



**PEMERINTAH KOTA METRO**  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTA METRO



# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA METRO TAHUN 2021-2026

Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah (Bappeda) Kota Metro  
Tahun 2021



[bappeda.metrokota.go.id](http://bappeda.metrokota.go.id)



(0725) 41927



[bappeda@metrokota.go.id](mailto:bappeda@metrokota.go.id)



**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 7 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**  
**TAHUN 2021- 2026**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah walikota terpilih dilantik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);



21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 13);

30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
31. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
18. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
19. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.



## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

#### **Pasal 2**

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

#### **Pasal 3**

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX : PENUTUP

(2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 5**

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

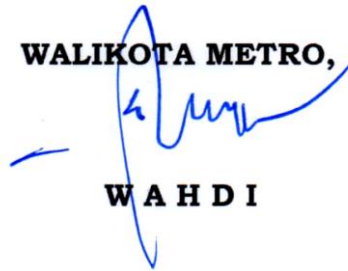
**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 25 Agustus 2021

**WALIKOTA METRO,**



**WAHDI**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 25 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**BANGKIT HARYO UTOMO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR 7**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (07/1184/MTR/2021);

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 7 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021-2026**

#### **I. UMUM**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan lima tahun yang berisi kondisi *existing* pembangunan secara komprehensif, permasalahan dan isu strategis yang ditindaklanjuti dengan strategi dan arah kebijakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dalam penyusunannya, dokumen RPJMD berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPD Kota Metro dan RTRW Kota Metro. Dokumen RPJMD menjadi pedoman pelaksanaan rencana tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Berakhirnya pelaksanaan pembangunan Kota Metro periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 yang merupakan periode keempat pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025. Visi sebagai Kota Pendidikan yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat Kota Metro dalam dokumen RPJPD tetap menjadi dasar pembangunan sampai tahun 2026 nanti.

Pelaksanaan RPJMD dijabarkan dalam 5 (lima) tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

#### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

#### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 7**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.1.1 Pengertian Dokumen RPJMD .....	I-1
1.1.2 Proses Penyusunan RPJMD .....	I-2
1.1.3 Kedudukan RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 dalam Tahun Rencana RPJPD Kota Metro 2005-2025 .....	I-5
1.1.4 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .....	I-6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-6
1.3 Hubungan antar Dokumen .....	I-11
1.3.1 Hubungan RPJMD Kota Metro 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024 .....	I-11
1.3.2 Hubungan RPJMD Kota Metro 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Lampung .....	I-12
1.3.3 Hubungan RPJMD Kota Metro 2021-2026 dengan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 .....	I-18
1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Metro 2021-2026 dengan RTRW Kota Metro 2011-2031 .....	I-20
1.3.5 Hubungan RPJMD Kota Metro 2021-2026 dengan Dokumen KLHS .....	I-23
1.3.6 Hubungan RPJMD Kota Metro 2021-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I-23
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-23
1.4.1 Maksud Penyusunan Dokumen RPJMD .....	I-23
1.4.2 Tujuan Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Metro 2021- 2026 .....	I-24
1.5 Sistematika Penulisan .....	I-24
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-18
2.3 Aspek Pelayanan Umum .....	II-38
2.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	II-110
2.5 Standar Pelayanan Minimal .....	II-112
2.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's .....	II-129
2.7 Capaian Kinerja RPJMD 2016-2021 .....	II-179
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>III-1</b>
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu .....	III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III-2
3.1.2 Kinerja Neraca Daerah .....	III-12

3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	III-20
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III-20
3.2.2	Analisis Pembiayaan .....	III-20
3.3	Kerangka Pendanaan .....	III-22
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja .....	III-22
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan .....	III-31
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>		<b>IV-1</b>
4.1	Permasalahan Pembangunan .....	IV-1
4.2	Isu Strategis .....	IV-5
4.3	Rekomendasi KLHS RPJMD Kota Metro dan Pencapaian Tujuan Pembangunn Berkelanjutan .....	IV-8
4.2.1	Rekomendasi Alternatif Capaian Indikator TPB .....	IV-8
4.2.2	Rekomendasi Skenario Alternatif untuk Indikator TPB berstatus Tak Tersedia Data .....	IV-56
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN .....</b>		<b>V-1</b>
5.1	Visi .....	V-1
5.2	Misi .....	V-3
5.2.1	Misi 1 <i>“Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan”</i> .....	V-3
5.2.2	Misi 2 <i>“Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial”</i> .....	V-4
5.2.3	Misi 3 <i>“Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan”</i> .....	V-5
5.2.4	Misi 4 <i>“Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif”</i> .....	V-6
5.2.5	Misi 5 <i>“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat”</i> .....	V-7
5.3	Tujuan dan Sasaran .....	V-11
<b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>		<b>VI-1</b>
6.1	Strategi .....	VI-1
6.2	Arah Kebijakan .....	VI-6
6.3	Program Pembangunan Daerah .....	VI-8
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b>		<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>		<b>VIII-1</b>
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>		<b>IX-1</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

1.1	Sinergi kebijakan RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 terhadap Agenda Kerja Utama RPJMD Provinsi Lampung .....	I-14
1.2	Arahan Pengembangan Pusat Kegiatan berdasarkan RTRW Provinsi Lampung .....	I-19
2.1	Luas Wilayah Administratif Kota Metro .....	II-3
2.2	Luas Lahan Menurut Penggunaan Di Kota Metro Tahun 2020 .....	II-12
2.3	Data Kependudukan Kota Metro Tahun 2016-2020 (Per 31 Desember) .....	II-14
2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Metro Tahun 2017-2020 .....	II-17
2.5	Perkembangan Garis kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Metro Tahun 2008-2020 .....	II-19
2.6	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung 2011-2020 .....	II-20
2.7	Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro Tahun 2012-2020 .....	II-24
2.8	Perkembangan PDRB Kota Metro ADHB dan ADHK 2011-2020 .....	II-26
2.9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Metro Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020 .....	II-28
2.10	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Metro Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2019 .....	II-29
2.11	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Metro Menurut Pengeluaran Tahun 2016 - 2020 .....	II-30
2.12	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Metro Menurut Pengeluaran Tahun 2016 - 2019 .....	II-31
2.13	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Metro Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 .....	II-31
2.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro, Provinsi, dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-32
2.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019-2020 .....	II-33
2.16	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-34
2.17	Komoditi dengan Bobot Terbesar di Bandar Lampung dan Metro (Berdasarkan SBH 2012) .....	II-35
2.18	Laju Inflasi Kota Metro Menurut Bulan di Kota Metro Tahun 2015-2020 .....	II-36
2.19	Laju Inflasi Kota Metro, Bandar Lampung, dan Nasional Tahun Kalender 2014-2020 (Berdasarkan SBH 2012) .....	II-36
2.20	Perkembangan IHK Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun Kalender 2019 Kota Metro dan Provinsi Lampung (Gabungan) .....	II-37
2.21	Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Metro, Bandar Lampung, dan Nasional Tahun 2014-2019 (2012=100) .....	II-38
2.22	Capaian Urusan Pendidikan Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-39
2.23	Capaian Indikator Bidang Kesehatan Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-44



2.24	Kondisi Stunting Kota Metro Tahun 2021 .....	II-49
2.25	Data Perkembangan Proses Vaksinasi per Agustus 2021 .....	II-55
2.26	Capaian Indikator Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Metro Tahun 2016-2020.....	II-55
2.27	Capaian Indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-57
2.28	Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-58
2.29	Capaian Indikator Bidang Sosial Kota Metro Tahun 2016-2020 ...	II-60
2.30	Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-61
2.31	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-62
2.32	Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Metro Tahun 2016-2020 ...	II-64
2.33	Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-65
2.34	Capaian Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-67
2.35	Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-68
2.36	Capaian Indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-69
2.37	Capaian Indikator Bidang Perhubungan Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-71
2.38	Capaian Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-72
2.39	Capaian Indikator Bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-74
2.40	Capaian Indikator Bidang Penanaman Modal Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-75
2.41	Capaian Indikator Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-76
2.42	Capaian Indikator Bidang Kebudayaan Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-77
2.43	Capaian Indikator Bidang Perpustakaan Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-78
2.44	Capaian Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-79
2.45	Capaian Indikator Bidang Pariwisata Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-80
2.46	Capaian Indikator Bidang Pertanian Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-81
2.47	Capaian Indikator Bidang Perdagangan Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-82
2.48	Capaian Indikator Bidang Perindustrian Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-83
2.49	Capaian Indikator Urusan Penunjang .....	II-84
2.50	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	II-85

2.51	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita (RP) Sebulan Menurut Kelompok Barang di Kota Metro Tahun 2019-2020 .....	II-111
2.52	Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan .....	II-113
2.53	Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan .....	II-120
2.54	Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	II-122
2.55	Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	II-125
2.56	Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Sosial .....	II-126
2.57	Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat .....	II-127
2.58	Evaluasi Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Metro Tahun 2019 .....	II-130
2.59	Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD 2016-2020 .....	II-180
3.1	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 s.d 2020 .....	III-3
3.2	Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah tahun 2016 s.d 2020 .....	III-7
3.3	Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s.d 2020 .....	III-9
3.4	Rata-Rata Pertumbuhan APBD Tahun 2016-2020 .....	III-10
3.5	Pertumbuhan Neraca daerah Kota Metro tahun 2016-2020 .....	III-14
3.6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur .....	III-20
3.7	Perbandingan Target Terhadap Realisasi APBD Tahun 2016 .....	III-21
3.8	Perbandingan Target Terhadap Realisasi APBD Tahun 2017 .....	III-21
3.9	Perbandingan Target Terhadap Realisasi APBD Tahun 2018 .....	III-21
3.10	Perbandingan Target Terhadap Realisasi APBD Tahun 2018 .....	III-22
3.11	Perbandingan Target Terhadap Realisasi APBD Tahun 2018 .....	III-22
3.12	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 .....	III-24
3.13	Proyeksi Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 .....	III-26
3.14	Skema Penganggaran Pelaksanaan SPM .....	III-28
3.15	Proyeksi APBD Kota Metro Tahun 2021-2026 .....	III-29
3.16	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Metro .....	III-32
3.17	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah .....	III-33
4.1	Permasalahan Pembangunan .....	IV-1
4.2	Isu Strategis .....	IV-5
4.3	Proyeksi BAU dan Skenario Capaian TPB 1.2.1.* dan 10.1.1.(a) .....	IV-25
4.4	BAU dan Skenario Capaian TPB 1.3.1.(a), 1.3.1.(b), 3.8.2.(a) dan 10.4.1.(b) .....	IV-29
4.5	BAU dan Skenario Capaian TPB 2.2.2.(a) .....	IV-33
4.6	BAU dan Skenario Capaian TPB 3.1.1.* .....	IV-37
5.1	Pemetaan Urusan Pengampu Misi .....	V-8
5.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro Tahun 2021-2026 .....	V-12
6.1	Visi, Misi, Tujuan, Strategi .....	VI-2
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan .....	VI-7
6.3	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Pemerintah Kota Metro .....	VI-9

7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 .....	VII-2
7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Metro .....	VII-4
8.1	Indikator Kinerja Utama Kot Metro .....	VIII-2
8.2	Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	VIII-3

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025 .....	I-5
1.2	Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan .....	I-6
2.1	Peta Batas Wilayah Kota Metro .....	II-2
2.2	Peta Kemiringan .....	II-5
2.3	Peta Topografi Kota Metro .....	II-6
2.4	Peta Curah Hujan Kota Metro .....	II-7
2.5	Peta Struktur Geologi Kota Metro .....	II-8
2.6	Peta Hidrologi Kota Metro .....	II-9
2.7	Peta Jalur Evakuasi dan Titik Lokasi rawan Banjir Kota Metro .....	II-11
2.8	Peta Penggunaan Lahan Kota Metro .....	II-13
2.9	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Metro Tahun 2020 .....	II-16
2.10	Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Metro Tahun 2020 .....	II-17
2.11	Perkembangan Penduduk Miskin .....	II-20
2.12	Perkembangan IPM Kota Metro .....	II-23
2.13	Posisi Relatif IPM Kota Metro Dibandingkan Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung Tahun 2020 .....	II-25
2.14	Perkembangan TPT Kota Metro .....	II-26
2.15	Grafik Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-27
2.16	Prevalensi Stunting pada Anak Balita dan Baduta di Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	II-51
2.17	Prevalensi Stunting per Kelurahan di Kota Metro Tahun 2021* .....	II-52
2.18	Jumlah Kasus Terkonfirmasi per Bulan (Maret 2020-Agustus 2021) .....	II-53
2.19	Kasus Kematian COVID-19 (2020-Agustus 2021) .....	II-54
3.1	Persentase Komponen Pendapatan Kota Metro Tahun 2016- 2020 .....	III-5
3.2	Komponen Aset Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	III-17
3.3	Komponen Aset Tetap Kota Metro Tahun 2016-2020 .....	III-18
4.1	Proyeksi BAU dan Skenario Capaian TPB 1.2.1.* dan 10.1.1.(a) .....	IV-25
4.2	BAU dan Skenario Capaian TPB 1.3.1.(a) dan 3.8.2.(a) .....	IV-29
4.3	BAU dan Skenario Capaian TPB 1.3.1.(b) dan 10.4.1.(b) .....	IV-30
4.4	BAU dan Proyeksi Capaian TPB 2.2.2.(a) .....	IV-33
4.5	BAU dan Proyeksi Capaian TPB 3.1.1.* .....	IV-37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **1.1.1. Pengertian Dokumen RPJMD**

Pembentukan Kota Metro pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai Daerah Otonom yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang secara substansi saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi kunci keberhasilan bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mendefinisikan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, pada poin (3) disebutkan bahwa periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Kota Metro merupakan salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 lalu dan Pemerintah Kota Metro juga telah menyusun Naskah Teknokratik RPJMD sebagai tahap awal penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota

Metro Tahun 2021-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

Dalam proses penyusunannya, dokumen RPJMD Kota Metro memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. **Transparan** : analisa data dan pembahasan permasalahan pembangunan serta isu strategis dilaksanakan melalui FGD dengan stakeholder terkait.
- b. **Responsive** : permasalahan dan isu strategis disusun berdasarkan analisa data yang akurat dan kondisi *existing*
- c. **Efektif** : penyusunan dokumen Naskah Teknokratik dilakukan dengan rangkaian tahapan yang telah ditentukan dalam Permendagri 86 Tahun 2017
- d. **Efisien** : penyusunan dokumen Naskah Teknokratik dilakukan dengan rangkaian tahapan yang telah ditentukan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 dengan tahapan waktu yang terencana.
- e. **Akuntabel** : penyusunan dokumen Naskah Teknokratik dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disahkan dengan legalitas.
- f. **Partisipatif** : Penyusunan permasalahan pembangunan dan isu strategis melibatkan stakeholder terkait.
- g. **Terukur** : data dan informasi yang disajikan untuk gambaran umum daerah dan gambaran umum kondisi keuangan daerah merupakan data terukur yang menjadi dasar untuk proyeksi lima tahun kedepan.
- h. **Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan** : penyusunan permasalahan pembangunan dan isu strategis memperhatikan Rancangan Awal dokumen KLHS RPJMD Kota Metro.

### **1.1.2. Proses Penyusunan RPJMD**

Adapun tahapan penyusunan dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

#### **1. PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD**

Penyusunan dokumen teknokratik RPJMD dilaksanakan sebelum pemilihan Kepala Daerah yang memuat gambaran umum kondisi daerah, keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis. Selanjutnya dokumen teknokratik disempurnakan menjadi rancangan awal RPJMD.

2. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD

Penyusunan Rancangan Awal merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Penyusunan rancangan awal RPJMD mencakup :

- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. perumusan program pembangunan Daerah;
- f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
- g. KLHS.

3. FORUM KONSULTASI PUBLIK

Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Hasil konsultasi publik selanjutnya dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.

4. PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL RPJMD DENGAN DPRD

Tahap selanjutnya adalah Walikota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ketua DPRD

5. KONSULTASI RANCANGAN AWAL RPJMD DENGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Setelah memperoleh kesepakatan, Rancangan Awal RPJMD dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi Lampung untuk memperoleh masukan. Masukan tersebut tertuang dalam bentuk surat kepala BAPPEDA Provinsi Lampung.

6. **PENYUSUNAN SURAT EDARAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA OPD**  
Rancangan awal RPJMD menjadi dasar bagi OPD untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.
7. **PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD**  
Penyusunan rancangan RPJMD adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappeda.
8. **MUSRENBANG RPJMD**  
Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Musrenbang RPJMD dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.
9. **PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RPJMD**  
Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan dan termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
10. **PEMBAHASAN RAPERDA RPJMD DENGAN DPRD**  
Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
11. **EVALUASI RAPERDA RPJMD OLEH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**
12. **PENETAPAN RPJMD**



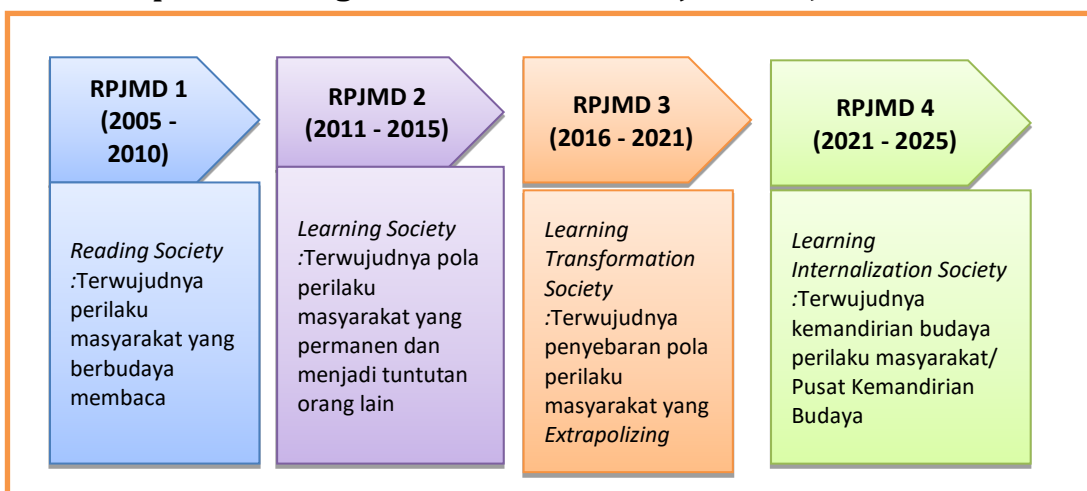
Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota dan Walkil Walikota dilantik.

### 1.1.3. Kedudukan RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 dalam Tahun Rencana RPJPD Kota Metro 2005-2025

RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025. Tahap ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera yang didukung oleh kemantapan sarana dan prasarana, SDM berkualitas dan berdaya saing, situasi sosial yang kondusif, perekonomian lokal yang kokoh dan lingkungan yang sustainable dengan kesadaran hukum sebagai wujud kemandirian budaya/perilaku masyarakat seutuhnya.

Dalam tahapan ini, proses *internalizing* memasuki tahap akhir yang dicerminkan dengan sikap dan tatanan hidup yang inovatif, kondusif, dan berkualitas dengan budaya belajar sebagai aktualisasi diri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan lagi dipandang sebagai sebuah hak ataupun peluang melainkan sebagai kewajiban ataupun tantangan. Perekonomian lokal menjadi basis ekonomi daerah yang diperkuat oleh kemandirian, kreatifitas, dan inovasi warga tanpa mengabaikan peluang investasi di seluruh sektor.

**Gambar 1.1**  
**Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025**

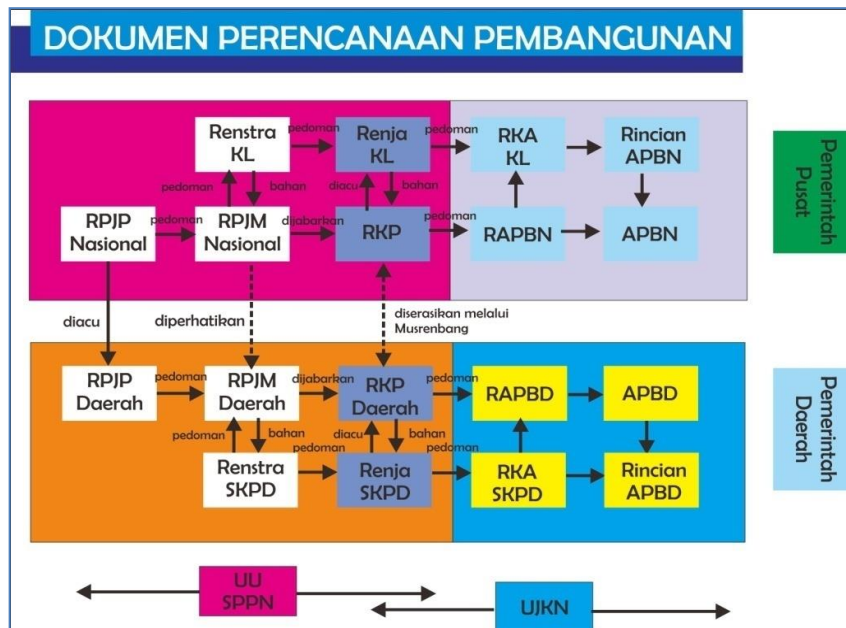


#### 1.1.4. Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RKPD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah untuk menjadi pedoman penyusunan Renstra OPD dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Visi dan misi Kepala Daerah dalam RPJMD menjadi pedoman OPD dalam menyusun program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sedangkan tujuan dan sasaran RPJMD diacu oleh OPD dalam menyusun indikator kinerja dalam Renstra.

Pelaksanaan RPJMD dijabarkan dalam 5 (lima) tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD.

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan**



#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2026;
32. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

33. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
34. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02);
35. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
36. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro 2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9);

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

#### **1.3.1. Hubungan RPJMD Kota Metro 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang saat ini adalah RPJMN 2020-2024. Selain itu sesuai dengan pasal 12 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Visi-Misi dari Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah ***“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”***. Adapun misi-misinya sebagai berikut :

1. Misi 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Misi 2 : Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Misi 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Misi 4 : Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Misi 5 : Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Misi 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Misi 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Misi 8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
9. Misi 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Selanjutnya dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan akan mempedomani visi misi tersebut untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan wakil Presiden RI 2020-2024.

### **1.3.2. Hubungan RPJMD Kota Metro 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Lampung**

Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, menjadi salah satu acuan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan selama 5 tahun kedepan. Sebagai satu kesatuan wilayah di Provinsi Lampung, seluruh kabupaten/kota wajib mengacu rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dengan tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah Rakyat Lampung Berjaya. Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Kehidupan masyarakat yang aman. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang



aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontra produktif terhadap pembangunan.
3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1 :  
Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2 :  
Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3 :  
Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4 :

Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.

5. Misi-5 :

Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

6. Misi-6 :

Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

**Tabel 1.1**  
**Sinergi kebijakan RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 terhadap Agenda Kerja Utama RPJMD Provinsi Lampung**

MISI	AGENDA KERJA UTAMA	SINERGI KEBIJAKAN
<b>MISI 1 :</b> Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.	Lampung Merawat Indonesia: memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan	Meningkatkan integrasi-kolaborasi tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam interaksi sosial, kegiatan budaya, dan kehidupan beragama
	Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan parapemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota	1. Peningkatan insentif kader poskeskel, posyandu, posbindu, jumantik, PHBS, LBS, Kelas Ibu dan KB 2. Peningkatan insentif RT dan RW 3. Meningkatkan insentif bagi pegiat keagamaan, seperti kaum, guru ngaji, marbot, dan penggali kubur.
	Lampung Mengaji: memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafalan Al-Quran dan mendirikan Pusat Studi Al-Quran	
	Lampung Kaya Festival : menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya Tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan	1. Penyediaan ruang bagi kelompok seni budaya di 22 kelurahan 2. Revitalisasi Rumah Pintar Kelurahan 3. Mengintegrasikan objek wisata yang ada di Kota Metro melalui sistem informasi data terpadu 4. Membangun creative-hub

MISI	AGENDA KERJA UTAMA	SINERGI KEBIJAKAN
		sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif
	Lampung Menuju Bebas Narkoba	Membangun creative-hub sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif
<b>MISI 2 :</b> Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik	Meningkatkan efektivitas pemerintahan, melalui sistem penjurusan karir berbasis kinerja dan kompetensi (job fit assessment) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik	Implementasi <i>Open Government</i> dengan prinsip transparansi
	APBD Rakyat Berjaya, melalui peningkatan PAD dan mendayagunakan APBD untuk program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat	Penerapan <i>E - Government</i> secara menyeluruh untuk pelayan yang lebih baik, cepat, tepat, dan efisien
	Smart Village : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-participation	Penerapan <i>E - Government</i> secara menyeluruh untuk pelayan yang lebih baik, cepat, tepat, dan efisien
	Pendampingan Program Pembangunan Desa	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sistem pemberdayaan
<b>MISI 3 :</b> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.	Perempuan Berjaya : memandirikan perempuan secara ekonomi, pengarusutamaan gender dan pendampingan hukum perempuan	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan KB melalui JAMA-PAI(Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu)
	Lampung Ramah Perempuan dan Anak : mengembangkan fasilitas dan ruang publik ramah perempuan dan anak, menurunkan tingkat kematian ibu dan anak (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)	Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan KB melalui JAMA-PAI(Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu)

MISI	AGENDA KERJA UTAMA	SINERGI KEBIJAKAN
	Anak Muda Berjaya : mendorong kompetensi dan festival seni/olahraga, gerakan malu menganggur, mencetak wirausaha muda, pendirian gelanggang remaja	Membangun creative-hub sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif
	Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam Dunia Olahraga, memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olahraga, meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi atlet berprestasi serta memperbaiki tata kelola organisasi olahraga	Revitalisasi Stadion Tejosari
	Lampung Sehat : Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), perbaikan kualitas layanan kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membangun perilaku pola hidup bersih dan sehat; serta peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan</li> </ol>
	Smart School : pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan	Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat
	Revitalisasi SMK mengintegrasikan SMK ke dunia kerja (kurikulum magang)	
<b>MISI 4 :</b> Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.	Infrastruktur Lampung Berjaya : konektivitas antar kabupaten/kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi	Peningkatan kualitas jalan dan drainase yang terintegrasi
	Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan Infrastruktur: berbasis peran serta warga dan pemanfaatan IT	Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat
	Lampung Terang Berjaya: swasembada sumber energi listrik	Meningkatkan Sistem Penerangan Lingkungan;
<b>MISI 5 :</b> Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang	Kartu Petani Berjaya (KPB): memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan bibit, pupuk, pasar, modal dan beasiswa bagi anak petani (pertanian secara luas)	Kemitraan Meningkatkan Produk Hasil Pertanian Melalui Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) bagi Petani

<b>MISI</b>	<b>AGENDA KERJA UTAMA</b>	<b>SINERGI KEBIJAKAN</b>
dengan wilayah perkotaan.	Beasiswa Mahasiswa Pertanian : mendorong minat generasi muda pada pertanian	
	Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu	
	Revitalisasi Lada (Lampung Black Pepper)	
	Meningkatkan daya saing Kopi, Kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir serta perluasan pasar dalam negeri	
	Nelayan Berjaya : untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan, memberikan pendampingan pemasaran, pengembangan industri pengolahan perikanan, jaminan sosial, beasiswa pendidikan tinggi bagi anak-anak nelayan, SPBU untuk nelayan	
	Lampung sebagai salah satu tujuan utama wisata (mengembangkan destinasi wisata unggulan, pusat agrowisata dan ekowisata, infrastruktur mendukung pariwisata, percepatan Bandara Taufik Kiemas)	Membangun creative-hub sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif
	Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditi strategis bidang pertanian (bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota)	Kemitraan Meningkatkan Produk Hasil Pertanian Melalui Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) bagi Petani
	Mengembangkan industri pengolahan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	1. Pembukaan 22 Pusat Wirausaha Baru 2. Pembukaan Pusat Distribusi Bahan Pokok di 5 (lima) Kecamatan
Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi	Membangun creative-hub sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif	

MISI	AGENDA KERJA UTAMA	SINERGI KEBIJAKAN
	Lampung Ramah usaha : menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha	Penerapan <i>E - Government</i> secara menyeluruh untuk pelayan yang lebih baik, cepat, tepat, dan efisien
	Memfasilitasi percepatan terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia (bersinergi dengan Kementerian Pertahanan)	1. Pembukaan 22 Pusat Wirausaha Baru 2. Pembukaan Pusat Distribusi Bahan Pokok di 5 (lima) Kecamatan
<b>MISI 6 :</b> Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.	Mengelola Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan rakyat	Meningkatkan sistem dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan; Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan dengan sistem pengelolaan sampah terpadu;
	Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara	

### 1.3.3. Hubungan RPJMD Kota Metro 2021-2026 dengan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029

Pengembangan wilayah Kota Metro dalam Perda No. 12 Tahun 2009 Tentang perubahan Perda No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Maka berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang adalah sebagai berikut :

#### A. Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2017-2037 dalam rencana pusat-pusat kegiatan, Kota Metro diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota, perdagangan dan jasa, dan pendidikan khusus. Pusat tersebut dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1

**Tabel 1.2**

**Arahan Pengembangan Pusat Kegiatan berdasarkan RTRW Provinsi Lampung**

Hirarki	Kota	Fungsi Utama
PKW	Metro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat Pemerintahan Kota</li><li>• Perdagangan dan Jasa</li><li>• Pendidikan Khusus</li></ul>

*Sumber : Perda no 12 tahun 2019 tentang perubahan perda no 1 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029*

Selain diarahkan sebagai PKW, Kota Metro termasuk dalam rencana struktur ruang lainnya, sebagai berikut :

- a. Pengembangan jaringan transportasi darat yaitu jaringan jalan kolektor primer penghubung lintas tengah – lintas timur (*feeder*) yang menghubungkan antara Tegineneng – Bts. Kota Metro – Jl. Sudirman – Jl. A. H. Nasution – Gedung Dalam – Batas Kota Sukadana – Sukadana (Jl. Soekarno-Hatta/Lintas Timur).
- b. Rencana pengembangan jaringan transportasi jalan melalui pembangunan Jalan Lingkar Utara dan Selatan Metro.
- c. Kota Metro juga merupakan dari rencana pengembangan jaringan jalur kereta api regional angkutan penumpang dan barang yang menghubungkan antara Bandar Lampung – Tegineneng – Metro – Sukadana.
- d. Rencana pengembangan jaringan pipa gas bumi, dimana jaringan distribusi melalui Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan yang melayani kebutuhan masyarakat dan industri dan kota.

**B. Rencana Pola Ruang**

Untuk menuju perkembangan wilayah yang berkelanjutan, maka tahapan yang dilakukan pertama-tama adalah melakukan penetapan kawasan lindung, selanjutnya pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya diarahkan berdasarkan sifat-sifat kegiatan yang akan ditampung, potensi pengembangan, dan kesesuaian lahan. Dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 yang sudah diperdakan pada tahun 2019 yaitu rencana pola ruang Kota Metro diarahkan sebagai berikut :

- a. Kawasan peruntukan pertanian  
Berdasarkan Perda No 13 Tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Provinsi Lampung, Kota Metro memiliki luas LP2B yaitu 1215 Ha sedangkan pada SK Menteri ATR BPN Nomor : 686/SK-PG.03.03/XII/2019 Kota Metro memiliki luasan LP2B yaitu 1567 dan sesuai dengan perda 21 Tahun 2016 luas LP2B Kota Metro seluas 1567,34 Ha.
- b. Pengembangan pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung yang menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Kota Metro terdapat kawasan pariwisata dengan kategori wisata alam dengan potensi minat khusus.
- c. Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan yang diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Pringsewu.

### **C. Penetapan Kawasan Strategis**

Kawasan Strategis merupakan suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Dalam Perda No 12 Tahun 2019 mengenai perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2009-2029 Kota Metro termasuk dalam Kawasan Strategis Provinsi yaitu kawasan perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya, yang meliputi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, sebagian Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

Kota Metro masuk dalam Kawasan Strategis Kabupaten untuk kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Strategis Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya. Seluruh Kecamatan di Kota Metro masuk dalam kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan sekitarnya. Deliniasi kawasan tersebut akan disesuaikan dengan dokumen RTR KSP Bandar Lampung dan Sekitarnya.

#### **1.3.4. Hubungan RPJMD Kota Metro 2021-2026 dengan RTRW Kota Metro 2011-2031**

Penyusunan RPJMD Kota Metro 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam dokumen



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang merupakan dokumen perencanaan penggunaan ruang yang disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Dalam dokumen tata ruang dilakukan pemetaan pengembangan wilayah sebagai pusat layanan dan kawasan strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam menyusun program prioritas selama lima tahun kedepan diacu dokumen RTRW agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan.

Berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2009-2029, Kota Metro ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan merupakan satu kesatuan dalam pengembangan kawasan andalan Nasional Bandar Lampung – Metro. Dengan fungsi utama sebagai : (1) Pusat Pemerintahan Kota; (2) Pusat Perdagangan dan Jasa; (3) Pusat Pendidikan Khusus. Selain itu, Kota Metro bersama Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi dalam bidang Pengembangan Kawasan Pendidikan Unggulan Terpadu Berbasis Potensi Lokal.

Pusat pelayanan di wilayah Kota Metro merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional, yang meliputi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. Berdasarkan pembagian pusat pelayanan tersebut, maka di Kota Metro dilihat dari hirarki dapat diketahui pusat pelayanan sebagai berikut :

1. Pusat Pelayanan Kota terdapat di Kecamatan Metro Pusat, yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota terdapat di Kecamatan Metro Timur dan Metro Barat. Dua kecamatan ini melayani Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Iring Mulyo, melayani masing-masing Kelurahan Tejosari, Tejoagung, Yosodadi, dan Yosorejo. Sedangkan Kelurahan Mulyojati melayani Kelurahan Mulyosari, Ganjar Agung, dan Ganjar Asri.
3. Pusat Lingkungan terdapat di Kecamatan Metro Selatan dan Metro Utara. Dua kecamatan ini melayani Sub Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Margorejo, melayani Kelurahan Margodadi, Sumber Sari, dan Rejo Mulyo. Sedangkan

Kelurahan Banjarsari melayani Kelurahan Purwoasri, Purwosari, dan Karang Rejo.

Pusat-pusat pelayanan perkotaan yang perlu didorong maupun dibatasi pertumbuhannya adalah :

- a. Kecamatan Metro Pusat; merupakan pusat pelayanan kota yang melayani wilayah Kota Metro dan regional daerah *hinterland*-nya, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan simpul transportasi darat. Sebagai pusat kota maka perkembangannya sangat pesat dibandingkan kawasan lainnya terutama masalah permukiman. Sebagai ibukota maka perlu adanya penataan ruang dan perlu dibatasi serta dikendalikan penggunaan lahannya.
- b. Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Barat; merupakan kawasan pendidikan tinggi di Kota Metro dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial yang memadai sehingga dimasa yang akan datang diperkirakan akan tumbuh secara cepat. Hal ini karena banyak mahasiswa luar Kota Metro yang menimba ilmu. Dua kecamatan ini arahkan untuk menjadi Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).
- c. Kelurahan Banjarsari; merupakan pusat pelayan di Utara kota namun jumlah fasilitas sosial dan aksesibilitasnya masih relatif kurang, sehingga fungsinya masih sebagai pusat lingkungan. Namun untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah perlu adanya dorongan pada kawasan ini. Kawasan ini diarahkan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan sedang dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan jasa.
- d. Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Ganjaragung, Kelurahan Yosorejo, Kelurahan Tejoagung, Kelurahan Margorejo dan Kelurahan Rejomulyo; merupakan daerah yang masih tertinggal sehingga perlu didorong pertumbuhannya. Kelurahan ini diarahkan menjadi Pusat Lingkungan (PL) sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan pada kawasan ini.
- e. Kecamatan Metro Selatan; merupakan kawasan pertanian yang subur dengan lahan persawahan terluas di Kota Metro. Sehingga untuk menjaga lahan pertanian berkelanjutan perlu adanya pembatasan dan pengendalian

penggunaan lahan. Ke depan kawasan ini diarahkan untuk kawasan permukiman terbatas namun tetap mendorong tumbuhnya perdagangan dan jasa guna melayani kawasan sekitar.

### **1.3.5. Hubungan RPJMD Kota Metro 2021-2026 dengan Dokumen KLHS**

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Sebagaimana diamantkan dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, wajib menyusun dokumen KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai prinsip berkelanjutan dengan menjadikan KLHS sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah. Selanjutnya dalam penyusunan dokumen KLHS RPJMD dilakukan dengan mengkaji pencapaian indicator SDG's untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.

### **1.3.6. Hubungan RPJMD Kota Metro 2021-2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penyusunan RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 juga memperhatikan dan bersinergi dengan dokumen perencanaan sektoral lainnya, seperti dokumen SDG's KLHS RPJMD, Rencana Pembangunan Industri Kota, RAD Pangan dan Gizi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah serta RPJMD Kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Metro. Sinergi dilakukan melalui kebijakan dan pelaksanaan program sektoral agar pembangunan lima tahun kedepan dapat terlaksana secara terintegrasi dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.4. Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1. Maksud Penyusunan Dokumen RPJMD**

Penyusunan RPJMD Kota Metro 2021-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagai pedoman arah pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

#### **1.4.2. Tujuan Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Metro 2021-2026**

Dokumen RPJMD Kota Metro 2021-2026 disusun bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis, serta merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menjadi instrumen dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan wakil Walikota terpilih;
3. Menjadi instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan 5 tahun kedepan, melalui penetapan indikator kinerja;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Dokumen RPJMD Kota Metro 2021-2026 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menyampaikan deskripsi tentang latar belakang dan dasar hukum, keterkaitan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dalam penyusunan dokumen RPJMD.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Membahas gambaran kondisi umum daerah Kota Metro dalam tinjauan Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing Daerah; yang dikombinasikan dengan deskripsi Aspek Pelayanan Umum Tahun 2016-2020, data-data pendukung penyelenggaraan layanan dasar yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyetaraan indikator SDG's, serta hasil-hasil rekomendasi dalam KLHS RPJMD Kota Metro.

### **BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Menguraikan tentang tinjauan kinerja keuangan daerah, dari sisi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; serta kebijakan pokok keuangan daerah pada periode lima tahun terakhir. Selanjutnya, dalam rangka penyusunan kapasitas/kemampuan

keuangan daerah untuk lima tahun ke depan, bab ini membahas pula tentang proyeksi dan kebijakan keuangan daerah yang akan ditempuh pada periode lima tahun ke depan.

#### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Dengan merujuk pada uraian pada bab-bab sebelumnya, bab ini mengulas tentang hasil rumusan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang masih dan akan menjadi pokok perhatian dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah daerah pada periode lima tahun ke depan, yang diselaraskan dengan tugas dan kewenangan pemerintah daerah Kota Metro.

#### **BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

#### **BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunann sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

#### **BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Provinsi Lampung, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

#### **BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci yang disajikan beserta target setiap tahun dari 2021 sampai dengan tahun 2026.

## **BAB IX PENUTUP**

Memuat ikhtisar keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang dilengkapi dengan pokok-pokok saran/masukan dan atau rekomendasi yang perlu ditempuh dalam penyusunan RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **2.1 Aspek Geografi dan Demografi**

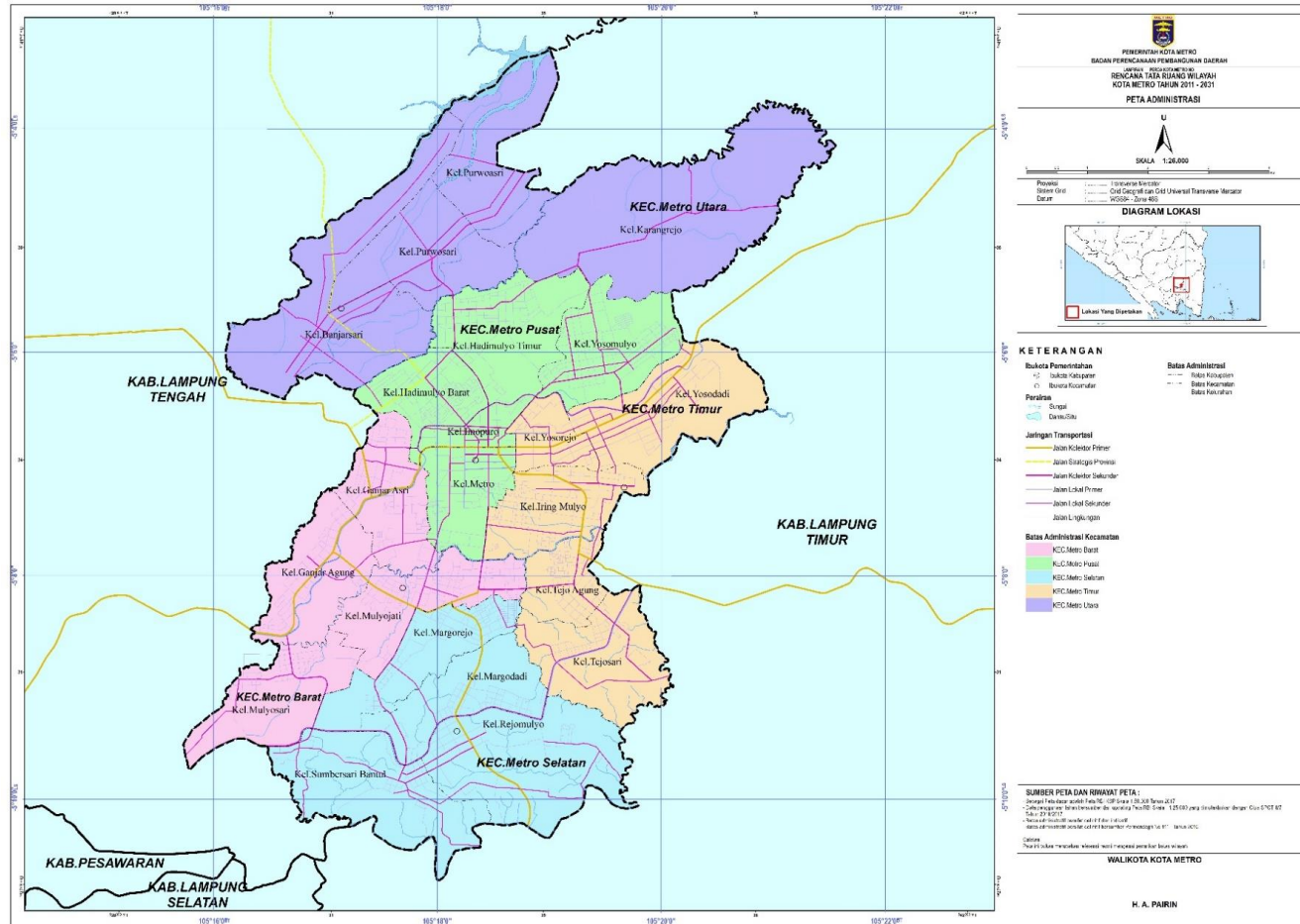
##### **A. Aspek Geografi**

Kota Metro merupakan salah dari 15 kabupaten/kota yang berada di wilayah administrasi Provinsi Lampung. Posisi geografis Kota Metro berada pada bagian tengah Provinsi Lampung ke arah timur yang dilewati jalur penghubung antara lintas tengah dengan lintas timur Sumatera dengan topografi wilayahnya yang relatif datar. Kota Metro terbentuk sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Metro. Secara administrasi Kota Metro terdiri dari 5 Kecamatan dengan 22 Kelurahan. Kota Metro memiliki kondisi topografi berupa daerah dataran aluvial. Ketinggian daerah ini berkisar antara 5 - 100 dpl, dan dengan kemiringan 0 % sampai 15 %. Secara geografis, Kota Metro terletak pada 5°6'-5°10'LS dan 105°17' - 105°21' BT. yang berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung.

Posisi Kota Metro yang berada di tengah-tengah Provinsi Lampung, sehingga memiliki banyak kawasan strategis. Salah satunya yakni dampak terbentuknya kawasan strategis dari adanya Pembangunan Penunjang Koridor Exit Tol MBBPT (Merak-Bakauheni-BandarLampung-Palembang-TanjungApi-Api). Dalam WPS MBBPT, Kota Metro tidak langsung dilalui jalan tol, namun terletak pada koridor Wilayah Pengembangan Strategis ini. Secara geografis batas wilayah Kota Metro berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur
- Sebelah Timur : Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Lampung Tengah

**Gambar 2.1**  
**Peta Batas Wilayah Kota Metro**





Wilayah administrasi Kota Metro terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan. Berikut adalah rincian luas wilayah per Kelurahan.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kota Metro**

No.	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)	
1.	Ganjar Agung	Metro Barat	297,85	
2.	Ganjar Asri	Metro Barat	270,32	
3.	Mulyojati	Metro Barat	287,21	
4.	Mulyosari	Metro Barat	298,23	
	<b>Kecamatan Metro Barat</b>			1.153,61
5.	Hadimulyo Barat	Metro Pusat	195,15	
6.	Hadimulyo Timur	Metro Pusat	349,06	
7.	Imopuro	Metro Pusat	87,67	
8.	Metro	Metro Pusat	212,76	
9.	Yosomulyo	Metro Pusat	314,47	
	<b>Kecamatan Metro Pusat</b>			1.159,11
10.	Margodadi	Metro Selatan	280,88	
11.	Margorejo	Metro Selatan	270,15	
12.	Rejomulyo	Metro Selatan	518,19	
13.	Sumbersari Bantul	Metro Selatan	432,27	
	<b>Kecamatan Metro Selatan</b>			1.501,49
14.	Iring Mulyo	Metro Timur	273,45	
15.	Tejo Agung	Metro Timur	154,38	
16.	Tejosari	Metro Timur	345,85	
17.	Yosodadi	Metro Timur	391,65	
18.	Yosorejo	Metro Timur	122,5	
	<b>Kecamatan Metro Timur</b>			1.287,83
19.	Banjarsari	Metro Utara	631,19	
20.	Karangrejo	Metro Utara	886	
21.	Purwoasri	Metro Utara	359,65	
22.	Purwosari	Metro Utara	336,51	
	<b>Kecamatan Metro Selatan</b>			2.213,35
<b>Luas Kota Metro</b>			<b>7.315,76</b>	<b>7.315,76</b>

Sumber : Permendagri Nomor 111 Tahun 2016 tentang Peta Tapal Batas.

Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1 : 25.000

Peta Spot 6 Provinsi Lampung Tahun 2016- Badan Informasi Geografis (BIG)

## 1. Topografi, Geologi, Hidrologi, dan Klimatologi

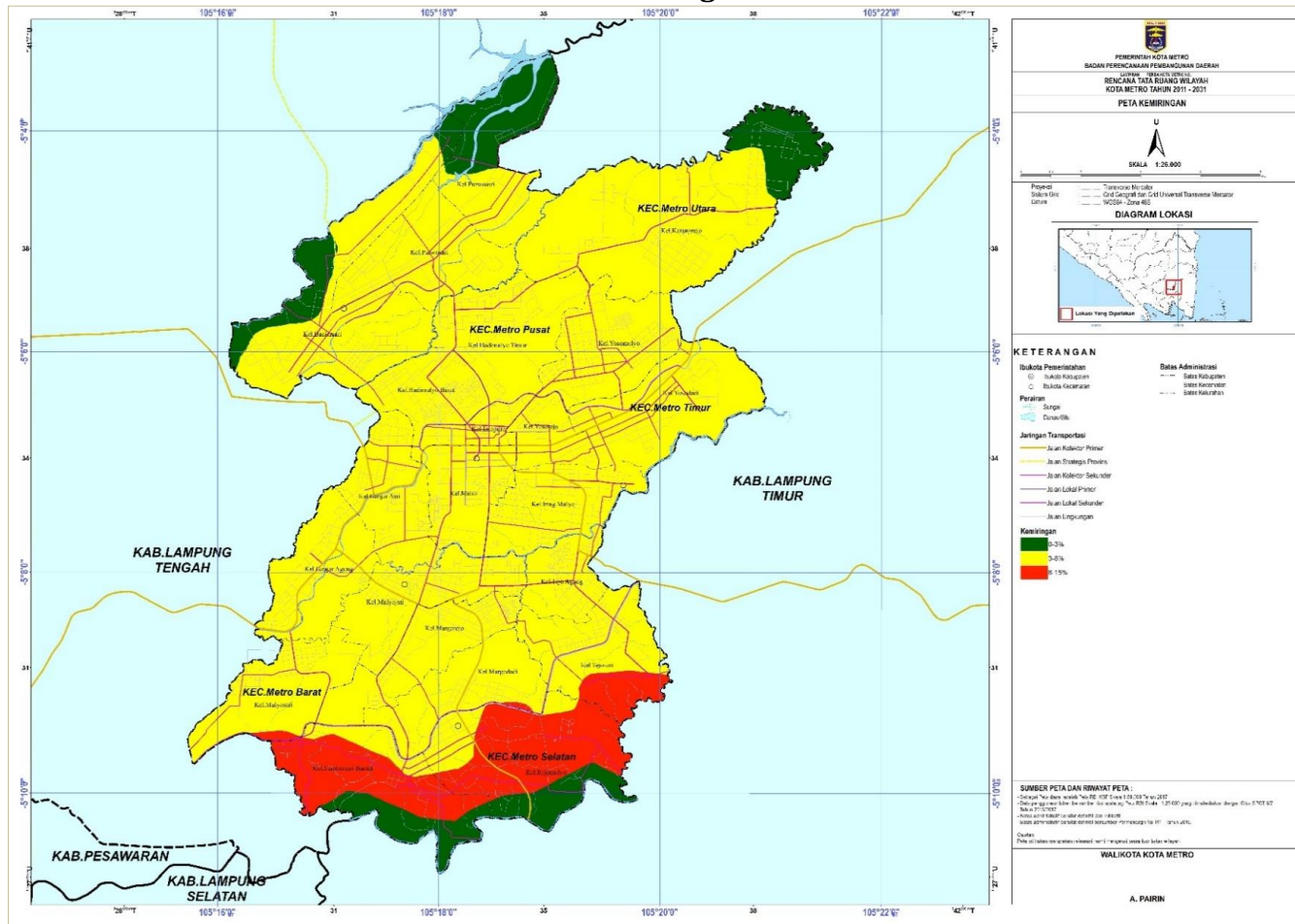
Topografi merupakan bentuk suatu kota yang dilihat dari jenis ketinggian dan kemiringan dari atas permukaan laut. Kota Metro memiliki 3 (tiga) jenis kelerengan, yakni 0-5 % (datar), 3-8 % (datar-bergelombang), 8-15%

(bergelombang). Kemiringan 0-5 yang berarti memiliki kemiringan datar. Untuk luas wilayah Kota Metro dengan kemiringan 0-3 % seluas 975 Ha (13,32%), kemiringan 3-8 % memiliki luas 5,718 Ha (78,16 %), kemiringan 8-15 % memiliki luas 622 Ha (8,50%).

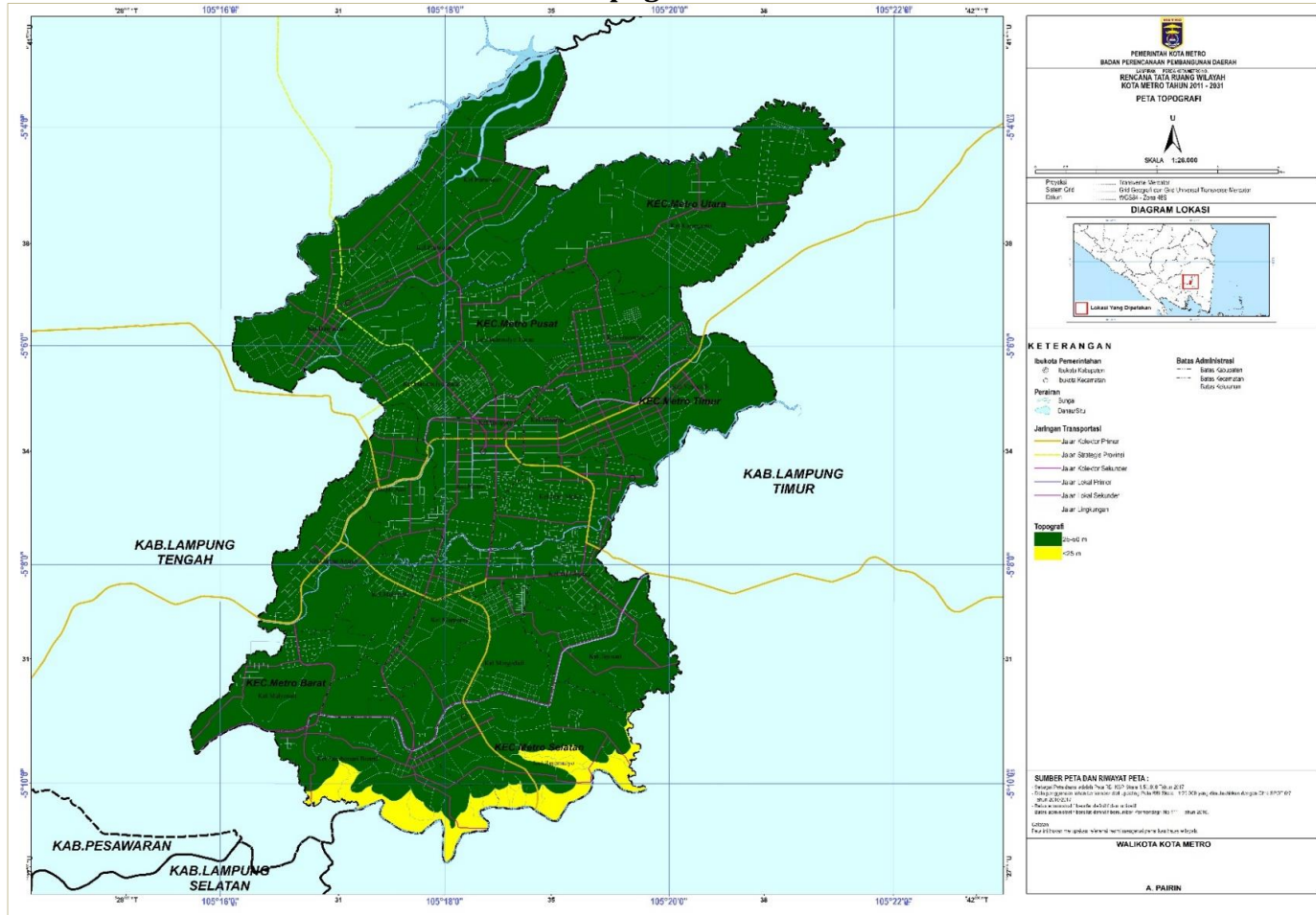
Wilayah Kota Metro dibatasi oleh aliran dua sungai, masing-masing Sungai Way Sekampung pada batas bagian selatan Kota Metro dengan Kecamatan Metro Kibang (Lampung Timur) dan Way Raman sebagai batas antara Kota Metro dengan Kecamatan Punggur disebelah utara. Selain itu, di dalam wilayah Kota Metro terdapat 2 sungai yaitu Way Batanghari dan Way Bunut. Pada musim Kemarau, debit air Way Batanghari mencapai 9-10 m<sup>3</sup>/detik dan pada musim hujan debitnya mencapai 500 liter/detik. Sedangkan Way Bunut pada musim kemarau debitnya mencapai 5-6 m<sup>3</sup>/detik dan pada musim hujan mencapai 100-200 Liter/detik. Wilayah aliran sungai dari kedua sungai tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Kota Metro dengan arah aliran ke arah timur. Untuk sumber daya air di wilayah Kota Metro didukung dengan adanya saluran irigasi teknis yang melalui Kota Metro dengan berbagai jenis saluran, mulai dari saluran primer hingga saluran tersier. Sebagian besar merupakan kawasan persawahan irigasi teknis, terutama di wilayah bagian selatan dan utara kota. Hal tersebut menggambarkan sumber daya air mempunyai arti yang penting bagi masyarakat dengan pencaharian sebagai petani.

Untuk temperatur pada dataran ketinggian 30-60 mdpl, memiliki temperatur minimum yakni 19°C. sedangkan untuk kelembaban udara sekitar 80-88%. Hal tersebut dikarenakan ketinggian wilayah Kota Metro itu sendiri. Sesuai data dari BPS untuk curah hujan pada wilayah Kota Metro dengan rata-rata tiap tahunnya pada tiga tahun terakhir (2015,2016,2017) yakni 2267 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata yakni 90 hari per tahun. Bulan hujan berkisar antara bulan September sampai dengan bulan Mei dengan curah hujan terbesar pada bulan Januari, sedangkan bulan kering terjadi pada bulan Juni sampai bulan Agustus, curah hujan terendah pada bulan Agustus.

**Gambar 2.2**  
**Peta Kemiringan**



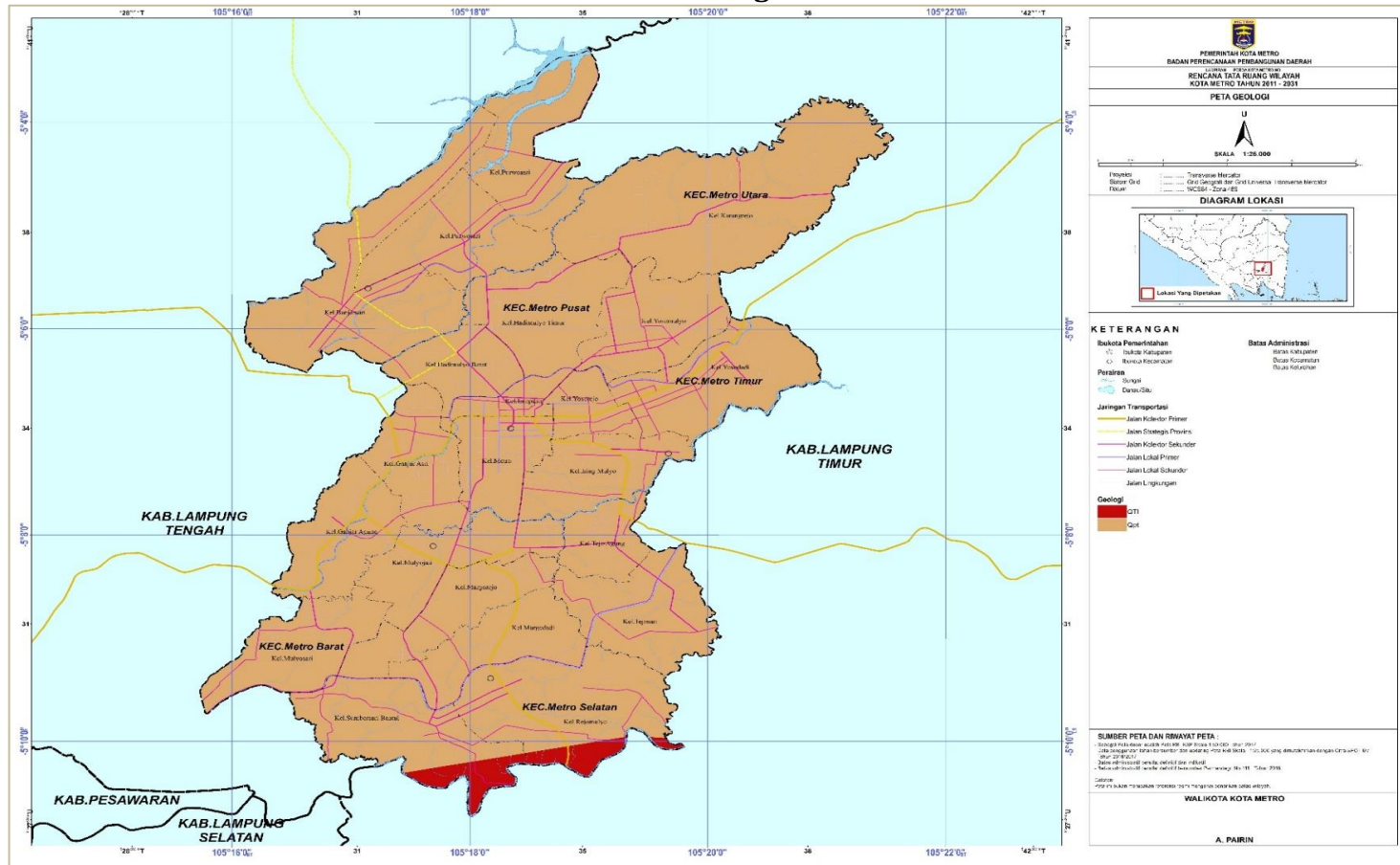
**Gambar 2.3**  
**Peta Topografi Kota Metro**



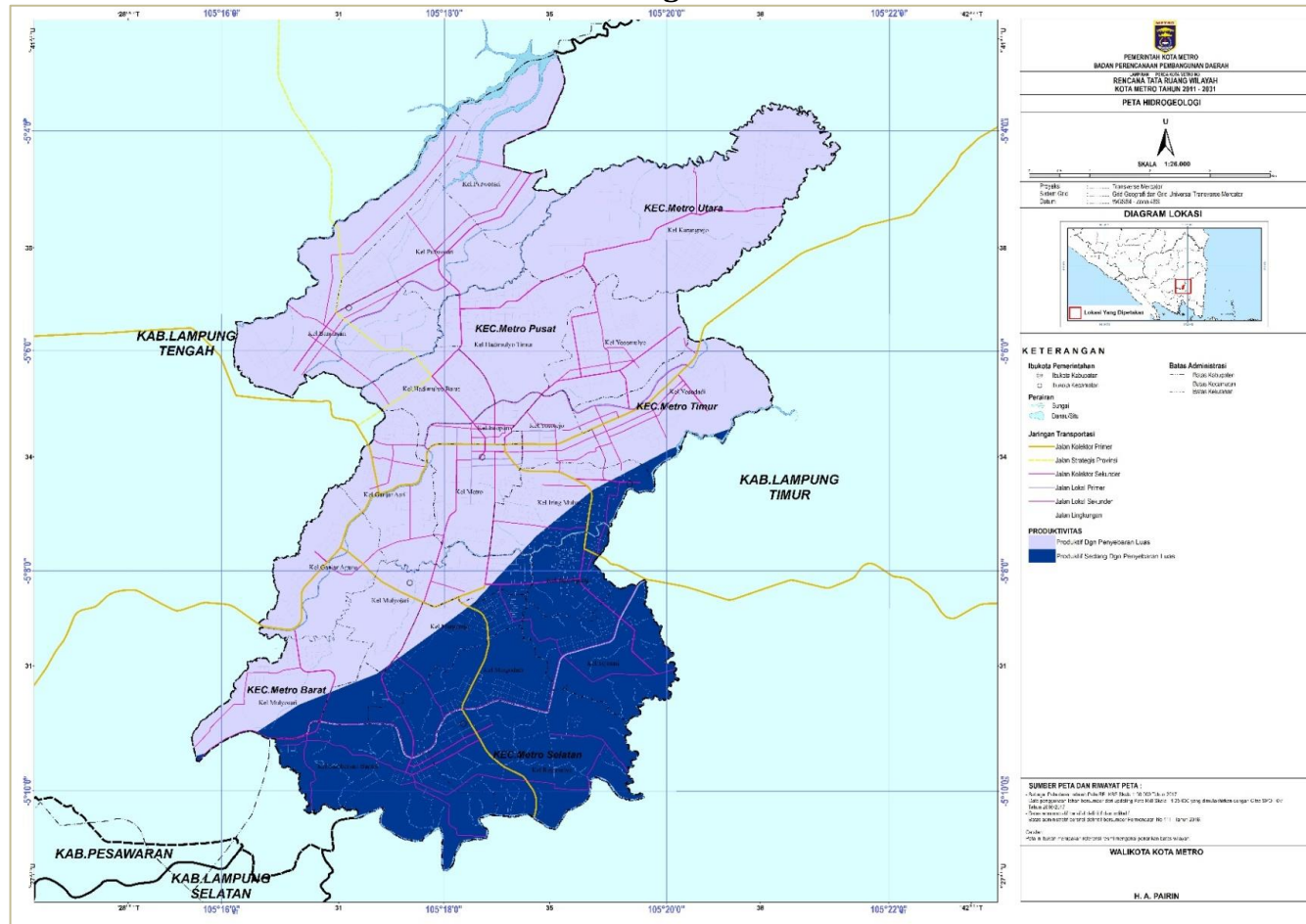




**Gambar 2.5**  
**Peta Struktur Geologi Kota Metro**



**Gambar 2.6**  
**Peta Hidrologi Kota Metro**



Jenis bencana yang terdapat di Kota Metro terdiri dari kebakaran, kekeringan, angin puting beliung/angin ribut, dan banjir. Seperti yang ditampilkan pada gambar 4.15 mengenai titik lokasi rawan bencana di Kota Metro. Sebagian besar yang terjadi pada musim hujan yaitu banjir namun masih dalam kategori genangan, hal ini disebabkan karena curah hujan tinggi dan infrastuktur draniase yang belum memenuhi kapasitas tampung yang tinggi.





## 2. Penggunaan Lahan

Sebagian besar penggunaan lahan yang ada dikota metro yaitu permukiman yang mencakup adanya kawasan perdangan dan jasa serta perumahan dan persawahan, walaupun Kota Metro merupakan kota madya namun penggunaan lahan sawah masih mendominasi, untuk itu Kota Metro sudah mengeluarkan LP2B untuk menjaga adanya alih fungsi lahan. Lebih detail rincian luas lahan menurut penggunaan lahan di Kota Metro pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2**  
**LUAS LAHAN MENURUT PENGGUNAAN**  
**DI KOTA METRO TAHUN 2020**

NAMA UNSUR	Luas (Ha)	Persentase (%)
Empang	12,17	0,17
Kawasan Perdagangan dan Jasa	14,32	0,20
Kawasan Perkantoran	10,11	0,14
Lahan Terbuka	18,51	0,25
Lapangan	13,98	0,19
Makam	22,77	0,31
Perkebunan Campuran	644,94	8,82
Permukiman	2752,20	37,62
Sawah	3386,95	46,30
Semak Belukar	21,39	0,29
Stadion	2,57	0,04
Sungai	125,00	1,71
Taman	7,59	0,10
Tegalan/Ladang	283,32	3,87
<b>Total</b>	<b>7315,46</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Bappeda KotaMetro



## B. Aspek Demografi

### 1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Jumlah penduduk Kota Metro per tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro adalah sebesar 171.802 jiwa, dengan pertumbuhan jumlah penduduk sebanyak 950 jiwa atau 0,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, diantaranya peningkatan terhadap permintaan kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*) sebesar 101,5 menunjukkan bahwa komposisi penduduk laki-laki di Kota Metro hampir sama dengan penduduk perempuan, yang berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 102 penduduk laki-laki. Jumlah anggota keluarga per Kartu Keluarga berjumlah 3,30 artinya setiap Kartu Keluarga rata-rata memiliki anggota keluarga sebanyak 3 sampai 4 orang. Kepadatan penduduk rata-rata sebesar 2.499 per-kilometer persegi artinya setiap kilometer persegi rata-rata dihuni oleh sekitar 2.499 jiwa.

**Tabel 2.3**  
**DATA KEPENDUDUKAN KOTA METRO**  
**TAHUN 2016-2020(PER 31 DESEMBER)**

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk	165.360	166.739	169.013	170.852	171.802
2.	Pertumbuhan Penduduk	1,46%	1,28%	1,38%	0,89%	0,55%
3.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	2.406	2.438	2.459	2.485	2.499
4.	Sex Ratio (L/P)	101,68	101,95	101,4	101,7	101,5
5.	Angka Ketergantungan ( <i>dependency ratio</i> )	41,82	39,55	40,1	41,77	29,15
5.	Jumlah KK	46.726	48.174	49.693	51.331	51.956
6.	Rata-Rata ART	3,39	3,49	3,44	3,36	3,30

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	(jiwa/KK)					

Sumber : Olah Data Bappeda berdasarkan data pada Disdukcapil Kota Metro

Struktur penduduk menurut kelompok umur dapat juga digunakan untuk melihat besaran angka ketergantungan (*dependency ratio*), yaitu gambaran beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (65 tahun keatas). Banyaknya penduduk produktif (umur 15-64 tahun) disuatu wilayah sangat menentukan rasio ketergantungan penduduk diwilayah tersebut. Semakin besar persentase penduduk usia produktif maka semakin besar penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tersebut.

Penduduk yang berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk yang berusia diatas 65 tahun juga dianggap sudah tidak produktif lagi setelah memasuki masa pensiun. Meskipun tidak terlalu akurat, namun rasio ini dapat memberikan gambaran ekonomis penduduk dari segi demografis.

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kota Metro pada tahun 2020 adalah 29,15% yang berarti untuk setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 30 orang penduduk usia tidak produktif.

## 2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

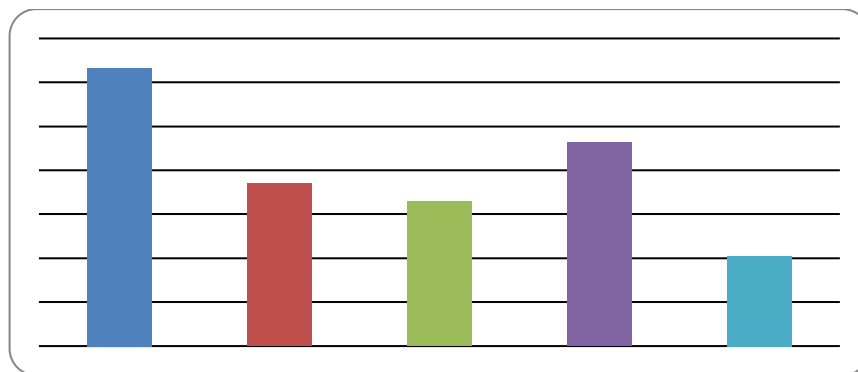
Permasalahan yang sering muncul di daerah yang sedang berkembang, seperti halnya Kota Metro adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk di Kota Metro pada tahun 2020 adalah 2.499 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kecamatan Metro Pusat dengan luas wilayah 11,71 km<sup>2</sup> merupakan daerah yang paling padat penduduknya yakni 4.643 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan ini mempunyai jumlah penduduk yang meliputi sekitar 31,64% dari total penduduk Metro. Sementara Kecamatan Metro Selatan yang luas wilayahnya 14,33 km<sup>2</sup> hanya ditempati oleh 10,24% dari total penduduk Kota Metro sehingga kecamatan ini memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 1.228 jiwa/km<sup>2</sup>. Walaupun sebagian wilayah Kecamatan Metro Selatan masih merupakan areal

persawahan, namun pemukiman penduduk sudah banyak berkembang di kecamatan ini.

Kota Metro jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk terendah kedua setelah Kabupaten Pesisir Barat, meskipun dengan kepadatan tertinggi kedua setelah Kota Bandar Lampung. Tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Metro dapat dilihat pada gambar berikut :

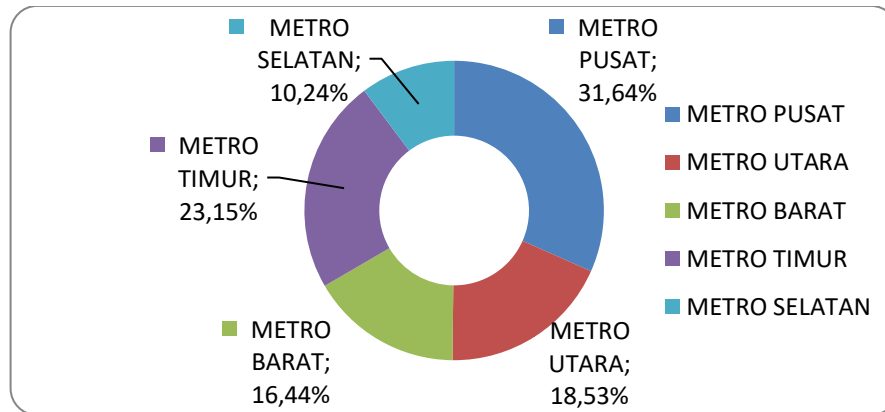
**Gambar 2.9**  
**KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN**  
**DI KOTA METRO TAHUN 2020**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, 2021

Kecamatan Metro Pusat yang menjadi jantung kota dan sebagai pusat pemerintahan serta perekonomian ini, mempunyai sarana prasarana dan fasilitas umum yang cukup lengkap, sehingga menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal tersebut sekaligus menjadi salah satu faktor persebaran penduduk yang tidak seimbang di Kota Metro, dimana Kecamatan Metro Pusat mengalami persebaran penduduk terpadat yaitu sebesar 31,64% sementara Kecamatan Metro Selatan dengan persebaran penduduk terendah sebesar 10,24%. Lebih jelas persebaran penduduk Kota Metro pada Tahun 2020 terlihat melalui gambar berikut.

**Gambar 2.10**  
**PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI**  
**KOTA METRO TAHUN 2020**



*Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, 2021*

### 3. Tingkat Pendidikan

Kualitas penduduk pada pendidikan formal dapat juga digambarkan oleh indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan. Hal ini disebabkan tingkat intelektual penduduk suatu daerah tercermin dari ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk wilayah tersebut. Semakin tinggi rata-rata ijazah/STTB yang dimiliki penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan dan kecerdasan masyarakat di wilayah tersebut.

**Tabel 2.4**  
**JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DI KOTA**  
**METRO TAHUN 2017-2020**

No.	Pendidikan Akhir	2017		2018		2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Tidak/Belum Sekolah	39.188	23,58	40.611	24,11	45.479	26,62	14.944	8,70
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	18.273	11,00	18.204	10,81	16.501	9,66		
3.	Tamat SD/Sederajat	24.227	14,58	23.977	14,23	23.006	13,47		
4.	SLTP/Sederajat	23.351	14,05	23.336	13,85	22.592	13,22		
5.	SLTA/Sederajat	43.252	26,03	43.750	25,97	43.579	25,51		
6.	Diploma I/II	2.476	1,49	2.479	1,47	2.226	1,30		
7.	Diploma III/Sarjana Muda	3.699	2,23	3.963	2,35	3.965	2,32		
8.	Diploma IV/S I	10.863	6,54	11.219	6,66	12.490	7,31		
9.	Strata II	788	0,47	844	0,50	964	0,56		
10.	Strata III	55	0,03	75	0,04	50	0,03		

No.	Pendidikan Akhir	2017		2018		2019		2020	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
	<b>Jumlah</b>	166.172	100	168.458	100	170.852	100	171.802	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, 2021

Pada tahun 2020, tingkat pendidikan yang telah ditamatkan terbanyak adalah jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, yaitu sebesar 71,14%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah penduduk dengan jenjang Perguruan Tinggi kalah dengan SMA/ sederajat. Artinya, terjadi peningkatan jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kota Metro.

## 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### A. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan salah satu indikator perekonomian yang dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat.

Persentase penduduk miskin diukur dengan menggunakan pendekatan tingkat konsumsi yaitu tingkat konsumsi 2.100 kkal per kapita per hari. Artinya apabila tingkat konsumsi penduduk kurang dari 2.100 kkal per hari, maka dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selanjutnya kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari segi ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan minimum makanan setara 2100 kkal perkapita per hari tersebut merupakan kemiskinan yang diukur melalui pendekatan kecukupan pemenuhan makan. Sedangkan kebutuhan non makanan berupa pengeluaran untuk kebutuhan perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Selain itu pendekatan yang digunakan adalah konversi tingkat konsumsi menjadi pendapatan yang kemudian dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Apabila pendapatan penduduk kurang dari angka pendapatan tersebut, maka dapat dikategorikan berada di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besaran garis kemiskinan yang ditetapkan, sedikit saja garis kemiskinan bertambah maka jumlah penduduk miskin akan langsung bertambah banyak. Untuk itulah pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat perlu bekerja sama



mengentaskan kemiskinan, karena dengan selalu tumbuhnya garis kemiskinan maka potensi penambahan jumlah penduduk miskin akan semakin besar.

Perkembangan garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kota Metro dari tahun 2008 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**  
**PERKEMBANGAN GARIS KEMISKINAN DAN PENDUDUK MISKIN DI KOTA METRO TAHUN 2008-2020**

No.	Tahun	Garis Kemiskinan	Pertumbuhan Garis Kemiskinan (%)	Penduduk Miskin		
				Jumlah (ribu)	Tingkat Kemiskinan (%)	Penurunan Kemiskinan (%)
1.	2008	168.835	13,05	22,05	15,91	
2.	2009	197.240	16,82	21,22	15,07	5,28
3.	2010	221.565	12,33	20,06	13,77	8,63
4.	2011	255.231	15,19	19,00	12,90	6,32
5.	2012	273.117	7,01	18,10	12,09	6,28
6.	2013	293.994,00	7,64	17,10	11,08	8,35
7.	2014	305.748,00	4,00	16,95	10,82	2,35
8.	2015	314.891,00	2,99	16,24	10,29	4,90
9.	2016	331.201,00	5,18	16,26	10,15	1,36
10.	2017	346.491,00	4,62	16,06	9,89	2,56
11.	2018	360.656,00	4,09	15,06	9,14	7,58
12.	2019	371.636,00	7,26	14,49	8,68	5,03
13.	2020	406.531,00	9,38	14,31	8,47	2,42

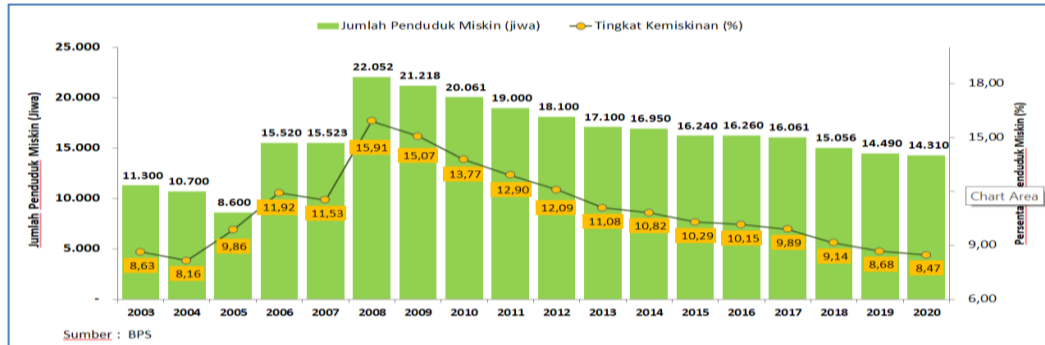
Sumber : BPS

Sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kota Metro juga semakin berkurang secara konsisten. Di tahun 2020 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 14.310 jiwa, berkurang sebanyak 180 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2019 yang jumlahnya 14.490 jiwa. Demikian pula di tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah penduduk miskin juga berkurang secara konsisten.

Capaian tersebut menjadikan Kota Metro sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah ketiga diantara 15 kabupaten/kota se-provinsi Lampung, setelah Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat. Bila dibandingkan dengan provinsi dan nasional, tingkat kemiskinan Kota Metro di tahun 2020 jauh lebih rendah dari provinsi Lampung (12,34 persen) dan nasional (9,78 persen).

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian Kota Metro sudah lebih baik dari angka provinsi maupun nasional.

**Gambar 2.11**  
**PERKEMBANGAN PENDUDUK MISKIN**



**Tabel 2.6**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota**  
**Se- Provinsi Lampung 2011 - 2020**

Wilayah		Persentase Penduduk Miskin (Persen)									
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lampung Barat	15.99	15.13	13.96	13.70	14.18	15.06	14.32	13.54	12.92	14,29
2	Tanggamus	17.06	16.10	15.24	14.95	14.26	14.05	13.25	12.48	12.05	11,68
3	Lampung Selatan	19.23	18.19	17.09	16.77	16.27	16.16	15.16	14.86	14.31	14,08
4	Lampung Timur	19.66	18.59	17.38	17.05	16.91	16.98	16.35	15.76	15.24	14,62
5	Lampung Tengah	15.76	14.96	13.37	13.13	13.30	13.28	12.90	12.62	12.03	11,82
6	Lampung Utara	26.33	25.16	23.67	23.32	23.20	22.92	21.55	20.85	19.90	19,30
7	Way Kanan	17.63	16.54	15.36	15.03	14.61	14.58	14.06	13.52	13.07	12,9
8	Tulang Bawang	10.11	9.43	8.04	8.66	10.25	10.20	10.09	9.70	9.35	9,33
9	Pesawaran	19.06	18.01	17.86	17.51	17.61	17.31	16.48	15.97	15.19	14,76
10	Pringsewu	11.62	11.01	9.81	9.83	11.80	11.73	11.30	10.50	10.15	9,97
11	Mesuji	8.07	7.69	5.81	6.57	8.20	8	7.66	7.55	7.47	7,33
12	Tulang Bawang Barat	7.11	6.73	6.31	7.12	8.23	8.40	8.11	8.10	7.75	7,39
13	Pesisir Barat	-	-	-	-	15.81	15.91	15.61	14.98	14.48	14,29
14	Bandar Lampung	13.61	12.65	10.85	10.60	10.33	10.15	9.94	9.04	8.71	8,81
15	Metro	12.90	12.09	11.08	10.82	10.29	10.15	9.89	9.14	8.68	8,47
16	Provinsi Lampung	1230.16	15.65	14.39	14.21	14.35	14.29	13.69	13.14	12.62	12,34

Dalam rangka percepatan pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia, pada tahun 2010 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dari Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 adalah meningkatkan efektifitas upaya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan sektor

swasta dalam penanggulangan kemiskinan. Di tingkat pusat, efektifitas tersebut berjalan melalui penguatan kapasitas pemerintah dan peran masyarakat oleh Tim Nasional Percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K).

Di tingkat daerah, implikasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 pada tatanan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di daerah adalah pembentukan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) yang dilegitimasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelaras Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Sebelumnya kelembagaan TKPK Daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sistem kelembagaan TKPK Daerah bekerja untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan di daerah sebagaimana direncanakan dalam RPJMD, sekaligus memantau relevansi arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD terhadap pemenuhan target pengurangan angka kemiskinan nasional dan target SDGs.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Metro dilakukan melalui 4 (empat) strategi utama yaitu:

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

Sedangkan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam 3 (tiga) klaster yaitu:

- a. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

- b. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan menggunakan dana kelurahan.

## **B. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu :

- Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- Pengetahuan (*knowledge*)
- Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

Indeks kesehatan menggunakan variabel Angka Harapan Hidup saat Lahir-AHH (*Life Expectancy-e<sub>0</sub>*) yaitu sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, hal ini dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

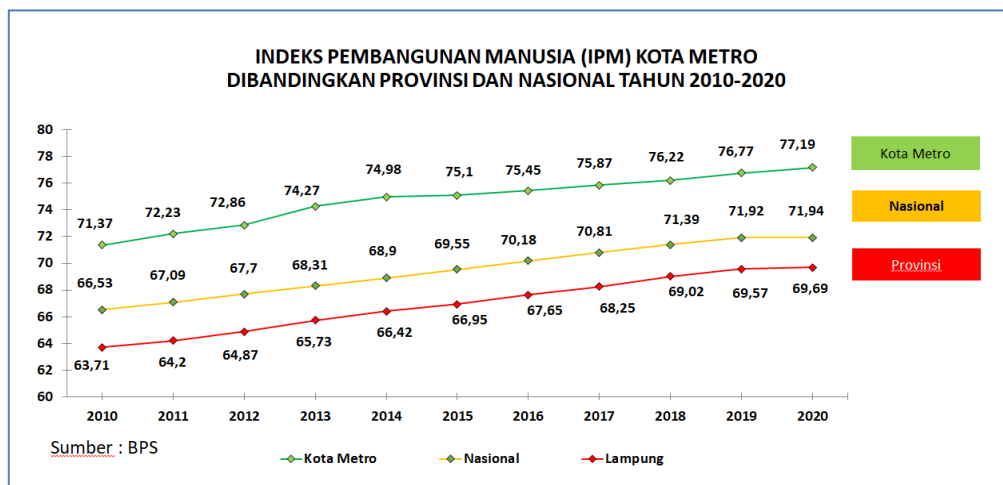
Indeks pendidikan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah-RLS (*Mean Years of Scholling-MYS*) dan Harapan Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling-EYS*). Rata-Rata Lama Sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Indeks pengeluaran menggunakan variabel Pengeluaran Perkapita Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Pada metode ini digunakan 96 komoditas untuk menghitung paritas daya beli yang sebelumnya hanya menggunakan 27 komoditas.

IPM digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuannya terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pembangunan manusia di Kota Metro.

Sejak tahun 2010 Kota Metro memiliki status pencapaian yang tinggi dengan nilai di atas 70. Selama sepuluh tahun terakhir pada umumnya menduduki tertinggi kesatu atau kedua di Provinsi Lampung. Untuk kategori kecepatan, Kota Metro mengalami pertumbuhan angka IPM terendah atau paling lambat di Provinsi Lampung. Hal ini salah satunya disebabkan status pencapaian yang sudah tinggi. Namun demikian hal ini harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah agar lebih memperhatikan pergerakan ekonomi dan status pendidikan masyarakatnya sehingga dapat tetap unggul dibandingkan daerah lainnya.

**Gambar 2.12**  
**Perkembangan IPM Kota Metro**



Sumber : BPS

Pada tahun 2020 Kota Metro menduduki nilai tertinggi kedua di Provinsi Lampung dengan nilai IPM 77,19 dengan rincian Angka Harapan Hidup 71,63 tahun, Harapan Lama Sekolah 14,47 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah 10,96 tahun dan Pengeluaran Per Kapita Rp.11,906 juta. Penurunan terjadi pada komponen Pengeluaran per Kapita dimana pada tahun 2020, Indonesia dilanda pandemic COVID-19 yang berdampak sangat signifikan pada sector perekonomian nasional. Tercatat pertumbuhan ekonomi nasional minus hingga 2 persen. Rincian IPM beserta komponennya di Kota Metro tahun 2012-2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA METRO**  
**TAHUN 2012-2020**

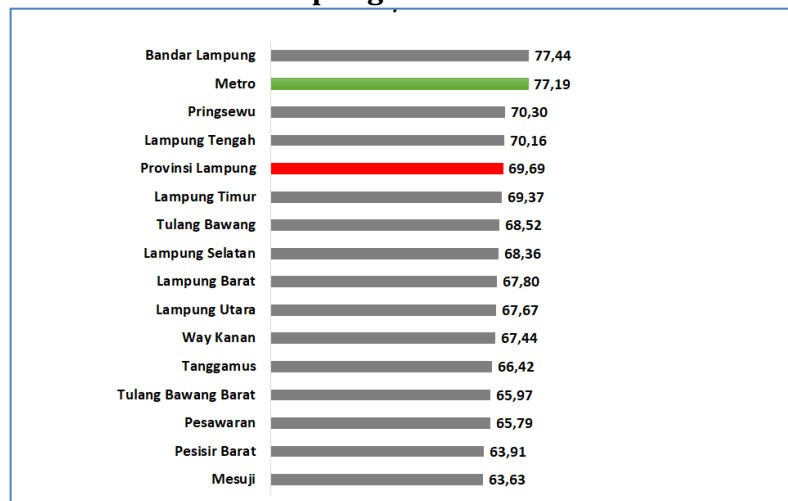
Kota Metro	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IPM	72,86	74,27	74,98	75,10	75,45	75,87	76,22	76,77	77,19
AHH	70,65	70,68	70,98	70,98	71,05	71,13	71,29	71,55	71,63
HLS	13,47	13,85	14,25	14,26	14,27	14,28	14,29	14,34	14,47
RLS	9,75	10,47	10,54	10,55	10,56	10,57	10,61	10,64	10,96
Pengeluaran	10,28	10,49	10,61	10,71	11,01	11,40	11,64	12,02	11,906

*Sumber : BPS Kota Metro*

**Keterangan :**

IPM : Indeks Pembangunan Manusia  
AHH : Angka Harapan Hidup  
HLS : Harapan Lama Sekolah  
RLS : Rata-Rata Lama Sekolah  
Pengeluaran : Pengeluaran Perkapita

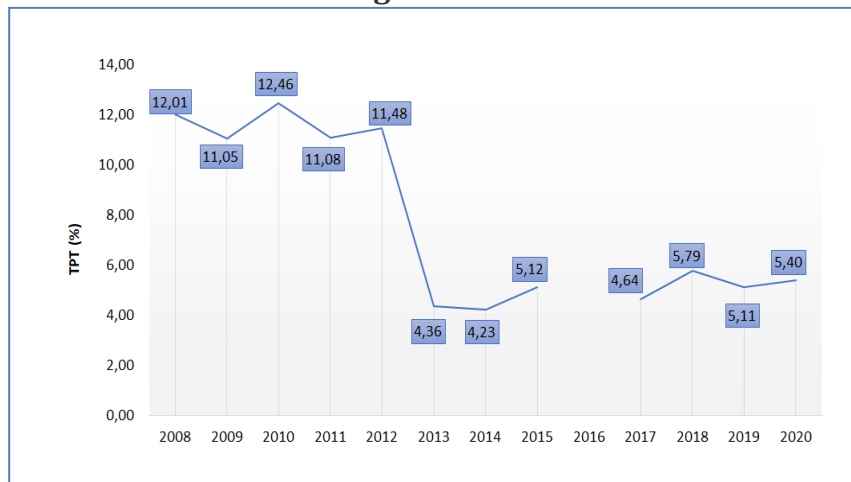
**Gambar 2.13**  
**Posisi Relatif IPM Kota Metro Dibandingkan Kabupaten/Kota se-Provinsi**  
**Lampung Tahun 2020**



### C. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jika dilihat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, TPT Kota Metro mengalami grafik yang fluktuatif dan relatif menurun. Untuk dua tahun terakhir, yaitu tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yang cukup baik, yaitu dari 5,79 menjadi 5,11. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Metro memang masih menjadi PR besar Pemerintah Kota Metro. Apalagi di tahun 2020, pandemic COVID-19 berdampak besar pada sector perekonomian nasional maupun daerah. Namun demikian, berbagai upaya telah diupayakan melalui program dan kebijakan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh dinas teknis maupun dunia usaha Kota Metro. Tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Metro tercatat sebesar 5,40. Angka ini meningkat 0,29 dibandingkan tahun 2019 namun tetap dibawah angka pada tahun 2018.

**Gambar 2.14**  
**Perkembangan TPT Kota Metro**



#### **D. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Seiring dengan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro pada periode Rencana Jangka Menengah sebelumnya maupun periode Rencana Jangka Menengah yang sedang berjalan, PDRB Kota Metro bertumbuh secara signifikan kearah yang baik ini membuktikan bahwa rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan berkesinambungan dan memiliki komitmen yang kuat baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan.

**Tabel 2.8**  
**PERKEMBANGAN PDRB KOTA METRO ADHB dan ADHK 2011-2020**

Tahun	PDRB Kota Metro (Juta Rp)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
2011	2841590.52	2695657.08
2012	3191358.32	2876024.84
2013	3533007.79	3074121.86
2014	3999559.70	3262462.05
2015	4437932.33	3453953.23
2016	4997830.93	3657866.68
2017	5481684.05	3865010.33
2018	5892670.42	4084824.76
2019	6365416.16	4314154.73

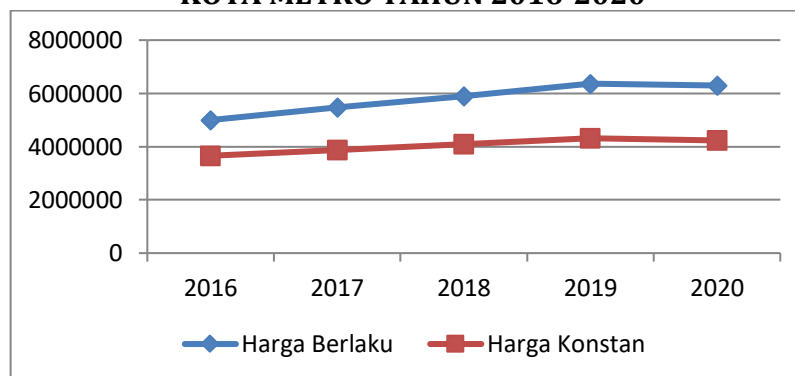


Tahun	PDRB Kota Metro (Juta Rp)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
2020	6297845.89	4235494.95

Sumber : BPS Kota Metro, 2021

Jika dilihat dari tabel di atas PDRB ADHB Kota Metro Tahun 2019 sebesar 6.365.416,16 juta rupiah dan pada tahun 2020 sebesar 6.297.845,89 juta rupiah, mengalami penurunan sebesar 67.570,27 juta rupiah atau sebesar 1 persen. Pada PDRB ADHK Kota Metro Tahun 2019 sebesar 4.314.154,73 juta rupiah dan pada tahun 2020 sebesar 4.235.494,95 juta rupiah mengalami penurunan 78.695,78 juta rupiah atau sebesar 0,1 persen. Kondisi penurunan ini diakibatkan pandemic COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia pada awal tahun 2020 dan berdampak sangat besar bagi perekonomian. Namun demikian persentase penurunan tidak terlalu besar dan ini menandakan perekonomian di Kota Metro berjalan cukup baik di tengah pandemic COVID-19.

**Gambar 2.15**  
**GRAFIK PERKEMBANGAN PDRB ADHK DAN ADHB KOTA METRO TAHUN 2016-2020**



Sumber : BPS Kota Metro Tahun 2021, diolah

Jika dilihat dari grafik di atas PDRB Kota Metro selama 5 tahun terakhir menunjukkan pergerakan naik dan turun hanya di tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa pergerakan perekonomian di Kota Metro ke arah yang positif dalam kurun waktu 2016-2019. Pengecualian untuk tahun 2020 dimana kondisi perekonomian secara nasional mengalami penurunan.

**Tabel 2.9**  
**PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU KOTA METRO**  
**MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2016-2020**

Kategori		Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				2020
		2016	2017	2018	2019	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	292709.61	309988.69	330130.50	343873.39	354 341,25
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	-	
C	Industri Pengolahan	850952.39	932758.61	1001477	1076762.28	1 026 029,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6038.29	7275.96	7770.96	8483.53	9 243,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2881.29	3062.08	3280.19	3432.41	3 609,30
F	Konstruksi	310355.15	347814.67	376109.74	402885.28	411 805,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	864006.24	938612.60	1000916.73	1127624.65	1 039 029,92
H	Transportasi dan Pergudangan	409553.64	450783.29	486159.86	522974.85	488 444,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	131350.55	144312.84	159923.65	175302.71	165 291,94
J	Informasi dan Komunikasi	354929.92	423173.79	455665.41	491972.92	528 306,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	381303.88	405423.57	429460.72	454682.07	463 906,20
L	Real Estat	297451.97	330639.90	359055.47	390652.62	392 945,86
M,N	Jasa Perusahaan	36187.19	38972.16	42174.42	45261.73	44 568,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	388149.52	416809.85	440555.61	459180.73	475 613,02
P	Jasa Pendidikan	281616.90	301424.44	333902.97	367521.06	379 028,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	269402.27	299786.69	317400.76	343415.63	371 915,56
R,S,T,U	Jasa Lainnya	120942.11	130844.90	136686.37	151390.29	143 767,43
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>4997830.93</b>	<b>5481684.05</b>	<b>5892670.42</b>	<b>6365416.16</b>	<b>6 297 845,89</b>

Sumber : BPS Kota Metro, 2021

Pada tabel di atas penyumbang terbesar PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2020 adalah pada sektor Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 1.039.029,92 juta rupiah. Posisi kedua disumbang oleh sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 1.026.029,71 posisi ketiga disumbang oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 488.444 juta rupiah. Komposisi ini berlaku juga untuk PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2020 penyumbang terbesar adalah pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 712.402,30 juta rupiah, penyumbang terbesar kedua adalah pada sektor Industri Pengolahan sebesar 682.304,89 juta rupiah dan penyumbang terbesar ketiga adalah pada sektor Informasi dan Komunikasi 386.047,78 juta rupiah (dapat dilihat pada tabel di bawah ini).

**Tabel 2.10**  
**PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN KOTA METRO**  
**MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2016-2019**

KATAGORI		TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	210.458,49	216423,78	221296,21	224280,90	227 503,42
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	-	0	0
C	Industri Pengolahan	606.716,23	642825,53	680142,95	723998,12	682 304,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.536,37	6020,16	6398,93	6813,17	7 355,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2.215,88	2270,27	2374,16	2475,27	2 581,77
F	Konstruksi	239.400,68	263267,19	279786,97	293857,88	290 884,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	672.298,31	703597,89	741714,97	786585,17	712 402,30
H	Transportasi dan Pergudangan	297.059,86	310624,20	333661,34	352067,06	331 196,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	83.970,62	90027,28	97251,46	104001,22	99 726,92
J	Informasi dan Komunikasi	280.207,66	311139,46	334418,32	358572,78	386 047,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	265.776,47	277.685	287158,01	296717,26	303 503,13
L	Real Estat	236.564,79	252381,93	266851,61	281802,41	276 623,53
M,N	Jasa Perusahaan	24.306,61	24980,91	26965,02	28290,32	27 767,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	251.817,08	260493,53	272906,07	282207,50	290 465,94

P	Jasa Pendidikan	196.929,89	205039,82	22033,38	237084,31	246 729,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	196.422,26	206738,38	218184,53	232630,67	251 930,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	88.185,49	91494,97	95382,83	102770,69	98 470,32
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>3.657.866,68</b>	<b>3865010,33</b>	<b>4084824,76</b>	<b>4314154,73</b>	4 235 494,95

Sumber : BPS Kota Metro, 2021

PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kota Metro Tahun 2019 sebesar 6365416.16 juta rupiah bergerak naik dari 5892670.42 juta rupiah pada Tahun 2018 dan masih di dominasi oleh sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 4590414,3 juta rupiah seperti pada tahun sebelumnya, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.11**  
**PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU KOTA METRO**  
**MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2016-2020**

Jenis Pengeluaran		TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3587339.26	3959035.88	4246238.45	4590414.34
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	83189.02	94708.01	114316.85	124743.56
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	844869.92	895739.09	940068.36	990462.72
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1070598.96	1157635.05	1272051.76	1369856.69
5	Perubahan Inventori	88073.58	61993.93	67488.93	14385.41
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-676239.80	-687427.91	-747493.93	-724446.56
	<b>PDRB</b>	<b>4997830.93</b>	<b>5481684.05</b>	<b>5892670.42</b>	<b>6365416.16</b>

Sumber : BPS Kota Metro, 2020

PDRB Pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.

PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Kota Metro Tahun 2018 sebesar 4084824.76 juta rupiah dan bergeser naik menjadi 4314154.73 juta rupiah pada Tahun 2019, sektor penyumbang terbesar masih di dominasi oleh sektor

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 3046120.22 juta rupiah seperti pada tahun sebelumnya, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.12**  
**PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN KOTA METRO**  
**MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2016-2019**

Jenis Pengeluaran		PDRB Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)			
		2016	2017	2018	2019
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2631406.60	2802982.34	2920670.73	3046120.22
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	61008.57	66237.88	75736.05	81689.82
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	582348.11	595168.54	604182.89	620472.57
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	817464.81	857203.93	909117.11	929646.18
5	Perubahan Inventori	33092.74	44724.20	47289.20	13898.51
Jenis Pengeluaran		2016	2017	2018	2019
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-467454.15	-501306.56	-472171.21	-377672.57
<b>PDRB</b>		<b>3657866.6</b>	<b>3865010.3</b>	<b>4084824.7</b>	<b>4314154.7</b>
		<b>8</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

Sumber : BPS Kota Metro, 2020

Jika ditinjau dari laju pertumbuhannya, sektor yang mengalami perkembangan paling tinggi pada tahun 2020 adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,3%); Pengadaan Listrik dan Gas (7,95%); Informasi dan Komunikasi (7,66%); dan disusul sector lainnya. Perkembangan internet dan jasa telekomunikasi merupakan pendorong utama percepatan pertumbuhan di sektor informasi dan komunikasi, tercatat selama 5 tahun terakhir sektor ini selalu tumbuh tinggi pada kisaran 7 s.d.12 persen.

Secara lebih rinci perkembangan laju pertumbuhan seluruh sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.13**  
**LAJU PERTUMBUHAN PDRB KOTA METRO**  
**MENURUT LAPANGAN USAHATAHUN 2016-2020**

Kategori		Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.03	2.83	2.25	1.35	1,60

B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	-	-
C	Industri Pengolahan	6.46	5.95	5.81	6.45	-5,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.92	8.74	6.29	6.47	7,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4.13	2.45	4.58	4.26	4,30
F	Konstruksi	10.05	9.97	6.27	5.03	-1,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.63	4.66	5.42	6.05	-9,43
H	Transportasi dan Pergudangan	8.11	4.57	7.42	5.52	-5,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.32	7.21	8.02	6.94	-4,11
J	Informasi dan Komunikasi	12.41	11.04	7.48	7.22	7,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.30	4.48	3.41	3.33	2,29
L	Real Estat	5.45	6.69	5.73	5.60	-1,84
M,N	Jasa Perusahaan	2.85	2.77	7.94	4.91	-1,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.54	3.45	4.77	3.41	2,93
P	Jasa Pendidikan	4.30	4.12	7.46	7.60	4,07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.19	5.25	5.54	6.62	8,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3.28	3.75	4.25	7.75	-4,18
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>5.90</b>	<b>5.66</b>	<b>5.69</b>	<b>5.60</b>	<b>-1,79</b>

Sumber : BPS Kota Metro, 2020

#### E. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Metro selama 5 (empat) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang baik dan selalu berada di atas rata-rata Provinsi Lampung dan Nasional, kecuali pada tahun 2020 yang tidak terkategori situasi normal. Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang Tahun 2-019 sebesar 5,61%, Kota Metro berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang hanya sebesar 5,27%, berada di atas Nasional yang 5,02% berada tepat di bawah Kota Bandar Lampung yang mempunyai laju pertumbuhan sebesar 6,24%.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kota Metro, Provinsi Lampung dan Nasional pada tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.14**  
**LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA METRO,**  
**PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2016-2020**

TAHUN	Kota Metro	Provinsi Lampung	Nasional
2016	5,9	5,14	5,02
2017	5,66	5,16	5,07

2018	5,69	5,25	5,17
2019	5.61	5,27	5,02
2020	-1,79	-1,67	-2,07

Sumber : BPS

Pertumbuhan ekonomi Kota Metro Tahun 2020, mengalami penurunan yang sangat tajam akibat pandemic COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Kota Metro lebih rendah dibandingkan Provinsi dan lebih baik dib/andingkan nasional.

**Tabel 2.15**  
**LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI**  
**KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2019-2020**

PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA (%)				
WILAYAH	PERTUMBUHAN EKONOMI 2019	Rank	PERTUMBUHAN EKONOMI 2020	Rank
Lampung Tengah	5,35	6	-1,02	1
Lampung Barat	5,19	9	-1,14	2
Way Kanan	5,17	10	-1,16	3
Pesisir Barat	5,37	4	-1,17	4
Pringsewu	5,04	12	-1,21	5
Pesawaran	5,00	14	-1,26	6
Tulang Bawang Barat	5,36	5	-1,32	7
Mesuji	5,26	8	-1,35	8
Tulang Bawang	5,41	3	-1,36	9
Lampung Utara	5,33	7	-1,45	10
<b>Provinsi Lampung</b>	<b>5,27</b>		<b>-1,67</b>	
Lampung Selatan	5,13	11	-1,73	11
Tanggamus	5,02	13	-1,77	12
Metro	5,60	2	-1,79	13
Bandar Lampung	6,21	1	-1,85	14
<b>Nasional</b>	<b>5,02</b>		<b>-2,07</b>	<b>16</b>
Lampung Timur	3,81	15	-2,29	15

## F. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Metro atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama tahun 2016-2019 selalu mengalami kenaikan, kecuali

pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi akibat pandemic COVID-19 yang berdampak pada sector perekonomian.

**Tabel 2.16**  
**PERKEMBANGAN PDRB PER KAPITA**  
**KOTA METRO TAHUN 2016-2020**

Tahun	PDRB Per Kapita (Ribuan Rp.) ADHB	Pertumbuhan PDRB ADHB	PDRB Per Kapita (Ribuan Rp.) ADHK	Pertumbuhan PDRB ADHK
2016	31.092,90	10,99	22.757,97	4,38
2017	33.653,02	8,23	23.713,68	4,21
2018	35.684,20	6,04	24.727,59	4,27
2019	38.022,69	6,55	25.769,84	4,21
2020	37.150,00	-3,59	24.653,35	-4,33

*Sumber : BPS Kota Metro*

Disisi lain, meskipun rata-rata pendapatan perkapita di Kota Metro tergolong rendah namun tidak demikian halnya dengan pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita yang merupakan salah satu cerminan dari pendapatan masyarakatnya menunjukkan data yang bertolak belakang dengan tingkat pendapatan perkapita. Dalam hal pengeluaran perkapita, Kota Metro termasuk paling unggul di Provinsi Lampung selain dari Kota Bandar Lampung. Penjelasan pengeluaran perkapita secara lebih detail dapat dilihat pada subbab Pola Konsumsi Penduduk.

### **G. Inflasi**

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan.

Perhitungan inflasi berdasarkan paket komoditas atas beberapa jenis barang dengan menentukan tahun dasar perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan rata-rata barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata (*agregat*). Angka inflasi selanjutnya digunakan Pemerintah sebagai petunjuk dalam penyusunan kebijakan ekonomi secara umum sekaligus sebagai indikator dalam mengambil keputusan dan kebijakan fiskal dan moneter.



Perkembangan perekonomian terutama pada bidang teknologi dan informasi menuntut untuk beberapa kali dilakukan perubahan tahun dasar. Terakhir Kota Metro menggunakan menggunakan tahun dasar 2012=100, dengan pembobotan komoditi berdasarkan Survey Biaya Hidup (SBH) Tahun 2012.

Dibawah ini dapat dilihat komoditi dengan bobot terbesar menurut SBH 2012 untuk Kota Metro dan Kota Bandar Lampung.

**Tabel. 2.17**  
**KOMODITI DENGAN BOBOT TERBESAR**  
**DI BANDARLAMPUNG DAN METRO(BERDASARKAN SBH 2012)**

Bandarlampung			Metro		
No.	Komoditi	Bobot (%)	No.	Komoditi	Bobot (%)
1	Beras	4,38	1	Beras	5,99
2	Kontrak Rumah	4,37	2	Tarif Listrik	3,27
3	Sewa Rumah	3,95	3	Nasi Dengan Lauk	3,02
4	Tarif Listrik	3,24	4	Bensin	2,75
5	Nasi Dengan Lauk	2,98	5	Rokok Kretek Filter	2,70
6	Bensin	2,95	6	Tukang Bukan Mandor	2,29
7	Rokok Kretek Filter	2,82	7	Sepeda Motor	2,24
8	Tarif Pulsa Ponsel	2,76	8	Semen	2,20
9	Mobil	2,12	9	Rokok kretek	2,11
10	Angkutan Dalam Kota	2,05	10	Kontrak Rumah	2,05

Sumber : BPS Kota Metro

SBH 2012 di atas memperlihatkan 10 komoditi yang memiliki bobot paling besar di Kota Metro, yang artinya kenaikan 10 komoditi tersebut akan memberikan pengaruh paling besar terhadap inflasi.

Pada tahun 2020, terjadi deflasi di bulan Mei sebesar 0,35 persen. Kondisi ini terjadi karena beberapa kebijakan dari pemerintah pusat seperti keringanan pajak untuk beberapa sector pada masa pandemic. Tujuannya adalah untuk menaikkan kembali perekonomian nasional. Selain itu, rendahnya uang yang beredar akibat pandemic COVID-19, juga dimungkinkan menjadi penyebab terjadinya deflasi

**Tabel 2.18**  
**LAJU INFLASI KOTA METRO MENURUT BULAN**  
**DI KOTA METRO TAHUN 2015-2020**

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Januari	-0,17	0,64	0,72	0,48	0,14	1,15
2.	Februari	-0,96	0,42	0,28	0,19	-0,04	0,19
3.	Maret	0,25	0,13	-0,30	0,17	0,16	0,27
4.	April	0,11	-0,8	-0,17	-0,12	0,52	0,23
5.	Mei	0,82	-0,02	0,86	-0,33	0,49	0,35
6.	Juni	0,84	0,67	0,48	0,52	0,48	0,26
7.	Juli	1,32	0,3	-0,07	-0,05	0,42	0,11
8.	Agustus	-0,33	0,64	-0,13	0,2	0,41	0,06
9.	September	0,15	0,15	0,1	-0,19	-0,31	0,01
10.	Oktober	0,03	0,04	0,23	0,22	0,10	0,05
11.	Nopember	-0,25	0,6	0,08	0,27	0,36	0,4
12.	Desember	0,87	0,13	0,23	0,27	0,40	0,51
	Tahun Kalender	2,67	2,92	2,32	1,64	2,97	2,53

Sumber : BPS Kota Metro

Jika dibandingkan dengan Kota Bandar Lampung dan Nasional, inflasi di Kota Metro tahun 2020, berada di atas Kota Bandar Lampung dan Nasional. Beberapa komoditi yang menyumbang andil besar dalam inflasi adalah komoditas hortikultura, seperti cabai merah, cabai rawit, kangkung dan jeruk dengan jumlah pasokan yang menurun. Selain itu penyumbang inflasi di Kota Metro adalah beras dan bawang merah. Secara lebih detail laju inflasi Kota Metro, Bandar Lampung dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.19**  
**LAJU INFLASI KOTA METRO, BANDAR LAMPUNG, DAN NASIONAL TAHUN**  
**KALENDER 2014-2020(BERDASARKAN SBH 2012)**

Tahun	Metro	Bandar Lampung	Nasional
2014	6,50	8,36	8,36
2015	2,67	4,65	3,35
2016	2,92	2,78	3,02
2017	2,32	3,14	3,61
2018	1,64	2,92	3,13
2019	2,97	3,53	2,72
2020	2,53	1,93	1,68

Sumber : BPS Provinsi Lampung

## H. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Harga Konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Komoditas IHK diklasifikasikan menjadi 7 kelompok, yaitu: (1) bahan makanan, (2) makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, (3) perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (4) sandang, (5) kesehatan, (6) pendidikan, rekreasi, dan olahraga, (7) transpor, komunikasi, dan jasa keuangan.

Hingga tahun 2019 ini perhitungan IHK menggunakan SBH 2012=100, artinya harga barang dan jasa di tahun 2012 dijadikan sebagai angka indeks dengan nilai 100. IHK sebesar 130 pada tahun 2019 menjelaskan bahwa harga barang yang pada tahun 2012 seharga 100 menjadi 130 pada tahun 2019.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Metro untuk tahun 2019 menurut kelompok pengeluaran dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.20**  
**PERKEMBANGAN IHK MENURUT**  
**KELOMPOK PENGELUARAN TAHUN KALENDER 2019**  
**KOTA METRO DAN PROVINSI LAMPUNG (GABUNGAN)**

No.	Kelompok Pengeluaran	IHK Kota Metro	IHK Gabungan Provinsi Lampung
1.	Bahan Makanan	168,02	156,65
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	133,73	144,03
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	133,54	134,04
4.	Sandang	132,06	121,26
5.	Kesehatan	141,56	140,18
6.	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	154,22	152,58
7.	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	129,62	126,09
	<b>UMUM</b>	<b>143,58</b>	<b>140,46</b>

Sumber : BPS Kota Metro

Pada tabel di atas dapat dilihat, bahwa kelompok pengeluaran Bahan Makanan mengalami peningkatan indeks yang paling tinggi yaitu menjadi 168,02, disusul oleh kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Keluarga dengan

indeks 154,22. Kelompok pengeluaran yang peningkatan indeksnya paling rendah adalah kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 129,62 dan kelompok Sandang 132,06.

Perkembangan nilai IHK di Kota Metro tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.21**  
**INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) KOTA METRO,**  
**BANDAR LAMPUNG, DAN NASIONAL TAHUN 2014-2019 (2012=100)**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Kota Metro</b>	126,89	130,28	134,08	137,19	139,44	143,58
<b>Bandar Lampung</b>	118,40	123,90	127,31	131,31	135,15	139,92
<b>Nasional</b>	119,00	122,99	126,71	131,28	135,39	139,07

*Sumber : BPS Provinsi Lampung*

Jika dilihat pada tabel di atas, IHK di Kota Metro sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Bandar Lampung dan Nasional. Hal ini menjelaskan bahwa perubahan harga di Kota Metro jika dibandingkan dengan tahun 2012 relatif lebih tinggi dari kota-kota lainnya di Indonesia.

Namun dengan telah dilakukannya Survey Biaya Hidup (SBH) 2018=100, diperkirakan kedepannya IHK Kota Metro akan lebih rendah dibandingkan daerah lainnya mengingat rendahnya inflasi di Kota Metro selama beberapa tahun terakhir.

### **2.3. Aspek Pelayanan Umum**

Layanan urusan wajib difokuskan pada pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah sosial; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga;

kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Sedangkan untuk urusan pilihan difokuskan pada perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.

a. **Pendidikan**

Pembangunan sektor pendidikan merupakan sektor prioritas dalam pembangunan Kota Metro sampai tahun 2025 atau sampai periode RPJPD berakhir. Selain merupakan sektor strategis, pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk mempersiapkan masa depan bangsa. Tahun 2016, kewenangan urusan pendidikan menengah berpindah dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sehingga, kewenangan Kabupaten/Kota ada di urusan pendidikan dasar. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator urusan pendidikan.

**Tabel 2.22**  
**Capaian Urusan Pendidikan Kota Metro Tahun 2016-2020**

No.	Urusan	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah siswa jenjang PAUD	orang	N/A	8.196	7.356	7.596	8.096
2.	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Orang	6.191	7.509	8.038	8.346	8.334
3.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	N/A	109,15	91,52	91,01	97,14
4.	Angka Partisipasi Kasar siswa SD/MI :	Angka	89,91	104,25	108,37	99,36	106,36
5.	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs :	Angka	95,88	93,88	94,19	95,38	147,88
6.	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	Orang	16.385	17.014	17.640	17.785	17.910
7.	Total penduduk	Orang	165.360	166.739	169.013	170.852	171.802
8.	Angka pendidikan yang ditamatkan :						
	- SD/MI	Angka	9,91	10,20	10,44	10,41	10,48
9.	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	Orang	7.877	8.070	8.280	8.306	8.507
10.	Total penduduk	Orang	165.360	166.739	169.013	170.852	264.17
11.	Angka pendidikan yang ditamatkan :						
	- SMP/MTs	Angka	4,76	4,84	4,90	4,86	4,98
12.	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	Orang	8.132	8.280	8.232	8.311	82.17

13.	Total penduduk	Orang	165.360	166.739	169.013	170.852	171.802
14	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka	91,02	99,56	100,00	99,58	103,35
15	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka	87,5	89,77	94,18	93,74	132,75
16	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Angka	89,91	99,56	100	99,36	102,2
17	Jumlah siswa putus sekolah SD/MI	Orang	N/A	6	9	4	4
18	Jumlah siswa putus sekolah SMP/MTs	Orang	11	31	13	13	13
19	Jumlah lulusan SD/MI	Orang	2.907	2.960	3.005	3.008	3772
20	Jumlah siswa tingkat tertinggi	Orang	2.907	2.960	3.005	3.008	3772
21	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100
22	Jumlah lulusan SMP/MTs	Orang	3.668	3.543	3.763	3.836	3891
23	Jumlah siswa tingkat tertinggi	Orang	3.668	3.543	3.763	3.836	3891
24	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100
25	Jumlah siswa Tk. 1 jenjang SMP/Mts	Orang	3.910	4.068	4.174	4.309	4345
26	Jumlah lulusan jenjang SD/MI	Orang	2.907	2.960	3.005	3.008	3295
27	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Angka	134,50	137,43	138,90	143,25	<b>145,5</b>
28	Jumlah lulusan jenjang SMP/MTs	Orang	3.668	3.543	3.763	3.836	3891
29	Jumlah ruang kelas baik (SD)	Unit	225	341	436	559	576
30	Total ruang kelas (SD)	Unit	582	580	633	634	641
31	Ruang Kelas SD kondisi bangunan baik	Persen	38,66	58,79	68,88	88,17	89,85
32	Jumlah ruang kelas baik (MI)	Unit	73	77	79	79	96
33	Total ruang kelas (MI)	Unit	79	84	85	87	134
34	Ruang Kelas MI kondisi bangunan baik	Persen	92,41	91,67	92,94	90,80	71,6
35	Jumlah ruang kelas baik (SMP)	Unit	117	225	281	352	364
36	Total ruang kelas (SMP)	Unit	351	359	372	373	373
37	Ruang Kelas SMP Kondisi Bangunan Baik	Persen	33	63	76	94	97,58
38	Jumlah ruang kelas baik (MTs)	Unit	67	73	77	79	100
39	Total ruang kelas (MTs)	Unit	67	73	77	81	100

40	Ruang Kelas MTs kondisi Bangunan yang Baik	Persen	100	100	100	98	100
41	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik						
	- SMP	Unit	33,33	62,67	75,54	94,37	97,58
	- MTs	Unit	100,00	100,00	100,00	97,53	100
42	Jumlah sekolah (SD, MI, SMP, MTs)	Unit	103	105	105	107	107
43	Jumlah penduduk usia (7-12) + (13-15)	Orang	24.711	25.889	25.049	25.479	26.417
44	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	1:240	1:246	1:238	1:238	1:405
45	Jumlah penduduk usia (16-18)	Orang	8.132	8.280	8.232	8.311	8.217
46	Jumlah Guru SD	Orang	995	1.006	826	1.007	1.034
47	Jumlah Guru MI	Orang	156	165	181	199	195
48	Jumlah Guru SMP	Orang	670	703	616	720	812
49	Jumlah Guru MTs	Orang	203	212	217	240	195
50	Jumlah Guru SD/MI & SMP/MTs	Orang	2.024	2.086	1.840	2.166	2.199
51	Jumlah Murid SD	Orang	15.971	15.882	15.980	16.017	15.784
52	Jumlah Murid MI	Orang	1.869	2.320	2.747	3.176	3.273
53	Jumlah Murid SMP	Orang	9.637	9.701	9.758	9.754	10.131
54	Jumlah Murid MTs	Orang	1.788	1.887	2.104	2.442	2.449
55	Jumlah murid SD/MI & SMP/MTs	Orang	29.265	29.790	30.589	31.389	31.638
56	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar						
	- SD	Rasio	1:16	1:16	1:19	1:16	1:15
	- MI	Rasio	1:12	1:14	1:15	1:16	1:17
	- SMP	Rasio	1:14	1:14	1:16	1:14	1:12
	- MTs	Rasio	1:9	1:9	1:10	1:10	1:13
57	Jumlah Guru rata-rata perkelas (Guru Kelas, Guru PAI, Guru Penjas, Guru Mulok)	Orang	4	4	4	4	4
58	Jumlah Guru mapel SMP	Orang	14	14	14	14	14
59	Jumlah murid SD	Orang	15.971	15.882	15.980	16.017	15.784
60	Jumlah murid SMP	Orang	9.637	9.701	9.758	9.754	10.131
61	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio					
	- SD		2,50	2,52	2,50	2,50	
	- SMP		14,53				
62	Jumlah lulusan jenjang	Orang	2907	2960	3005	3008	3295

	SD/MI						
63	Penduduk usia 12 tahun	Orang	2.717	2.784	2.864	2.894	3295
64	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	106,99	106,32	104,92	103,94	
66	Penduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf	Orang	15.921	16.668	17.359	17.938	18.653
67	Penduduk usia 15-24 tahun	Orang	27.161	27.578	27.617	27.780	27.525
68	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Orang	58,62	60,44	62,86	64,57	18.653
69	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Orang	100	100	100	100	123.233
70	Guru kualifikasi S1/D-IV:						
	- SD	Orang	822	845	794	887	915
	- MI	Orang	125	137	161	170	178
	- SMP	Orang	565	586	573	623	715
	- MTs	Orang	168	176	181	201	201
71	Jumlah Guru:						
	- SD	Orang	995	1006	826	1007	1035
	- MI	Orang	156	165	181	199	195
	- SMP	Orang	670	703	616	720	812
	- MTs	Orang	203	212	217	240	162

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021

Berdasarkan data tahun 2016-2020, pembangunan pendidikan dasar di Kota Metro terbilang berhasil. Target 2020 pun telah dicapai dengan maksimal. Angka partisipasi kasar maupun murni pada jenjang SD dan SMP telah mencapai angka 100 lebih. Jumlah siswa jenjang PAUD pada tahun 2018 mengalami penurunan karena fasilitas pendidikan PAUD di daerah luar Metro (Kabupaten berbatasan dengan Metro) semakin memadai, sehingga Metro tidak menjadi satu-satunya tujuan pendidikan untuk jenjang PAUD. Namun, pada tahun 2020 jumlah siswa PAUD bertambah 500 siswa seiring dengan bertambahnya jumlah sekolah PAUD.

Jika dilihat dari jumlah anak usia 4-6 tahun, maka tidak seluruhnya mengecap pendidikan jenjang PAUD (sekitar 90%). Hal ini disebabkan kurangnya minat dari orangtua untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang tersebut dengan pertimbangan PAUD bukan merupakan jenjang pendidikan wajib.



Untuk jenjang SD, tingkat partisipasi sekolah pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan bertambahnya jumlah anak putus sekolah sebanyak 4 orang. Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pembinaan kepada keluarga keempat anak didik dimaksud. Akan tetapi, pihak keluarga tidak responsive untuk menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan. Namun demikian pada tahun 2020, angka partisipasi telah mencapai angka 100 persen.

Untuk jenjang SMP, angka partisipasi sekolah mengalami penurunan pada tahun 2019 disebabkan faktor kebijakan PPDB online yang memberlakukan aturan zonasi dimana peserta didik yang diterima diprioritaskan warga Kota Metro. Untuk peserta didik dengan Kartu Keluarga luar Metro, kuota yang diberikan hanya sebesar 5%. Faktor lainnya adalah, banyaknya warga Metro yang menyekolahkan anaknya ke luar daerah Kota Metro. Selanjutnya tahun 2020 mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya kualitas sekolah swasta di Kota Metro yang menjadi daya tarik bagi penduduk luar Metro.

Untuk sarana prasarana pendidikan, setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini didorong dengan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan sarana prasarana jenjang pendidikan dasar 9 tahun melalui Dana Alokasi Khusus Fisik. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Metro mendapatkan alokasi yang sangat memadai untuk pembangunan ataupun rehabilitasi. Selain Dana Alokasi Khusus Fisik, Pemerintah Kota Metro juga mendapatkan Dana Insentif Daerah sektor pendidikan yang peruntukannya juga untuk pembangunan sarana prasarana selain peningkatan sumberdaya aparatur tenaga didik dan kependidikan. Tercatat persentase ruang kelas kondisi baik tahun 2020 untuk SD mencapai angka 89,85% dan untuk SMP hanya 97,58%.

#### **b. Kesehatan**

Selain sektor pendidikan, sektor kesehatan merupakan sektor prioritas pembangunan di Indonesia, tak terkecuali di Kota Metro. Terdapat 45 indikator utama untuk menganalisa keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Salah satunya adalah angka kematian bayi yang didefinisikan sebagai banyaknya kematian bayi usia 0 dari setiap 1000 kelahiran hidup pada waktu tertentu atau

dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Secara rinci capaian indikator kinerja dari program-program urusan Wajib Kesehatan dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.23**  
**Capaian Indikator Bidang Kesehatan Kota Metro Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	6,61 (18/2.723)	7,81 (21/2.689)	7,54 (20/2.654)	6,49 (17/2.620)	4,64
2	Angka kelangsungan hidup bayi	Angka	993,4	992,2	992,5	997,3	995,36
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	7,34 (20/2.723)	8,18 (22/2.689)	7,91 (21/2.654)	6,49 (17/2.620)	5,03
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	4,77 (13/2.723)	7,44 (20/2.689)	6,03 (16/2.654)	4,58 (12/2.620)	4,64 (12/2.585)
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	36,72 (1/2.273)	111,57 (3/2.689)	113,04 (3/2.654)	114,50 (3/2.620)	0-
6	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	11,47	11,59	11,71	12,24	11,97
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,20	0,25	0,25	0,22	0,21
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05
9	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,40	0,51	0,62	0,63	0,81
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,65	0,78	1,02	1,24	1,82

11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98%	100%	100%	100%	89%
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persen	100%	100%	100%	100%	18%
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100%	100%	100%	-	-
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	N/A	108,98%	105,95%	90,44%	82,67%
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Angka	0	0	0	0	0
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	7,86%	0,42%	13,98%	18,94%	5,19%
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100%	100%	100%	100%	35,8%
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Angka	143,10	155,24	233,67	308,22	208,25
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Angka	1,87	3,07	3,03	4,18	4,13
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	34,0%	34,9%	39,9%	52,4%	35,8%
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	93,9%	94,5%	98,2%	95,7%	96,9%
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
25	Penderita diare yang ditangani	Persen	80,55%	53,95%	54,64%	47,15%	28,88%
26	Angka kejadian Malaria	Angka	0,62	0,61	0	0	1,18

27	Tingkat kematian akibat malaria	Angka	0	0	0	0	0
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Persen	0	0	0	0	0
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0	0	0	0	0
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,002%	0,007%	0,005%	0,009%	0,008%
31	Penggunaan Kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	4,10%	3,80%	4,30%	4,00%	7,9%
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
34	Cakupan kunjungan bayi	Persen	99%	99%	100%	100%	87%
35	Cakupan puskesmas	Persen	220%	220%	240%	240%	220%
36	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	27%	27%	23%	23%	23%
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	99%	100%	100%	100%	89%
38	Cakupan pelayanan nifas	Persen	98%	100%	100%	100%	89%
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
40	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	74%	98%	100%	100%	67%
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	100%	100%	100%	96%	100%
42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD	Persen	103%	100%	100%	100%	79%

	dan setingkat						
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100%	100%	100%	100%	89%
45	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		0	0	0	0	0

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Kesehatan, 2021

n/a =

0/- = NOL KASUS

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa pembangunan di sektor kesehatan terbilang berhasil. Untuk angka kematian bayi cukup baik dengan adanya penurunan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Indonesia Tahun 2020 sebesar 21,12, Kota Metro berada jauh di bawahnya. Artinya tingkat kematian bayi sebelum usia 1 tahun di Kota Metro cukup rendah secara nasional. Angka Kematian bayi dan balita tahun 2020 mengalami penurunan. Namun untuk angka kematian neonatal mengalami kenaikan meskipun jumlah kasus sama dengan tahun 2019, yaitu sebanyak 12 kasus. Akan tetapi jumlah kelahiran hidup mengalami penurunan yaitu 2.585 yang sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 2.620 kelahiran. Untuk angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2020 adalah 0 dengan kasus 0 kematian.

Adapun cakupan kelurahan yang minimal 80% penduduk balitanya mendapatkan imunisasi dasar lengkap, sudah mencapai 100%. Artinya untuk wilayah Kota Metro, jumlah balita yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap sudah di atas 80%.

Untuk kasus gizi buruk, pada tahun 2020 tidak ditemukan kasus balita gizi buruk. Sejak tahun 2016 sampai 2020, di Kota Metro juga tidak ditemukan kasus anak terkena penyakit polio. Sedangkan kasus diare, tren cenderung menurun sejalan dengan semakin membaiknya sanitasi di Kota Metro. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Kota Metro mendeklasikan ODF.

Permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah di sector kesehatan adalah penyakit TBC. Penyakit ini cenderung naik sejalan dengan meningkatnya deteksi oleh tenaga kesehatan. Meskipun jika dilihat dari kinerja aparatur kesehatan terbilang semakin membaik, penyakit TBC masih memerlukan perhatian khusus karena jumlah kematian akibat penyakit ini meningkat meskipun factor penyakit penyerta juga menjadi penyebabnya.

Selanjutnya, isu stunting yang didefinisikan sebagai kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya, menjadi permasalahan yang cukup priorittas di Kota Metro. Kasus stunting masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pemerintah Kota Metro telah melaksanakan program-program pencegahan stunting selama lima tahun terakhir, seperti Getuk Melanting (*Gerakan Melawan Stunting*). Berikut disajikan dalam tabel kondisi stunting di Kota Metro per Februari 2021.

**Tabel 2.24**  
**Kondisi Stunting Kota Metro Tahun 2021**

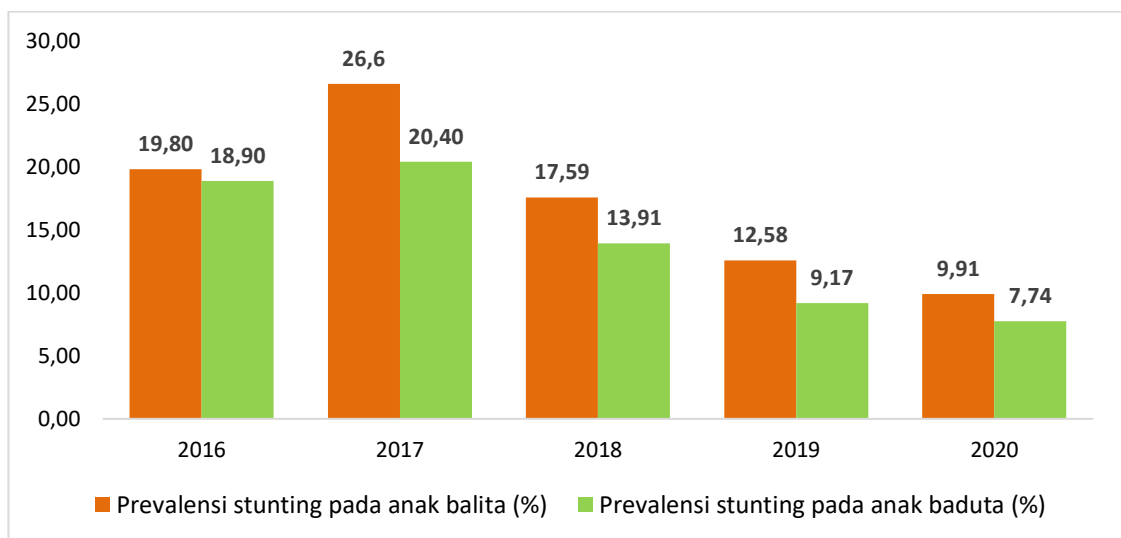
No	Kelurahan	Sasaran			TB/U											
					Sangat Pendek			Pendek			Sangat Pendek+Pendek			Sangat Pendek+Pendek		
		0 - 59 Bln			0 - 59 Bln			0 - 59 Bln			0 - 59 Bln			0 - 59 Bln		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	METRO	260	231	491	2	3	5	19	17	36	21	20	41	8,08	8,66	8,35
2.	IMOPURO	120	99	219	4	0	4	13	10	23	17	10	27	14,17	10,10	12,33
<b>Puskesmas Metro</b>		<b>380</b>	<b>330</b>	<b>710</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>27</b>	<b>59</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>10,00</b>	<b>9,09</b>	<b>9,58</b>
1.	HADIMULYO BARAT	235	238	473	17	17	34	37	23	60	54	40	94	22,98	16,81	19,87
2.	HADIMULYO TIMUR	260	248	508	14	9	23	29	20	49	43	29	72	16,54	11,69	14,17
3.	YOSOMULYO	283	240	523	14	6	20	33	18	51	47	24	71	16,61	10,00	13,58
<b>Puskesmas Yosomulyo</b>		<b>778</b>	<b>726</b>	<b>1504</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>77</b>	<b>99</b>	<b>61</b>	<b>160</b>	<b>144</b>	<b>93</b>	<b>237</b>	<b>18,51</b>	<b>12,81</b>	<b>15,76</b>
1.	BANJARSARI	340	290	630	1	1	2	20	14	34	21	15	36	6,18	5,17	5,71
<b>Puskesmas Banjarsari</b>		<b>340</b>	<b>290</b>	<b>630</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>6,18</b>	<b>5,17</b>	<b>5,71</b>
1.	PURWOSARI	157	149	306	2	0	2	12	7	19	14	7	21	8,92	4,70	6,86
2.	PURWOASRI	123	112	235	0	0	0	5	4	9	5	4	9	4,07	3,57	3,83
<b>Puskesmas Purwosari</b>		<b>280</b>	<b>261</b>	<b>541</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>30</b>	<b>6,79</b>	<b>4,21</b>	<b>5,55</b>
1.	KARANG REJO	309	251	560	1	2	3	16	10	26	17	12	29	5,50	4,78	5,18
<b>Puskesmas Karangrejo</b>		<b>309</b>	<b>251</b>	<b>560</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>5,50</b>	<b>4,78</b>	<b>5,18</b>

1.	TEJOSARI	107	88	195	0	0	0	5	3	8	5	3	8	4,67	3,41	4,10
2.	TEJOAGUNG	123	119	242	1	0	1	5	12	17	6	12	18	4,88	10,08	7,44
<b>Puskesmas Tejo Agung</b>		<b>230</b>	<b>207</b>	<b>437</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>4,78</b>	<b>7,25</b>	<b>5,95</b>
1.	YOSOREJO	166	151	317	0	0	0	6	7	13	6	7	13	3,61	4,64	4,10
2.	YOSODADI	181	158	339	3	2	5	15	11	26	18	13	31	9,94	8,23	9,14
<b>Puskesmas Yosodadi</b>		<b>347</b>	<b>309</b>	<b>656</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>44</b>	<b>6,92</b>	<b>6,47</b>	<b>6,71</b>
1.	IRINGMULYO	290	241	531	5	3	8	12	4	16	17	7	24	5,86	2,90	4,52
<b>Puskesmas Iringmulyo</b>		<b>290</b>	<b>241</b>	<b>531</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>5,86</b>	<b>2,90</b>	<b>4,52</b>
1.	MULYOJATI	154	147	301	3	2	5	10	10	20	13	12	25	8,44	8,16	8,31
2.	MULYOSARI	114	70	184	2	0	2	6	6	12	8	6	14	7,02	8,57	7,61
<b>Puskesmas Mulyojati</b>		<b>268</b>	<b>217</b>	<b>485</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>7,84</b>	<b>8,29</b>	<b>8,04</b>
1.	GANJARAGUNG	150	140	290	5	1	6	18	12	30	23	13	36	15,33	9,29	12,41
2.	GANJARASRI	209	207	416	4	2	6	26	11	37	30	13	43	14,35	6,28	10,34
<b>Puskesmas Ganjaragung</b>		<b>359</b>	<b>347</b>	<b>706</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>44</b>	<b>23</b>	<b>67</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>79</b>	<b>14,76</b>	<b>7,49</b>	<b>11,19</b>
1.	SUMBERSARI	121	102	223	2	1	3	6	10	16	8	11	19	6,61	10,78	8,52
2.	REJOMULYO	143	142	285	9	5	14	18	15	33	27	20	47	18,88	14,08	16,49
3.	MARGODADI	97	87	184	3	1	4	17	10	27	20	11	31	20,62	12,64	16,85
4.	MARGOREJO	110	98	208	0	1	1	4	8	12	4	9	13	3,64	9,18	6,25
<b>Puskesmas Margorejo</b>		<b>471</b>	<b>429</b>	<b>900</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>88</b>	<b>59</b>	<b>51</b>	<b>110</b>	<b>12,53</b>	<b>11,89</b>	<b>12,22</b>
<b>KOTA METRO</b>		<b>4052</b>	<b>3608</b>	<b>7660</b>	<b>92</b>	<b>56</b>	<b>148</b>	<b>332</b>	<b>242</b>	<b>574</b>	<b>424</b>	<b>298</b>	<b>722</b>	<b>10,46</b>	<b>8,26</b>	<b>9,43</b>



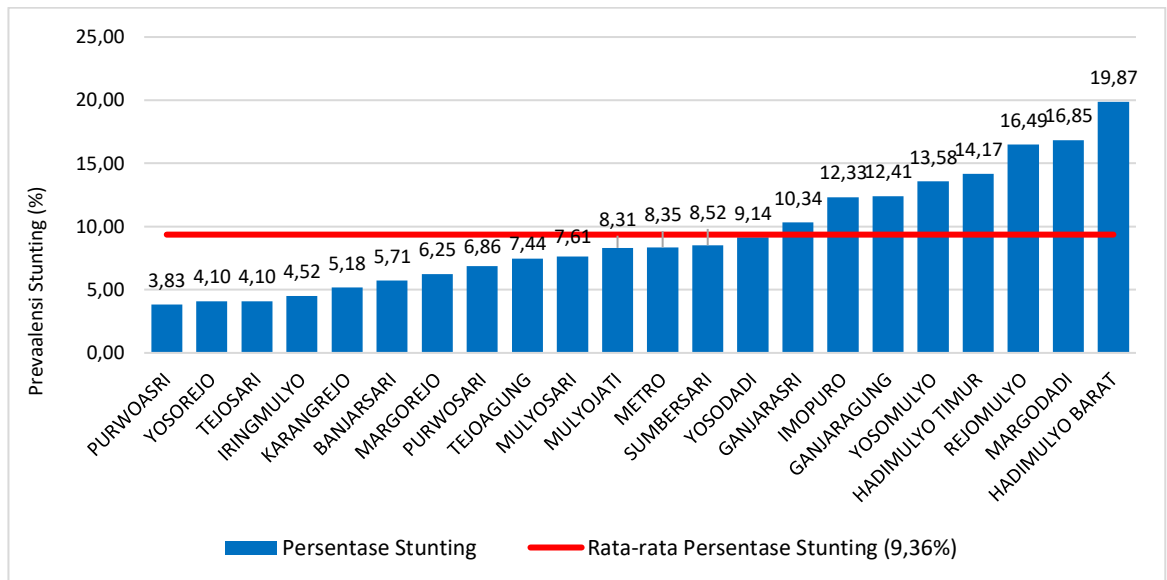
Berdasarkan data prevalensi *stunting* dari Dinas Kesehatan Kota Metro yang diolah dari aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), prevalensi *stunting* pada anak balita dan anak baduta selama tiga tahun terakhir semakin membaik yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi *stunting*. Prevalensi *stunting* anak balita menurun dari 17,59% (2018) menjadi 12,58% (2019) dan 9,91% (2020). Demikian pula dengan angka prevalensi *stunting* anak baduta yang menurun dari 13,91% (2018) menjadi 9,17% (2019) dan 7,74% (2020).

**Gambar 2.16**  
**Prevalensi *Stunting* pada Anak Balita dan Baduta**  
**di Kota Metro Tahun 2016-2020**



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro (diolah)

**Gambar 2.17**  
**Prevalensi Balita *Stunting* per Kelurahan di Kota Metro Tahun 2021\***



Selama ini berbagai program penurunan *stunting* telah diselenggarakan, namun belum efektif dan belum terjadi dalam skala yang memadai. Untuk itu, secara nasional Pemerintah telah menetapkan strategi dan instrumen untuk meningkatkan integrasi intervensi dalam penurunan prevalensi *stunting* melalui 8 (delapan) Aksi Konvergensi yaitu:

1. Analisis Situasi
2. Penyusunan Rencana Kegiatan
3. Rembuk Stunting
4. Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa
5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia
6. Sistem Manajemen Data
7. Pengukuran dan Publikasi Data Stunting
8. Reviu Kinerja Tahunan

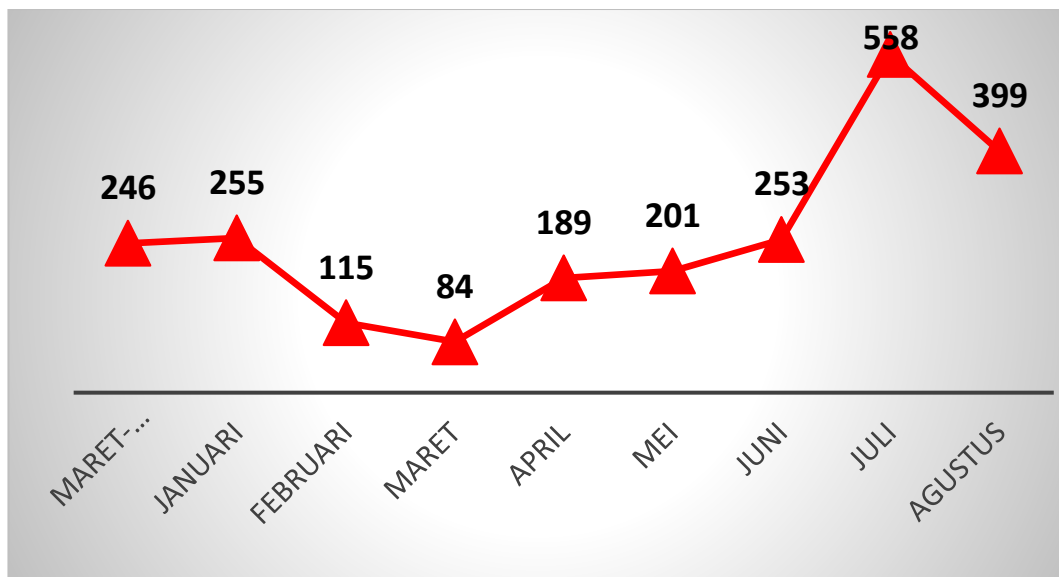
Selanjutnya, untuk dalam dokumen RPJMD ini disajikan mengenai gambaran umum kondisi pandemic COVID-19 di Kota Metro. Data ini menjadi kondisi tahun dasar penyusunan RPJMD. Selain itu, pademi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020 dan masih berlangsung sampai saat ini, belum dapat dipastikan kestabilannya. Oleh karena itu, beberapa kebijakan juga

mengakomodir situasi pandemic COVID-19, khususnya untuk kebijakan di tahun 2022.

Sejak tahun 2020 hingga Agustus 2021, jumlah kasus terkonfirmasi di Kota Metro sebesar 2.300 orang dengan jumlah tertinggi terjadi pada Bulan Juli 2021. Begitu pula halnya dengan tren kasus kematian yang sejalan dengan tren kasus terkonfirmasi setiap bulannya. Sampai Agustus 2021, jumlah kematian akibat COVID-19 sebanyak 149 orang dengan persentase 63,8% (95 kasus) disertai komorbid. Penyakit komorbid terbanyak adalah Diabetes Melitus. Adapun berdasarkan usia, sebanyak 50% penderitanya berusia di atas 60 tahun.

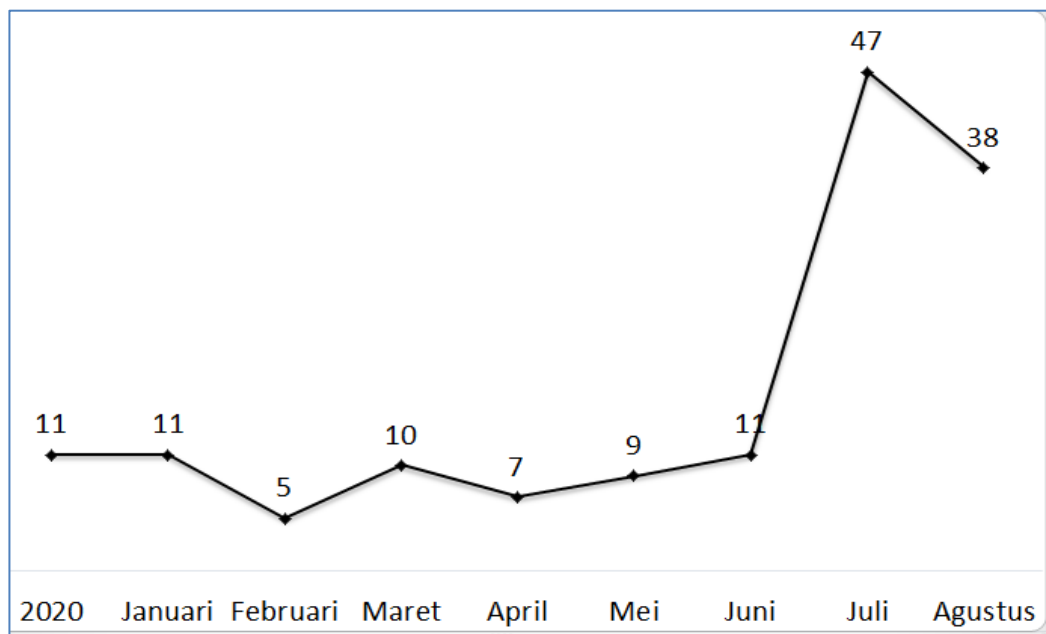
**Gambar 2.18**

**Jumlah Kasus Terkonfirmasi per Bulan (Maret 2020-Agustus 2021)**



Sumber : Bappeda Kota Metro, 2021

**Gambar 2.19**  
**Kasus Kematian COVID-19 (2020-Agustus 2021)**



*Sumber : Bappeda Kota Metro, 2021*

Dari jumlah kasus terkonfirmasi, sebanyak 83% berasal dari kluster keluarga, 12% berasal dari kluster kantor, 3% berasal dari kluster resepsi, dan 2% berasal dari kluster lain-lain. Selanjutnya untuk Bed Occupation Rate (BOR) bulan Agustus 2021 sebesar 59,4% dan tertinggi di Rumah Sakit Mardiwalyo. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemantauan Tim Pemantauan Obat COVID-19 Pemerintah Kota Metro dari seluruh jumlah 59 apotek dan 2 PBF Pedagang Besar Farmasi (Distributor) yang menyediakan obat terapi COVID-19 hanya ada di 8 apotek dengan jumlah obat yang sangat terbatas dan di masing-masing 8 apotek tersebut hanya memiliki satu saja item obat terapi COVID-19. Ketersediaan obat COVID-19 di apotek se-Kota Metro sangat terbatas. Hal ini dikarenakan pemilik Apotek sangat kesulitan untuk memperoleh obat dari distributor karena pembatasan pembelian oleh apotek-apotek dan stok pabrikan yang sangat sangat terbatas sehingga diprioritaskan untuk pembelian oleh rumah sakit yang memang merawat pembelian pasien-pasien COVID-19. Untuk keterjangkauan harga multivitamin/obat tradisional masih terjangkau dan masih tersedia di apotek-apotek di Kota Metro.

Adapun untuk kegiatan vaksinasi, sebanyak 57.931 jiwa sudah divaksin sampai dosis ke-2 atau sebesar 46,53%. Berikut disajikan data terkait vaksinasi dalam tabel berikut :

**Tabel 2.25**  
**Data Perkembangan Proses Vaksinasi per Agustus 2021**

SASARAN	Tahap I		Tahap II				Tahap III				BELUM DIVAKSIN
	SDM KESEHATAN		LANSIA		PETUGAS PUBLIK		MASY RENTAN & UMUM		REMAJA		
	Dos 1	Dos 2	Dos 1	Dos 2	Dos 1	Dos 2	Dos 1	Dos 2	Dos 1	Dos 2	
124.776	2.658	2.492	1.779	1.136	17.848	11.209	12.621	8.124	64	0	89.806
Total Divaksin	Dosis I				Dosis II						71,97%
	34.970		28,03%		22.961		18,40%				
KOTA Metro Dosis 1 dan 2	57.931				46,43%						

Sumber : Bappeda Kota Metro, 2021

**c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Pembangunan infrastruktur merupakan sektor pendorong bagi tumbuh dan berkembangnya sektor lain. Infrastruktur merupakan media efisiensi dan efektifitas bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan.

Ketika keadaan infrastruktur pada suatu daerah lemah, maka itu berarti perekonomian di daerah itu berarti berjalan secara tidak efisien bisa dikatakan seperti itu. Besarnya biaya-biaya yang terbilang sangat tinggi bisa berujung pada perusahaan dan bisnis yang kekurangan daya saing dikarenakan biaya tersebut. Dengan munculnya ketidakadilan sosial misalnya juga bisa menjadi salah satunya. Pastinya sulit bagi sebagian penduduk untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan ataupun susah nya anak-anak pergi ke sekolah karena perjalanannya terlalu susah dan terbilang cukup mahal.

Secara rinci capaian indikator kinerja dari program-program pembangunan dalam lingkup urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.26**  
**Capaian Indikator Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kota Metro Tahun 2016-2020**

NO	Indikator	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,596	0,684	0,701	0,706	0,706

2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Angka	N/A	0,004	0,004	0,003	0,003
3	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	Persen	56,60 %	67,23 %	70,32 %	72,01 %	72,01 %
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	1,89%	1,85%	1,85%	2,49%	2,49%
5	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen	0,32%	0,35%	0,44%	0,49%	0,49%
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	12,88 %	13,11 %	12,35 %	10,89 %	10,89 %
7	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	99,77 %	99,77 %	99,63 %	99,56 %	99,56 %
8	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	1	0,5	1	N/A	N/A
9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	321,45 %	311,87 %	311,87 %	190,87 %	190,87 %
10	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	N/A	0,00%	0,00%	70,98 %	70,98 %
11	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	N/A	0,00%	0,00%	12,36 %	12,36 %
12	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	84,94	92,27	87,6	9,9	9,9
13	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	5,02%	5,07%	5,65%	6,00%	6,00%
14	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Angka	N/A	0,408	0,540	0,667	0,667
15	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Angka	0,0104	0,0206	0,0283	N/A	N/A
16	Ruang publik yang berubah peruntukannya	Km2	0	0	0	0	0
17	Persentase kondisi jembatan dalam kondisi mantap	%	95,94	95,94	95,94	95,94	95,94

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas PUTR, 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari total 589,398 km panjang jalan di Kota Metro, sebesar 96,34% merupakan kewenangan Pemerintah Kota Metro. Artinya, Pemerintah Kota Metro memiliki otonomi penuh atas panjang jalan tersebut. Dari tahun 2016-2019, panjang jalan yang merupakan kewenangan Kota Metro dalam kondisi baik semakin meningkat, meskipun di tahun 2019 dan 2020 persentase masih berada pada angka 72,1%. Pemerintah Kota Metro telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur (khususnya Jalan)

pada prioritas kedua setiap tahunnya. Namun demikian, dengan kapasitas fiscal yang terkatagori rendah serta semakin meningkatnya jumlah jalan baru, maka panjang jalan dalam kondisi baik belum maksimal.

Selain itu, pembangunan drainase juga dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan jalan. Namun demikian, pada musim penghujan dengan debit air yang sangat tinggi, sering terjadi genangan air dan atau banjir di Kota Metro. Dikatakan genangan air karena air akan surut dalam waktu 1 hingga 2 jam.

**d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Capaian indikator bidang perumahan dan permukiman di Kota Metro dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terbilang sangat baik. Pada tahun 2019, jumlah rumah layak huni sebanyak 41.139 unit dari total rumah sebanyak 41. 392 atau sekitar 99,38%. Berdasarkan rasio rumah layak huni tahun 2019 sebesar 0,243, maka setiap satu rumah layak huni ditempati oleh 4 penduduk. Artinya, hampir seluruh penduduk Kota Metro telah menempati rumah layak huni. Kondisi ini dicapai dengan faktor dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus Fisik yang digelontorkan setiap tahunnya untuk rehab rumah tidak layak huni.

Untuk lingkungan kumuh yang persentasenya semakin menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, juga didukung oleh beberapa program pemerintah pusat, seperti program KOTAKU dengan fokus pembangunan sarana prasarana dan utiitas umum permukiman. Namun demikian, dukungan dari pemerintah daerah juga sangat besar dengan program peningkatan sarana prasarana permuhan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Metro Tahun 2016-2019.

**Tabel 2.27**  
**Capaian Indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
			2016	2017	2018	2019

1	Rasio Rumah Layak Huni	Angka	-	0,212	0,233	0,243
2	Rasio Permukiman Layak Huni	Angka	0,97	0,96	0,97	1,00
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	98,11%	98,73%	98,83%	99,39%
4	Persentase Permukiman yang tertata	Persen	96,61%	96,32%	96,51%	99,61%
5	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persen	1,16%	1,26%	1,20%	0,14%
6	Persentase Luasan Permukiman kumuh di kawasan di kawasan perkotaan	Persen	0,00%	5,06%	88,70%	100%
7	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	N/A	24,39%	122,73%	0,00%

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas PKP, 2021

#### e. Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintah daerah yang fokus pada penegakkan peraturan daerah. Berdasarkan data tahun 2016-2020, jumlah petugas Linmas tidak mengalami kenaikan. Hal ini dianggap belum prioritas mengingat angka kriminalitas di Kota Metro terbilang rendah. Dengan rasio 1 orang Linmas melayani 4 rukun Tetangga Kota Metro, rasio ini cukup untuk mencapai kinerja 83,3% bagi penegakkan peraturan daerah pada tahun 2020. Adapun untuk penanganan masalah kebakaran, dengan SOP selama 15 menit, kasus dapat diselesaikan 100%. Namun demikian, Pemerintah Kota Metro masih perlu untuk meningkatkan sarana dan prasarana penanganan masalah kebakaran, mengingat usia peralatan akan semakin bertambah dan semakin pula berkurang fungsinya. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kota Metro Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 2.28**  
**Capaian Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kota Metro Tahun 2016-2020**

No.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah petugas Linmas di Kota Metro	Orang	220	220	220	220	220
2	Wilayah kerja Kota Metro (RT)	Jumlah RT	825	825	825	825	825



3	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Rasio	01:04	01:04	01:04	01:04	01:04
4	Jumlah penyelesaian penegakan Perda	Jumlah	20	25	23	25	1645
5	Jumlah pelanggaran Perda	Jumlah	35	38	30	30	1675
6	Persentase penegakan Perda	Persen	57,14	65,79	76,67	83,33	98%
7	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan	Jumlah	20	25	23	25	57
8	Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP	Jumlah	35	38	38	30	64
9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	Persen	57,1	65,8	60,5	83,3	91%
10	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Jumlah	9	24	23	28	15
11	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	Jumlah	9	24	23	28	15
12	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan WMK	Persen	100	100	100	100	100
13	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (km <sup>2</sup> )	Km <sup>2</sup>	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74
14	Luas wilayah Kota Metro (km <sup>2</sup> )	Km <sup>2</sup>	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74
15	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Metro (%)	Persen	100	100	100	100	100
16	Angka kriminalitas	Persen	29,24	27,8	13,82	13,59	
17	Indeks Resiko Bencana	angka	113,6	113,6	113,6	113,6	113,6

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Kesbangpol dan Sat.Pol.PP, 2021

#### f. Sosial

Bidang sosial merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah yang fokus pada hak yang diperoleh setiap Penyandang Masalah Keejahteraan Sosial (PMKS). PMKS itu sendiri didefinisikan sebagai perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial, atau budaya sehingga tidak bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Berdasarkan data tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, persentase PMKS yang tertangani oleh Pemerintah Kota Metro sangat dinamis. Tahun 2018 melonjak sampai 200% dibandingkan tahun 2017. Namun, tahun 2019 jumlah PMKS yang tertangani mengalami penurunan sebesar 25%. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah PMKS bertambah di Kota Metro akibat jumlah PMKS

yang terdata/terjaring semakin meningkat Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 72,20%. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator bidang sosial tahun 2016-2020 di Kota Metro.

**Tabel 2.29**  
**Capaian Indikator Bidang Sosial di Kota Metro Tahun 2016-2020**

No.	Indikator	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	31,61 %	35,86%	84,32%	66,39%	72,20%
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	33,70 %	37,63%	86,10%	75,50%	73,80%
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	31,61 %	35,85%	84,32%	66,39%	72,20%
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	27,27 %	27,27%	27,27%	27,27%	7,14%
5	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	13,64 %	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	40,00 %	55,00%	12,00%	6,67%	100%
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	5,96%	5,96%	5,96%	34,94%	25,64%

*Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Sosial, 2021*

#### **g. Tenaga Kerja**

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Fungsi pemerintah daerah dalam urusan ketenagakerjaan adalah untuk melindungi hak-hak tenaga kerja yang berada di wilayahnya. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator urusan ketenagakerjaan di Kota Metro Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.30**  
**Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kota Metro Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	91,67	100,00	75,00	75,00	100,00
2	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	59,20	47,19	49,44	48,85	48,33
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	61,19	61,19	91,67	92,42	93,71
4	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Jumlah kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	68,18	69,77	55,56	73,17	66,67
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen	0,00	0,00	64,94	97,56	0,00

*Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021*

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 6 indikator urusan ketenagakerjaan yang diampu oleh Pemerintah Kota Metro. Jika dilihat dari kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama tahun 2018 dan 2019 relatif sama. Kondisi ini disebabkan banyaknya kasus yang masuk pada bulan Desember dan diselesaikan pada tahun berikutnya, sehingga tidak tercatat sebagai pencapaian target. Faktor lain adalah terdapatnya beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan Perjanjian Bersama sehingga diteruskan ke ranah pengadilan. Namun demikian, pada tahun 2020 kasus yang terselesaikan telah mencapai sebesar 100%

Terkait persentase pencari kerja yang ditempatkan, Pemerintah Kota Metro tidak dapat melakukan intervensi terlalu dalam pada kebijakan internal perusahaan dalam perekrutan pegawai. Namun demikian, Pemerintah Kota Metro tetap melakukan upaya peningkatan kapasitas pencari kerja melalui

program pembinaan kewirausahaan untuk tenaga kerja. Selain itu, dampak pandemic COVID-19 juga mempengaruhi pencari kerja yang ditempatkan.

#### **h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kasus kekerasan di Kota Metro tahun 2020 sebanyak 10 kasus dan keseluruhannya mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat ada 15 kasus pada tahun 2019. Menurunnya jumlah kasus disebabkan factor meningkatnya sosialisasi dan pendampingan tentang KDRT yang dilaksanakan oleh Dinas PP, PA, KB dan PP.

Melalui Dinas PP,PA, KB dan PP, Pemerintah Kota Metro telah banyak melakukan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dalam kegiatan pembangunan ataupun untuk meningkatkan penghasilan rumah tangga. Pemerintah bekerjasama dengan PKK, BNN dan Kejaksaan Negeri Kota Metro mengadakan penyuluhan dan pembinaan untuk para perempuan di Kota Metro. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator urusan pemberdayaan dan perlindungan anak tahun 2016-2020 di Kota Metro.

**Tabel 2.31**  
**Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan**  
**Perlindungan Anak di Kota Metro Tahun 2016-2020**

No	Indikator	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	32,00%	32,00 %	32,00%	28%	28%
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	-	-	100,00%	100%	100%
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	Persen	100,00%	100,00 %	N/A	N/A	100%

4	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	50,00%	63,83 %	50,72%	57,97 %	78,72 %
5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00 %	50%
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	40,00%	58,33 %	50,00%	73,68 %	100%
7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	40,00%	75,00 %	50,00%	52,63 %	100%
8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	40,00%	50,00 %	50,00%	47,37 %	100%

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas PP, PA, KB dan PP, 2021

#### i. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Berikut disajikan tabel capaian indikator urusan pangan di Kota Metro Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.32**  
**Capaian Indikator Urusan Pangan di Kota Metro Tahun 2016-2020**

NO.	SATUAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun	Ton	20.309,40	15.348,17	14.928,79	18.053,13	26.479,77
2	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Kalori X BDD	Kkal	2.444,14	2.331,20	2.459,69	2.403,95	2.925,92
3	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Protein X BDD	Kkal	84,66	62,08	67,45	54,75	85,98
4	Jumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	Sampel	812	800	804	483	420
5	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	Sampel	746	732	751	470	354

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data DKP3, 2021

Berdasarkan tabel di atas, ketersediaan pangan utama di Kota Metro sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relatif dinamis. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan, namun di tahun-tahun selanjutnya mengalami kenaikan . Hal ini disebabkan ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca serta ketersediaan air. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim dan ketersediaan air tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan. Selain itu, karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen juga mempengaruhi fluktuasi ketersediaan pangan utama. Jika dihitung dengan memasukan komponen jumlah penduduk, maka persentase ketersediaan pangan di Kota Metro berkisar di angka 9 sampai dengan 12%.

**j. Lingkungan Hidup**

Kondisi bidang Lingkungan Hidup di Kota Metro masih memerlukan perhatian yang tinggi dari Pemerintah. Ketiaktersediaan dokumen RPPLH sebagai dokumen induk dari dokumen lingkungan hidup lainnya belum tersusun. Selain itu, selama 5 tahun terakhir, Kota Metro tidak mendapatkan Adipura sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan kondisi TAP yang belum memenuhi sanitary landfill. Untuk cakupan area pelayanan pengolahan sampah yang masih berkisar di angka 58,4% disebabkan masih terbatasnya sarana prasarana pengangkut sampah. Berikut disajikan dalam tabel indikator bidang lingkungan hidup.

**Tabel 2.33**  
**Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kota Metro**  
**Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Kota	Ada /Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	0	0	0	63,75	63,85
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	78,59	82,98	80,98	81,20	81,29
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	0	22,69	22,66	24,90	24,96
5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	0,00%	59,70%	71,43%	92,31%	96,88
6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Kali	3	1	1	1	2
7	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

	Daerah kabupaten/kota.						
8	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	62,00%	64,00%	71,45%	71,71%	81,94%
9	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	1165,90	1205,50	1371,20	2245,00	6346,64
10	Persentase cakupan area pelayanan Pengelolaan Sampah	Persen	41,20%	48,10%	51,60%	55,00%	58,40%
11	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	60,00%	65,35%	71,31%	79,55%	82,66%
12	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota (Nilai TPA berdasarkan Program Adipura)	Angka	71	72,4	-	-	-
13	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
14	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Ada/Tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
15.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	53,363	53,501	55,226	63,517	63,187

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Lingkungan Hidup, 2021

#### k. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data kependudukan merupakan data yang memiliki nilai sangat strategis dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh pelayanan masyarakat menggunakan data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro merupakan salah satu dinas berprestasi dalam pencapaian kinerja. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian indikator kinerja yang sangat baik serta penghargaan yang diberikan oleh MenPAN-RB terkait Pelayanan Publik. Selama dua tahun 2018-2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro meraih Predikat Prima Sebagai Role Model Pelayanan Publik. Untuk penilaian tahun 2020 hasilnya belum dirilis oleh Kemenpan RB. Berikut disajikan pencapaian indikator bidang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Metro selama kurun waktu 2016-2020 :



**Tabel 2.34**  
**Capaian Indikator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro**  
**Tahun 2016-2020**

No	Indikator	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Angka	0,95	0,98	0,99	1,04	1,04
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka	0,88	0,91	0,93	0,98	0,996
3	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	Persen	94,83	98,19	99,91	103,84	104%
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	Persen	87,98	91,32	92,71	98,21	99,58%

*Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021*

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator kependudukan dan pencatatan sipil sangat baik. Tahun 2020, rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk sudah melebihi angka 100%. Perhitungan ini berdasarkan penerbitan NIK yang sudah dimulai dua bulan sebelum wajib KTP berusia 17 tahun. Selain itu, perhitungan juga didapat dari target dari pusat terkait wajib KTP yang lebih rendah dibandingkan dengan KTP yang diterbitkan. Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah masih terdapatnya masyarakat yang tidak melaporkan kelahiran di luar wilayah Kota Metro.

#### **I. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Tahun 2016 sampai tahun 2020, kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa cukup baik. Tercatat tahun 2020, persentase PKK aktif sebesar 98,96 persen. Angka ini dihitung dari jumlah PKK aktif (dari tingkat kota sampai desa wisata) dibagi jumlah keseluruhan anggota PKK. Tercatat, jumlah pengurus PKK se-Kota Metro sebanyak 1.056 orang dari seluruh tingkatan. Kegiatan PKK terbilang cukup aktif untuk pemberdayaan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi maupun kesehatan, antara lain pembinaan UP2K,

posyandu, dan PKDRT. Adapun jumlah posyandu di Kota Metro sebanyak 156 posyandu yang keseluruhannya tercatat aktif. Posyandu adalah salah satu contoh kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Untuk LPM tercatat ada 28 LPM se-Kota Metro dan juga tercatat aktif. Tidak dapat dipungkiri bahwa PKK dan LPM merupakan salah satu mitra pemerintah yang menjadi garda terdepan untuk proses pemberdayaan masyarakat. Berikut disajikan dalam tabel capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Metro.

**Tabel 2.35**  
**Capaian Indikator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Metro**  
**Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	5,74	5,02	5,24	5,72	5,73
3	Persentase LPM aktif	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase PKK aktif	Persen	N/A	75,66	76,61	86,90	98,96
5	Persentase Posyandu aktif	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	36,36	45,45

*Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021*

### **13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengendalian jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana di Kota Metro sangat baik dan berhasil. Selain mengatur jarak kelahiran juga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan kehamilan yang terprogram. Tercatat jumlah anak rata-rata per kepala keluarga sebanyak 2 orang. Selanjutnya, angka kelahiran remaja dari tahun 2016 sampai dengan

tahun 2019 semakin menurun, dari 20 jumlah kelahiran menjadi 10 kelahiran dari perempuan kelompok 15-19 tahun di tahun 2019.

Untuk pemakaian kontrasepsi pasangan usia subur juga masih di atas angka 100% dari jumlah akseptor KB sebanyak 20.432 orang di tahun 2020. Untuk Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sudah mencapai angka di atas 100%. Artinya, pelayanan untuk bidang keluarga berencana sudah dilaksanakan secara optimal. Berikut disajikan dalam tabel capaian kinerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Metro Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.36**  
**Capaian Indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga**  
**Berencana Kota Metro Tahun 2016-2020**

No	Indikator	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,42	2,08	2,10	2,34	Penundaan pendataan
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persen	31,25 %	30,30 %	78,13 %	78,13 %	78,13%
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	6,25%	6,06%	6,25%	6,25%	6,25%
4	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Bidang	2	2	2	2	2
5	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	2	2	2	2	2
6	Ratio Akseptor KB	Persen	71,22 %	71,97 %	72,60 %	72,75 %	101,389 %
7	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	71,22 %	71,97 %	72,60 %	72,75 %	101.389 %
8	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	18	13,9	14,77	N/A	N/A

9	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,36%	0,36%	0,39%	0,42%	N/A
10	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	Persen	16,00 %	15,00 %	15,00 %	16,00 %	100%
11	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	11%	29%	30%	32%	159.251 %
12	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	12,00 %	13,00 %	13,00 %	12,00 %	184,355 %
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	77,00 %	75,00 %	78,00 %	78,00 %	67%
14	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	59%	60%	55%	56%	55%
15	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	51%	50%	36%	36%	34,23%
16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	480	480	480	420	100%
17	Cakupan PKB/PLKB yang didayaguna kan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
18	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	62	66	68	68	67
19	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
20	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	279%	310%	147%	124%	
21	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	29%	100%	100%	100%	100%
22	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Persen	100%	100%	100%	100%	
23	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100%	100%	100%	100%	98,87%

24	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	85%	79%	89%	86%	86,11%
25	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	0,58%	0,58%	0,53%	0,79%	

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas PP, PA, KB dan PP, 2021

#### 14. Perhubungan

Kota Metro merupakan sebuah daerah dengan jarak jangkauan yang rendah. Artinya, untuk melakukan pergerakan, penduduk dapat dengan mudah tanpa dukungan sarana transportasi yang maksimal. Selain itu, wilayah Kota Metro tidak berbatasan langsung dengan laut, sehingga tidak memiliki pelabuhan. Adapun untuk sarana transportasi udara, masyarakat dapat mengakses bandara dengan jarak kurang lebih 20km saja dari Kota Metro. Namun demikian, beberapa permasalahan yang sangat krusial masih ditemukan di Kota Metro untuk sektor perhubungan, yaitu, belum tersedianya lahan parkir yang memadai, khususnya untuk daerah perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kendaraan yang parkir di bahu-bahu jalan yang dapat menimbulkan kemacetan pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, fungsi terminal kota saat ini tidak optimal mengingat makin berkurangnya sarana transportasi umum, seperti angkutan kota. Hal ini disebabkan oleh makin berkembangnya sarana transportasi umum secara online. Berikut disajikan dalam tabel, kondisi sektor perhubungan di Kota Metro Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.37**  
**Capaian Indikator Bidang Perhubungan Kota Metro Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	28000	26000	24500	8525	8760
2	Rasio ijin trayek	Rasio	N/A	0	0	0	0
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Angka	220	203	141	0	950
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2	2	1	1	1

5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,27%	0,25%	0,22%	0,19%	0,50%
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Rasio pemasangan Rambu-rambu	Angka	0,0567	0,0000	0,0950	0,0373	0,39
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Angka	0,0202	0,0227	0,0241	0,0691	0,46
9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang	310	325	355	375	250

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Perhubungan, 2021

## 15. Komunikasi dan Informatika

Kondisi pelayanan bidang komunikasi dan informatika di Kota Metro cukup baik. Pencapaian ini didukung oleh masyarakat dan stakeholder penyedia layanan komunikasi dan informatika. Tercatat tahun 2016-2020 cakupan layanan telekomunikasi sudah mencapai 100%. Artinya 22 kelurahan sudah tercoverage layanan komunikasi. Sedangkan untuk penduduk yang menggunakan HP mencapai angka 85,8%. Angka ini sebenarnya dapat dikatakan 100% karena pembandingnya adalah jumlah penduduk secara keseluruhan dimana penduduk usia 0-12 tahun pun masuk dalam perhitungan.

Tahun 2017, Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah memasang jaringan Wi-fi di seluruh gedung perkantoran Kota Metro, termasuk Kelurahan. Selain itu, pada tahun 2018, Dinas Kominfo juga melakukan pemasangan jaringan wi-fi di beberapa ruang publik.

Berikut disajikan tabel capaian indikator pelayanan komunikasi dan informatika tahun 2016-2020.

**Tabel 2.38**  
**Capaian Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Metro**  
**Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	0%	0%	22%	41%	41%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	N/A	N/A	N/A	100%	100%
3	Persentase Penduduk	Persen	71,5%	80,5%	82,1%	88,1%	85,8%

	yang menggunakan HP/telepon						
4	Jumlah penduduk yang mengakses internet	Persen	35,4%	42,9%	55,2%	61,2%	62,5%
5	Jumlah rumah tangga yang memiliki Komputer pribadi	Persen	36,6%	34,5%	35,5%	36,9%	42%

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

## 16. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di Kota Metro. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan masyarakat kecil. Tetapi UKM yang ada di Kota Metro masih menghadapi berbagai masalah antara lain masalah promosi, pemasaran dan penjualan produk yang dihasilkan. Tercatat tahun 2016 jumlah UMK di kota Metro sebanyak 7.363 usaha. Jumlah ini terus naik hingga tahun 2020 yang menjadi 13.267 usaha. Beberapa faktor pendorong tumbuhnya usaha kecil adalah mudahnya perizinan usaha melalui Kecamatan. Selain itu, banyaknya bantuan pemerintah dalam hal permodalan dan peralatan juga memicu tumbuhnya UMK di Kota Metro. Tahun 2020, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro memberikan bantuan modal bagi 1.250 usaha kecil dan menengah terdampak COVID 19. Selain itu, dinas juga melakukan pembinaan bagi usaha kecil menengah untuk menyiasati strategi usaha di tengah pandemic COVID 19, seperti pemasaran online.

Terkait jumlah koperasi aktif yang semakin menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 disebabkan oleh semakin mudahnya proses administrasi keuangan di perbankan sehingga koperasi tidak lagi menjadi alternatif untuk masalah keuangan masyarakat di Kota Metro. Namun demikian, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro terus melakukan pembinaan terhadap koperasi yang masih beroperasi. Tercatat jumlah koperasi aktif tahun 2020 sebanyak 175 unit atau sebesar 77%. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kota Metro Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.39**  
**Capaian Indikator Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Metro**  
**Tahun 2016-2020**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	202	204	214	213	225
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	137	138	147	149	175
3	Jumlah Seluruh UKM Non BPR/LKM	Unit	992	992	1.047	1.014	1.167
4	Jumlah UKM Non BPR/LKM Aktif	Unit	992	992	1.047	1.014	1.167
5	Jumlah seluruh UMKM	Unit	7.363	7.418	8.133	8.221	14.127
6	Jumlah usaha Mikro & Kecil	Unit	7.285	7.333	8.042	8.123	14.048
7	Jumlah usaha Menengah	Unit	78	85	91	88	79

*Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, 2021*

## 17. Penanaman Modal

Jumlah investor berskala nasional di Kota Metro tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan hingga mencapai angka 46%. Beberapa faktor penyebabnya adalah terjadinya transisi sistem perizinan dari manual menjadi berbasis online. Selain itu, faktor politik nasional di tahun 2019 dimana terjadi pergantian pemimpin negara menjadi salah satu pertimbangan investor untuk melihat kepastian usaha. Namun demikian, jumlah investasi semakin meningkat. Artinya dari investasi yang ada mengalami peningkatan nilai investasi yang cukup tinggi. Kondisi ini juga berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja yang semakin meningkat. Pemerintah Kota Metro melalui Dinas PMPTSP terus melakukan penyederhanaan birokrasi dalam hal perizinan. Selanjutnya tahun 2020 jumlah investor berskala nasional, meningkat sebesar 80,1%. Hal ini terjadi karena adanya dorongan investasi dari pemerintah di tengah pandemic COVID-19 untuk menjaga perekonomian daerah. Dorongan ini juga didukung oleh persepsi pelaku usaha terkait kondisi Kota Metro yang relatif aman. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator penanaman modal tahun 2016-2020 di Kota Metro.



**Tabel 2.40**  
**Capaian Indikator Bidang Penanaman Modal Kota Metro Tahun 2016-2020**

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Usaha	157	221	243	136	245
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	95,5 milyar	108,2 milyar	112,8 milyar	115,7 milyar	130,5 milyar
3	Jumlah seluruh PMA/PMDN	Usaha	157	221	243	136	245
4	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	Orang	0	3352	5599	5673	3930

*Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas PMPTSP, 2021*

### **18. Kepemudaan dan Olahraga**

Urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Metro mulai diampu oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sejak tahun 2017 sebagaimana terjadinya perubahan struktur organisasi perangkat daerah di Kota Metro. Karena dihadapkan pada kondisi tersebut, maka data capaian indikator bidang kepemudaan dan olahraga tidak dapat disajikan untuk tahun 2016.

Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro, persentase organisasi kepemudaan yang aktif sudah mencapai angka 100%. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata melibatkan organisasi kepemudaan dalam event-event olahraga maupun kepariwisataan. Tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan sekaligus mengaktifkan kegiatan kepemudaan. Sedangkan untuk masalah pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina, masih sangat minim dikarenakan adanya tumpang tindih antara tupoksi Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian.

Untuk prestasi di bidang olahraga, capaian kinerja cukup optimal. Tercatat peningkatan jumlah atlet berprestasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dengan rincian 18 atlet sepak bola piala BLISPI Usia 15 tahun dan 23 atlet sepak bola piala Suratin Cup Di Blitar. Adapun jenis prestasinya berjumlah 3 jenis untuk tahun 2017 (juara 3 cabor atletik O2SN lampung tengah, juara 1 tunggal putri cabor tenis meja PORPROV, Juara 3 tunggal putri tenis meja tingkat Propinsi) dan 14 cabor medali emas PORPROV. Untuk tahun 2018,

diperoleh 2 cabor (juara 2 cabor tenis meja tingkat propinsi dan 18 atlit sepakbola Usia 15 thn (BLISPI) juara 1 tingkat nasional di Palembang. Serta 3 cabang olahraga untuk tahun 2019 (cabor sepak bola : juara 3 cabor sepak bola tingkat nasional di Blitar, juara 1 cabor sepak bola piala suratin usia 15 tahun tingkat propinsi, juara 1 cabor sepak bola piala kemenpora usia 16 tahun tingkat propinsi, juara 2 cabor sepak bola piala suratin usia 17 tahun tingkat propinsi), Cabor Tenis Meja Tingkat Propinsi, Cabor Atletik Tingkat Propinsi. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator bidang kepemudaan dan olahraga dari tahun 2016-2020 di Kota Metro.

**Tabel 2.41**  
**Capaian Indikator Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Metro**  
**Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	unit	-	10	11	10	3
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	unit	-	11	12	12	3
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	-	90,91	109,09	83,33	100
4	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina	unit	-	1	6	5	48
5	Jumlah seluruh pelaku usaha ekonomi kreatif	unit	-	40	40	40	40
6	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina	Persen	-	2,50	15,00	12,50	120
7	Jumlah cabor yang dibina	Cabor	-	21	23	23	24
8	Jumlah seluruh cabor yang ada	Cabor	-	23	23	23	24
9	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	-	91,30	100,00	100,00	100
10	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	-	-	85	85	85
11	Jumlah seluruh pelatih	Orang	-	-	135	135	135
12	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	-	-	62,96	62,96	62,96
13	Jumlah atlet berprestasi	Orang	-	-	18 atlit	23 atlit	7 atlet
14	Jumlah prestasi olahraga	prestasi	-	3	2	3	7

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2021

## 19. Kebudayaan

Kota Metro merupakan salah satu tujuan transmigran pada zaman Belanda. Kota Metro dibuka oleh transmigran dengan pola yang sama dengan pembangunan di pulau Jawa oleh Belanda. Dengan tatanan pasar, masjid, dan kantor pemerintahnya yang berada dalam satu lokasi menjadi ciri khas pembangunan di pulau Jawa. Sampai saat ini, Kota Metro memiliki 12 cagar budaya yang dilestarikan berupa rumah/tempat tinggal, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Untuk cagar budaya yang dikembangkan secara terpadu sebanyak 1 unit, yaitu bekas rumah dinas dokter yang rencananya tahun 2021 akan dijadikan museum cagar budaya di Kota Metro. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator kebudayaan di Kota Metro Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.42**  
**Capaian Indikator Bidang Kebudayaan Kota Metro Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	-	3	3	3	0
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	12	12	12	12	12
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	-	2	3	5	5
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	1	1	1	1	1

*Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2021*

## 20. Perpustakaan

Urusan perpustakaan merupakan urusan prioritas karena merupakan bagian dari sektor pendidikan. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020, Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan. Rehabilitasi bangunan dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dengan menciptakan suasana yang nyaman dan kekinian. Sistem pelayanan peminjaman buku serta inovasi dalam bidang keperustakaan dilakukan untuk merubah mindset tentang membaca yang masih dipandang sebagai sesuatu hal yang membosankan. Tercatat ada 2 inovasi yang

dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mampu menjadi daya tarik, yaitu penyelenggaraan Hari Kunjung Perpustakaan serta NGOPI (Ngobrol Seputar Literasi). Tidak mengherankan jika jumlah kunjungan setiap tahunnya semakin meningkat. Selain itu, dengan dukungan pemerintah pusat, Dinas Perpustakaan dapat membangun Pojok Baca Digital (Pocadi) di ruang publik. Pembangunan Pocadi ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi secara sosial dan persuasif. Adapun jumlah koleksi buku yang menurun disebabkan adanya perubahan dari *manual book* menjadi *digital book*. Terkait tidak adanya tenaga pustakawan yang bersertifikat disebabkan belum mencapainya tahapan aparatur dalam kepegawaian untuk mendapatkan sertifikat. Berikut disajikan dalam tabel capaian bidang perpustakaan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 2.43**  
**Capaian Indikator Bidang Perpustakaan Kota Metro Tahun 2016-2020**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	Kunjungan	76.383	82.443	82.468	118.865	141.599
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Orang	120.758	122.356	123.933	125.537	125.537
3	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	63,253	67,380	66,542	94,685	112,794
4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	46815 eks	48068 eks	52746 eks	45580 eks	46,997 eks
5	Jumlah perpustakaan	Unit	176	176	177	177	177
7	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Persen	10,95%	10,80%	10,71%	10,57%	10,57%
8	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun	Kunjungan	76.383	82.443	82.468	118.865	141.599
9	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	13.906	14.503	16.389	17.323	18.852
10	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	0	0	0	0	0
11	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	5	5	5	5	5

12	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	persen	0%	0%	0%	0%	0%
13	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	12,50%	24,24%	36,36%	48,48%	78,79%
14	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	1	2	2	2
15	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	0	33	55	55	55

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2021

## 21. Kelautan dan Perikanan

Kota Metro merupakan wilayah dengan tutupan lahan berupa 100% daratan. Artinya, untuk urusan perikanan dan kelautan yang menjadi indikator adalah perikanan darat yang diusahakan oleh petani perikanan. Jenis ikan yang diusahakan di Kota Metro adalah lele, patin, nila dan gurame. Jumlah produksi yang tidak terlalu banyak serta persaingan harga pasar, maka produksi perikanan darat di Kota Metro hanya untuk konsumsi lokal dan wilayah Provinsi Lampung. Jumlah produksi ikan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai persentase 95-105% dari target yang direncanakan. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator urusan kelautan dan Perikanan di Kota Metro Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.44**  
**Capaian Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Metro**  
**Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Target Daerah Produksi Ikan(Ton)	Ton	1.853,18	1.901,18	1.954,72	2.005,52	2.062,045
2	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	Ton	1.894,71	1.910,04	1.955,72	1.965,41	1.869,82
3	Target Daerah Konsumsi Ikan (Kg)	Kg	35,2	36,96	38,8	40,74	43,78
4	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	Kg	30,82	30,64	34,89	35,89	37,65

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data DKP3, 2021

## 22. Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi sektor prioritas di Kota Metro sejak tahun 2016. Hal ini sejalan dengan Visi Wisata Keluarga yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Metro 2016-2021. Terdapat 2 destinasi wisata alam yang menjadi fokus pembangunan pariwisata di Kota Metro, yaitu Raman Asri dan Bumi Perkemahan Sumbersari Bantul. Pembangunan destinasi ini juga didukung oleh swadaya masyarakat sehingga memudahkan pemerintah untuk mencapai target. Selain itu, penataan taman dan lapangan yang ada di Kota Metro juga menjadi prioritas sebagai alternatif wisata keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Metro. Tidak mengherankan jika kontribusi PAD dari sektor pariwisata semakin meningkat setiap tahunnya. Berikut disajikan dalam tabel capaian urusan pariwisata tahun 2016-2020 di Kota Metro.

**Tabel 2.45**  
**Capaian Indikator Bidang Pariwisata Kota Metro Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisata	kunjungan	248.580	262.240	374.098	303.921	48.384
2	Yang direncanakan	Kunjungn	230.000	250.000	270.000	290.000	310.000
3	Kunjungan wisata (persen)	Persen	108	105	139	105	15,61
4	Rata-rata kunjungan Wisata dalam 1 bulan	Kunjungan	20.715	21.853	31.175	25.327	16128
5	PAD Sektor Pariwisata (Rp)	rupiah	1,28 milyar	1,35 milyar	2 milyar	3,18 milyar	2,58 milyar
6	Total PAD (Rp)	Rupiah	113,9 milyar	138,7 milyar	132,2 milyar	176,2 milyar	221 milyar
7	PAD Sektor Pariwisata	Persen	1,12	0,98	1,57	1,81	1,17

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2021

## 23. Pertanian

Sektor pertanian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2015, pertanian masih menjadi mata pencaharian utama penduduk Kota Metro. Namun, seiring dengan perkembangan sebuah kota, mata pencaharian penduduk beralih ke sektor jasa dan hal ini sangat lumrah. Namun demikian, Pemerintah Kota Metro

berkomitmen untuk menjaga sektor pertanian melalui penetapan LP2B sebagai salah satu sektor pilihan dalam urusan pemerintah dengan pertimbangan lahan yang subur. Berikut disajikan dalam tabel capaian kinerja bidang pertanian di Kota Metro tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

**Tabel 2.46**  
**Capaian Indikator Bidang Pertanian Kota Metro Tahun 2016-2020**

NO	INDKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n	Ton	35852,95	25458,20	29468	27212,72	31.489,51
2	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Thn n	Ton	35852,95	25458,20	29468	27212,72	31.489,51
3	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	Ha	2.984	2.984	2.984	2.984	4.948
4	Produktivitas tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	Kw/Ha	55,01	51,4	56,47	58,45	58,90
5	Jumlah kelompok tani	Kelompok	279	279	269	276	296
6	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	Kelompok	50	53	52	59	287
7	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	5,86	5,64	5,6	-	
8	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	45,49	46,2	46,23	-	
9	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	2,67	2,67	2,6	-	
5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persen	1,84	1,72	1,89	1,96	0,77
6.	Cakupan bina kelompok petani	Persen	17,92	19,00	19,33	21,38	97

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data DKP3, 2021

Dari tabel di atas digambarkan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Metro, meskipun hanya sedikit. Tahun 2018 tercatat kontribusi sektor pertanian sebesar 5,6% menurun sebesar 0,04% dari tahun 2017. Namun, produktivitas bahan pangan terus mengalami kenaikan dan begitu pula dengan jumlah kelompok tani. Adapun tahun 2018 jumlah kelompok petani mengalami penurunan disebabkan terjadinya pembubaran kelompok akibat adanya kelompok petani yang tingkat ketergantungannya terhadap bantuan pemerintah sangat besar.

#### 24. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi di Kota Metro, meskipun perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat belum berorientasi pada ekspor dan impor. Tercatat ada 4 pasar tradisional yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kota Metro. Keempat pasar tersebut berlokasi di Kecamatan Metro Pusat, Metro Utara, Metro Selatan dan Metro Timur. Setiap tahunnya Pemerintah Kota Metro melakukan peremajaan terhadap 4 pasar tersebut untuk menciptakan pasar yang bersih dan nyaman. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator bidang perdagangan tahun 2016-2020 di Kota Metro.

**Tabel 2.47**  
**Capaian Indikator Bidang Perdagangan Kota Metro Tahun 2016-2020**

NO.	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai ekspor		-	-	-	-	-
2	Nilai impor		-	-	-	-	-
3	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok	1273	1373	1198	1296	1333
4	Jumlah kelompok pedagang/ usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda	kelompok	0	0	0	0	0

Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Perdagangan, 2021



## 25. Perindustrian

Industri yang berkembang di Kota Metro adalah industri kecil dan menengah dengan skala distribusi untuk wilayah Kota Metro dan Provinsi Lampung. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, jumlah kelompok pengrajin setiap tahunnya meningkat dari tahun 2016-2020. Begitu pula dengan jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan dari pemerintah. Adapun bentuk binaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian adalah pembinaan untuk pengemasan, pembinaan produk si dan pemasaran. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator urusan perindustrian di Kota Metro Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.48**  
**Capaian Indikator Bidang Perindustrian Kota Metro Tahun 2016-2020**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pengrajin	Kelompok	22	40	47	71	85
2	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan Pemda/OPD	Kelompok	8	36	39	54	35

*Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, 2020*

## 26. Urusan Penunjang

Dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan, selama lima tahun terakhir kinerja Pemerintah Kota Metro terbilang cukup baik dengan melihat capaian indicator di bidang pelayanan publik, keuangan, dan perencanaan. Lima tahun berturut-turt, Pemerintah Kota Metro mampu mendapatkan penilaian WTP dari BPK atas kinerja pengelolaan keuangan. Selama 4 tahun berturut-turut pula, Pemerintah Kota Metro mampu meraih penghargaan Katagori Kota untuk perencanaan terbaik. Tidak hanya itu, di sector pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro mampu meraih penilaian Pelayanan Prima oleh Menpan-RB. Berikut disajikan dalam tabel capaian indicator urusan penunjang pemerintahan

**Tabel 2.49**  
**Capaian Indikator Urusan Penunjang**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP	Angka	51,03	60,18	62,04	65,04	Belum dinilai
3	Penghargaan Menpan RB untuk Pelayanan Publik						
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat	-	Sangat Baik	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Belum dinilai
	DPMPSTP	Predikat	-	Sangat Baik	Baik	Baik	Belum dinilai
	RSUD. A. Yani	Predikat	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Belum dinilai

*Sumber : Olah Data Bappeda dari Data Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, 2020*

Tabel 2.50

**Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

No.	Urusan	Satuan	Tahun					Stand ar	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>									
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,9	5,66	5,69	5,61	-1,79	6,23	Belum Tercapai (<)
2	PDRB Per Kapita	Juta Rp	499783 0,93	5481684, 05	5892670,42	6365416,16	6297945,89	63979 45,89	Melampaui (>)
3	Persentase Penduduk Miskin	%	10,15	9,89	9,14	8,68	8,47	7,8	Melampaui (>)
4	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,45	75,87	76,22	76,77	77,19	76	Melampaui (>)
5	Inflasi	%	2,92	2,32	1,64	2,97	2,53	4	Melampaui (>)
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	N/A	4,64	5,79	5,11	5,40	4	Belum Tercapai (<)
7	Angka Harapan Hidup	%	71,05	71,13	71,29	71,55	71,63	71,16	Melampaui (>)
8	Harapan Lama Sekolah	%	14,27	14,28	14,29	14,34	14,47	14,31	Melampaui (>)
9	Rata-rata Lama Sekolah	%	10,56	10,57	10,61	10,64	10,96	10,56	Melampaui (>)
<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>									
1	Angka Partisipasi Kasar siswa SD/MI :	Angka	89,91	104,25	108,37	99,36	106,36	100	Melampaui (>)
2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs :	Angka	95,88	93,88	94,19	95,38	147,88	100	Melampaui (>)
3	Angka pendidikan yang ditamatkan :								
	- SD/MI	Angka	9,91	10,20	10,44	10,41	10,48	10,48	Sesuai (=)
1	Angka pendidikan yang								

	ditamatkan :								
	- SMP/MTs	Angka	4,76	4,84	4,90	4,86	4,98	4,78	Melampaui (>)
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Angka	91,02	99,56	100,00	99,58	103,35	100	Melampaui (>)
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Angka	87,5	89,77	94,18	93,74	132,75	100	Melampaui (>)
4	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Angka	89,91	99,56	100	99,36	102,2	100	Melampaui (>)
5	Jumlah siswa putus sekolah SD/MI	Orang	N/A	6	9	4	4	0	Melampaui (>)
6	Jumlah siswa putus sekolah SMP/MTs	Orang	11	31	13	13	13	0	Melampaui (>)
7	Ruang Kelas SD kondisi bangunan baik	Persen	38,66	58,79	68,88	88,17	89,85	100	Belum Tercapai (<)
8	Ruang Kelas MI kondisi bangunan baik	Persen	92,41	91,67	92,94	90,80	71,6	100	Belum Tercapai (<)
9	Ruang Kelas SMP Kondisi Bangunan Baik	Persen	33	63	76	94	97,58	100	Belum Tercapai (<)
10	Ruang Kelas MTs kondisi Bangunan yang Baik	Persen	100	100	100	98	100	100	Sesuai (=)
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio	1:240	1:246	1:238	1:238	1:405	1:405	Sesuai (=)
12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar								

	- SD	Rasio	1:16	1:16	1:19	1:16	1:15	1:15	Sesuai (=)
	- MI	Rasio	1:12	1:14	1:15	1:16	1:17	1:17	Sesuai (=)
	- SMP	Rasio	1:14	1:14	1:16	1:14	1:12	1:12	Sesuai (=)
	- MTs	Rasio	1:9	1:9	1:10	1:10	1:13	1:13	Sesuai (=)
13	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Orang	58,62	60,44	62,86	64,57	18.653	18.653	Sesuai (=)
14	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Orang	100	100	100	100	123.233	123.233	Sesuai (=)
<b>URUSAN KESEHATAN</b>									
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	6,61 (18/2.723)	7,81 (21/2.689)	7,54 (20/2.654)	6,49 (17/2.620)	4,64	4,64	Sesuai (=)
2	Angka kelangsungan hidup bayi	Angka	993,4	992,2	992,5	997,3	995,36	995,36	Sesuai (=)
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	7,34 (20/2.723)	8,18 (22/2.689)	7,91 (21/2.654)	6,49 (17/2.620)	5,03	5,03	Sesuai (=)
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	4,77 (13/2.723)	7,44 (20/2.689)	6,03 (16/2.654)	4,58 (12/2.620)	4,64 (12/2.585)	4,64 (12/2.585)	Sesuai (=)
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka	36,72 (1/2.273)	111,57 (3/2.689)	113,04 (3/2.654)	114,50 (3/2.620)	0	0	Sesuai (=)
6	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	11,47	11,59	11,71	12,24	11,97	10	Melampaui (>)
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	0,20	0,25	0,25	0,22	0,21	0,11	Melampaui (>)

8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	Sesuai (=)
9	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,40	0,51	0,62	0,63	0,81	0,70	Melampaui (>)
10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,65	0,78	1,02	1,24	1,82	1,12	Melampaui (>)
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai (=)
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	98%	100%	100%	100%	89%	100%	Belum Tercapai (<)
13	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	Persen	100%	100%	100%	100%	18%	100%	Belum Tercapai (<)
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100%	100%	100%	-	-	-	
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	N/A	108,98%	105,95%	90,44%	82,67%	95%	Belum Tercapai (<)
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Angka	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	7,86%	0,42%	13,98%	18,94%	5,19%	30%	Belum Tercapai (<)
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100%	100%	100%	100%	35,8%	100%	Belum Tercapai (<)

20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Angka	143,10	155,24	233,67	308,22	208,25	350,25	Belum Tercapai (<)
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Angka	1,87	3,07	3,03	4,18	4,13	4,13	Sesuai (=)
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	34,0%	34,9%	39,9%	52,4%	35,8%	60,8%	Belum Tercapai (<)
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	93,9%	94,5%	98,2%	95,7%	96,9%	100%	Belum Tercapai (<)
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai (=)
25	Penderita diare yang ditangani	Persen	80,55%	53,95%	54,64%	47,15%	28,88%	70%	Belum Tercapai (<)
26	Angka kejadian Malaria	Angka	0,62	0,61	0	0	1,18	0	Belum Tercapai (<)
27	Tingkat kematian akibat malaria	Angka	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Persen	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0	0	0	0	0	0	Sesuai (=)
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,002%	0,007%	0,005%	0,009%	0,008%	0%	Belum Tercapai (<)

31	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	4,10%	3,80%	4,30%	4,00%	7,9%	7,9%	Sesuai (=)
32	Cakupan kunjungan bayi	Persen	99%	99%	100%	100%	87%	87%	Sesuai (=)
33	Cakupan puskesmas	Persen	220%	220%	240%	240%	220%	220%	Sesuai (=)
34	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	27%	27%	23%	23%	23%	23%	Sesuai (=)
35	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	99%	100%	100%	100%	89%	89%	Sesuai (=)
36	Cakupan pelayanan nifas	Persen	98%	100%	100%	100%	89%	89%	Sesuai (=)
37	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai (=)
38	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	74%	98%	100%	100%	67%	67%	Sesuai (=)
39	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Persen	100%	100%	100%	96%	100%	100%	Sesuai (=)
40	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	103%	100%	100%	100%	79%	100%	Belum Tercapai (<)
41	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100%	100%	100%	100%	89%	89%	



**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	0,596	0,684	0,701	0,706	0,706	0,706	Sesuai (=)
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Angka	N/A	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	Sesuai (=)
3	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	Persen	56,60%	67,23%	70,32%	72,01%	72,01%	72,01%	Sesuai (=)
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	1,89%	1,85%	1,85%	2,49%	2,49%	2,49%	Sesuai (=)
5	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	Persen	0,32%	0,35%	0,44%	0,49%	0,49%	0,49%	Sesuai (=)
6	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	12,88%	13,11%	12,35%	10,89%	10,89%	100%	Belum Tercapai (<)
7	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen	99,77%	99,77%	99,63%	99,56%	99,56%	99,56%	Sesuai (=)
9	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	321,45%	311,87%	311,87%	190,87%	190,87%	190,87%	Sesuai (=)
10	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	N/A	0,00%	0,00%	70,98%	70,98%	100%	Sesuai (=)

11	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	N/A	0,00%	0,00%	12,36%	12,36%	100%	Sesuai (=)
12	Persentase areal kawasan kumuh	Persen	84,94	92,27	87,6	9,9	9,9	5	Belum Tercapai (<)
13	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Persen	5,02%	5,07%	5,65%	6,00%	6,00%	6,00%	Sesuai (=)
14	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Angka	N/A	0,408	0,540	0,667	0,667	0,667	Sesuai (=)
15	Persentase kondisi jembatan dalam kondisi mantap	%	95,94	95,94	95,94	95,94	95,94	95,94	Sesuai (=)
<b>URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
1	Rasio Rumah Layak Huni	Angka	-	0,212	0,233	0,243	0,243	0,243	Sesuai (=)
2	Rasio Permukiman Layak Huni	Angka	0,97	0,96	0,97	1,00	1,00	1,00	Sesuai (=)
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	98,11%	98,73%	98,83%	99,39%	99,39%	99,39%	Sesuai (=)
4	Persentase Permukiman yang tertata	Persen	96,61%	96,32%	96,51%	99,61%	99,61%	99,61%	Sesuai (=)
5	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Persen	1,16%	1,26%	1,20%	0,14%	0,14%	0,14%	Sesuai (=)
6	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	N/A	24,39%	122,73%	0,00%	0,00%	0,00%	Sesuai (=)

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Jumlah petugas Linmas di Kota Metro	Orang	220	220	220	220	220	220	Sesuai (=)
2	Wilayah kerja Kota Metro (RT)	Jumlah RT	825	825	825	825	825	825	Sesuai (=)
3	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Rasio	01:04	01:04	01:04	01:04	01:04	01:04	Sesuai (=)
4	Persentase penegakan Perda	Persen	57,14	65,79	76,67	83,33	98%	100%	Belum Tercapai (<)
5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	Persen	57,1	65,8	60,5	83,3	91%	100%	Belum Tercapai (<)
6	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	Jumlah	9	24	23	28	15	15	Sesuai (=)
7	Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan WMK	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
8	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (km <sup>2</sup> )	Km <sup>2</sup>	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74	68,74	Sesuai (=)
9	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota Metro (%)	Persen	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
10	Indeks Resiko Bencana	angka	113,6	113,6	113,6	113,6	113,6	113,6	Sesuai (=)
URUSAN SOSIAL									
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	31,61%	35,86%	84,32%	66,39%	72,20%	72,20%	Sesuai (=)
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	33,70%	37,63%	86,10%	75,50%	73,80%	73,80%	Sesuai (=)

3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	31,61%	35,85%	84,32%	66,39%	72,20%	72,20%	Sesuai (=)
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	7,14%	7,14%	Sesuai (=)
5	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	Sesuai (=)
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	40,00%	55,00%	12,00%	6,67%	100%	100%	Sesuai (=)
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	5,96%	5,96%	5,96%	34,94%	25,64%	25,64%	Sesuai (=)
<b>URUSAN KETENAGAKERJAAN</b>									
1	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	91,67	100,00	75,00	75,00	100,00	100,00	Sesuai (=)

2	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	59,20	47,19	49,44	48,85	48,33	80	Belum Tercapai (<)
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	61,19	61,19	91,67	92,42	93,71	93,71	Sesuai (=)
4	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Jumlah kasus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sesuai (=)
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	68,18	69,77	55,56	73,17	66,67	66,67	Sesuai (=)
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>									
1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	32,00%	32,00%	32,00%	28%	28%	28%	Sesuai (=)
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	-	-	100,00%	100%	100%	100%	Sesuai (=)
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu	Persen	100,00%	100,00%	N/A	N/A	100%	100%	Sesuai (=)

	tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit								
4	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	50,00%	63,83%	50,72%	57,97%	78,72%	78,72%	Sesuai (=)
5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50%	50%	Sesuai (=)
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	40,00%	58,33%	50,00%	73,68%	100%	100%	Sesuai (=)
7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	40,00%	75,00%	50,00%	52,63%	100%	100%	Sesuai (=)
8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	40,00%	50,00%	50,00%	47,37%	100%	100%	Sesuai (=)
<b>URUSAN PANGAN</b>									

1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun	Ton	20.309,40	15.348,17	14.928,79	18.053,13	26.479,77	26.479,77	Sesuai (=)
2	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Kalori X BDD	Kkal	2.444,14	2.331,20	2.459,69	2.403,95	2.925,92	2.925,92	Sesuai (=)
3	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Protein X BDD	Kkal	84,66	62,08	67,45	54,75	85,98	85,98	Sesuai (=)
4	Jumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu	Sampel	812	800	804	483	420	420	Sesuai (=)
5	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu	Sampel	746	732	751	470	354	354	Sesuai (=)
<b>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</b>									
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Kota	Ada /Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Belum Tercapai (<)

2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	0	0	0	63,75	63,85	63,85	Sesuai (=)
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	78,59	82,98	80,98	81,20	81,29	81,29	Sesuai (=)
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	0	22,69	22,66	24,90	24,96	24,96	Sesuai (=)
5	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persen	0,00%	59,70%	71,43%	92,31%	96,88	96,88	Sesuai (=)
6	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai (=)
7	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	62,00%	64,00%	71,45%	71,71%	81,94%	81,94%	Sesuai (=)
8	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persen	1165,90	1205,50	1371,20	2245,00	6346,64	6346,64	Sesuai (=)



9	Persentase cakupan area pelayanan Pengelolaan Sampah	Persen	41,20%	48,10%	51,60%	55,00%	58,40%	58,40%	Sesuai (=)
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	60,00%	65,35%	71,31%	79,55%	82,66%	82,66%	Sesuai (=)
<b>URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Angka	0,95	0,98	0,99	1,04	1,04	1,04	Sesuai (=)
2	Rasio bayi berakte kelahiran	Angka	0,88	0,91	0,93	0,98	0,996	0,996	Sesuai (=)
3	Rasio pasangan berakte nikah	Angka	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Sesuai (=)
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/ Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sesuai (=)
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (%)	Persen	94,83	98,19	99,91	103,84	104%	104%	Sesuai (=)
7	Cakupan penerbitan akta kelahiran (%)	Persen	87,98	91,32	92,71	98,21	99,58%	99,58%	Sesuai (=)
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>									
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai (=)

2	jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	5,74	5,02	5,24	5,72	5,73	5,73	Sesuai (=)
3	Persentase LPM aktif	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai (=)
4	Persentase PKK aktif	Persen	N/A	75,66	76,61	86,90	98,96	100	
5	Persentase Posyandu aktif	Persen	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Melampaui (>)
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	N/A	N/A	N/A	36,36	45,45	80	Melampaui (>)
<b>URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>									
1	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,42	2,08	2,10	2,34	Penundaan pendatan	Penundaan pendatan	-
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persen	31,25%	30,30%	78,13%	78,13%	78,13%	50%	Melampaui (>)
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang	2	2	2	2	2	2	Sesuai (=)
4	Ratio Akseptor KB	Persen	71,22%	71,97%	72,60%	72,75%	101,389%	101,389%	Sesuai (=)
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	71,22%	71,97%	72,60%	72,75%	101,389%	101,389%	Sesuai (=)

6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	18	13,9	14,77	N/A	N/A	N/A	-
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0,36%	0,36%	0,39%	0,42%	N/A	N/A	-
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	Persen	16,00%	15,00%	15,00%	16,00%	100%	100%	Sesuai (=)
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	11%	29%	30%	32%	159.251%	159.251%	Sesuai (=)
10	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	12,00%	13,00%	13,00%	12,00%	184,355%	184,355%	Sesuai (=)
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	77,00%	75,00%	78,00%	78,00%	67%	67%	Sesuai (=)
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	59%	60%	55%	56%	55%	55%	Sesuai (=)
13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	51%	50%	36%	36%	34,23%	34,23%	Sesuai (=)
14	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di	Persen	480	480	480	420	100%	100%	Sesuai (=)

	bidang pengendalian penduduk								
15	Cakupan PKB/PLKB yang didayaguna kan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai (=)
16	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	62	66	68	68	67	67	Sesuai (=)
17	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai (=)
18	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persen	29%	100%	100%	100%	100%	100%	Sesuai (=)
19	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100%	100%	100%	100%	98,87%	98,87%	Sesuai (=)

20	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persen	85%	79%	89%	86%	86,11%	80%	Melampaui (>)
<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>									
1	Jumlah uji kir angkutan umum	Angka	220	203	141	0	950	950	Sesuai (=)
2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2	2	1	1	1	1	Sesuai (=)
3	Persentase layanan angkutan darat	Persen	0,27%	0,25%	0,22%	0,19%	0,50%	0,50%	Sesuai (=)
4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Persen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Sesuai (=)
5	Rasio pemasangan Rambu-rambu	Angka	0,0567	0,0000	0,0950	0,0373	0,39	0,39	Sesuai (=)
6	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Angka	0,0202	0,0227	0,0241	0,0691	0,46	0,46	Sesuai (=)
<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	0%	0%	22%	41%	41%	41%	Sesuai (=)
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	Sesuai (=)
<b>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>									
1	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	202	204	214	213	225	225	Sesuai (=)

2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	137	138	147	149	175	200	Belum Tercapai (<)
3	Jumlah Seluruh UKM Non BPR/LKM	Unit	992	992	1.047	1.014	1.167	1.167	Sesuai (=)
4	Jumlah UKM Non BPR/LKM Aktif	Unit	992	992	1.047	1.014	1.167	1.167	Sesuai (=)
5	Jumlah seluruh UMKM	Unit	7.363	7.418	8.133	8.221	14.127	14.127	Sesuai (=)
6	Jumlah usaha Mikro & Kecil	Unit	7.285	7.333	8.042	8.123	14.048	14.048	Sesuai (=)
7	Jumlah usaha Menengah	Unit	78	85	91	88	79	79	Sesuai (=)
<b>URUSAN PENANAMAN MODAL</b>									
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Usaha	157	221	243	136	245	245	Sesuai (=)
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	95,5 milyar	108,2 milyar	112,8 milyar	115,7 milyar	130,5 milyar	200 milyar	Belum Tercapai (<)
3	Jumlah seluruh PMA/PMDN	Usaha	157	221	243	136	245	245	Sesuai (=)
4	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	Orang	0	3352	5599	5673	3930	3930	Sesuai (=)
<b>URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>									
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	-	90,91	109,09	83,33	100	100	Sesuai (=)
2	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina	Persen	-	2,50	15,00	12,50	120	120	Sesuai (=)
3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	-	91,30	100,00	100,00	100	100	Sesuai (=)

4	Jumlah pelatih bersertifikat	Orang	-	-	85	85	85	85	Sesuai (=)
5	Jumlah atlet berprestasi	Orang	-	-	18 atlit	23 atlit	7 atlet	10 atlet	Belum Tercapai (<)
<b>URUSAN KEBUDAYAAN</b>									
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	-	3	3	3	0	0	Sesuai (=)
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	12	12	12	12	12	12	Sesuai (=)
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	-	2	3	5	5	5	Sesuai (=)
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	1	1	1	1	1	1	Sesuai (=)
<b>URUSAN PERPUSTAKAAN</b>									
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	Kunjungan	76.383	82.443	82.468	118.865	141.599	141.599	Melampaui (>)
2	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	63,253	67,380	66,542	94,685	112,794	100	Melampaui (>)
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	46815 eks	48068 eks	52746 eks	45580 eks	46,997 eks	46,997 eks	Sesuai (=)
4	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Persen	10,95%	10,80%	10,71%	10,57%	10,57%	10,57%	Sesuai (=)
5	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan / tahun	Kunjungan	76.383	82.443	82.468	118.865	141.599	141.599	Sesuai (=)
6	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	13.906	14.503	16.389	17.323	18.852	18.852	Sesuai (=)

7	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Orang	0	0	0	0	0	5	Belum Tercapai (<)
8	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	Orang	5	5	5	5	5	10	Belum Tercapai (<)
9	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	persen	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Belum Tercapai (<)
10	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	12,50%	24,24%	36,36%	48,48%	78,79%	78,79%	Sesuai (=)
11	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	0	33	55	55	55	55	Sesuai (=)
<b>URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>									
1	Target Daerah Produksi Ikan(Ton)	Ton	1.853,18	1.901,18	1.954,72	2.005,52	2.062,045	2.062,045	Sesuai (=)
2	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	Ton	1.894,71	1.910,04	1.955,72	1.965,41	1.869,82	1.869,82	Sesuai (=)
3	Target Daerah Konsumsi Ikan (Kg)	Kg	35,2	36,96	38,8	40,74	43,78	43,78	Sesuai (=)
4	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	Kg	30,82	30,64	34,89	35,89	37,65	37,65	Sesuai (=)
<b>URUSAN PARIWISATA</b>									
1	Kunjungan wisata	kunjungan	248.580	262.240	374.098	303.921	48.384	48.384	Sesuai (=)



2	Yang direncanakan	Kunjungan	230.000	250.000	270.000	290.000	310.000	310.000	Sesuai (=)
3	Kunjungan wisata (persen)	Persen	108	105	139	105	15,61	15,61	Sesuai (=)
4	Rata-rata kunjungan Wisata dalam 1 bulan	Kunjungan	20.715	21.853	31.175	25.327	16128	16128	Sesuai (=)
5	PAD Sektor Pariwisata (Rp)	rupiah	1,28 milyar	1,35 milyar	2 milyar	3,18 milyar	2,58 milyar	2,58 milyar	Sesuai (=)
6	PAD Sektor Pariwisata	Persen	1,12	0,98	1,57	1,81	1,17	1,17	Sesuai (=)
<b>URUSAN PERTANIAN</b>									
1	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n	Ton	35852,95	25458,20	29468	27212,72	31.489,51	31.329,51	Sesuai (=)
2	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Thn n	Ton	35852,95	25458,20	29468	27212,72	31.489,51	31.489,51	Sesuai (=)
3	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	Ha	2.984	2.984	2.984	2.984	4.948	4.478	Sesuai (=)
4	Produktivitas tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	Kw/Ha	55,01	51,4	56,47	58,45	58,90	57,95	Sesuai (=)
5	Jumlah kelompok tani	Kelompok	279	279	269	276	296	295	Sesuai (=)
6	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n	Kelompok	50	53	52	59	287	289	Sesuai (=)

7	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	5,86	5,64	5,6	-	Belum Ada Data	5,64	Belum Ada Penilaian
8	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	45,49	46,2	46,23	-	Belum Ada Data	46,2	Belum Ada Penilaian
9	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	2,67	2,67	2,6	-	Belum Ada Data	2,67	Belum Ada Penilaian
10.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persen	1,84	1,72	1,89	1,96	0,77	0,77	Sesuai (=)
11	Cakupan bina kelompok petani	Persen	17,92	19,00	19,33	21,38	97	97	Sesuai (=)
<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>									
1	Nilai ekspor		-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai impor		-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok	1273	1373	1198	1296	1333	1299	Sesuai (=)
<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>									
1	Jumlah kelompok pengrajin	Kelompok	22	40	47	71	85	84	Sesuai (=)
2	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan Pemda/OPD	Kelompok	8	36	39	54	35	35	Sesuai (=)
<b>URUSAN PENUNJANG</b>									
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai (=)
2	Nilai SAKIP	Angka	51,03	60,18	62,04	65,04	Belum dinilai	65,14	-
3	Penghargaan Menpan								

	RB untuk Pelayanan Publik								
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Predikat	-	Sangat Baik	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Pelayanan Prima	Sesuai (=)
	DPMPTSP	Predikat	-	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Belum Tercapai (<)
	RSUD. A. Yani	Predikat	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sesuai (=)

## **2.4. Aspek Daya Saing Daerah**

### **A. Pola Konsumsi Penduduk**

Pola konsumsi merupakan salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pada kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Peningkatan pendapatan mengakibatkan pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi belanja makanan dan peningkatan porsi belanja non makanan. Dengan demikian pergeseran komposisi pengeluaran dapat mengindikasikan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk. Tingkat pendidikan juga menentukan pola konsumsi. Dari hasil survei yang dilaksanakan BPS diketahui bahwa makin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga maka semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Persentase pengeluaran makanan semakin kecil sejalan dengan makin tingginya tingkat pendidikan kepala rumah tangga, hal ini terjadi pada daerah perdesaan maupun perkotaan. Data ini dapat menjelaskan bahwa tingkat pendidikan memiliki keterkaitan dengan tingkat kesejahteraan. Upaya pemerintah untuk mendongkrak tingkat pendidikan sejak dini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan di masa depan.

Pola konsumsi pada setiap jenis kelompok barang juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan di tingkat masyarakat. Tingginya pengeluaran untuk jenis ikan, daging, telur dan susu mengindikasikan kesejahteraan yang lebih baik. Besarnya pengeluaran untuk jenis kelompok barang bukan makanan juga mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan.

Pada tahun 2020, pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kota Metro masih didominasi untuk non makanan. Berdasarkan data BPS, pengeluaran untuk non makanan sebulan sebesar Rp. Rp. 801.558,- atau sebesar 54,35 persen, sedangkan untuk makanan sebesar Rp. 673.115,- atau sebesar 45,65 persen. Pola persentase ini juga sama di tahun 2019. Artinya, meskipun dalam

kondisi pandemic COVID-19, masyarakat Kota Metro masih dalam kondisi sejahtera.

Untuk melihat lebih jelas, dibawah ini disajikan pengeluaran untuk tiap jenis kelompok barang di Kota Metro tahun 2019 dan 2020.

**Tabel 2.51**  
**PENGELUARAN RATA-RATA PERKAPITA (RP) SEBULAN MENURUT**  
**KELOMPOK BARANG DI KOTA METRO TAHUN 2019 - 2020**

KELOMPOK BARANG		TAHUN	
		2019	2020
<b>A.</b>	<b>MAKANAN</b>		
	1. Padi-padian	54.293	58.728
	2. Umbi-umbian	3.145	3.874
	3. Ikan/udang/cumi/kerang		52.141
	4. Daging	48.974	28.920
	5. Telur dan susu	26.363	46.685
	6. Sayur-sayuran	42.774	52.150
	7. Kacang-kacangan	39.428	13.092
	8. Buah-buahan	12.426	39.482
	9. Minyak dan kelapa	30.305	13.890
	10. Bahan minuman	13.804	13.079
	11. Bumbu-bumbuan	9.252	10.575
	12. Konsumsi lainnya	9.031	10.110
	13. Makanan & minuman jadi	191.214	248.375
	14. Rokok	74.227	82.015
	<b>TOTAL MAKANAN</b>	<b>567.378</b>	<b>673.115</b>
<b>B.</b>	<b>BUKAN MAKANAN</b>		
	1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	331.578	333.283
	2. Aneka barang dan jasa	243.944	222.312
	3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	47.081	58.854
	4. Barang tahan lama	94.336	100.230
	5. Pajak, pungutan dan asuransi	55.151	55.994
	6. Keperluan pesta dan upacara/kenduri	31.366	30.886
	<b>TOTAL BUKAN MAKANAN</b>	<b>803 457</b>	<b>801 558</b>
	<b>TOTAL MAKANAN + BUKAN MAKANAN</b>	<b>1.370.835</b>	<b>1.474.674</b>

Sumber : BPS Kota Metro

## **2.5. Standar Pelayanan Minimal**

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Atas dasar inilah kemudian pemerintah wajib mempedomani pencapaian SPM dalam menyusun program dan kegiatan. Berikut disajikan dalam tabel capaian SPM Kota Metro Tahun 2016-202 :

**Tabel 2.52**  
**Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan**

No	Indikator Standar Pelayanan Minimal :	Jenjang	Total	2016			2017			2018			2019			2020		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD	0	0	0	0	0	0	0	70	70	100,00						
		SMP	0	0	0	0	0	0	0	35	35	100,00						
2	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.	SD	58	53	91,40	172,45	53	91,40	172,45	17,183	698	4.062,15						
		SMP	25	23	100	333,33	23	100	333,33	11,274	399	656,29						
3	Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan	SMP	25	22	88,00	400,00	22	88,00	400,00	35	26	74,29						

	minimal 1 (satu) set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.																	
4	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan setiap SMP dan MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	SD	58	51	88,00	172,5 5	51	88,00	172,5 5	70	20	28,57						
		SMP	25	23	92,00	400	23	92,00	400	35	26	104,0 0						
5	Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.	SD	58	58	100	172,4 1	58	100	172,4 1	7,00 0	1,168	16,69						
6	Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran	SMP	25	25	100	400	25	100	400	25	100	62,88						
	Di setiap SD dan MI	SD	58	45	81,10	180,2	49	84,50	172,4	49	84,50	172,4						



7	tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.				2			4			4							
8	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.	SMP	25	25	100	400	25	100	400	25	100	400	450	412	91,56			
9	Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.	SMP	25	25	100	400	25	100	400	25	100	400	450	432	96,00			
10	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah	SD	58	58	100	172,41	58	100	172,41	30	37	123,33						

	memiliki sertifikat pendidik.																	
11	Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.	SMP	25	25	100	400	25	100	400	15	17	113,33						
12	Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.		27	27	100	370,37	27	100	370,37	4	4	100,00						
13	Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.		2	2	100	5.000	2	100	5.000	1	1	100,00						
14	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi	SD	58	25	100	400	25	100	400									
			25	25	100	400	25	100	400	50	19	38,00						

	dan pembinaan.	SMP																
15	Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.	SD	25	20	80,00	400	20,	80,00	400	0	0							
16	Setiap SMP dan MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap peserta didik.	SMP	58	58	100	172,4 1	58	100	172,4 1	0	2							
17	Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	SD	58	50	86,20	172,4	50	86,20	172,4	0	0							
		SMP	25	25	100	400	25	100	400	0	0							
18	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan,		23	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0						

	termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan.	SD																
		SMP	57	25	43,86	175,4 4	25	43,86	175,4 4	2054	746	36,32						
19	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut:	SD																
	Kelas 1-2 : 8 Jam per minggu		58	86,2 0	172,4	50	86,2 0	172,4										
	Kelas 3 : 24 Jam per minggu		58	77,6 0	172,44	45	77,6 0	172,44										
	Kelas 4-6 : 27 Jam per minggu		58	84,5 0	172,45	49	84,5 0	172,45										
	Kelas 7-9 : 27 per minggu	SMP	25	80,0 0	400	20	80,0 0	400										
20	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai dengan peraturan yang berlaku	SD	58	58	100	172,4 1	58	100	172,4 1	70	61							
		SMP	25	25	100	400	25	100	400	35	26	74,29						
21	Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	SD	58	58	100	172,4 1	58	100	172,4 1	1168	1015	86,90						
			25	25	100	400	25	100	400	986	737	74,75						

	yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya.	SMP																
22	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD	58	58	100	172,4 1	58	100	172,4 1	1168	1015	86,90						
		SMP	25	25	100	400	25	100	400	986	737	74,74						
23	Kepala Sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali setiap semester.	SD	58	100	172,41	58	100	172,41	64	55	85,94	58						
		SMP	25	100	400	25	100	400	30	23	76,67	25						
24	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil belajar.	SD	0	0	0	-	0	0	-	698	698	100,0 0						
		SMP	25	25	100	400	25	100	400	417	417	100,0 0						
25	Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir (US/UN)	SD	58	58	100	172,41	58	100	172,4 1	64	64	100						
		SMP	25	25	100	400	25	100	400	30	30	100						
26	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	SD	58	58	100	172,41	58	100	172,4 1	0	0	-						
		SMP	25	22	88,00	400	22	88,00	400	0	0	-						

27	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)											25.479	26.599	104,40	26.211	25.974	99,10
28	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan											1.346	1.346		1.736	1.736	100,00
29	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)											6.003	6.003	100	5.596	5.596	100

**Tabel 2.53**  
**Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan**

No	Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020				
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
<b>I</b>	<b>Pelayanan kesehatan dasar</b>																	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				2958	2958	100	2.919	2.919	100	2.882	2.882	100	2.844	2.622	92		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				2823	2823	100	2.787	2.787	100	2.751	2.751	100	2.714	2.421	89		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				2689	2689	100	2.704	2.704	100	2.620	2.620	100	2.649	2.358	89		
4	Pelayanan Kesehatan Balita				13458	13458	100	13.320	13.320	100	13.183	13.183	100	13.036	8.713	67		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				2937	2937	100	56.708	56.708	100	14.389	17.105	100	31.487	24.686	78		
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				11384	11384	100	115.505	115.505	100	125640	113.724	90,52	112.981	41.053	36		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				12681	12681	100	13.291	13.291	100	13.960	13.960	100	14.652	12.675	82		

8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi				21744	21744	100	22.762	22.762	100	16.321	15.575	95,43	16.579	23.045	139
9	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Militus				1423	1423	100	7.633	7.633	100	3.807	3.242	84,32	3.867	9.420	244
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				1141	1141	100	191	191	100	308	310	100,6	340	353	104
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB				230	230	100	357	357	100	2.525	2.525	100	2.059	1.943	94
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV				260	260	100	3.113	3.113	100	3.113	2.306	74,08	2.505	2.790	11
13	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	2995	2276	75,99												
14	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	599	515	85,98												
15	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	2859	2173	76,01												
16	Cakupan pelayanan nifas	2859	2170	75,90												
17	Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani	552	261	47,28												
18	Cakupan kunjungan bayi	2762	2131	77,15												
19	Cakupan desa /kelurahan universal child immunization (UCI)	22	19	86,36												
20	Cakupan pelayanan anak balita	10902	7580	40,10												
21	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan	297	297	100												
22	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	0	0	-												
23	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	3178	3178	100												
24	Cakupan peserta KB aktif	22501	18403	81,79												
25	<b>Cakupan penemuan dan penanganan penderit penyakit</b>															
A	Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	41427	0	1/10000												

B	Penemuan penderita pneumonia balita	343	215	62,68												
C	Penemuan pasien baru TB BTA positif	257	69	26,85												
D	Penderita DBD yang ditangani	192	204	106												
E	Penemuan penderita diare	2868	1656	57,74												
26	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	146076	91228	62,5												
<b>II Pelayanan kesehatan rujukan</b>																
27	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	14596	14596	102,2												
28	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota	7	7	100												
<b>III Penyelidikan</b>																
29	Cakupan desa /kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	22	0	100												
<b>IV Promosi</b>																
30	Cakupan desa siaga aktif	22	22	100												

**Tabel. 2.54**  
**Target dan Realisasi SPM**  
**Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No.	Indikator	2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari										152	152	100			
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik										1.000	1.400	140			
3	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	59,71	58,96	98,74	63	61	96,82	100	95,3	95,3						



4	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	120,00	120,00	100	120,00	120,00	100	50	43	86						
5	Persentase tingkat kondisi jalan kota baik dan sedang							50	50	100						
6	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	97,60	97,60	100	99,20	99	99,79	50	37	74						
7	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman							100	80,4	80,4						
8	Persentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai							30	30	100						
9	Persentase pengurangan sampah di perkotaan							10	20	200						
10	Persentase pengangkutan sampah							70	70	100						
11	Persentase pengoperasian TPA							70	70	100						
12	Persentase penduduk yang terlayani system jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun							50	34	68						
13	Persentase jumlah Izin Mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan							25	30	120						
14	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan							10	6,4	64						
15	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kota pada SIPJAK							60	18	81,82						
16	Persentase tersedianya layanan IUJK dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap							100	100	100						

17	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital							13	11	84,62						
18	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan							25	35	71,43						
19	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	100	100	100	100	100	100									
20	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	58,62	58,62	100	63	63	100									
21	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	58,62	58,62	100	64	64	100									
22	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	58,62	58,62	100	63	63	100									
23	Tersedianya akses air minum yang aman melalui system penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaanterlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	Cluster pelayan : sangat buruk = 40, buruk = 50, sedang = 70, baik = 80, sangat baik = 100	60,13		65,13	61	93,65									

**Tabel 2.55**  
**Target dan Realisasi SPM**  
**Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

No.	Indikator	2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni										100	0	0	250 kk	250 kk	100
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni										95	94	98,94	20 kk	0	0
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	94	93,13	99,07	95	94	98,94	75	75	100						
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	68	67	98,52	67,50	67,17	99,51	30	50	166,66						
5	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di-dukung prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	91	90,91	99,90	95	95	100	60	53	88,33						

**Tabel 2.56**  
**Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Sosial**

No.	Indikator	2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial							30	24	80	59	59	100	68	68	100
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial							30	23	76,66	60	53	88,33	103	71	68,93
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial							30	21	70	1.107	1.107	100	1.107	680	61,42
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial							30	18	60	0	0	0	0	0	0
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota							0	0	0	20	5	25	9.373	9.373	100
6	Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota	80	75,51	94,38	80	25,24	31,55									
7	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten/kota	80	9,17	11,46	80	8,77	10,96									
8	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	80	100	125	80	100	125									
9	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota	60	60	100	60	60	100									
10	Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota	40	100	250	40	100	250									
11	Evakuasi korban bencana skala kabupaten/kota	80	0	0	80	0	0									
12	Penyelenggaraan jaminan sosial skala kab/kota	40	61,56	153,90	40	10,6	26,50									

**Tabel 2.57**  
**Target dan Realisasi SPM**  
**Bidang Urusan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat**

No	Indikator	2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100	100	100	95	95	50	73	146						
2	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	100	100	100	100	97	97	2	2	100						
3	Cakupan Rasio Petugas Linmas	100	100	100	100	100	100	280	280	100						
4	Cakupan pengamanan hari-hari besar keagamaan dan tahun baru	100	100	100	100	90	90	3	3	100						
5	Cakupan peningkatan ketrampilan regu korsik	100	100	100	100	100	100	22	22	100						
6	Cakupan pengembangan sumberdaya Aparatur kegiatan Rasa Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan	100	100	100	1000	100	100	0	0	0						
7	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0	50	50	100						
8	Cakupan Seleksi Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Tahun Anggaran 2017	0	0	0	100	100	100	0	0	0						
9	Cakupan Rasio Diklat Pelatihan Anti Huru Hara Tenaga Kontrak	0	0	0	100	97	97	0	0	0						
10	Jumlah warga negara yang										100	80	80	0	0	0

	memperoleh layanan akibat dari penegakan perda dan peraturan kepala daerah															
11	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana										650	865	133,07	110	110	100
12	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana										714	714	100	900	900	100
13	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana										4	4	100	206	206	100
14	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran										23	16	69,5 6	15	15	100

## 2.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's

Integrasi SDG's dalam dokumen RPJMD merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia, khususnya di Kota Metro. Berdasarkan hasil pemetaan, hingga tahun 2019, dari total 186 indikator TPB/SDGs yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Kota Metro:

1. 63 indikator (34 persen) tercapai
2. 54 indikator (29 persen) akan tercapai
3. 38 indikator (20 persen) perlu perhatian khusus
4. 31 indikator (16 persen) tidak dapat diidentifikasi capaiannya karena data tidak tersedia.

Untuk pencapaian indikator yang perlu mendapat perhatian khusus atau masih berstatus merah perlu dilakukan upaya percepatan oleh Pemerintah bersama dengan akademisi, filantropi, pengusaha dan masyarakat dengan cara yang inovatif (tidak lagi dengan cara *business as usual*). Selanjutnya, kebijakan dan strategi yang tepat perlu dirumuskan dalam menjawab serangkaian tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Metro dengan memprioritaskan program/kegiatan yang memiliki daya ungkit besar dalam pencapaian TPB/SGs.

Selanjutnya, dalam dokumen KLHS RPJMD Kota Metro terdapat 5 TPB Prioritas yang dianalisis lebih lanjut untuk alternative skenario dan rekomendasinya, yaitu TPB 12 (Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab); TPB 15 (Ekosistem Daratan); TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak); TPB 11 (Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan); dan TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Berikut disajikan dalam tabel capaian SDG's 2016-2019.

Tabel 2.58 Evaluasi Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Metro Tahun 2019

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional</b>											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Susenas BPS	%	10,29	8,32	10,15	9,89	9,14	8,68	Lintas Sektor (Bappeda)	▶
<b>Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan</b>											
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPJS Kesehatan	%	63,02	85,00	65,46	71,43	80,99	82,69	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial	▶
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan	%	39,60	95,00	41,27	61,19	91,67	92,42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	▶
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinas Sosial	%	13	25	13	13	13	21	Dinas Sosial	▶
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	1.936	Berdasarkan kuota	2.606	2.585	4.896	4.585	Dinas Sosial	●




Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro</b>											
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	%	100	100	98	100	100	100	Dinas Kesehatan	●
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	111,2	100	107,7	110,1	104,10	104,80	Dinas Kesehatan	●
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	SDKI BKKBN BPS	%	N/A	72,00	71,22	71,97	72,60	72,75	Dinas PP PA PP dan KB	●
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Kesehatan	%	89,20	95,00	89,60	88,60	94,50	93,60	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	▶
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (sumber air minum terlindungi)	Susenas BPS	%	N/A	Meningkat	91,07	91,67	52,5	75,38 (40%)	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (jarak pembuangan akhir tinja minimal 10 m)	Susenas BPS	%	N/A	Meningkat	82,54	67,76 (total) 79,17 (40%)	52,5	82,54	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	




Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Kesehatan	%	93,71	95,00	94,98	93,84	96,51	100,00		●
	Persentase rumah tangga dengan kloset leher angsa	Susenas BPS	%	N/A	Meningkat	99,05	100,00	99,29	100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan	
	Persentase rumah tangga dengan tangki septik/ SPAL/ IPAL	Susenas BPS	%	N/A	Meningkat	93,65	94,11	98,26	89,32 (total) 84,69 (40%)		
1.4.1.(f)	Persentase luas wilayah kumuh perkotaan.	Bappeda	%	1,24	Menurun				0,13		▶
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Susenas BPS	%	91,02	94,78	91,02	99,56	100,00	99,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Susenas BPS	%	87,50	82,02	87,50	89,77	94,18	93,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Disdukcapil	%	84,03	77,40	84,43	89,33	95,42	98,48	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	●
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS, Dinas Sosial	%	100,00	100,00	100,00	99,75	100,00	100,00	Dinas Sosial	●

**1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	korban/100.000	18	Menurun	21	19	18	2	BPBD	●
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	kec	5	5	5	5	5	5	BPBD	●
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	BPBD, Dinas Sosial	jiwa	0 (tidak ada bencana sosial)	0 (tidak ada bencana sosial)	0 (tidak ada bencana sosial)	0 (tidak ada bencana sosial)	0 (tidak ada bencana sosial)	0 (tidak ada bencana sosial)	BPBD, Dinas Sosial	●
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	BPBD, Dinas Sosial	jiwa	0 (tidak ada bencana sosial)	0 (tidak ada bencana sosial)	0 (tidak ada bencana sosial)	0 (tidak ada bencana sosial)	0 (tidak ada bencana sosial)	0 (tidak ada bencana sosial)	BPBD, Dinas Sosial	●
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rp (juta)	180	Menurun	94.000.000	985.000.000	3.395.000	1,697	BPBD	●
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	dokumen	Belum ada	Ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	BPBD	▼
<b>1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.</b>											
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Bappeda	%		Meningkat				69	Bappeda	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.										
	- Pendidikan	Bappeda	%	33,30	20,00	33,22	27,02	22,28	20,13	Bappeda	
	- Kesehatan	Bappeda	%	20,00	10,00	23,00	25,00	23,00	32,00	Bappeda	

Keterangan:

-  = Tercapai (*achieved*)
-  = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
-  = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)

## Tujuan 2. Tanpa Kelaparan




Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</b>											
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernutrition</i> )	Susenas BPS, Riskesdas	%	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
2.1.1.(a)	Prevalensi Kekurangan Gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita	Dinas Kesehatan, Riskesdas	%	7,02	17,00	17,00	18,20	11,13	10,18	Dinas Kesehatan	●
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan pangan.	Susenas BPS, Riskesdas	%	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari.	Susenas BPS, Riskesdas	%	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
<b>2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</b>											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	Riskedas, e-PPGBM, PSG,	%	6,80	27,70	19,80	26,6	17,59	12,58	Dinas Kesehatan	●
2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta.	Riskedas, e-PPGBM, PSG	%	N/A	28,00	18,9	20,40	13,91	9,17	Dinas Kesehatan	●
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Riskedas, PSG	% (wasting)	4,90	9,50	8,90	13,20	10,27	6,70	Dinas Kesehatan	▶
			% (obesitas)	2,90	menurun	3,70	3,80	6,01	4,30	Dinas Kesehatan	▶
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Riskedas, PSG	%	7,70	28,00	16,53	13,25	17,37	23,88	Dinas Kesehatan	▼
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	PSG, Dinas Kesehatan	%	49,55	50,00	65,55	63,52	64,90	79,47	Dinas Kesehatan	▶
2.2.2.(c)	i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH);	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Skor	89,10	92,50	84,40	86,00	87,30	89,00	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	▶
	(ii) tingkat konsumsi ikan per kapita	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Kg/Kapita / Tahun	27,49	54,50	30,82	30,64	34,89	35,89	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	▶

**2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya,**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Sakernas dan Data Nilai Tambah Pertanian BPS	Rupiah/tenaga kerja	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	-
<b>2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</b>											
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Ha	1567,5 Ha	Meningkat	1567,5 Ha	1567,5 Ha	1567,5 Ha	1567,5 Ha	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	▼

Keterangan:

-  = Tercapai (*achieved*)
-  = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
-  = Perubahan negattive/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)

### Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.</b>											
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	kematian per 100.000 Kelahiran Hidup	0 (0/2.888 KH)	Nasional : 306 Daerah : 75	36,72 (1/2.723 KH)	111,57 (3/2.689 KH)	113,04 (3/2.654 KH)	114,5 (3/2.620 KH)	Dinas Kesehatan	▶
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Susenas BPS	%	100	100	98	100	100	100	Dinas Kesehatan	●
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas BPS	%	100	100	98,00	100	100	100	Dinas Kesehatan	●
<b>Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.</b>											
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Kematian per 1000 Kelahiran Hidup	7,96 (23/2.888)	7,2	7,34 (20/2.723)	8,18 (22/2.689)	7,91 (21/2.654)	6,49 (17/2.620)	Dinas Kesehatan	●
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Kematian per 1000 Kelahiran Hidup	5,89 (17/2.888)	menurun	4,77 (13/2.723)	7,44 (20/2.689)	6,03 (16/2.654)	4,58 (12/2.620)	Dinas Kesehatan	●
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Kematian per 1000 Kelahiran Hidup	7,62 (22/2.888)	6,8	6,61 (18/2.723)	7,81 (21/2.689)	7,54 (20/2.654)	6,49 (17/2.620)	Dinas Kesehatan	●



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</b>											
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%	0,008	<0,5	0,003	0,007	0,004	0,012	Dinas Kesehatan	▼
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	%	159,80	344,00	143,10	155,238	233,67	308,22	Dinas Kesehatan	▼
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	API per 1000 penduduk	0	0	0,006	0,006	0	0	Dinas Kesehatan	●
3.3.5 (c)	Angka kesakitan ( <i>incidence rate</i> ) DBD per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	angka	173,45	menurun	144,96	50,93	35,72	114,69	Dinas Kesehatan	▼
<b>Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</b>											
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Riskesdas, BPS	%	N/A	5,4	23,95	26,96	-	30,88	Dinas Kesehatan	▼
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	%	9,35	23,40	11,94	11,64	21,70	21,33	Dinas Kesehatan	▼
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan Riskesdas BPS	%	1,44	15,40	2,90	3,36	3,30	3,25	Dinas Kesehatan	▼
3.4.2*	Angka kematian ( <i>insidence rate</i> ) akibat bunuh diri.	Sistem Registrasi Sampel	Kematian per 100.000 penduduk	0	menurun	0	0	0	0	Dinas Kesehatan, Kepolisian	●
3.4.2.(a)	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	puskesmas	11	11	11	11	12	12	Dinas Kesehatan	●

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.</b>											
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	BNN	orang	N/A	menurun	N/A	N/A	13	21	Dinas Kesehatan, BNN	▼
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	BNN	orang	N/A	meningkat	N/A	N/A	N/A	10	BNN	▶
3.5.1 (d)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti dan di dalam panti (IPWL) sesuai standar pelayanan.	Dinas Sosial	Orang (Di Luar Panti)	0	meningkat	0	0	0	0	BNN, Dinas Sosial	▼
			Orang (Di dalam Panti)	0		0	0	0	0	BNN, Dinas Sosial	
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	BNN	lembaga	0	meningkat	0	0	0	1	BNN, Dinas Sosial	▶
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNN (angka nasional)	%	2,2	menurun	-	1,77	-	1,80	BNN	▼
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Susenas BPS	liter/kapita	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	BNN	
<b>3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</b>											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	SDKI, Survey Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP)	%	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PP PA PP dan KB	
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Statistik Rutin BKKBN	%	72,27	70,00	71,22	71,97	72,60	72,75	Dinas PP PA PP dan KB	●
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Statistik Rutin BKKBN	%	29,21	31,00	11,11	29,41	30,4	31,85	Dinas PP PA PP dan KB	●
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR).	SUSENAS BPS, BKKBN	Kelahiran per 1000 perempuan 15-19 tahun	14	38	10	11	14,77	14,77 (2018)	Dinas PP PA PP dan KB	▼
3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR).	SUSENAS BPS, BKKBN	Jumlah anak per WUS (15-49 tahun)	2,16	2,28	2,42	2,08	2,10	2,34	Dinas PP PA PP dan KB	▼
<b>Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</b>											
3.8.1.(a)	<b>Unmet need</b> pelayanan kesehatan.	Susenas BPS	%	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	BPJS Kesehatan	%	630,18	850,00	654,56	714,34	809,88	826,90	BPJS Kesehatan	▶
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPJS Kesehatan	%	63,02	85,00	65,46	71,43	80,99	82,69	Dinas Kesehatan	▶
<b>3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.</b>											
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Sistem Registrasi Sampel	%	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kesehatan	
<b>3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.</b>											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Susenas BPS	%	N/A	menurun	23,95	26,96	-	30,88	Dinas Kesehatan	▼
<b>Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health</i>, yang menegaskan hak negara and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.</b>											
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	●
<b>Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.</b>											
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										▶

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
	Kepadatan dan distribusi dokter spesialis	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan	dokter spesialis per 1.000 penduduk	0,43	0,11	0,49	0,43	0,49	0,53	Dinas Kesehatan	▶
	Kepadatan dan distribusi dokter umum	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan	dokter umum per 1.000 penduduk	0,52	0,45	0,47	0,43	0,51	0,63	Dinas Kesehatan	▶
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan	dokter gigi per 1.000 penduduk	0,10	0,13	0,08	0,06	0,06	0,07	Dinas Kesehatan	▶
	Kepadatan dan distribusi perawat	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan	perawat per 1.000 penduduk	4,72	1,80	4,31	2,80	2,85	5,05	Dinas Kesehatan	▶
	Kepadatan dan distribusi perawat gigi	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan	perawat gigi per 1.000 penduduk	0,06	0,18	0,06	0,05	0,05	0,07	Dinas Kesehatan	▼

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
	Kepadatan dan distribusi bidan	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan	bidan per 1.000 penduduk)	1,36	1,20	1,19	1,24	1,29	1,68	Dinas Kesehatan	▶
	Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan	tenaga gizi per 1.000 penduduk	0,16	0,14	0,18	0,15	0,16	0,18	Dinas Kesehatan	▶
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan	tenaga kesehatan lingkungan per 1.000 penduduk	0,18	0,18	0,14	0,15	0,21	0,21	Dinas Kesehatan	▶
	Kepadatan dan distribusi tenaga keterampilan fisik	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan	tenaga keterampilan fisik per 1.000 penduduk	0,10	0,05	0,07	0,06	0,06	0,11	Dinas Kesehatan	▶
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	Sistem Registrasi Tenaga Kesehatan, Dinas Kesehatan	tenaga kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	0,09	0,18	0,09	0,04	0,05	0,07	Dinas Kesehatan	▼

Keterangan:



= Tercapai (*achieved*)



= Akan tercapai/membaik (*positive change*)



= Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)

N/A

= *Not Available* (Tidak tersedia)

Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<p><b>Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</b></p>											
4.1.1*	<p><b>Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.</b></p>										▶
	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	90	meningkat	90	90	90	90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) pada kelas 4, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) matematika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	90	meningkat	90	90	90	90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD kelas 6, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100	meningkat	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SD kelas 6, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) matematika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	90	meningkat	90	90	90	90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) tingkat akhir SMP/kelas 9, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (bahasa Indonesia)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	100	meningkat	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9, yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) matematika	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	95	meningkat	95	95	95	95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	71,93	84,20	88,33	88,52	95,16	96,77	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	84	88,00	84	84,62	85,18	88,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Susenas BPS	persen	101,23	114,09	106,58	104,25	108,37	99,36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▼
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Susenas BPS	persen	118,84	118,84	101,78	93,88	94,19	95,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Susenas BPS	tahun	10,55	10,69	10,56	10,57	10,61	10,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	●
<b>Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</b>											
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	81,65	88,00	88,26	92,97	72,20	72,28	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▼
<b>Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan</b>											
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas BPS	% remaja (15-24)	44,54	62,00	60,60	60,90	61,75	59,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
			% dewasa (15-59)	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</b>											
4.5.1*#	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.										
	Rasio APM SD/MI/ sederajat	Susenas BPS	%	91,02	100,00	91,02	99,56	100,00	99,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
	Rasio APM SMP/MTs/ sederajat	Susenas BPS	%	87,50	94,00	87,50	89,77	94,18	93,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
<b>Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</b>											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Susenas BPS	%	N/A	meningkat	99,14	97,69	99,12	98,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Susenas BPS	% (umur 15-24 tahun)	N/A	meningkat	N/A	N/A	100	99,47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	▶
		Susenas BPS	% (umur 15-59 tahun)	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
<b>4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.</b>											
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))										




Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik dan Statistik Pendidikan Disdik	%	SD :100 SMP : 100 SMA : 100 SMK : 100 SLB : 100	100	SD : 100 SMP : 100 SMA : 100 SMK : 100 SLB : 100	SD :100 SMP: 100	SD :100 SMP: 100	SD :100 SMP: 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik dan Statistik Pendidikan Disdik	%	SD : 50 SMP : 50 SMA : 70 SMK : 80 SLB : 50	70	SD : 60 SMP : 100 SMA : 100 SMK : 100 SLB : 60	SD : 70 SMP: 100	SD : 80 SMP: 100	SD : 90 SMP : 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dapodik dan Statistik Pendidikan Disdik	%	SD : 100 SMP : 100 SMA : 100 SMK : 100 SLB : 100	100	SD : 100 SMP : 100 SMA : 100 SMK : 100 SLB: 100	SD : 100 SMP : 100	SD :100 SMP : 100	SD : 100 SMP : 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	SD : 50 SMP : 50 SMA : 80 SMK : 50 SLB : 50	80	SD : 60 SMP : 60 SMA : 90 SMK : 60 SLB : 55	SD : 70 SMP : 75	SD : 75 SMP : 85	SD : 80 SMP : 90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	SD : 100 SMP : 100 SMA : 100 SMK : 100 SLB : 100	100	SD :100 SMP : 100 SMA : 100 SMK : 100 SLB : 100	SD :100 SMP : 100	SD : 100 SMP : 100	SD : 100 SMP : 100	SD :100 SMP: 100 SMA: 100 SMK: 100 SLB: 100	
	Proporsi sekolah dengan akses ke:(f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	SD : 50 SMP : 50 SMA : 80 SMK : 50 SLB : 50	85	SD : 60 SMP : 60 SMA : 90 SMK : 60 SLB : 55	SD : 70 SMP :75	SD : 75 SMP : 85	SD : 80 SMP : 90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	SD : 100 SMP : 100 SMA : 100 SMK : 100 SLB : 100	90	SD : 100 SMP : 100 SMA : 100 SMK : 100 SLB : 100	SD : 100 SMP : 100	SD : 100 SMP : 100	SD :100 SMP : 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</b>											
4.c.1*	Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang )bersertifikat pendidik.	Dapodik, Statistik Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	46,66	70,00	50,28	50,03	61,86	54,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
	Persentase guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik.	Dapodik, Statistik Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	52,00	60,00	53,00	54,00	55,00	56,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
	Persentase guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik.	Dapodik, Statistik Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	34,65	50,00	39,40	40,76	52,66	43,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
	Persentase guru SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik.	Dapodik, Statistik Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	46,96	70,00	54,48	55,33	77,92	64,86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
	Persentase guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik.	Dapodik, Statistik Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	53,05	-	54,24	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase guru SMK yang bersertifikat pendidik.	Dapodik, Statistik Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	7,16	-	30,83				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
	Persentase guru TK/TKLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dapodik, Statistik Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	55,27	90,00	74,74	86,00	85,74	85,91	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
	Persentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dapodik, Statistik Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	76,77	90,00	82,61	84,00	96,13	88,08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
	Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dapodik, Statistik Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	74,29	90,00	84,33	90,90	93,02	86,53	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
	Persentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dapodik, Statistik Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	92,18	-	92,54	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶
	Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4	Dapodik, Statistik Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	%	82,63	-	86,84	-	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	▶

Keterangan:

-  = Tercapai (*achieved*)
-  = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
-  = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)

**Tujuan 5. Kestaraan Gender**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</b>											
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas PP PA PP KB, Bagian Hukum	kebijakan	0	meningkat	2	3	6	5	Dinas PP PA PP KB,	●
<b>Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</b>											
5.2.1*#	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas PP PA PP KB	kasus	-	menurun	0	0	2	2	Dinas PP PA PP KB	▼
5.2.1.(a)#	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas PP PA PP KB	kasus	-	menurun	0	4	2	5	Dinas PP PA PP KB	▼
5.2.2*#	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	SPHPN BPS, Dinas PP PA PP KB	kasus	-	menurun	0	2	0	0	Dinas PP PA PP KB, POLRI	▼
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas PP PA PP KB	%	0	meningkat	0	0	100	100	Dinas PP PA PP KB	●
<b>Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan</b>											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Susenas BPS	% (sebelum umur 15 tahun)	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PP PA PP KB	
			% (sebelum umur 18 tahun)	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PP PA PP KB	
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	SDKI, SUPAS BPS BKKBN	tahun	N/A	21	21	21	23	21	Dinas PP PA PP KB	●
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate /ASFR</i> ).	SDKI, SUPAS BPS BKKBN	per 1000	13,9	menurun	18/1000	13,9/1000	14,77/1000 (SUSENAS)	14,77 (2018)	Dinas PP PA PP KB	▼
<b>Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</b>											
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Sekretariat DPRD Kota Metro	%	32	meningkat	32	32	32	28	Sekretariat DPRD, Dinas PP PA PP KB	▶
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial. (Ess. II)	BKPSDM Kota Metro	%	29,63	meningkat	33,33	31,25	25,00	22,58	BKPSDM	▼
<b>Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the <i>International Conference on Population and Development</i> and the <i>Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.</b>											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	SDKI, SUPAS BPS BKKBN	%	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PP PA PP KB, Dinas Kesehatan	
5.6.1.(a)	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	SUSENAS, BKKBN	%	N/A	menurun	16,0	15,0	17,4	18,7	Dinas PP PA PP KB Dinas Kesehatan	▶
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	SDKI, BKKBN, BPS		N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PP PA PP KB Dinas Kesehatan	
<b>Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.</b>											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Susenas BPS	%	N/A	meningkat	71,47	95,71	82,96	88,07	Dinas Kominfo	●

Keterangan :

- = Tercapai (*achieved*)
- ▶ = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
- ▼ = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)



**Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	(2019)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(7)	(7)	(8)
<b>Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua</b>											
6.1.1(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.										
	- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (sumber air minum terlindungi)	Susenas BPS	%	N/A	100,00	91,07	91,67	52,5	75,38 (40%)	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	▶
	- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (jarak pembuangan akhir tinja minimal 10 m)	Susenas BPS	%	N/A	100,00	82,54	67,76 (total) 79,17 (40%)	52,5	82,54	Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	▶
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	m <sup>3</sup> /detik	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Kesehatan	%	89,22	100,00	89,64	88,59	94,47	93,62	Dinas Kesehatan	▶
<b>Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan</b>											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	(2019)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(7)	(7)	(8)
6.2.1(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Kesehatan	%	68,30	90,00	98,09	86,79	95,51	91,10	Dinas Kesehatan	●
6.2.1(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Kesehatan	%	93,71	100,00	94,98	93,84	96,51	100,00	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	▶
	Persentase rumah tangga dengan kloset leher angsa	Susenas BPS	%	N/A	100,00	99,05	100,00	99,29	100,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,	▶
	Persentase rumah tangga dengan tangki septik/ SPAL/ IPAL	Susenas BPS	%	N/A	100,00	93,65	94,11	98,26	89.32 (total) 84.69 (40%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan	
6.2.1(c)	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dinas Kesehatan	kelurahan	22	22	22	22	22	22	Dinas Kesehatan	●
6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Dinas Kesehatan	kelurahan	4	22	6	8	15	22	Dinas Kesehatan	●
6.2.1 (e)	Jumlah <b>kelurahan</b> yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Dinas PU TR, Dinas Perkim	kelurahan	1 (IPLT Karang Rejo)	-	1 (IPLT Karang Rejo)	1 (IPLT Karang Rejo)	1 (IPLT Karang Rejo)	1 (IPLT Karang Rejo)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	●
6.2.1 (f)	Jumlah rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Dinas LH, Dinas Perkim	%		meningkat					Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	▶

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	(2019)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(7)	(7)	(8)
<b>Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global</b>											
6.3.1. (a)	Jumlah IPLT yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas PU TR, Dinas Perkim	IPLT	1 (IPLT Karang Rejo)	1	1 (IPLT Karang Rejo)	1 (IPLT Karang Rejo)	1 (IPLT Karang Rejo)	1 (IPLT Karang Rejo)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	●
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Dinas LH (setiap tahun < 3% dari jumlah rumah tangga)	%	N/A	meningkat	0,34	0,34	0,33	0,32	Dinas Lingkungan Hidup	▼
6.3.2(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku (sungai way sekampung)	Dinas LH	Indeks Kualitas Air	N/A	meningkat	N/A	N/A	N/A	sedang	Dinas Lingkungan Hidup	▶

Keterangan:

- = Tercapai (*achieved*)
- ▶ = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
- ▼ = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)

## Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Capaian				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern</b>											
7.1.1*	Rasio elektrifikasi rumah tangga	PLN	%	100	100	100	100	100	100	PLN	●
7.1.1(a)	Konsumsi Listrik Per Kapita	PLN	kWh	102	meningkat	104	103	108	128	PLN	●
	Konsumsi Listrik Per Rumah Tangga	PLN	kWh	73	meningkat	78	73	77	93	PLN	
7.1.2.(a)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS	%	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	PLN	

Keterangan:

- = Tercapai (*achieved*)
- ▶ = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
- ▼ = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)

## Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline '(2015)	Target (2015)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(7)	(7)	(8)
<b>Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang</b>											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB	BPS	persen	5,87	6,04	5,90	5,66	5,69	5,61	Bappeda	●
8.1.1(a)	PDRB per kapita (berlaku)	BPS	Rp	28.014.597	32.964.187	31.094.770	33.653.920	35.671.430	38.022.690	Bappeda	●
8.1.1(b)	PDRB atas Harga Konstan	BPS	Rp	3.453.953.230	meningkat	3.657.866.700	3.865.010.300	4.084.824.800	4.314.154.700	Bappeda	●
<b>Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya</b>											
8.2.1 *	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun	BPS, Sakernas	%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Bappeda	
<b>Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan</b>											
8.3.1(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS, Sakernas	%	47,68	51,00	-	47,70	46,74	46,57	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	▶
8.3.1(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	%	13,28	-	-	10,68	10,38	10,09	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	▶
8.3.1(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ke layanan keuangan	Dinas Koperasi, UMK, Usaha Menengah dan Perindustrian	%	11,55	meningkat	34,46	28,25	29,52	31,15	Dinas Koperasi, UMK, Usaha Menengah dan Perindustrian	▶




Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline '(2015)	Target (2015)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(7)	(7)	(8)
<b>Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya</b>											
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	Rp	N/A		NA	2.581.382	3.041.904	2.617.139	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	●
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	BPS	%	5,12		-	4,64	5,79	5,11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	▼
8.5.2(a)	Tingkat setengah pengangguran	BPS	%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
<b>Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan</b>											
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS	%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
<b>Target 8.8. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya</b>											
8.8.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	perusahaan	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
<b>Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal</b>											
8.9.1(b)	Jumlah wisatawan nusantara	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	orang	N/A	meningkat	248.580	262.240	374.098	303.921	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	▶

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline '(2015)	Target (2015)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(7)	(7)	(8)
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	BPS (Nesparnas)	%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	
<b>Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua</b>											
8.10.1*	a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	OJK	unit	132	meningkat	144	142	139	129	Bank Indonesia	●
	b. Jumlah kantor Bank per 100.000 penduduk	OJK	unit	35	meningkat	38	38	37	37	Bank Indonesia	●
8.10.1(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	BPS	Km	Rata-rata Daerah Tertinggal: 45,02 (2011) Rata-rata Nasional: 24,92 (2011)		N/A	N/A	N/A	N/A	Bank Indonesia	

Keterangan:

- = Tercapai (*achieved*)
- ▶ = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
- ▼ = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)

**Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua</b>											
9.1.1.(a)#	Kondisi mantap jalan kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	-	meningkat	56,60	67,23	70,32	72,01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
<b>Target 9.2. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, keberkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua</b>											
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB dan perkapita.	BPS	%	-		17,03	17,02	17,00	16,92	Bappeda	
9.2.1(a)	Laju pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan non migas	BPS	%	7,57		6,46	5,95	5,82	6,46	Bappeda	
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	BPS	%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Bappeda	
<b>Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.</b>											
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	BPS	%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian	



Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Koperasi UMK, UM dan Perindustrian	%	6,70		17,39	14,10	23,21	15,96	Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian	▼
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020											
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Susenas Kor BPS	%	-		N/A	N/A	N/A	N/A	Diskominfo	
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai / memiliki telepon genggam.	Susenas Kor BPS	%	-		71,47	69,23	75,51	88,07	Diskominfo	●
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	Susenas Kor BPS	%	-		35,36	42,89	55,23	61,23	Diskominfo	●

Keterangan:

- = Tercapai (*achieved*)
- ▶ = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
- ▼ = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)

**Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline '(2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional</b>											
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS	Indeks	0,3968	0,36	0,3721	0,3273	0,3273	0,3273 (2018)	Bappeda	●
10.1.1* (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	10,29	8,32	10,15	9,89	9,14	8,68	Bappeda	▶
<b>Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.</b>											
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Susenas BPS	persen	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Sosial	
<b>Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar</b>											
10.4.1(a)	Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenaga kerjaan	%	39,60	95,00	41,27	61,19	91,67	92,42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	▶

Keterangan:




- = Tercapai (*achieved*)
- ▶ = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
- ▼ = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)

**Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh</b>											
11.1.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS, Susenas kor.	%	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
<b>Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.</b>											
11.2.1 (a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Dinas Perhubungan	%	22	meningkat	18	12	15	6	Dinas Perhubungan	▼
<b>Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan</b>											
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	korban/100.000	18	menurun	21	19	18	2	BPBD	●
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	juta Rupiah	180	menurun	94.000.000	985.000.000	3.395.000	1,697	BPBD	●
<b>Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota</b>											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	%	39,80	80,00	65,00	65,35	71,31	73,16	Dinas Lingkungan Hidup	▼
<b>Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas</b>											
11.7.2(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Polres Metro	%	0,017	menurun	0,027	0,024	0,025	0,052	Satpol PP, Polres	▼
<b>Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan <i>the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030</i></b>											
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	Belum ada	ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	BPBD	▼

Keterangan:




-  = Tercapai (*achieved*)
-  = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
-  = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)

**Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(7)	(7)	(8)
<p><b>Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, disepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan</b></p>											
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru	Dinas Lingkungan Hidup	Usaha/ kegiatan	1 (RS.Mardi Waluyo)	ada	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	▼
12.4.2 (a)#	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan	ton	55,163	meningkat	101,208	131,709	132,269	146,528	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan	▼
<p><b>Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.</b></p>											
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	ton	N/A	meningkat	N/A	140,59	164,81	5.933,45	Dinas Lingkungan Hidup	▶
<p><b>Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.</b></p>											
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas Lingkungan Hidup	perusahaan	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup	
<p><b>Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.</b></p>											
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dinas Lingkungan Hidup	Produk Ramah Lingkungan	0	meningkat	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	▼

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(7)	(7)	(8)
<b>Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</b>											
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas Lingkungan Hidup	Fasilitas Publik	0	meningkat	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	▼

Keterangan:

-  = Tercapai (*achieved*)
-  = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
-  = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)

**Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara</b>											
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan resiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD	dokumen	belum ada	ada	belum ada	belum ada	belum ada	belum ada	BPBD	▼
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	orang	18	menurun	21	19	31	4	BPBD	●

Keterangan:

- = Tercapai (*achieved*)
- ▶ = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
- ▼ = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)

Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	(2019)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar</b>											
14.b.1*#	Jumlah nelayan yang terlindungi	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	pokdakan( orang)	N/A	meningkat	N/A	N/A	56 pokdakan (658 orang)	59 pokdakan (691 orang)	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	▶

Keterangan:

- = Tercapai (*achieved*)
- ▶ = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
- ▼ = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)



**Tujuan 15. Ekosistem Daratan**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<p><b>Target 15.1 'Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</b></p>											
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan. (RTH publik ditambah RTH privat) acuan Perwali No. 20 tahun 2013	Dinas Lingkungan Hidup	%	N/A	meningkat	N/A	N/A	N/A	11	Dinas Lingkungan Hidup	▶
<p><b>Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.</b></p>											
15.3.1 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup	Ha	0		0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	▶
<p><b>Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal</b></p>											
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi	Dinas Lingkungan Hidup	%	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup	-

Keterangan:

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi (6)				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)

- = Tercapai (*achieved*)
- ▶ = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
- ▼ = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)

**Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	(2019)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun</b>											
16.1.1 (a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Polres Metro	kasus	0	Menurun	1	0	0	0	Polres, Satpol PP	●
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Polres Metro	Kematian/ per 100,000 penduduk	0	0	0	0	0	0	Polres, Satpol PP	●
16.1.3 (a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Polres Metro	%	0,017	Menurun	0,027	0,024	0,025	0,052	Polres, Satpol PP	▼
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Polres Metro	%	88	Meningkat	72	76	74	68	Polres, Satpol PP	▼
<b>Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak</b>											
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Susenas BPS	%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PP PA PP dan KB, Polres	
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Dinas Sosial, Dinas PP PA PP KB	%	0,055	Menurun	0,069	0,055	0,005	0,028	Dinas Sosial, Dinas PP PA PP KB, Polres	▼

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	(2019)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
16.2.3.(a)#	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Dinas Sosial, Dinas PP PA PP KB	kasus	12	0	10	14	14	3	Dinas Sosial, Dinas PP PA PP KB, Polres	▼
<b>Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua</b>											
16.3.1 (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	Polres Metro	%	0,023	Menurun	0,039	0,037	0,038	0,056	Polres, Satpol PP	▶
<b>Target 16.5 Secara substansi mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya</b>											
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS (angka Nasional)	Indeks	N/A	4,0	N/A	3,71	3,66	3,7	Inspektorat	▶
<b>Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat</b>											
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BAPPEDA, BPKAD	%	94,04	Meningkat	95,79	88,06	89,31	91,24	BAPPEDA, BPKAD	●
16.6.1.(a)#	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPKAD	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	●
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Bagian Organisasi	Nilai	CC (50,20)	B	CC (51,03)	B (60,18)	B (62,04)	B (65,04)	Bagian Organisasi	●
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	UPPBJ	%	21,07	Meningkat	36,18	32,07	23,46	20,04	Bagian Pembangunan	▼

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	(2019)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan</b>											
16.7.1 (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Sekretariat DPRD	%	32	32	32	32	32	28	Sekretariat DPRD, Dinas PP PA PP KB	▶
16.7.1 (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (eselon II)	BKPSDM	%	29,63	Meningkat	33,33	31,25	25,00	22,58	BKPSDM	▶
<b>Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran</b>											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	66,05	Meningkat	66,51	67,06	76,23	84,69	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	●
16.9.1 (a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	BDT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	43,79	Meningkat	44,31	59,27	56,58	54,66	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial	●
16.9.1 (b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	72,12	85,00	92,50	99,50	99,63	99,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	●
<b>Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional</b>											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	(2019)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
16.10.2 ('c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Kominfo	%	0	ada	0	0	0	0	Dinas Kominfo	▼

Keterangan:

- = Tercapai (*achieved*)
- ▶ = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
- ▼ = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)

**Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan**

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
<b>Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya</b>											
17.1.1*	Total Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	BPPRD, BAPPEDA	%	2,38	meningkat	2,34	2,61	2,38	2,43	BPPRD	●
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	BPPRD, BAPPEDA	%	0,30	meningkat	0,30	0,29	0,34	0,39	BPPRD	●
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BPPRD, BAPPEDA	%	1,76	meningkat	1,77	1,85	2,22	2,65	BPPRD, BAPPEDA	●
<b>Target 17.6 Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Kerjasama Triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.</b>											
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	BPS, Diskominfo	%	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Diskominfo	
<b>Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi</b>											
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS, Statistik Kesra	%	35,36	meningkat	35,36	42,89	55,23	61,23	Diskominfo	●
<b>Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.</b>											

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2015)	Target (2019)	Realisasi				Instansi	Status
						2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6a)	(6b)	(6c)	(6d)	(7)	(8)
17.17.1. (a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	UPPBJ, Bagian Pemerintahan	Proyek KPBU	1 (Metro Mega Mall)	ada	-	1 (Pasar Kopindo beserta Terminal)		1 (Pertokoan Jend. Sudirman)	Dinas Perdagangan Bagian Pemerintahan	▶
17.17.1. (b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	UPPBJ, Bagian Pemerintahan	Alokasi	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Bagian Pemerintahan	▶

Keterangan:

- = Tercapai (*achieved*)
- ▶ = Akan tercapai/membaik (*positive change*)
- ▼ = Perubahan negative/memburuk/perlu perhatian khusus (*negative change*)
- N/A = *Not Available* (Tidak tersedia)



## **2.7. Capaian Kinerja RPJMD 2016-2021**

Pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang saling berkaitan dari satu period ke periode berikutnya. Target RPJMD periode 2016-2021 secara umum telah tercapai. Namun demikian untuk tahun 2020, terdapat beberapa target yang belum tercapai. Hal ini disebabkan pandemic COVID-19 yang berdampak di seluruh sector pembangunan, terutama di sector ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar -1,79 dengan target 6,23. Kondisi yang sama untuk indicator Tingkat Pengangguran Terbuka. Sedangkan untuk nilai IPM mengalami kenaikan yang konstan dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi membaik ini juga dialami indicator angka kemiskinan yang mengalami penurunan dengan angka 8,47% pada Tahun 2020.

Selanjutnya dalam menetapkan target lima tahun kedepan, aspek indicator makro mempertimbangkan kondisi tahun 2020 dan 2021, seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Untuk itu disajikan dalam tabel berikut capaian kinerja RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 :

**Tabel 2.59**  
**Evaluasi Capaian Kinerja RPJMD 2016-2020**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN CAPAIAN									
				Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020
<b>Misi Kesatu :</b>  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan	1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	1.1.1. Terwujudnya Pemerataan dan meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah SD	99,28 %	98,88%	99,64 %	99,65%	99,75 %	110,19%	100%	105,36 %	100%	99,36%
			2. Angka Partisipasi Sekolah SMP	98,16 %	96,00%	98,82 %	99,00%	99,48 %	127,43%	100%	102,90 %	100%	83,05%
			3. Angka melek huruf	98,6%	98,01%	98,7%	98,91%	98,8%	97,2%	98,90 %	98,30 %	99%	99,47%
			4. Indeks pembangunan manusia	75	75,45	75,61	75,87	75,78	76,22	75,94	76,77	76,00	77,19
			5. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia 3-6 :	1:96	1:99	1:98	1:157	1:100	1:39	1:102	1:46	1:104	1:75

									6th =6659		
									6659/ 146 = 45,61 pembu latan jd 46		
1.1.2. Meningkatnya kualitas belajar	1. Persentase kelulusan siswa :										
	- SD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,54	10,56	10,59	10,5 7	10,64	10,61	10,69	10,64	10,74	10,96
	3. Nilai rata-rata kelulusan siswa :										
	- SD	70,62	69,21	70,92	71,7 2	71,17	71,17	71,42	72,50	71,67	tidak ada UJIAN NASION

			- SMP	66,09	67,31	66,59	67,14	67,09	67,09	67,59	70,50	68,09	AL KARENA COVID
		1.1.3. Berkembangnya pendidikan inklusif	1. Jumlah sekolah berbasis inklusif dan pusat sumber	18 Sekolah	18 Sekolah	23 Sekolah	23 Sekolah	28 Sekolah	55 Sekolah	33 Sekolah	40 Sekolah	38 Sekolah	38 Sekolah
		1.1.4. Masyarakatnya minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	2. Jumlah pemustaka yang berkunjung	63.525 orang	76.383 Orang	63.752 orang	82.422 Orang	64.064 orang	82.468 orang	64.065 orang	90.288 orang	64.065 Orang	141.599 orang
		1.1.5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	109/100.000	73/100.000	90/100.000	107/100.000	80/100.000	113/100.000	75/100.000	114,5/100.000	70/100.000	0/100.000
											(3 Kasus kematian/2.620 kelahiran hidup)		(0 kasus kematian/2.585 kelahiran hidup)
			2. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	8/1.000	7,3/1.000	7,8/1.000	7,5/1.000	7,5/100	7,9/1.000	7,2/100	0/100	7/100	5,03/100
											(0 Kasus kematian/2.620 kelahiran hidup)		(13 kasus kematian/ 2.585 Kelahiran Hidup)

1.1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	1.1.5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	7,5/1000	6,42/1000	7,2/1000	7,5/1000	7/1000	7,5/1000	6,8/1000	6,5/1000	6,5/1000	4,64/1000
		4. Angka harapan hidup	71,04	71,05	71,07	71,13	71,1	71,29	71,13	71,55	71,16	71,63
	1.1.6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB	1. Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	70%	72,78%	70%	71,97%	71%	73,66%	71%	72,75%	72%	73%
		2. Angka Kelahiran Total (TFR)	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	2,01%	2,02%	2,01%	2,29%	2,01%	2,34%
		3. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 th (ASFR)	20/1000 kelahiran	18/1000 kelahiran	18/1000 kelahiran	13,9/1000 Kelahiran	15/1000 kelahiran	10/1000 kelahiran	10/1000 kelahiran	3,38/1000 kelahiran	5/1000 kelahiran	10/1000 kelahiran
	1.1.7. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Persentase penanganan kasus untuk perempuan dan anak korban kekerasan	25%	100%	40%	100%	50%	60%	60%	100%	70%	100% (10 kasus)
2. Jumlah Kelurahan layak anak		0	0	1 Kelurahan	2 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	22 kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	

	1.2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	1.2.1. Meningkatnya prestasi pemuda di seluruh bidang	1. Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	5 Lembaga	11 Lembaga	6 Lembaga	10 Lembaga	9 Lembaga	12 Lembaga	9 Lembaga	10 Lembaga	9 Lembaga	3 lembaga (dikarenakan terdapat peralihan pembinaan organisasi kepemudaan dari dibina Disporapar dialihkan ke Kesbang pol)
			2. Jumlah organisasi olahraga yang aktif	17 lembaga	18 lembaga	18 lembaga	21 lembaga	19 lembaga	23 Lembaga	20 lembaga	23 Lembaga	21 lembaga	24 lembaga (cabang olahraga yang dibina)
	1.3. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Lokal	1.3.1. Berkembangnya budaya dalam kehidupan masyarakat	1. Partisipasi publik (sanggar) dalam proses berkebudayaan	40 Sanggar	40 Sanggar	43 Sanggar	43 Sanggar	45 Sanggar	30 Sanggar	50 Sanggar	70 sanggar	53 Sanggar	1 sanggar (1 DKM)
<b>Misi Kedua :</b>	2.1. Pengembangan Wisata Keluarga	2.1.1. Meningkatnya kepariwisataan daerah	1. Jumlah wisatawan	7.800 Wisatawan	10.680 Wisatawan	8.000 Wisatawan	10.000 Wisatawan	8100 Wisatawan	374.098 Wisatawan	8300 Wisatawan	303.921 Wisatawan	8.500 Wisatawan	48.384 wisatawan

Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata	2.2. Pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dalam rangka penanggulangan kemiskinan	2.2.1. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	2. Jumlah investor pendukung pariwisata	85 investor	84 investor	90 investor	95 investor	95 investor	116 investor	100 investor	125 investor	105 investor	128 investor
			1. Persentase Koperasi aktif yang berbadan hukum di Kota Metro	60%	58%	65%	68,47%	65%	69%	70%	70%	75%	78%
			2. Pertumbuhan PDRB	6,04	5,9	5,94	5,66	6,05	5,69	6,04	5,61	6,23	-1,79
			3. Laju inflasi	3,7	2,92	4	2,32	4	1,64	4	2,97	4	2,53
			4. PDRB per kapita	27.327.844	31.095.000	29.090.490	33.635.000	30.966.827	35.671.000	32.964.187	38.023.000	35.090.377	37.150.000
	2.2.2. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan	1. % PMKS yang tertangani	5%	5,8%	10%	5%	15%	15%	20%	66%	25%	73,15%	
		2. Tingkat kemiskinan	9,82%	10,15%	9,32%	9,89%	8,82%	9,14%	8,32%	8,68%	7,82%	8,47%	
	2.2.3. Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat pengangguran terbuka	4,75%	5,12%	5%	4,64%	4,25%	5,79%	4%	5,11%	4%	5,40%	
	2.2.4. Meningkatnya ketahanan pangan dan produktivitas pertanian	1. Tingkat ketersediaan pangan pokok (beras)	58 ton	58 ton	70 ton	73,49 ton	80 ton	90 ton	90 ton	91,68 Ton	100 ton	100 ton	
		2. Skor Pola Harapan	85%	84,4%	86%	86%	87%	87%	89%	89%	90%	89%	
		3. Indeks Pertanaman di lahan sawah	200	260	204	253	210	220	215	232	220	282	

Misi Ketiga :  Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan	3.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan utilitas kota yang berwawasan lingkungan	3.1.1. Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan utilitas kota	1. % Panjang jalan dalam kondisi mantap	81%	70,97%	82%	90,56%	83%	92%	84%	96%	85%	90,88%	
			2. Jembatan dalam kondisi baik	55 unit	57 unit	56 unit	53 Unit	57 unit	57 unit	57 unit	57 unit	57 unit	57 Unit	57 unit
			3. % Drainase dalam kondisi baik	60%	80%	65%	90,56%	70%	91,56%	75%	93%	80%	91,80%	
			4. PJU dalam kondisi baik	2833 titik	2842 titik	3033 titik	3148 titik	3233 titik	3.392 titik	3433 titik	3.392 titik ( 4.078 titik PJL)	3633 titik	4089 titik	
			5. % Cakupan layanan air minum layak	91%	91%	93%	92,75%	95%	91,14%	97%	98%	100%	97,96%	
			6. % Rumah tangga pengguna listrik	97%	97%	97%	100%	97%	100%	98%	98%	100%	100%	
			7. % Cakupan layanan sanitasi layak	92%	92%	94%	75%	96%	100%	98%	98%	100%	100%	
		3.1.2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika	1. Jumlah lampu lalu lintas :											
			- ( <i>traffic light</i> )	9 unit	9 unit	10 unit	12 Unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	12 unit	13 unit	
			- ( <i>warning light</i> )	12 unit	12 unit	14 unit	2 Unit	16 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	20 unit	
			2. Peningkatan sarana dan prasarana terminal angkutan	55%	50%	65%	50%	70%	75%	75%	75%	80%	0% ( pelimpahan wewenang ke provinsi )	



		3.1.3. Terwujudnya perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	1. Persentase ruang terbuka hijau	24,5%	17,77%	25%	23,80%	26%	20%	28%	25%	30%	35%	
			2. Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,10%
		3.1.4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	1. % Penanganan sampah	72%	40,00%	76%	76,52%	78%	76%	80%	71,71%	80%	81,94%	
			2. Status pengendalian pencemaran udara	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara Tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	
			3. Status kerusakan tanah	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	
		3.1.5. Meningkatkan kualitas utilitas kota dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata	1. Jumlah taman Kota yang tertata	6 buah	5 buah	8 buah	8 buah	10 buah	20 buah	12 buah	26 buah	14 buah	14 buah	
			2. Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	1 destinasi	1 destinasi	2 destinasi	3 destinasi	3 destinasi	3 destinasi	3 destinasi	3 destinasi	3 destinasi	3 Destinasi	
		3.1.6. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana	1. % Penanganan Bencana	100%	97,10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			4.1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	4.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi	1. Kategori akuntabilitas kinerja	50,2	51,03	54,13	60,18	56	62,04	58	65,04	58
		<b>Misi keempat :</b>  <b>Mewujudkan pemerintahan Kota Metro</b>		4.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi	2. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	level 3	Level 3

yang good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik		3. Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	78,6%	80,50 %	81,45%	81%	82,20%	81,50 %	84,90 %	82%	85,46%	
		4. Persentase peningkatan kualitas dan profesionalitas sumberdaya aparatur	20%	45%	25%	60%	30%	31,52%	35%	46,1%	40%	112,87%	
	4.1.2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	1. % Usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan kerja pemerintah daerah	60%	65%	65%	65%	67%	69,63%	69%	83,66 %	72%	80,36%	
	4.1.3. Meningkatnya dan berkembangnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BELUM AUDIT
		2. Tingkat pertumbuhan realisasi PAD	5%	-11%	6%	35,63%	7%	-4,81%	7%	24,21 %	7%	25,80%	
		3. % Alokasi Belanja Langsung terhadap Total Belanja	50%	54%	50,5%	56,58%	50,7%	67,2%	50,8%	62,79 %	51%	58%	
	4.1.4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	1. % Penegakan PERDA dan PERWALI Kota Metro	50%	94,8%	60%	95%	70%	65%	80%	100%	90%	95%	
2. Rasio Angka Kriminalitas		29,16	29,24	28	27,8	27	13,82	26	13,59	25	24,48		

## **BAB III**

# **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

#### **A. Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020**

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berikut disajikan pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah dari tahun 2016 sampai tahun 2020 dengan perpedoman pada APBD Perubahan setiap tahunnya.

**Tabel 3.1**  
**Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 s.d 2020**

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>868.453.605.463,87</b>	<b>893.188.558.895,92</b>	<b>850.862.998.519,21</b>	<b>927.116.733.837,5</b>	<b>917.969.390.317,05</b>	<b>1,52</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>114.436.719.785,89</b>	<b>154.659.728.334,45</b>	<b>132.202.276.039,19</b>	<b>176.199.324.166,36</b>	<b>221.649.607.090,58</b>	<b>19,93</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	14.281.738.649	18.209.976.443,55	<b>21.731.062.461,16</b>	27.205.358.060	28.847.730.447,46	19,52
1.1.2.	Retribusi Daerah	6.156.855.004	6.108.016.994	5.604.726.996	5.631.840.647	7.031.322.895,00	4,10
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.418.100.707	3.902.898.385,08	4.342.620.324,20	4.894.552.257,69	5.562.606.121,31	6,49
1.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	89.580.025.425,3	126.439.536.511,82	100.523.866.257,83	138.467.573.201,70	180.207.312.582,48	22,13
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>683.788.519.394</b>	<b>680.266.516.198</b>	<b>624.067.025.412</b>	<b>641.899.006.676</b>	<b>571.903.785.093,00</b>	<b>-4,21</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	24.735.231.935	30.758.068.069	26.780.781.557	15.523.520.712	20.697.958.545,00	0,68
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	463.881.055.000	453.830.037.000	455.732.157.000	476.738.35.000	435.052.452.000,00	-1,47
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	195.172.232.459	195.678.411.129	141.554.086.855	149.637.150.964	116.153.374.548,00	-11,02
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>65.071.547.283,98</b>	<b>57.262.314.363,47</b>	<b>94.593.697.067</b>	<b>109.018.402.994</b>	<b>124.419.911.485,50</b>	<b>20,64</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	5.000.000.000	-	15.546.960.000	15.908.400.000	16.350.760.000,00	-23,72
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	56.511.746.362	48.091.147.330,31	49.569.016.479,19	71.063.330.413,49	56.362.479.436,59	2,71
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	5.156.819.000	7.500.000.000	25.500.000.000	20.768.002.000	49.532.667.000,00	101,35
	Pendapatan Lainnya	3.559.800.921,98	1.671.167.033,16	3.977.720.588,25	1.278.670.581,62	2.174.005.048,91	21,78

SUMBER : BPKAD KOTA METRO, 2021

Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada di angka 1,52% dengan pertumbuhan rata-rata PAD sebesar 19,93%; Dana Perimbangan tumbuh sebesar -4,2% dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 20,64%. Rata-rata pertumbuhan pendapatan dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam Pemerintah Kota Metro maupun dari luar, yaitu kebijakan Pemerintah Pusat. Harus diakui kapasitas fiskal daerah Kota Metro masih sangat bergantung pada Dana Transfer yang dimasukkan dalam pos Dana Perimbangan maupun Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

Berdasarkan analisa keuangan daerah, maka beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah Kota Metro sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

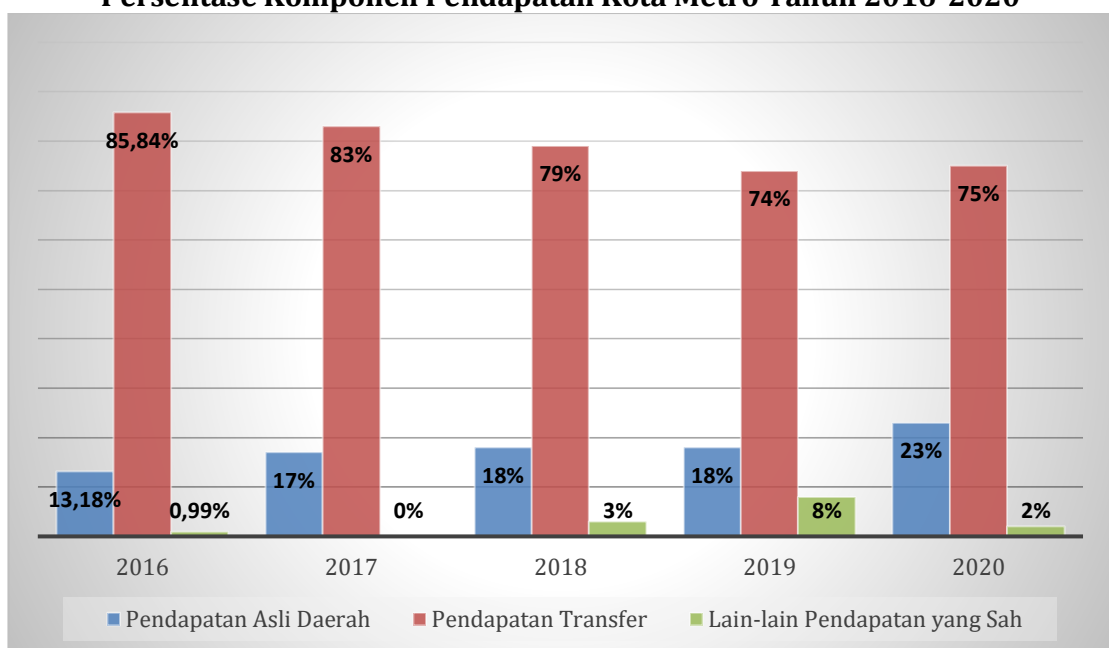
1. Pertumbuhan positif PAD setiap tahunnya disebabkan bertambahnya objek pajak dan retribusi serta meningkatnya kinerja pemungut pajak.
2. Pertumbuhan positif PAD setiap tahunnya juga disebabkan peningkatan kinerja BLUD RSUD A. Yani.
3. Pertumbuhan fluktuatif Dana Perimbangan setiap tahunnya disebabkan kebijakan pemerintah pusat, baik kebijakan terkait DAU, DAK (terutama DAK Fisik), maupun Dana Bagi Hasil, dimana regulasi semakin diperketat dalam pengaturan Dana Transfer. Sejak tahun 2018, pengalokasian DAK Fisik sudah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah yang diajukan melalui aplikasi KRISNA. Aplikasi ini memberikan penilaian secara objektif terkait kebutuhan daerah akan DAK Fisik. Selain itu, sejak tahun 2019, pemerintah pusat juga mengalokasikan Dana Kelurahan dalam pos DAU Tambahan, layaknya Dana Desa di Kabupaten.
4. Pertumbuhan fluktuatif Lain-Lain Pendapatan Yang Sah setiap tahunnya disebabkan perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat, seperti pemindahan Tamsil dan DAK Non Fisik pada rekening Dana Perimbangan serta pengalokasian Dana Insentif Daerah. Sejak tahun 2019 lalu, Pemerintah Pusat mulai melakukan penataan terhadap pengalokasian Dana Insentif Daerah dengan menambahkan beberapa indikator penilaian DID, seperti memasukkan perencanaan, pelaporan serta isu Stunting.

- Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan penurunan pendapatan daerah.

Tahun 2017 lalu, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, pemerintah menyusun regulasi terkait peta kapasitas fiskal daerah yang merupakan gambaran kemampuan keuangan yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Jika dihitung berdasarkan rumus dalam Permenkeu tersebut, kapasitas fiskal Kota Metro pada tahun 2017 termasuk rendah dengan nilai 0,58. Namun, jika dilihat dari struktur tahun 2020, kapasitas fiskal Kota Metro termasuk sedang.

Gambaran ini memberikan optimisme akan pertumbuhan perekonomian di Kota Metro dengan didukung oleh pertumbuhan kapasitas fiskal yang baik. Jika dilihat persentase dana transfer dari total Pendapatan, nilainya mengalami penurunan setiap tahunnya dan hal ini berbanding terbalik dengan PAD. PAD yang menjadi tolok ukur utama kinerja pendapatan daerah terus ditingkatkan melalui berbagai upaya, seperti penyederhanaan birokrasi, optimalisasi pemungutan pajak, serta pemberian *reward* dan *punishment* terhadap subjek pajak. Sejak tahun 2017, Pemerinth Kota Metro juga menaikkan insentif RT dan RW sebagai garda depan dalam pemungutan PBB di Kota Metro. Berikut disajikan pada gambar persentase komponen Pendapatan Kota Metro Tahun 2016-2020.

**Gambar 3.1**  
**Persentase Komponen Pendapatan Kota Metro Tahun 2016-2020**



## **B. Kinerja Belanja Daerah Tahun 2016-2020**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.



**Tabel 3.2**  
**Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 s.d 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>875.876.415.196,05</b>	<b>839.011.920.310</b>	<b>870.142.022.923,74</b>	<b>902.508.611.826,02</b>	<b>946.165.570.428,71</b>	2,04
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>386.075.153.333</b>	<b>308.320.469.345</b>	<b>315.265.497.555</b>	<b>335.964.930.536</b>	<b>388.892.693.001,00</b>	1,11
2.1.1	Belanja Pegawai	383.749.073.469	300.117.614.087	<b>306.492.173.898</b>	322.844.097.047	330.463.178.104,00	-2,99
2.1.4	Hibah	1.587.600.000	7.163.093.310	<b>6.679.917.105</b>	<b>9.277.604.102</b>	<b>32.829.914.344,00</b>	156,94
2.1.5	Bantuan Sosial	-	-	-	<b>1.745.000.000</b>	-	-25
2.1.7	Bantuan Keuangan	738.479.864	738.480.848	<b>1.893.842.552</b>	<b>2.055.734.387</b>	765.930.228,00	25,56
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	301.281.100,00	<b>199.564.000</b>	<b>42.495.000</b>	25.728.069.023,00	15.070,90
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>489.801.261.863,05</b>	<b>530.691.450.965</b>	<b>554.876.525.368</b>	<b>568.599.415.677,02</b>	<b>558.018.549.655,71</b>	<b>3,38</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	33.271.768.578	37.694.213.008	<b>41.883.683.478</b>	41.387.148.051	100.401.573.722,00	41,45
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	207.482.958.848	268.098.397.288	<b>288.531.544.660</b>	<b>317.687.319.425,74</b>	290.726.119.601,95	9,61
2.2.3	Belanja Modal	249.046.534.437,05	224.898.840.669	<b>224.461.297.229,80</b>	<b>209.524.948.200,28</b>	166.890.856.331,76	-9,22
<b>2.</b>							

SUMBER : BPKAD KOTA METRO, 2021

Berdasarkan tabel di atas, alokasi anggaran untuk belanja pembangunan yang dianggarkan dalam pos Belanja Langsung, mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikannya lebih besar daripada Belanja Tidak Langsung, yaitu 3,38% untuk Belanja Langsung dan 1,11% untuk Belanja Tidak Langsung. Selanjutnya jika dilihat dari komposisi antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja, Belanja Langsung memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan Belanja Tidak Langsung.

Tahun 2020, pos Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan yang sangat tajam, dari 42 juta pada tahun 2019 menjadi 25 milyar di tahun 2020. Kondisi ini disebabkan oleh adanya pandemic COVID-19 yang melanda dunia sehingga membutuhkan alokasi besar melalui Pos Belanja Tidak Terduga.

### **C. Kinerja Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020**

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Metro baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar lagi atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kota Metro terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari pos pengeluaran dan penerimaan. Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Metro yang perlu dibayar lagi atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kota Metro terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Akhir setelah audit BPK yang dilaksanakan pada T+1. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan yang dalam penganggaran Pemerintah Kota Metro terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan hanya dilakukan untuk Penyertaan Modal Bank Lampung yang setiap tahunnya relatif sama, namun di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 2 milyar yang sebelumnya dianggarkan sebesar 1,5 milyar. Di tahun 2020, naik kembali menjadi 5 milyar. Berikut disajikan dalam tabel realisasi pembiayaan tahun 2016-2020:

**Tabel 3.3**  
**Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s.d 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>61.025.483.179,94</b>	<b>53.656.413.160,76</b>	<b>104.868.459.932</b>	<b>82.632.524.280,34</b>	101.289.932.211,82	21,19
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>61.025.483.179,94</b>	<b>53.656.413.160,76</b>	<b>106.368.459.932</b>	<b>85.632.524.280,34</b>	106.289.932.211,82	22,70
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	60.968.754.729,94	53.602.673.447,76	106.333.051.646,58	85.589.435.528,05	106.184.911.904,82	22,71
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	56.728.455	53.739.713	35.408.286	43.088.752,20	105.020.307,00	31,51
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	5.000.000.000,00	45,83
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	0	1.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	5.000.000.000,00	45,83

SUMBER : BPKAD KOTA METRO, 2021

**Tabel 3.4**  
**Rata-Rata Pertumbuhan APBD Tahun 2016-2020**

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>868.453.605.463,87</b>	<b>893.188.558.895,92</b>	<b>850.862.998.519,21</b>	<b>927.116.733.837,5</b>	<b>917.969.390.317,05</b>	<b>1,52</b>
<b>1.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>114.436.719.785,89</b>	<b>154.659.728.334,45</b>	<b>132.202.276.039,19</b>	<b>176.199.324.166,36</b>	<b>221.649.607.090,58</b>	<b>19,93</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	14.281.738.649	18.209.976.443,55	<b>21.731.062.461,16</b>	27.205.358.060	28.847.730.447,46	19,52
1.1.2.	Retribusi Daerah	6.156.855.004	6.108.016.994	5.604.726.996	5.631.840.647	7.031.322.895,00	4,10
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.418.100.707	3.902.898.385,08	4.342.620.324,20	4.894.552.257,69	5.562.606.121,31	6,49
1.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	89.580.025.425,3	126.439.536.511,82	100.523.866.257,83	138.467.573.201,70	180.207.312.582,48	22,13
<b>1.2.</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>683.788.519.394</b>	<b>680.266.516.198</b>	<b>624.067.025.412</b>	<b>641.899.006.676</b>	<b>571.903.785.093,00</b>	<b>-4,21</b>
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	24.735.231.935	30.758.068.069	26.780.781.557	15.523.520.712	20.697.958.545,00	0,68
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	463.881.055.000	453.830.037.000	455.732.157.000	476.738.35.000	435.052.452.000,00	-1,47
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	195.172.232.459	195.678.411.129	141.554.086.855	149.637.150.964	116.153.374.548,00	-11,02
<b>1.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>65.071.547.283,98</b>	<b>57.262.314.363,47</b>	<b>94.593.697.067</b>	<b>109.018.402.994</b>	<b>124.419.911.485,50</b>	<b>20,64</b>
1.3.1.	Pendapatan Hibah	5.000.000.000	-	15.546.960.000	15.908.400.000	16.350.760.000,00	-23,72
1.3.3.	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	56.511.746.362	48.091.147.330,31	49.569.016.479,19	71.063.330.413,49	56.362.479.436,59	2,71
1.3.4.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	5.156.819.000	7.500.000.000	25.500.000.000	20.768.002.000	49.532.667.000,00	101,35
	Pendapatan Lainnya	3.559.800.921,98	1.671.167.033,16	3.977.720.588,25	1.278.670.581,62	2.174.005.048,91	21,78

<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>875.876.415.196,05</b>	<b>839.011.920.310</b>	<b>870.142.022.923,74</b>	<b>902.508.611.826,02</b>	<b>946.165.570.428,71</b>	2,04
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>386.075.153.333</b>	<b>308.320.469.345</b>	<b>315.265.497.555</b>	<b>335.964.930.536</b>	<b>388.892.693.001,00</b>	1,11
2.1.1	Belanja Pegawai	383.749.073.469	300.117.614.087	<b>306.492.173.898</b>	322.844.097.047	330.463.178.104,00	-2,99
2.1.4	Hibah	1.587.600.000	7.163.093.310	<b>6.679.917.105</b>	<b>9.277.604.102</b>	<b>32.829.914.344,00</b>	156,94
2.1.5	Bantuan Sosial	-	-	-	<b>1.745.000.000</b>	-	-25
2.1.7	Bantuan Keuangan	738.479.864	738.480.848	<b>1.893.842.552</b>	<b>2.055.734.387</b>	765.930.228,00	25,56
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	301.281.100,00	<b>199.564.000</b>	<b>42.495.000</b>	25.728.069.023,00	15.070,90
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>489.801.261.863,05</b>	<b>530.691.450.965</b>	<b>554.876.525.368</b>	<b>568.599.415.677,02</b>	<b>558.018.549.655,71</b>	<b>3,38</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	33.271.768.578	37.694.213.008	<b>41.883.683.478</b>	41.387.148.051	100.401.573.722,00	41,45
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	207.482.958.848	268.098.397.288	<b>288.531.544.660</b>	<b>317.687.319.425,74</b>	290.726.119.601,95	9,61
2.2.3	Belanja Modal	249.046.534.437,05	224.898.840.669	<b>224.461.297.229,80</b>	<b>209.524.948.200,28</b>	166.890.856.331,76	-9,22
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>61.025.483.179,94</b>	<b>53.656.413.160,76</b>	<b>104.868.459.932</b>	<b>82.632.524.280,34</b>	101.289.932.211,82	21,19
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>61.025.483.179,94</b>	<b>53.656.413.160,76</b>	<b>106.368.459.932</b>	<b>85.632.524.280,34</b>	106.289.932.211,82	22,70
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya	60.968.754.729,94	53.602.673.447,76	106.333.051.646,58	85.589.435.528,05	106.184.911.904,82	22,71
	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	56.728.455	53.739.713	35.408.286	43.088.752,20	105.020.307,00	31,51
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	5.000.000.000,00	45,83
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	0	1.500.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	5.000.000.000,00	45,83

Pertumbuhan pembiayaan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 sebesar 21,19 persen. Penerimaan pembiayaan dari pos SiLPA dari tahun 2016 sampai dengan 2020 fluktuatif. SiLPA tertinggi pada tahun 2018 dan selanjutnya di tahun 2020, namun belum proses audit BPK. Realisasi SILPA pada Tahun Anggaran 2016-2020 ini terdiri dari:

1. Pelampauan penerimaan pendapatan dan sisa belanja yang ada di rekening Kas Umum Daerah
2. Saldo dana BLUD RSUD A. Yani
3. Saldo dana FKTP
4. Saldo dana FKTP dan
5. Saldo kas di Bendahara BOS
6. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran,
7. Rekening Kas Umum Daerah masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Dana Insentif Daerah (DID), yang telah dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan akan diperhitungkan kembali pada penyaluran alokasi tahun anggaran rencana.

Sedangkan untuk Penyertaan Modal pada Bank Lampung dilakukan untuk peningkatan kinerja daerah dimana pada tahun 2018, terdapat kebijakan transaksi non tunai pada pemerintah sampai saat ini.

### **3.1.2. Kinerja Neraca Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai

dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Berikut disajikan dalam tabel kinerja neraca daerah Kota Metro Tahun 2016-2020:

**Tabel 3.5**  
**Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Metro Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	<b>ASET</b>						
2	<b>Aset Lancar</b>	<b>115.459.444.085,81</b>	<b>168.423.447.480,23</b>	<b>187.584.420.716,28</b>	<b>187.284.148.966,54</b>	146.734.394.622,95	8,86%
3	Kas di Kas Daerah	47.116.575.605,66	93.341.877.072,58	83.471.314.208,05	83.818.018.839,71	49.025.475.225,09	11,61%
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	254.737.681,00	-	-	74.074.717,00	-	-50,00%
5	Kas di Bendahara BLUD	5.973.427.101,10	12.647.883.284,10	2.076.276.590,00	21.286.838.150,00	23.202.336.735,10	240,60%
6	Kas di Puskesmas (FKTP)	257.933.060,00	218.091.390,00	25.273.401,00	97.072.769,11	-	20,06%
7	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	-
8	Kas di Bendahara Lainnya	36.683.334,00	125.200.000,00	16.571.329,00	908.907.429,00	100.017.264,00	1362,5%
9	Piutang Pajak Daerah	10.131.763.655,82	11.117.052.982,82	11.832.735.223,82	13.500.166.638,82	15.136.117.391,82	10,59%
10	Piutang Restribusi Daerah	870.341.524,00	1.041.282.389,00	867.292.925,00	973.335.425,00	1.144.228.925,00	8,18%
11	Bagian Tuntuan Ganti Kerugian Daerah	4.500.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-27,78%
12	Bagian Lancar Kemitraan	1.286.954.350,97	1.968.118.662,17	2.783.348.147,26	-	228.054.028,65	-1,41%
13	Bagian Lancar Tagih Sewa	378.148.428,00	449.589.513,00	449.589.513,00	449.589.513,00	449.589.513,00	4,72%
14	Piutang Perikatan-Pinjaman Lunak	2.575.265.006,75	2.238.803.892,75	2.038.723.440,00	1.905.349.607,55	1.478.096.016,55	-12,74%
15	Piutang Lainnya	42.390.304.127,05	43.850.299.126,14	79.804.407.831,07	61.249.065.575,58	36.973.472.902,00	5,64%
16	Penyisihan Piutang tidak Tertagih	11.691.720.197,54	12.660.186.056,33	15.015.592.955,92	14.922.684.845,40	(13.329.640.459,14)	3,90%
17	Beban Dibayar Dimuka	54.967.932,00	-	737.205.827,00	-	-	-50,00%



18	Persediaan	15.819.562.477,00	14.081.435.224,00	18.497.275.237,00	17.944.415.147,17	32.306.389.080,88	24,35%
19	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>11.081.457.352,03</b>	<b>12.581.457.352,03</b>	<b>14.081.457.352,03</b>	<b>16.081.457.352,03</b>	21.081.457.352,03	17,69%
20	Investasi Non Permanen	-	-				
21	Investasi Permanen	11.081.457.352,03	12.581.457.352,03	14.081.457.352,03	16.081.457.352,03	21.081.457.352,03	17,69%
22	<b>ASET TETAP</b>	<b>1.656.926.315.587,05</b>	<b>1.768.116.955.276,05</b>	<b>2.516.537.093.268,25</b>	<b>2.681.128.746.006,17</b>	2.606.865.631.499,93	13,20%
23	Tanah	586.713.642.099,00	587.813.948.776,00	1.240.014.470.258,00	1.274.425.886.825,62	1.144.679.411.837,62	25,93%
24	Peralatan dan Mesin	214.140.364.356,05	255.213.095.775,05	309.172.989.972,85	381.510.518.024,61	425.657.673.688,61	18,82%
25	Gedung dan Bangunan	482.825.991.392,00	539.335.736.413,00	592.234.909.711,00	728.737.621.642,22	786.779.041.367,75	13,13%
26	Jalan Irigasi dan Jaringan	999.876.320.839,00	1.122.826.208.722,00	1.208.774.977.457,00	1.281.580.760.899,26	1.332.923.166.350,70	7,50%
27	Aset Tetap Lainnya	42.832.924.743,00	43.421.410.748,00	44.404.264.848,00	48.362.719.382,02	49.620.238.359,02	3,79%
28	Konstruksi dalam Pengerjaan	967.054.400,00	2.622.438.200,00	30.489.997.000,00	1.927.913.196,08	3.659.966.000,00	307,50%
29	Akumulasi Penyusutan	- 670.429.982.242,00	- 783.115.883.358,00	- 908.554.515.978,60	- 1.035.416.673.963,64	-1.136.453.866.103,77	14,14%
30	<b>DANA CADANGAN</b>						
31	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00%
32	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>128.555.829.090,00</b>	<b>64.583.795.320,00</b>	<b>89.940.490.608,11</b>	<b>56.756.511.264,54</b>	96.320.031.786,00	5,58%
33	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	0,00%
34	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
35	Kemitraan dengan Pihak ketiga	42.406.880.000,00	42.406.880.000,00	42.406.880.000,00	42.406.880.000,00	78.233.510.000,00	21,12%
36	Aset Tak Berwujud	3.393.048.390,00	3.786.102.259,00	5.235.267.259,00	1.958.052.355,21	1.323.996.211,00	-11,28%
37	Aset Lain Lain	82.755.900.700,00	18.390.813.061,00	42.298.343.349,11	12.391.578.909,33	12.478.888.981,00	-4,44%
38	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.912.023.046.114,89</b>	<b>2.013.705.655.428,31</b>	<b>2.808.143.461.944,67</b>	<b>2.941.250.863.589,28</b>	92.026.359.192,00	-11,84%
39	<b>KEWAJIBAN</b>						
40	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>22.862.404.260,83</b>	<b>31.908.666.319,16</b>	<b>24.671.025.176,39</b>	<b>45.266.006.411,93</b>	45.437.415.049,65	25,19%

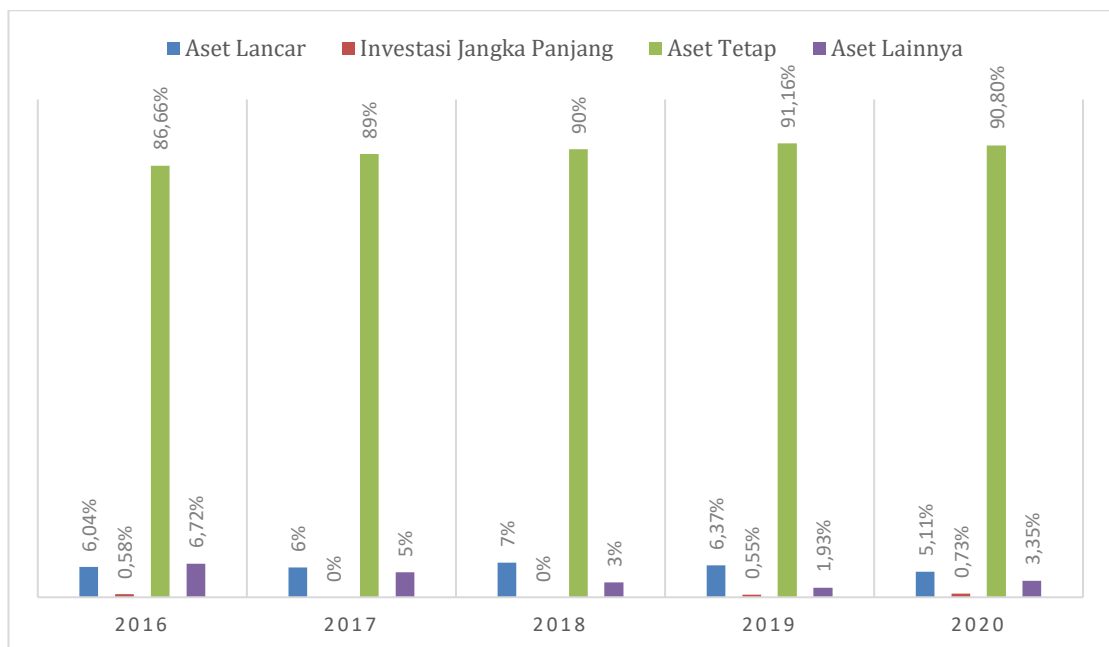
41	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-	0,00%
42	Utang Bunga dan Denda	-	-	-	-	-	0,00%
43	Utang Pajak	-	-	-	-	-	0,00%
44	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	0,00%
45	Pendapatan diterima Dimuka	225.075.746,83	242.649.616,16	246.125.251,70	254.157.558,37	263.951.757,03	4,09%
46	Beban yang Masih Harus Dibayar	20.782.602.245,00	29.850.144.389,00	22.943.102.890,69	43.553.046.819,56	43.714.661.258,62	27,67%
47	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.854.726.269,00	1.815.872.314,00	1.481.797.034,00	1.458.802.034,00	1.458.802.034,00	-5,51%
48	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
49	Utang Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	0,00%
50	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	0,00%
51	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>22.862.404.260,83</b>	<b>31.908.666.319,16</b>	<b>24.671.025.176,39</b>	<b>45.266.006.411,93</b>	45.437.415.049,65	25,19%
52	<b>EKUITAS</b>	<b>1.889.160.641.854,06</b>	<b>1.981.796.989.109,15</b>	<b>2.783.472.436.769,03</b>	<b>2.895.984.857.177,35</b>	2.825.564.100.211,25	11,74%
53	Ekuitas	1.889.160.641.854,06	1.981.796.989.109,15	2.783.472.436.769,03	2.895.984.857.177,35	2.825.564.100.211,25	11,74%
54	<b>JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN</b>	<b>1.912.023.046.114,89</b>	<b>2.013.705.655.428,31</b>	<b>2.808.143.461.945,42</b>	<b>2.941.250.863.589,28</b>	2.871.001.515.260,90	11,78%

SUMBER : BPKAD KOTA METRO, 2020

## A. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Metro sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

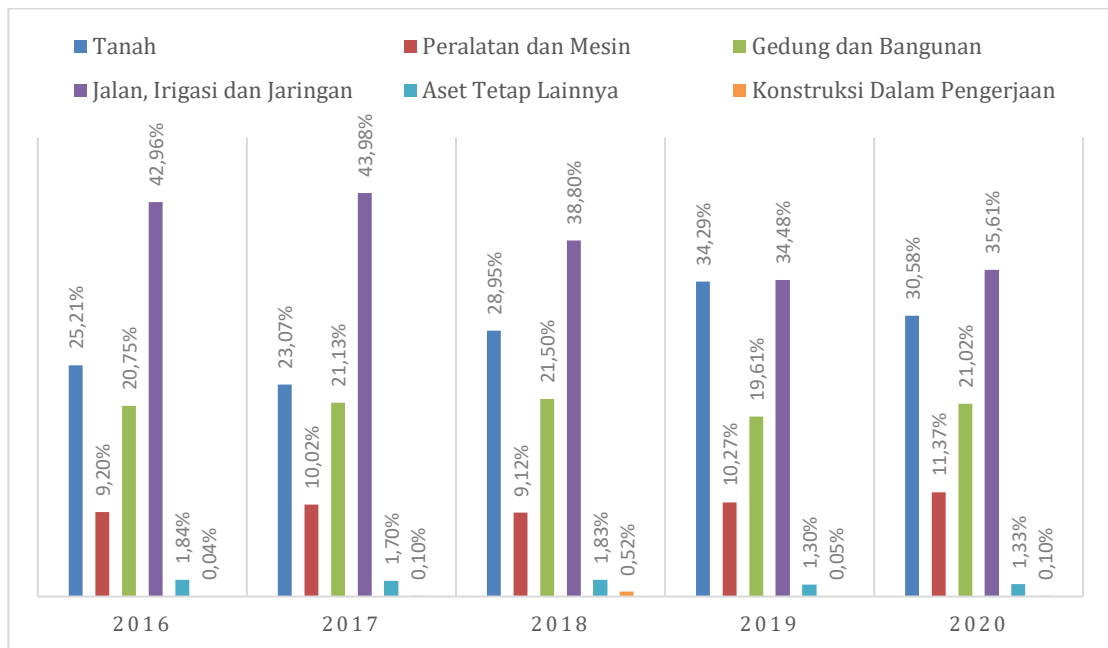
**Gambar 3.2**  
**Komponen Aset Kota Metro Tahun 2016-2020**



Tahun 2017, kenaikan aset Kota Metro jika dibandingkan 2016 mencapai 31,54%. Nilai aset per 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 39,45% atau naik sebesar Rp.794.437.806.517,11 dibandingkan dengan nilai aset per 31 Desember 2017. Sedangkan nilai aset per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,74% atau naik sebesar Rp133.107.482.643,85 dibandingkan dengan nilai aset per 31 Desember 2018. Kenaikan nilai aset per tahunnya terjadi karena BPKAD Kota Metro sejak tahun 2017 sampai 2020 melakukan penelusuran aset, dimana banyak aset Kota Metro yang dulunya merupakan aset Lampung Tengah (saat Kota Metro masih bergabung dalam Kabupaten Lampung Tengah). Selain itu,

kenaikan aset juga dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan BLUD RSUD A. Yani. Namun demikian, pada tahun 2020 terjadi penurunan aset lancar yang disebabkan terjadinya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk aset tetap penurunan disebabkan penataan karena adanya pencatatan ganda.

**Gambar 3.3**  
**Komponen Aset Tetap Kota Metro Tahun 2016-2020**



Pada tahun 2018, selain kebijakan atas perubahan masa manfaat Aset Tetap atas kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan, juga terdapat beberapa kebijakan yang berpengaruh secara signifikan pada penyusunan Neraca khususnya pada Aset Tetap dan perhitungan penyusutan Aset Tetap, yaitu dilakukan reklasifikasi antar akun pada pencatatan Aset Tetap pada buku inventaris BMD, serta mutasi Aset Tetap antar OPD terhadap Aset Tetap yang dikuasai dan menjadi kewenangannya agar sesuai dengan yang tercatat pada buku inventaris masing-masing OPD. Juga terdapat penghapusan Aset Tetap baik untuk dihibahkan maupun untuk dimusnahkan dan dijual. Hibah Aset Tetap antara lain berupa penyerahan Aset Tetap terminal sebagai akibat perubahan kebijakan tentang kewenangan pengelolaan terminal yang beralih kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Investasi permanen yang dimiliki Pemerintah Kota Metro sampai dengan 2020, seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal pada PT Bank Lampung yang dilakukan sejak Tahun 2000 s.d 2020. Jumlah penyertaan modal tersebut berdasarkan bukti penyertaan/pemilikan saham (surat kolektif saham) yang diterbitkan oleh PT Bank Lampung, serta jumlah titipan modal penyertaan yang belum diterbitkan bukti pemilikan sahamnya. nilai kepemilikan saham atas penyertaan modal Pemerintah Kota Metro pada PT. Bank Lampung hanya sebesar 6,12%. Kebijakan penilaian investasi Pemerintah Daerah atas kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan hasil atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

## **B. KEWAJIBAN**

Kewajiban diakui apabila pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pada Neraca Pemerintah Kota Metro dari tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak terdapat saldo utang perhitungan pihak ketiga begitu pula Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. Untuk Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang telah diterima Pemerintah Kota Metro atas suatu barang/jasa yang sesungguhnya belum merupakan hak tahun yang bersangkutan, sehingga jumlah tersebut merupakan suatu uang muka bagi Pemerintah Kota Metro dan termasuk kategori kewajiban jangka pendek. Pendapatan Diterima di Muka dari tahun 2016 sampai 2019 berasal dari Dinas Perhubungan, BPPRD, dan RSUD A. Yani.

Beban yang masih harus dibayar merupakan beban atau biaya yang harus diakui Pemerintah Kota Metro atas manfaat yang telah diterima lebih dahulu walaupun beban/biaya atas manfaat tersebut belum dibayarkan. Beban yang masih

harus dibayar dari tahun 2016 sampai 2019 terdiri dari utang pegawai, utang barang dan jasa serta utang retensi.

Untuk Ekuitas yang didefinisikan sebagai jumlah kekayaan bersih yang dimiliki pemerintah daerah dan merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban, mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,47%.

## 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini akan diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja.

**Tabel 3.6**  
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

NO	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	%
1	Tahun Anggaran 2016	417.020.842.047	875.876.415.196,05	47,6
2	Tahun Anggaran 2017	337.811.827.095	839.011.920.310,00	40,3
3	Tahun Anggaran 2018	348.375.857.376	870.142.022.923,74	40,12
4	Tahun Anggaran 2019	364.231.245.098	902.508.611.826,02	40,36
5	Tahun Anggaran 2020	430.864.751.826	946.911.242.656,71	45,45

Sumber : BPKAD Kota Metro

Berdasarkan tabel diatas, maka rata-rata belanja untuk kebutuhan aparatur dari tahun 2016-2020 sebesar 42,76 persen. Artinya, belanja pembangunan masih lebih besar daripada belanja aparatur. Pelaksanaan belanja aparatur sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam hal gaji, tunjangan kinerja, sertifikasi maupun honorarium kegiatan.

### 3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut adalah gambaran masa lalu tentang kebijakan

anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah Kota Metro dari tahun 2016-2020 :

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Target Terhadap Realisasi APBD Tahun 2016**

Uraian	Target APBD	Realisasi	Lebih/(kurang)	%
Pendapatan	914.841.058.620,00	868.453.605.463,87	(46.387.453.156,13)	94,93
Belanja	975.809.813.344,94	875.876.415.196,05	(99.933.398.148,89)	89,76
Surplus (defisit)	-60.968.754.724,94	-7.422.809.732,18	53.545.944.992,76	12,17
Pembiayaan :				
· Penerimaan Pembiayaan	60.968.754.724,94	61.025.483.179,94	56.728.455,00	100,09
· Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0
Pembiayaan Neto	60.968.754.724,94	61.025.483.179,94	56.728.455,00	100,09
SiLPA Tahun Berjalan		53.602.673.447,76	53.602.673.447,76	

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Target Terhadap Realisasi APBD Tahun 2017**

Uraian	Perubahan APBD	Realisasi	Lebih/(kurang)	%
Pendapatan	900.670.493.429,00	893.188.558.895,92	(7.481.934.533,08)	99,17
Belanja	952.773.166.877,00	839.011.920.310,00	(113.761.246.567,00)	88,06
Surplus (defisit)	-52.102.673.448,00	54.176.638.585,92	106.279.312.033,92	103,98
Pembiayaan :				
· Penerimaan Pembiayaan	53.602.673.448,00	53.656.413.160,76	53.739.712,76	100,1
· Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0	100
Pembiayaan Neto	52.102.673.448,00	52.156.413.160,76	53.739.712,76	100,1
SiLPA Tahun Berkenaan		106.333.051.746,68	106.333.051.746,68	

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Target Terhadap Realisasi APBD Tahun 2018**

Uraian	Perubahan APBD	Realisasi	Lebih/(kurang)	%
Pendapatan	869.406.981.216,00	850.862.998.519,21	(18.543.982.696,79)	97,87
Belanja	974.240.032.962,68	870.142.022.923,74	(104.098.010.038,94)	89,31
Surplus (defisit)	-104.833.051.746,68	-19.279.024.404,53	85.554.027.342,15	18,39

Pembiayaan :				
· Penerimaan Pembiayaan	106.333.051.746,68	106.368.459.932,58	35.408.185,90	100,03
· Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	100,00
Pembiayaan Neto	104.833.051.746,68	104.868.459.932,58	35.408.185,90	100,03
SiLPA Tahun Berkenaan	0,00	85.589.435.528,05	85.589.435.528,05	

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Target Terhadap Realisasi APBD Tahun 2019**

Uraian	Perubahan APBD	Realisasi	Lebih/(kurang)	%
Pendapatan	905.976.221.816,69	927.116.733.837,50	21.140.512.020,81	102,33
Belanja	986.352.682.934,74	902.508.611.826,02	(83.844.071.108,72)	91,50
Surplus (defisit)	-83.589.435.528,05	22.552.387.624,48	106.141.823.152,53	-26,98
Pembiayaan :				
· Penerimaan Pembiayaan	85.589.435.528,05	85.632.524.280,34	43.088.752,29	100,05
· Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-	100,00
Pembiayaan Neto	83.589.435.528,05	83.632.524.280,34	43.088.752,29	100,05
SiLPA Tahun Berkenaan	0,00	106.184.911.904,82	106.184.911.904,82	

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Target Terhadap Realisasi APBD Tahun 2020**

Uraian	Perubahan APBD	Realisasi	Lebih/(kurang)	%
Pendapatan	909.371.003.167,71	917.969.397.669,08	8.598.394.501,37	100,95
Belanja	1.010.582.915.071,71	946.911.242.656,71	(63.671.672.415,00)	93,70
Surplus (defisit)	-101.211.911.904,00	-28.941.844.987,63	72.270.066.916,37	28,60
Pembiayaan :				
· Penerimaan Pembiayaan	106.211.911.904,00	106.289.932.211,82	78.020.307,82	100,07
· Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00
Pembiayaan Neto	101.211.911.904,00	101.289.932.211,82	78.020.307,82	100,08
SiLPA Tahun Berkenaan	0,00	72.348.087.224,19	72.348.087.224,19	

### 3.3. Kerangka Pendanaan

#### 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

##### A. Proyeksi Pendapatan

Dalam melakukan proyeksi terhadap pendapatan daerah Kota Metro untuk Tahun 2021-2026, hal penting yang mendasari adalah realisasi pendapatan 2020 dan target tahun 2021 mengingat kondisi pandemi COVID 19 yang berdampak pada



keuangan daerah. Selain itu, faktor ketergantungan fiscal Kota Metro terhadap Dana Transfer (baik dari pusat maupun provinsi) yang sangat tinggi, juga menjadi dasar proyeksi. Meskipun demikian, kinerja pendapatan daerah Kota Metro dapat diupayakan melalui Pendapatan Asli Daerah. Secara umum, proyeksi dilakukan berdasarkan histori realisasi pendapatan dari tahun 2016-2021. Selain itu, sesuai amanat Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Permendagri 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD, dalam rangka peningkatan daerah diperlukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi. Adapun kebijakan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi dan memperbaharui regulasi pemungutan pajak maupun retribusi;
2. Membentuk BUMD untuk membuka peluang baru sumber pendapatan
3. Meningkatkan kinerja pemungut pajak
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai objek pajak
5. Mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pemungutan pajak
6. Memperbaharui database objek pajak
7. Meningkatkan system pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan

Adapun kebijakan proyeksi Dana Transfer Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kinerja pembangunan sebagai upaya peningkatan Dana Insentif Daerah
2. Mengoptimalkan pengusulan DAK Fisik melalui aplikasi KRISNA
3. Meningkatkan koordinasi terkait Dana Transfer dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan
4. Meningkatkan koordinasi terkait Dana Transfer dengan Pemerintah Provinsi Lampung

Berikut disajikan dalam tabel proyeksi Pendapatan Daerah :

**Tabel 3.12**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026**

KODE	URAIAN	PROYEKSI					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>910,828,597,27</b>	<b>890,089,058,89</b>	<b>961,296,183,61</b>	<b>982,457,869,74</b>	<b>1,008,169,318,40</b>	<b>1,042,422,681,67</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>216,774,746,27</b>	<b>220,146,522,89</b>	<b>237,758,244,73</b>	<b>256,778,904,30</b>	<b>279,889,005,69</b>	<b>310,676,796,32</b>
4.1.1	Pajak Daerah	29,602,124,08	31,851,772,77	34,399,914,59	37,151,907,76	40,495,579,46	44,950,093,20
4.1.2	Retribusi Daerah	7,583,497,00	8,155,692,94	8,808,148,37	9,512,800,24	10,368,952,26	11,509,537,01
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,000,000,00	6,000,000,00	6,480,000,00	6,998,400,00	7,628,256,00	8,467,364,16
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	173,589,125,18	174,139,057,18	188,070,181,75	203,115,796,29	221,396,217,96	245,749,801,94
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>669,273,451,00</b>	<b>645,162,136,00</b>	<b>696,775,106,88</b>	<b>696,775,106,88</b>	<b>696,775,106,88</b>	<b>696,775,106,88</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	616,073,451,00	591,962,136,00	639,319,106,88	639,319,106,88	639,319,106,88	639,319,106,88
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53,200,000,00	53,200,000,00	57,456,000,00	57,456,000,00	57,456,000,00	57,456,000,00
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>24,780,400,00</b>	<b>24,780,400,00</b>	<b>26,762,832,00</b>	<b>28,903,858,56</b>	<b>31,505,205,83</b>	<b>34,970,778,47</b>
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24,780,400,00	24,780,400,00	26,762,832,00	28,903,858,56	31,505,205,83	34,970,778,47

## **B. Proyeksi Belanja**

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program priority*) dan kebutuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja Daerah dibagi dalam 3 (tiga) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Kebijakan Belanja Tahun 2021 -2026 disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Selanjutnya, proyeksi belanja dilakukan berdasarkan tahapan pembangunan lima tahun yang telah disusun serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung memerlukan recovery dan reformasi kebijakan di bidang bidang belanja Selanjutnya, kebijakan belanja memperhatikan pencapaian visi dan misi serta program prioritas yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2021-2026. Adapun untuk proyeksi alokasi Belanja memperhatikan proyeksi pendapatan. Berikut disajikan proyeksi Belanja Daerah tahun 2021-2026,

**Tabel 3.13**  
**Proyeksi Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026**

KODE	URAIAN	PROYEKSI					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>978,176,684,496</b>	<b>935,089,058,898</b>	<b>1,006,296,183,610</b>	<b>1,027,457,869,749</b>	<b>1,053,169,318,407</b>	<b>1,087,422,681,675</b>
<b>5,1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>821,441,954,674</b>	<b>778,354,329,076</b>	<b>778,354,329,076</b>	<b>819,516,015,215</b>	<b>845,227,463,873</b>	<b>879,480,827,141</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	444,973,144,84	444,973,144,84	444,973,144,84	444,973,144,84	444,973,144,84	444,973,144,84
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	338,244,349,83	295,156,724,23	295,156,724,23	336,318,410,37	362,029,859,02	396,283,222,29
5.1.03	Belanja Hibah	36,902,070,00	36,902,070,00	36,902,070,00	36,902,070,00	36,902,070,00	36,902,070,00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	1,322,390,00	1,322,390,00	1,322,390,00	1,322,390,00	1,322,390,00	1,322,390,00
<b>5,2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>146,694,729,82</b>	<b>146,694,729,82</b>	<b>217,901,854,53</b>	<b>197,901,854,53</b>	<b>197,901,854,53</b>	<b>197,901,854,53</b>
5.2.01	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	25,728,975,68	25,728,975,68	25,728,975,68	25,728,975,68	25,728,975,68	25,728,975,68
5.2.02	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	42,045,533,28	42,045,533,28	73,252,657,99	73,252,657,99	73,252,657,99	73,252,657,99
5.2.03	Belanja Mobil Jalan, Jaringan Dan Irigasi	78,039,703,55	78,039,703,55	118,039,703,55	98,039,703,55	98,039,703,55	98,039,703,55
5.2.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	880,517,30	880,517,30	880,517,30	880,517,30	880,517,30	880,517,30
<b>5,3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10,040,000,00</b>	<b>10,040,000,00</b>	<b>10,040,000,00</b>	<b>10,040,000,00</b>	<b>10,040,000,00</b>	<b>10,040,000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10,040,000,00	10,040,000,00	10,040,000,00	10,040,000,00	10,040,000,00	10,040,000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>978,176,684,496</b>	<b>935,089,058,898</b>	<b>1,006,296,183,610</b>	<b>1,027,457,869,749</b>	<b>1,053,169,318,407</b>	<b>1,087,422,681,675</b>

Selanjutnya, kebijakan Belanja tetap memperhatikan regulasi pusat terkait penyusunan APBD tahun berkenaan, dimana salah satunya adalah tentang mandatory item sebagai berikut :

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
4. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah
6. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah
7. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik

dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

8. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan melihat capaian indicator SPM 6 urusan sebagaimana yang telah disajikan pada bab 2 sebelumnya. Berikut adalah skema penganggaran SPM :

**Tabel 3.14**  
**Skema Penganggaran Pelaksanaan SPM**

NO	BIDANG SPM	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Pendidikan	38.000.000.000	35.000.000.000	38.000.000.000	38.100.000.000	38.200.000.000	38.300.000.000
2.	Kesehatan	210.000.000.000	200.000.000.000	205.000.000.000	206.000.000.000	207.000.000.000	208.000.000.000
3.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14.000.000.000	13.000.000.000	13.200.000.000	13.500.000.000	14.000.000.000	14.500.000.000
4.	Sosial	3.500.000.000	3.200.000.000	3.500.000.000	3.600.000.000	3.700.000.000	3.800.000.000
5.	Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat	2.000.000.000	1.800.000.000	2.000.000.000	2.100.000.000	2.200.000.000	2.300.000.000
6.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.000.000.000	68.000.000.000	70.000.000.000	71.000.000.000	72.000.000.000	73.000.000.000

### C. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026

Berdasarkan uraian di atas, maka proyeksi APBD Kota Metro Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
**Proyeksi APBD Kota Metro Tahun 2021-2026**

KODE	URAIAN	PROYEKSI					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>910,828,597,27</b>	<b>890,089,058,89</b>	<b>961,296,183,61</b>	<b>982,457,869,74</b>	<b>1,008,169,318,40</b>	<b>1,042,422,681,67</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>216,774,746,27</b>	<b>220,146,522,89</b>	<b>237,758,244,73</b>	<b>256,778,904,30</b>	<b>279,889,005,69</b>	<b>310,676,796,32</b>
4.1.1	Pajak Daerah	29,602,124,08	31,851,772,77	34,399,914,59	37,151,907,76	40,495,579,46	44,950,093,20
4.1.2	Retribusi Daerah	7,583,497,00	8,155,692,94	8,808,148,37	9,512,800,24	10,368,952,26	11,509,537,01
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,000,000,00	6,000,000,00	6,480,000,00	6,998,400,00	7,628,256,00	8,467,364,16
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	173,589,125,18	174,139,057,18	188,070,181,75	203,115,796,29	221,396,217,96	245,749,801,94
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>669,273,451,00</b>	<b>645,162,136,00</b>	<b>696,775,106,88</b>	<b>696,775,106,88</b>	<b>696,775,106,88</b>	<b>696,775,106,88</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	616,073,451,00	591,962,136,00	639,319,106,88	639,319,106,88	639,319,106,88	639,319,106,88
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	53,200,000,00	53,200,000,00	57,456,000,00	57,456,000,00	57,456,000,00	57,456,000,00
<b>4.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>24,780,400,00</b>	<b>24,780,400,00</b>	<b>26,762,832,00</b>	<b>28,903,858,56</b>	<b>31,505,205,83</b>	<b>34,970,778,47</b>
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24,780,400,00	24,780,400,00	26,762,832,00	28,903,858,56	31,505,205,83	34,970,778,47
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>978,176,684,49</b>	<b>935,089,058,89</b>	<b>1,006,296,183,61</b>	<b>1,027,457,869,74</b>	<b>1,053,169,318,40</b>	<b>1,087,422,681,67</b>
<b>5,1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>821,441,954,67</b>	<b>778,354,329,07</b>	<b>778,354,329,07</b>	<b>819,516,015,21</b>	<b>845,227,463,87</b>	<b>879,480,827,14</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	444,973,144,84	444,973,144,84	444,973,144,84	444,973,144,84	444,973,144,84	444,973,144,84

5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	338,244,349,83	295,156,724,23	295,156,724,23	336,318,410,37	362,029,859,02	396,283,222,29
5.1.03	Belanja Hibah	36,902,070,00	36,902,070,00	36,902,070,00	36,902,070,00	36,902,070,00	36,902,070,00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	1,322,390,00	1,322,390,00	1,322,390,00	1,322,390,00	1,322,390,00	1,322,390,00
<b>5,2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>146,694,729,82</b>	<b>146,694,729,82</b>	<b>217,901,854,53</b>	<b>197,901,854,53</b>	<b>197,901,854,53</b>	<b>197,901,854,53</b>
5.2.01	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	25,728,975,68	25,728,975,68	25,728,975,68	25,728,975,68	25,728,975,68	25,728,975,68
5.2.02	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	42,045,533,28	42,045,533,28	73,252,657,99	73,252,657,99	73,252,657,99	73,252,657,99
5.2.03	Belanja Mobil Jalan, Jaringan Dan Irigasi	78,039,703,55	78,039,703,55	118,039,703,55	98,039,703,55	98,039,703,55	98,039,703,55
5.2.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	880,517,30	880,517,30	880,517,30	880,517,30	880,517,30	880,517,30
<b>5,3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10,040,000,00</b>	<b>10,040,000,00</b>	<b>10,040,000,00</b>	<b>10,040,000,00</b>	<b>10,040,000,00</b>	<b>10,040,000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10,040,000,00	10,040,000,00	10,040,000,00	10,040,000,00	10,040,000,00	10,040,000,00
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>70.348.087.22</b>	<b>48.000.000.00</b>	<b>48.000.000.00</b>	<b>48.000.000.00</b>	<b>48.000.000.00</b>	<b>48.000.000.00</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>72.348.087.22</b>	<b>50.000.000.00</b>	<b>50.000.000.00</b>	<b>50.000.000.00</b>	<b>50.000.000.00</b>	<b>50.000.000.00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72.348.087.22	50.000.000.00	50.000.000.00	50.000.000.00	50.000.000.00	50.000.000.00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.000.000.00</b>	<b>2.000.000.00</b>	<b>2.000.000.00</b>	<b>2.000.000.00</b>	<b>2.000.000.00</b>	<b>2.000.000.00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00	2.000.000.00



### **3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Berdasarkan hasil proyeksi Pendapatan Belanja dan Pendapatan Daerah selama kurun waktu lima tahun, selanjutnya dapat ditentukan kapasitas riil keuangan daerah yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.16**  
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Metro**

NO	Uraian	Proyeksi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	910.828.597.272	890.089.058.898	961.296.183.610	982.457.869.748	1.008.169.318.407	1.042.422.681.675
2	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	72.348.087.224	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	Jumlah Penerimaan	983.176.684.496	940.089.058.898	1.011.296.183.610	1.032.457.869.749	1.058.169.318.407	1.092.422.681.675
	Dikurangi						
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	393.484.834.683	393.484.834.683	393.484.834.683	393.484.834.683	393.484.834.683	393.484.834.683
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	589.691.849.813	546.604.224.215	617.811.348.927	638.973.035.065	664.684.483.724	698.937.846.992

**Tabel 3.17****Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah**

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Kapasitas Riil	589.691.849.813	546.604.224.215	617.811.348.927	638.973.035.065	664.684.483.724	698.937.846.992
1	Pembangunan Sumberdaya Manusia	224.973.144.842	224.973.144.842	224.973.144.842	224.973.144.842	224.973.144.842	224.973.144.842
2	Pembangunan Infrastruktur	138.244.349.830	195.156.724.232	195.156.724.232	136.318.410.371	162.029.859.029	196.283.222.297
3	Pembangunan Sektor Ekonomi	124.973.144.842	124.973.144.842	124.973.144.842	124.973.144.842	124.973.144.842	124.973.144.842
4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Birokrasi	146.694.729.822	146.694.729.822	217.901.854.534	197.901.854.534	197.901.854.534	197.901.854.534

## BAB IV

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 4.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan kondisi umum daerah yang telah dijabarkan dalam aspek kesejahteraan manusia, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum, maka selanjutnya akan dianalisa permasalahan berdasarkan urusan. Analisa permasalahan ditarik dari data pembangunan, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang dan hasil FGD dengan OPD pengampu urusan.

**Tabel 4.1**  
**Permasalahan Pembangunan**

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
1.	Pendidikan	Belum meratanya pembangunan sarana prasarana pendidikan di seluruh sekolah di Kota Metro. Hal ini dapat dilihat dari maksimalnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sarana prasaran pendidikan, namun berdasarkan analisa belum seluruhnya mendapatkan pembangunan sesuai kebutuhan sekolah.
		Belum mencukupinya jumlah guru dan persebaran guru yang belum merata di semua jenjang pendidikan dasar. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapatnya sekolah-sekolah favorite meskipun sudah diberlakukan kebijakan zonasi. Selain itu juga dapat dilihat dari prestasi sekolah maupun anak didik
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD
2.	Kesehatan	Adanya transisi epidemiologi penyakit, yaitu perubahan tren penyakit, dari penyakit menular ke penyakit tidak menular
		Meningkatnya prevalensi penyakit menular HIV/AIDS (kenaikan rata-rata pertahun 2016-2021 sebesar 22,25%) dan TBC ((kenaikan rata-rata pertahun 2016-2021 sebesar 30,25%)
		Munculnya pandemic COVID 19
		Masih rentannya tingkat kesehatan ibu dan anak

		Belum optimalnya upaya pencegahan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitive secara terintegrasi
		Belum optimalnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinamika pembangunan kota yang cepat diikuti dengan penyediaan aksesibilitas, baik jumlah, status, maupun kualitasnya. Meningkatnya jumlah jalan baru yang disebabkan terjadinya alih fungsi lahan (dari pertanian menjadi permukiman) membutuhkan pembukaan jalan baru
		Masih rendahnya kualitas infrastruktur perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari rentannya fisik infrastruktur terhadap kerusakan, terutama infrastruktur jalan. Sedangkan untuk kondisi drainase dalam kondisi baik masih belum memadai (dapat menimbulkan banjir)
		Belum terintegrasinya gedung perkantoran pemerintahan terutama yang mengampu tugas dan fungsi bidang pelayanan publik
		Belum memadainya pembangunan sarana prasarana gedung perkantoran pemerintahan
		Belum maksimalnya pengendalian pemanfaatan ruang karena belum lengkapnya dokumen penataan ruang (RDTR dan RTBL)
		Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan infrastruktur
		Belum maksimalnya jumlah pengguna air bersih perpipaan. Masyarakat cenderung menggunakan sumur bor untuk kehidupan sehari-hari dimana kondisi ini akan menyebabkan penurunan muka air tanah
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Masih tingginya angka Backlog (ketimpangan ketersediaan rumah dengan kebutuhan tempat tinggal). Satu rumah bisa dihuni oleh lebih dari 1 kepala keluarga
		Masih terdapatnya rumah tidak layak huni
		Meningkatnya kepadatan perumahan penduduk mengakibatkan turunnya kualitas hunian
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Keterbatasan jumlah PPNS (Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
		Masih rendahnya penyelesaian tindak pidana ringan
		Masih kurangnya kelengkapan sarana pemadam kebakaran. Hal ini dapat dilihat dari jumlah mobil dan seragam pemadam kebakaran yang belum mencukupi

6.	Sosial	Belum optimalnya pengelolaan data sasaran program penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi
		Belum optimalnya penanganan PPKS
7.	Tenaga Kerja	Masih tingginya Tingkat Pengguran Terbuka. Tahun 2020, TPT Kota Metro sebesar 5,4% diatas TPT Provinsi Lampung yaitu sebesar 4,6%
		Belum optimalnya pelatihan, pembinaan dan pendampingan kewirausahaan bagi pencari kerja
		Masih rendahnya kompetensi pencari kerja
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kecendrungan meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemenuhan hak anak
9.	Pangan	Rendahnya pengawasan keamanan pangan (khusus holtikultura) akibat kurangnya sarana prasarana dan tenaga laboran
10.	Lingkungan Hidup	Masih rendahnya cakupan area pelayanan pengelolaan sampah (55%) yang disebabkan oleh masih kurang memadainya jumlah sarana parasaran persampahan
		Masih rendahnya kualitas Tempat Pengelolaan Akhir yang menjadi salah satu indikator penilaian Adipura
		Belum tersusunya dokumen induk pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
		Rendahnya pengelolaan sampah di tingkat hulu atau di tingkat rumah tangga
11.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memproses administrasi kependudukan.
12.	Pemberdayaan Masyarakat	Masih rendahnya kesadaran tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan
13.	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Masih ditemukannya angka kelahiran remaja (usia 15-19 tahun)/ASFR
		Kecendrungan meningkatnya Total Fertility Rate
14.	Perhubungan	Belum tersedianya lahan parkir yang memadai. Hal ini terlihat dari banyaknya kendaraan yang parkir di bahu jalan
		Belum optimalnya fungsi terminal Kota Metro
		Belum optimalnya pengaturan lalu-lintas

15.	Komunikasi dan Informatika	Masih rendahnya bandwidth yang disediakan oleh Pemerintah Kota Metro untuk perkantoran maupun ruang public
		Belum optimalnya pemanfaatan Radio Metropolis sebagai radio pemerintah
		Belum optimalnya fungsi persandian
		Belum terintegrasinya aplikasi antar OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Metro
		Belum optimalnya pemanfaatan server pemerintah
16.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Masih lemahnya jiwa entrepreneurship pelaku koperasi dan UMKM dalam mengembangkan usahanya
		Masih rendahnya kapasitas koperasi dan UMKM dalam mengakses permodalan
		Kurangnya daya saing produk UMK Kota Metro
		Menurunnya produktivitas pelaku usaha kecil dan menengah akibat pandemi COVID-19
17.	Penanaman Modal	Iklm investasi yang belum kondusif
18.	Kepemudaan dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan terhadap seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Kota Metro
		Masih kurangnya jumlah pelatih olahraga yang bersertifikat.
		Masih rendahnya kualitas sistem pembinaan olahraga
		Belum optimalnya pemanfaatan prasarana olahraga
19.	Kebudayaan	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan cagar budaya
		Belum optimalnya pembinaan terhadap sanggar seni yang ada di Kota Metro
20.	Perpustakaan	Belum optimalnya pembinaan terhadap Rumah Pintar Kelurahan dan perpustakaan sekolah
21.	Kearsipan	Belum optimalnya pembinaan terhadap perangkat daerah untuk pengelolaan arsip secara baku
		Masih rendahnya jumlah sumberdaya aparatur pengelola kearsipan
22.	Perikanan	Usaha perikanan darat masih pada skala usaha rumah tangga dan sulit untuk berkembang karena kurangnya sifat kompetisi masyarakat/petani perikanan
23.	Pariwisata	Belum optimalnya pengembangan sector pariwisata, baik dari sarana prasarana maupun regulasi

		Belum optimalnya pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata
		Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif.
24.	Pertanian	Kecendrungan alih fungsi lahan pertanian meningkat
25.	Perdagangan	Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok pedagang/usaha informal
		Kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang info perdagangan di Pasar Kota Metro
		Rendahnya pemahaman pedagang tentang regulasi dan kebijakan pemerintah tentang lokasi usaha
26.	Perindustrian	Belum optimalnya industry dalam memanfaatkan potensi dan peluang pasar

#### 4.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis disusun berdasarkan data capaian pembangunan dan kondisi dampak pandemi COVID-19 yang masih membutuhkan penanganan di pembangunan kedepannya.

**Tabel 4.2**  
**Isu Strategis**

NO	URUSAN	ISU STRATEGIS
1.	Pendidikan	1. Pemerataan pembangunan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
		2. Peningkatan akreditasi sekolah
		Peningkatan pembangunan pendidikan jenjang PAUD
2.	Kesehatan	Peningkatan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular
		Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
		Percepatan penanganan stunting
		Peningkatan Universal Health Coverage



3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur perkotaan
		Pengembangan/pembangunan gedung kantor pemerintahan terintegrasi
		Peningkatan kualitas penataan ruang
		Penguatan penyediaan air minum berkelanjutan (perpiayaan)
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan rumah tinggal layak huni
		Peningkatan pengelolaansanitasi wilayah permukiman
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Peningkatan sarana prasarana penanggulangan bencana
6.	Sosial	Peningkatan kualitas data melalui data terpadu kesejahteraan social (DT/KS)
		Peningkatan persentase penanganan PPKS
7.	Tenaga Kerja	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka
		Peningkatan kualitas pelatihan kewirausahaan berbasis e-commerce
		Peningkatan kompetensi pencari kerja
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan upaya pemenuhan hak anak melalui pengembangan Kota Layak Anak
9.	Pangan	Peningkatan pengawasan keamanan pangan
10.	Lingkungan Hidup	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengelolaan sampah
		Peningkatan kualitas perencanaan bidang lingkungan hidup
		Peningkatan pengelolaan sampah melalui startegi 3R di rumah tangga
11.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Peningkatan akses pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digital
12.	Pemberdayaan Masyarakat	Membangun kesadaran masyarakat tentang

		peran masyarakat dalam pembangunan
13.	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka menyongsong bonus demografi
14.	Perhubungan	Pembangunan lahan parkir yang terintegrasi
		Pengembangan fungsi terminal Kota
		Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu-lintas
15.	Komunikasi dan Informatika	Peningkatan kualitas jaringan internet untuk perkantoran dan ruang public
		Pengembangan satu data dan data center pemerintah kota melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
16.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM
		Peningkatan pembinaan produksi UMK
		1. Pengembangan sistem kewirausahaan berbasis sentra; 2. Pengembangan pemasaran berbasis online
17.	Penanaman Modal	Peningkatan iklim investasi melalui penguatan regulasi
18.	Kepemudaan dan Olahraga	Perluasan sasaran pembinaan organisasi kepemudaan
		Peningkatan kualitas tenaga pelatih
		Peningkatan sistem pembinaan olahraga
		Peningkatan kapasitas prasarana olahraga
19.	Kebudayaan	Optimalisasi pembangunan bidang kebudayaan
20.	Perpustakaan	Peningkatan pembangunan dan optimalisasi perpustakaan kelurahan dan perpustakaan sekolah
21.	Kearsipan	Optimalisasi kinerja bidang kearsipan
		Peningkatan kapasitas dan jumlah aparatur pengelola kearsipan
22.	Perikanan	Peningkatan pembinaan kepada rumah tangga perikanan
23.	Pariwisata	Peningkatan kualitas kebijakan sector pariwisata

		Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di sector pariwisata
24.	Pertanian	Peningkatan pertanian perkotaan
25.	Perdagangan	Penguatan fungsi perdagangan
		Peningkatan pembinaan pedagang terkait kebijakan pemerintah
26.	Perindustrian	Peningkatan kapasitas pelaku industry (konvensional dan kreatif)

### **4.3. Rekomendasi KLHS RPJMD Kota Metro dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

#### **4.2.1. Rekomendasi Alternatif untuk TPB Prioritas**

Untuk merumuskan alternatif skenario dan upaya intervensi yang direkomendasikan untuk memenuhi target capaian indikator TPB yang telah ditetapkan secara nasional, diperlukan data target yang telah ditetapkan secara nasional, baik melalui peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Presiden atau tercantum dalam dokumen Rencana Aksi Nasional (selanjutnya disingkat dengan sebutan RAN) TPB Indonesia. Namun demikian, target indikator TPB dalam Buku Metadata TPB/SDGs Indonesia Edisi II, terutama untuk indikator-indikator yang baru ditambahkan, belum terpublikasi. Selain itu, untuk menentukan proyeksi capaian sampai dengan tahun 2026 dan 2030, data capaian indikator TPB Kota Metro sejak tahun 2015 belum terkumpul dan/ atau tersedia. Salah satu hal yang menyebabkan hal ini adalah dalam penyusunan KLHS RPJMD Kota Metro 2021-2026, Kota Metro mengacu pada indikator-indikator TPB terkini yang tercantum dalam Buku Metadata TPB/SDGs Indonesia Edisi II. Berkaitan dengan kedua hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Metro akan melakukan perhitungan dan perumusan proyeksi capaian sesegera mungkin serta melakukan revisi laporan ini, setelah data-data yang diperlukan dalam perhitungan, telah tersedia dan dipublikasikan. Dalam laporan ini, proyeksi capaian BAU dan skenario alternatif yang disajikan, adalah untuk indikator-indikator yang kedua data yang diperlukan sudah tersedia. Rekomendasi Skenario Intervensi Alternatif untuk TPB Prioritas.

## **A. Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab**

Berdasarkan data dan hasil analisis capaian TPB, untuk TPB nomor 12 yaitu produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, termasuk salah satu TPB yang harus diprioritaskan pemenuhan targetnya, khususnya pada rentang periode tahun 2021 s.d. 2026 ini. Pola produksi dan konsumsi yang terjadi atau diterapkan berdampak pada kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam. Selama proses produksi, selain memerlukan sumber daya alam sebagai bahan baku namun juga akan menimbulkan dampak pada lingkungan, seperti sampah, limbah, emisi dan/ atau efluen yang berpotensi mencemari dan/ atau merusak lingkungan hidup. Begitu pula selama proses konsumsi, mulai dari kemasan produk sampai dengan sisa produk yang tidak dapat dikonsumsi berpotensi mengganggu kualitas lingkungan hidup. Potensi ini akan menjadi ancaman serius saat tidak ada perubahan perilaku produksi dan konsumsi menjadi yang bertanggung jawab, termasuk pula perlu cara tertentu untuk menjawab tantangan penambahan jumlah penduduk, yang kemungkinan akan berdampak pada keragaman pola perilaku produksi dan konsumsi.

Limbah dan sampah merupakan sebuah produk yang bersumber dari gerak metabolisme pertumbuhan dan pergerakan kota, yang keberadaannya tidak dapat dihindari dan dicegah. Seiring dengan semakin bertambahnya penduduk dan semakin beragamnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota masyarakat, limbah dan sampah pun semakin bertambah banyak dan beragam. Jika tidak dikelola sebaik mungkin, limbah dan sampah akan menjadi sumber penyakit yang akan berdampak pada penurunan kualitas kehidupan warga masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Kota Metro perlu untuk melakukan berbagai macam terobosan dan inovasi dalam pengelolaan limbah dan sampah, bukan untuk semata-mata memenuhi target yang telah ditetapkan secara nasional, namun lebih pada keberlanjutan peningkatan kualitas kehidupan warga masyarakat dan kota sendiri.

Pengelolaan limbah dan sampah perkotaan merupakan salah satu unsur standar pelayanan minimal sekaligus menjadi urusan wajib Pemerintah Kota. Warga masyarakat memiliki hak memperoleh pelayanan berkualitas, sementara Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan berkualitas dalam pengelolaan limbah dan sampah. Namun demikian, pada praktiknya,

pengelolaan limbah dan sampah tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah sendiri, perlu mengikutsertakan peran seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa langkah yang diusulkan sebagai rekomendasi skenario alternatif untuk tercapainya target serta indikator produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab di Kota Metro, adalah:

1. Evaluasi keefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, termasuk penerapan penegakan hukum serta pembentukan satuan tugas khusus jika diperlukan
2. Peningkatan manajemen perizinan dan pengawasan termasuk penerapan mekanisme PROPER pada pelaku usaha terkait dengan penerapan prinsip-prinsip produksi dan teknologi bersih, *green industry*, *green manufacture*, *life cycle assessment*, sistem manajemen lingkungan
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang berperan dalam penataan serta penaaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pula di dalamnya untuk pengelolaan sampah dan limbah serta kajian lingkungan hidup dan/ atau sumber daya alam, seperti: KLHS, Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan, Jasa Ekosistem, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Penghematan dan pengukuran pemanfaatan sumber daya alam dalam proses produksi barang maupun jasa
5. Menumbuhkembangkan budaya produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, termasuk edukasi, promosi, diseminasi informasi, perubahan perilaku dengan memanfaatkan berbagai jenis media serta melalui berbagai aktifitas komunitas
6. Pembinaan dan pendampingan, fasilitasi dan asistensi serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah
7. Peningkatan sistem manajemen, sarana dan prasarana terkait dengan produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, seperti: peningkatan pengelolaan sampah berbasis komunitas, sarana transportasi angkutan sampah, tempat pemrosesan akhir sampah, revitalisasi tempat pemrosesan akhir sampah, pembangunan sel baru pemrosesan akhir sampah dengan menerapkan teknik dan teknologi terkini yang relatif lebih ramah

- lingkungan, bank sampah, pusat daur ulang, tempat pemrosesan terpadu, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun skala lokal kota
8. Peningkatan kinerja laboratorium lingkungan hidup daerah, memperbanyak lokasi atau titik pengambilan/ pengujian sampel lingkungan, identifikasi dan inventarisasi emisi gas rumah kaca
  9. Peningkatan peran serta berbagai pihak pemangku kepentingan, entitas pendidikan dan komunitas masyarakat, termasuk pihak pelaku usaha melalui program *extended producer responsibility* dan *corporate social responsibility* serta para filantropi dalam program terkait produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab.
  10. Penerapan teknik atau metode baru dalam pengelolaan sampah sebagai penerapan prinsip 8R dan siklus tertutup pengelolaan sampah (*closed loop, circular economy*) melalui: komposting, biodigester, *maggot black soldier flies*, peuyeumisasi, RDF, karbonisasi, pirolisis, *landfill minning*, pengelolaan gas methane dan lain sebagainya
  11. Peningkatan kerjasama dengan pihak perseorangan atau perusahaan swasta dalam pengolahan air limbah domestik maupun sampah, seperti sokli, kelompok karang taruna, kelompok masyarakat, dan sejenisnya

## **B. Ekosistem Daratan**

TPB nomor 15 yaitu ekosistem daratan menjadi TPB prioritas urutan kedua. TPB ini berhubungan erat dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan kategori daya dukung lahan dan daya dukung fungsi lindung, indeks kualitas tutupan lahan dalam indeks kualitas lingkungan hidup dan seluruh kategori jasa ekosistem. TPB ini juga berkorelasi sangat kuat dengan konservasi, pemanfaatan dan tata guna lahan.

Pemerintah Kota Metro harus mempercepat penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk melengkapi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro yang telah diterbitkan dan berlaku sebelumnya. Sebagaimana RTRW, RDTR ini akan dilengkapi pula dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pemerintah Kota Metro melakukan upaya tindak lanjut berupa pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota tentang Tata Laksana Peraturan

Daerah tentang Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman. Dokumen-dokumen ini menjadi salah satu dasar acuan yang dipertimbangkan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/ atau surat izin lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang atau lahan. Selain itu, Pemerintah Kota Metro akan melaksanakan upaya peningkatan aspek pengawasan dan penegakan hukum, untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pemanfaatan ruang atau lahan.

Penaatan dan penataan pemanfaatan tata ruang wilayah dalam upaya peningkatan kualitas ekosistem daratan daerah Kota Metro, beberapa langkah yang diusulkan sebagai rekomendasi skenario alternatif pemenuhan target TPB, antara lain:

- a. Penegakan ketentuan rencana tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana lainnya
- b. Penambahan luas area kawasan konservasi atau ruang terbuka hijau
- c. Peningkatan upaya perawatan hutan kota
- d. Pengaturan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang wilayah
- e. Peningkatan efektifitas instrumen-instrumen pengendalian ruang
- f. Penerapan insentif dan disinsentif, penjatuhan sanksi serta hukuman bagi pelanggar tata ruang
- g. Pembentukan bank tanah
- h. Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, meningkatkan ketangguhan wilayah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan pengarusutamaan kesiapsiagaan serta tanggap darurat bencana,
- i. Pengembangan budaya sadar bencana
- j. Peningkatan ruang lingkup pendampingan, pembinaan dan pengawasan dengan pendekatan manajemen risiko dan memasukan kriteria proper, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen mutu, proses produksi bersih, produk ramah lingkungan, industri hijau kepada para pelaku usaha
- k. Peningkatan pengujian kualitas tanah, termasuk dengan memperbanyak lokasi pengambilan sampel
- l. Peningkatan kinerja laboratorium lingkungan hidup yang berada di daerah

- m. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan perizinan lingkungan, juga dalam melakukan pemantauan dan pengawasan kinerja pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan oleh para pelaku usaha
- n. Peningkatan sistem, sarana dan prasarana pelayanan, akses dan keterjangkauan pengaduan yang disampaikan masyarakat
- o. Peningkatan sistem penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan pemantauan pelaksanaan program rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak pencemar
- p. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya dengan institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum, terutama penjatuhan sanksi atau hukuman atas tindak pidana yang terkait peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup serta sumber daya alam
- q. Upaya lain yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dalam rangka untuk meminimalisasi ketidakteraturan pemanfaatan ruang, potensi munculnya kawasan kumuh baru serta memaksimalkan komposisi atau proporsionalitas antara kawasan konservasi dan kawasan budidaya, dengan menerapkan pola/ konsep *compact city*, *mix use* dan vertikal. Konsep *compact city* berbasis pada prinsip *simple/ small is beautiful*, sederhana atau kecil itu indah. Konsep ini memaksimalkan berbagai macam fungsi pada suatu kawasan/ lahan, sehingga lahan-lahan yang dulunya hanya dimanfaatkan untuk satu fungsi saja, di masa mendatang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam fungsi (*mix use*), untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Metro.
- r. Konsep bangunan gedung, yang sebelumnya lebih banyak membangun secara horizontal (mendatar), di masa yang akan datang, diarahkan untuk membangun gedung bertingkat. Dalam konsep *mix use* ini, tanah mentah/ kosong yang belum terolah, belum dilengkapi sarana/ prasarana, aksesibilitasnya masih rendah dan belum produktif diolah menjadi tanah yang matang. Beberapa hal teknis yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan lahan campuran, antara lain: penentuan dan analisis karakteristik lahan, pemilihan dan penentuan lokasi, identifikasi dan



inventarisasi obyek pengguna (pemanfaat) lahan, fasilitasi dan diseminasi informasi serta edukasi kepada masyarakat

- s. Peningkatan upaya untuk memperpendek jarak dan waktu tempuh antara pemukiman dengan pusat-pusat aktifitas keseharian luar rumah, yang diikuti pula dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik yang memadai. Hal ini sesuai dengan upaya penurunan dampak rumah kaca dari sektor transportasi dan permukiman.
- t. Pada wilayah yang menjadi pusat pemukiman warga masyarakat, Pemerintah Kota Metro akan melaksanakan penataan sebaik mungkin, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai kawasan kumuh wilayah perkotaan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota, Pemerintah Kota Metro akan melakukan upaya pengentasan sekaligus peningkatan kualitas kawasannya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi penyebaran kawasan perumahan atau pemukiman yang tidak tertata, mencegah timbulnya kawasan kumuh baru serta tetap menyediakan ruang wilayah yang cukup bagi warga masyarakat untuk melakukan aktivitas lainnya. Pemerintah Kota Metro akan melaksanakan penyusunan perencanaan (jangka panjang, menengah, tahunan), penyelenggaraan (perlindungan, pemulihan, peningkatan fungsi, pemeliharaan fungsi, dengan menerapkan berbagai macam metode, seperti: vegetatif, agronomi, sipil teknis, manajemen atau metode lain sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi) konservasi tanah dan air
- u. Pemerintah Kota Metro juga akan menyelenggarakan perlindungan fungsi tanah (pengendalian konversi/ alih fungsi, pengamanan, penataan kawasan), penataan kawasan (pendeliniasian kawasan, penandaan batas).

### **C. Air Bersih dan Sanitasi Layak**

TPB nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak juga menjadi prioritas berikutnya. TPB ini sangat erat berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kategori air, jasa ekosistem untuk penyediaan sumber air bersih, indeks kualitas air dalam indeks kualitas lingkungan hidup dan status air. Ketersediaan dan akses air minum sudah selayaknya menjadi

bagian dari prioritas pembangunan, sebab isu air minum sangat berkaitan erat dengan isu pembangunan lain seperti kesehatan, kemiskinan, pendidikan dan kualitas kehidupan itu sendiri.

Penyediaan air minum yang layak, aman dan berkelanjutan merupakan tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Kota Metro. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak air minum yang harus tersedia. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak dan beragam kegiatan kehidupan, baik domestik maupun non domestik yang memerlukan pasokan air bersih. Semua warga masyarakat memiliki hak dasar untuk terpenuhinya kebutuhan akan air minum yang layak, aman dan berkelanjutan. Bukan hanya ketersediaannya saja yang harus diperhatikan pemenuhannya, melainkan juga sarana, prasarana, akses, keterjangkauan dan keberlanjutannya pun harus menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh Kota Metro. Selain itu, tantangan lainnya bukan sekadar kuantitas air minum namun juga kualitasnya. Tantangan berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan air minum dengan pembuatan sumur bor dan sumur gali di rumah atau tempat kediamannya masing-masing. Hal ini menyebabkan pelayanan air minum perpipaan berkurang atau luas cakupannya layanannya masih rendah. Selain itu, sumur gali dan sumur bor pun juga masih bermasalah dalam hal konstruksi pengamanannya juga jarak antara sumur gali dengan tangki septiknya.

Untuk menjamin ketersediaan air yang cukup dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari seluruh warga masyarakat Kota Metro, termasuk untuk menjaga dan meningkatkan indeks kualitas air, Pemerintah Kota Metro akan melaksanakan beberapa hal, antara lain:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas badan air serta daerah aliran dan sempadannya, seperti sungai, anak sungai, saluran irigasi, drainage, termasuk volume, geometri dan dimensinya;
- b. Menjaga dan meningkatkan kualitas air permukaan (sungai), dengan cara meminimalisasi beban pencemaran, terutama sampah, limbah domestik dan limbah industri dengan pembangunan sistem pengelolaan air limbah atau limbah cair, peningkatkan penyelenggaraan dan perizinan pengolahan limbah cair;

- c. Meminimalisasi pemanfaatan atau penyalahgunaan lahan di daerah milik badan air/ sempadan badan air untuk kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya;
- d. Menyelenggarakan kegiatan konservasi lahan di daerah-daerah milik badan air, seperti dengan melakukan penanaman pohon;
- e. Melakukan serta memperbanyak titik lokasi pengukuran dan analisis kualitas air permukaan khususnya air sungai secara berkala;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas wilayah-wilayah serapan air, termasuk embung-embung dan sarana prasarana pengendalian banjir;
- g. Menerapkan teknik dan teknologi penangkapan atau pemanenan air hujan, memperbanyak pembangunan sumur-sumur resapan dan pembuatan lubang biopori;
- h. Meningkatkan program pengawasan ketaatan dan kesesuaian pembangunan sarana dan prasarana sistem pengolahan air limbah domestik dan limbah cair;
- i. Melaksanakan penyusunan, penetapan, penerapan dan pengendalian kebijakan, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- j. Memrioritaskan pemanfaatan air permukaan daripada air tanah;
- k. Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi, termasuk teknik gelontor, tetes, curah yang dilakukan secara simultan;
- l. Meningkatkan pengelolaan kawasan lindung sumber air;
- m. Meningkatkan dan memaksimalkan kinerja unit pelaksana teknis daerah air minum;
- n. Menyelenggarakan perizinan dan pengawasan pemanfaatan air tanah, khususnya hak izin usaha air;
- o. Melindungi dan melestarikan sumber air;
- p. Melakukan pengawetan air, pengendalian kualitas air dan pengendalian pencemaran;
- q. Pendayagunaan sumber daya air meliputi penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan; dan
- r. Mengikutsertakan masyarakat serta berbagai pihak antar dan lintas sektor dalam upaya konservasi sumber daya air.

Dalam hal penyediaan dan pelayanan publik terkait dengan air bersih bahkan untuk kebutuhan pasokan pangan, Pemerintah Kota Metro akan melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak melalui berbagai macam metode, seperti: *handshake agreements, free for service contracts, joint agreements, jointly formed authorities* dan *regional bodies*.

Selain hal-hal tersebut di atas, untuk pelayanan air bersih, beberapa skenario alternatif yang diusulkan dapat dilakukan oleh Kota Metro, adalah:

- a. Melakukan revitalisasi terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi penyediaan atau pasokan air minum;
- b. Memperluas area cakupan sistem perpipaan pelayanan air minum;
- c. Mempersyaratkan layanan perpipaan air minum sebagai bagian dari ketentuan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan atau izin lainnya;
- d. Mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah untuk tujuan usaha komersial;
- e. Membangun dan/ atau meningkatkan kinerja laboratorium, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan pemantauan dan analisis kualitas air minum secara berkala.

Sanitasi berkaitan erat dengan pengelolaan air limbah domestik. Untuk strategi akses air minum yang layak, aman dan berkelanjutan telah diuraikan pada paragraf di atas. Untuk pengelolaan air limbah domestik, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan sampah dan limbah, dapat diusulkan strategi:

- a. Pembinaan dan pendampingan, fasilitasi dan asistensi, pengawasan dan penegakan hukum peraturan perundang-undangan terkait sanitasi;
- b. Tangki septik skala personal, SPALD-S/T sebagai bagian persyaratan perizinan;
- c. Penyelenggaraan program layanan lumpur tinja terjadwal;
- d. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat maupun terpusat;
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dan
- f. Revitalisasi instalasi pengolahan lumpur tinja,

#### **D. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan**

Kota selalu memiliki daya tarik tersendiri, baik bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya maupun masyarakat di sekitarnya. Kota yang berkegiatan utama sebagai wilayah pusat kegiatan perekonomian, dan menyediakan berbagai macam sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjadi tempat tujuan (destinasi) dalam bermata pencaharian. Hal ini berdampak tersendiri bagi sendiri, selain laju pertumbuhan jumlah penduduk, baik yang bersifat permanen maupun sementara (commute), namun juga sektor lainnya, termasuk penataan ruang wilayah.

Secara administratif, luas wilayah kota tidak akan berubah. Luas wilayah yang tidak berubah, kondisi atau karakteristik wilayah yang juga tidak berubah dihadapkan pada permasalahan yang timbul dari pertumbuhan jumlah penduduk. Ketidakseimbangan luas lahan yang tersedia dengan jumlah penduduk atau laju pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan-lahan perumahan menjadi salah satu penyebab munculnya kawasan kumuh perkotaan, termasuk di wilayah Kota Metro. Selain itu, Kota Metro yang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat di sekitarnya, tidak dapat menghalangi, membatasi bahkan melarang terjadinya perpindahan penduduk dari luar kota, baik untuk sementara waktu ataupun untuk menetap dalam rentang waktu yang lama atau mungkin selamanya (permanen). Daya tarik yang dimiliki oleh Kota Metro ini, menjadi salah satu penyebab harga-harga lahan/ tanah dan rumah semakin mahal. Hal ini yang kemudian memacu timbulnya wilayah-wilayah kumuh baru di Kota Metro. Pemerintah Kota Metro perlu melakukan berbagai macam upaya alternatif sebagai solusi terobosan untuk mengentaskan masalah wilayah kumuh sebagaimana pula telah ditargetkan secara nasional. Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk menjamin akses dan keterjangkauan bagi semua warga masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, ini dapat dilakukan dengan:

- a. Penerapan prinsip *green city, sustainable city, smart sustainable city, low carbon city, resilient city* pada pembangunan kota
- b. Menyediakan akses terhadap sistem transportasi publik yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua

- c. Menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif
- d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ instansi/ institusi di tingkat Pemerintah Provinsi dan Nasional, misalnya melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
- e. Peningkatan ketegasan dalam pengawasan serta penerapan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Metro terkait dengan perencanaan dan penataan perumahan dan kawasan permukiman
- f. Peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan rencana tata ruang
- g. Pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun
- h. Peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh
- i. Penguatan implementasi standar keandalan dan tertib bangunan, pengembangan teknologi bangunan hijau/ ramah lingkungan
- j. Peningkatan kerjasama multi dan antar pihak dalam penyediaan perumahan
- k. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat tangguh bencana
- l. Pencegahan dan penanggulangan bencana lintas sektor
- m. Pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis masyarakat sertaidentifikasi dan inventarisasi daerah rawan dan terdampak bencana

Dalam era perubahan iklim, cuaca ekstrim dan pemanasan global seperti yang sedang terjadi saat ini, internasilsasi dan pengarusutamaan pembangunan rendah karbon, yaitu pembangunan yang meminimalisasi emisi gas-gas rumah kaca merupakan sebuah hak yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota. Salah satu sektor pembangunan rendah karbon adalah sektor transportasi, yang kemudian bertumpu pada mobilitas warga masyarakat bukan pergerakan alat angkut atau transportasinya. Dengan demikian, transportasi umum dan mobilitas warga dengan unmachined vehicles perlu kembali digaungkan kembali. Jalan raya merupakan prasarana transportasi dan mobilitas, yang memudahkan pergerakan atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, dengan aman, selamat dan nyaman. Kualitas jalan raya turut mempengaruhi kualitas transportasi dan mobilitas, namun juga kelancaran rantai pasokan

berbagai macam kebutuhan, termasuk juga kualitas lingkungan dan psikologis warga masyarakatnya. Beberapa strategi yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Metro untuk urusan peningkatan kualitas jalan raya, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan kualitas jalan;
- b. Membangun *early warning system, reporting, response, service level arrangement* kerusakan dan perbaikan jalan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait dengan manajemen atau rekayasa lalu lintas, penyesuaian tonase kendaraan dengan kualitas atau konstruksi jalan;
- d. Meningkatkan sistem pengawasan pembangunan jalan;
- e. Meningkatkan kualitas drainage dan jalur hijau di badan milik jalan;
- f. Membangun konstruksi jalan dengan menyesuaikan data klimatologis dan karakteristik geologi
- g. Penerapan insentif dan disinsentif bagi pengguna transportasi umum, khususnya dalam kota;
- h. Penerapan program “satu hari naik angkot”
- i. Pembangunan proyek percontohan transportasi massal perkotaan yang aman, nyaman dan ramah lingkungan dengan mengikutsertakan para pengusaha angkutan dalam perkotaan;
- j. Pembangunan kawasan *car free zone, car free day, bike to work, car sharing*

#### **E. Penanganan Perubahan Iklim**

Berbagai macam ragam kegiatan di wilayah perkotaan, terutama kegiatan-kegiatan yang menghasilkan produk samping berupa emisi gas rumah kaca, berdampak signifikan terhadap terjadinya fenomena perubahan iklim. Berdasarkan hasil perhitungan, diprediksikan bahwa penggunaan bahan bakar fosil dapat berkontribusi sebanyak 57 % emisi gas rumah kaca dan alih fungsi lahan, khususnya dari wilayah konservasi dan ruang terbuka hijau berkontribusi sebanyak 30%. Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim juga harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- a. Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon, ekonomi hijau, sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, penurunan emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- b. Penyusunan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca, yang kemudian diacu untuk menyusun dan mengawasi pelaksanaan program kerja/ kegiatan;
- c. Pembangunan wilayah dan/ atau pemanfaatan ruang/ lahan yang didasarkan pada peta kerawanan bencana atau kerentanan perubahan iklim;
- d. Upaya mitigasi dan peningkatan kapasitas adaptif melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pelatihan dan pendidikan kebencanaan kepada seluruh masyarakat, termasuk pada para relawan;
- e. Pembentukan desa tangguh bencana, keluarga tangguh bencana, program kampung iklim

Untuk menjaga kualitas udara tetap berkategori baik dan layak dimanfaatkan secara alamiah atau meningkatkan kualitasnya untuk mencapai nilai indeks kualitas udara setinggi mungkin, Pemerintah Kota Metro perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Meningkatkan keefektifan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan untuk sumber tidak bergerak yaitu industri-industri yang dalam proses kegiatannya mengeluarkan emisi yang berpotensi mengandung zat pencemar udara;
- b. Meningkatkan keefektifan dan pengendalian serta pembinaan untuk sumber bergerak yaitu kendaraan bermotor, dengan cara melakukan uji emisi;
- c. Melakukan dan memperbanyak titik lokasi pengujian dan analisis kualitas udara wilayah perkotaan secara berkala pada semakin banyak titik/ lokasi, baik dengan metode aktif maupun pasif serta kontinu.

Sedangkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, Pemerintah Kota Metro perlu menerapkan beberapa strategi sebagai berikut:



- a. Sektor pertanian/ perkebunan/ peternakan/ kehutanan: penggunaan pupuk organik dan biomassa, pengaturan pola teknik pengairan, pengolahan limbah peternakan, pelestarian kawasan konservasi, reboisasi dan penanaman pohon;
- b. Sektor energi: penghematan konsumsi energi, pengembangan sumber energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan, pengembangan angkutan umum massal
- c. Sektor pengelolaan sampah dan limbah: melakukan pengelolaan sampah dan limbah dengan siklus tertutup, menerapkan prinsip 8R secara efisien dan efektif, merehabilitasi TPAS lama dan atau membangun sel baru untuk pemrosesan akhir sampah dengan metode *controlled landfill*

Selain itu, Pemerintah Kota Metro dapat menerbitkan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan terhadap bencana perubahan iklim serta *mainstreaming* dan internalisasi pembangunan rendah karbon.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Metro, antara lain:

- Memperkuat data, informasi dan literasi tentang bencana perubahan iklim
- Memperkuat sistem regulasi dan tata kelola bencana
- Peningkatan rencana aksi pengurangan risiko bencana perubahan iklim
- Pemberdayaan masyarakat
- Pengembangan *ownership* dan komitmen pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan
- Pengembangan kapasitas dan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia
- Pengembangan *enabling environment* berupa kebijakan serta penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan perubahan iklim
- Penyusunan rencana induk dan peta jalan penanganan perubahan iklim tingkat kota
- Pengembangan jejaring dan jaringan kerja, koordinasi dan sinergitas antar entitas pembangunan

- Diseminasi informasi, komunikasi, promosi dan edukasi penanganan perubahan iklim
- Penguatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada sektor utama, yaitu: ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, kesehatan, permukiman, infratraktur dan ekosistem lainnya.
- Peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi melalui pertanian dan perkebunan berkelanjutan, mempertahankan fungsi ekosistem, mengurangi laju alih fungsi lahan, rehabilitasi daerah aliran sungai dan sempadan badan air, mengurangi penebangan pohon dan deforestasi, penanggulangan degradasi lahan, perbaikan efisiensi energi dan pola konsumsi.
- Peningkatan ketahanan sosial dan sumber penghidupan melalui peningkatan kapasitas adaptasi dengan membangun sistem peringatan dini, kampanye kesadaran publik,
- Pengembangan penggunaan varietas rendah emisi di lahan pertanian, penerapan sistem pengairan sawah yang hemat air.
- Pelaksanaan analisis dan manajemen risiko lingkungan, perhitungan kerentanan dan ketahanan iklim.

#### **4.2.2. Rekomendasi Alternatif Capaian Indikator TPB**

##### **A. Pengentasan Kemiskinan**

Persentase masyarakat miskin di Kota Metro sampai dengan tahun 2019 yang lalu belum memenuhi target yang telah ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota Metro menghadapi tantangan bukan saja mengentaskan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, namun juga mencegah timbulnya kemiskinan baru. Pengentasan kemiskinan tidak lagi berfokus pada penyelesaian urusan finansial, namun harus secara simultan menyelesaikan pula dimensi lainnya, seperti: tempat tinggal, jaminan kesehatan, jaminan sosial, sanitasi, energi dan lainnya. Proyeksi persentase masyarakat miskin di Kota Metro, jika tidak dilakukan upaya intervensi dalam pengentasannya, terdapat kecenderungan penurunan yang tidak signifikan, dengan laju penurunan  $\pm 0,42$  % per tahun, tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan secara nasional. Untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional yaitu 0,00 % pada tahun 2030 yang akan datang, Kota Metro

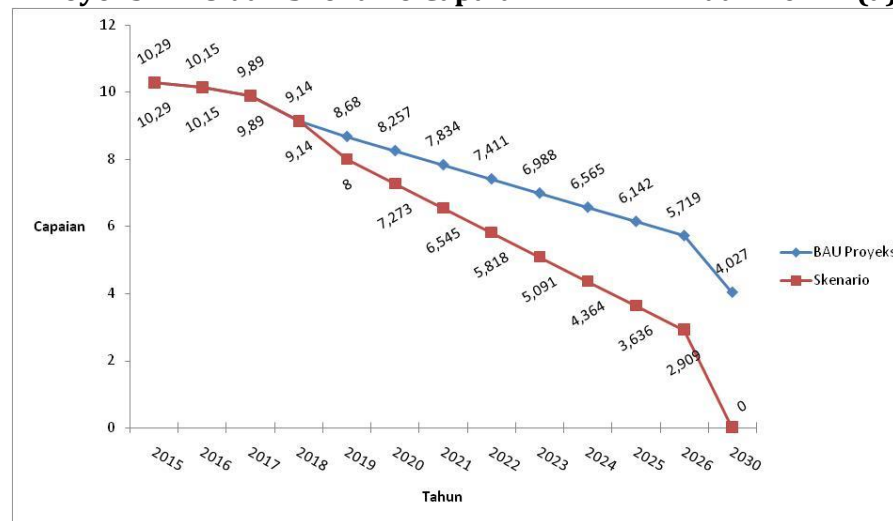
perlu melaksanakan berbagai macam upaya intervensi untuk meningkatkan laju penurunan paling sedikit  $\pm 0,73$  % per tahun. Berdasarkan Buku Metadata Edisi II TPB/SDGs Indonesia, prosentase masyarakat yang hidup di bawah garis batas kemiskinan merupakan indikator 1.2.1.\* dan 10.1.1.(a). Proyeksi kecenderungan prosentase masyarakat miskin di Kota Metro, baik tanpa upaya intervensi (*bussiness as usual*) maupun dengan upaya tambahan tersaji pada Tabel 4.2 dan Gambar 4.1.

**Tabel 4.3**  
**Proyeksi BAU dan Skenario Capaian TPB 1.2.1.\* dan 10.1.1.(a)**

No.	Indikator		Tahun													Rate
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	
1	1.2.1.* 10.1.1.a	BAU Proyeksi	10,29	10,15	9,89	9,14	8,68	8,26	7,83	7,41	6,99	6,57	6,14	5,72	4,03	- 0,42
		Skenario	10,29	10,15	9,89	9,14	8,00	7,27	6,55	5,82	5,09	4,36	3,64	2,91	0,00	- 0,73

*Sumber: Analisis Tim KLHS RPJM Kota Metro, 2021*

**Gambar 4.1**  
**Proyeksi BAU dan Skenario Capaian TPB 1.2.1.\* dan 10.1.1.(a)**



*Sumber: Analisis Tim KLHS RPJM Kota Metro, 2021*

Pemerintah Kota Metro juga harus mampu memastikan masyarakat yang sudah berada sedikit di atas garis kemiskinan, tidak kembali hidup miskin, terutama pada saat terkena dampak bencana, termasuk dalam masa tanggap darurat pandemik covid-19. Dengan demikian, Pemerintah Kota Metro perlu menerbitkan kebijakan dengan mempertimbangkan aspek makro ekonomi (pengendalian pertumbuhan dan inflasi terutama harga bahan pokok) serta mikro ekonomi (perlindungan sosial dan ekonomi produktif) dan berkomitmen dalam pengalokasian anggaran yang memadai dalam program kegiatan yang bertujuan pengentasan kemiskinan. Beberapa skenario intervensi alternatif yang direkomendasikan untuk diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Metro, antara lain:

- a. Revitalisasi (termasuk pendataan ulang/ sensus jika diperlukan, termasuk validasi data) sistem basis data dan manajemen informasi yang berkenaan dengan masyarakat miskin, dengan menerapkan prinsip “*by name by address*” serta pemetaan spasial;
- b. Pemantapan pengelolaan basis data terpadu yang terhubung dengan basis data kependudukan dan sistem jaminan sosial nasional;
- c. Penguatan kapasitas kelembagaan tim koordinasi pengentasan kemiskinan daerah dalam analisis, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program percepatan pengentasan kemiskinan;
- d. Melakukan analisis penyebab kemiskinan untuk menyesuaikan pola dan cara mengentaskannya agar lebih efisien dan efektif;
- e. Memberikan berbagai jenis bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk akses, membina dan mengawasi masyarakat miskin dalam mengelola dan memanfaatkan bantuan agar relatif lebih tepat dan berhasil guna, digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif bukan konsumtif;
- f. Meningkatkan kerjasama dan/ atau koordinasi dengan lembaga/ institusi nirlaba. Seperti Badan Amil Zakat (BAZ) tingkat kota untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan perkotaan dengan cara santunan dhuafa, bedah rumah dhuafa, santunan yatim piatu;
- g. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, peningkatan keterampilan dan keahlian serta peningkatan program-program pemberdayaan lainnya kepada masyarakat miskin;

- h. Penguatan pelaksanaan penyelenggaraan pemberian bantuan sosial, melalui:
  - 1) Pengintegrasian sistem penyaluran bantuan sosial untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
  - 2) Revitalisasi penyaluran bantuan dalam bentuk non tunai yang menyediakan berbagai pilihan penyaluran dan instrumen pembayaran yang saling terkoneksi dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi digital, didukung dengan edukasi untuk meningkatkan literasi dan edukasi keuangan;
  - 3) Penguatan lembaga dan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap risiko sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim dan bencana alam; dan
  - 4) Pengembangan sistem pembiayaan.
- i. Peningkatan kesejahteraan sosial, melalui:
  - 1) Pengembangan sistem pembinaan dan pendampingan berjangka pendek, menengah dan panjang terintegrasi dan holistik yang disesuaikan dengan keadaan nyata masing-masing anggota masyarakat;
  - 2) Penguatan penerapan standar pelayanan minimal bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk;
  - 3) Pembangunan masyarakat, lingkungan dan sarana prasarana rumah bagi masyarakat rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas;
  - 4) Penguatan kelembagaan dan program kerja yang terkait dengan masyarakat rentan, seperti: masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak, perempuan, lanjut usia dan disabilitas;
  - 5) Pengembangan pendidikan, keterampilan dan keahlian sepanjang hayat; dan
  - 6) Penguatan pelayanan sosial bagi kelompok rentan.

## **B. Kepesertaan Masyarakat dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan**

Kondisi dan situasi lingkungan yang tidak menentu, terutama pada masa tanggap darurat pandemik covid-19 di seluruh dunia seperti yang terjadi sampai dengan saat ini, memiliki pengaruh yang cukup signifikan pula terhadap kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan yang berkurang dapat mempengaruhi produktifitas personal bahkan berpotensi menyebabkan penurunan kualitas kesejahteraan keluarga. Warga masyarakat, tanpa terkecuali harus mendapatkan jaminan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, baik dalam rangka upaya preventif, kuratif maupun promotif. Pemerintah Kota Metro perlu meningkatkan upaya meningkatkan presentase jumlah warga masyarakat sebagai peserta sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan.

Bukan hanya dalam bidang kesehatan, keselamatan dan kesehatan warga masyarakat selama bekerja pun harus menjadi perhatian bagi Pemerintah. Setiap pekerjaan memiliki risikonya masing-masing, dan setiap kecelakaan yang terjadi akan berdampak pada kehidupan pihak-pihak terkait, terutama korban beserta keluarga terdekatnya. Untuk meminimalisasi dampak negatif yang mungkin terjadi dalam kecelakaan kerja, Pemerintah perlu meningkatkan akses sistem jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan.

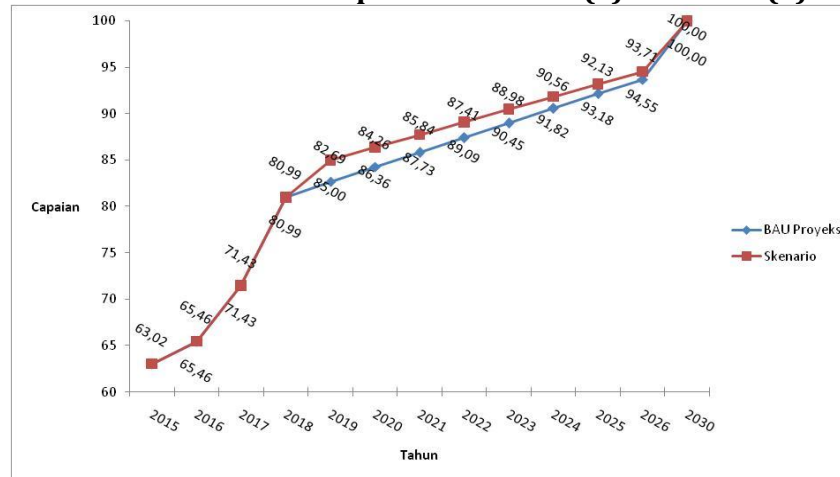
Untuk dua jenis jaminan sosial nasional ini, persentase jumlah pesertanya di Kota Metro sampai dengan tahun 2019 belum memenuhi target yang telah ditetapkan secara nasional. Dengan demikian, untuk memenuhi target nasional, Pemerintah Kota Metro harus melakukan beberapa program terobosan, mempercepat sekaligus meningkatkan presentase keikutsertaan warga masyarakat untuk dua jenis jaminan sosial nasional ini. Berdasarkan Buku Metadata TPB/SDGs Indonesia Edisi II, terdapat 4 indikator yang menguraikan tentang keikutsertaan warga masyarakat dalam sistem jaminan sosial nasional ini, yaitu 2 indikator untuk SJSN bidang kesehatan, 1.3.1.(a) dan 3.8.2.(a) serta 2 indikator untuk SJSN bidang ketenagakerjaan, 1.3.1.(b) dan 10.4.1.(b). Proyeksi kecenderungan prosentase kepesertaan masyarakat Kota Metro pada SJSN ini, baik tanpa upaya intervensi (*bussiness as usual*) maupun dengan upaya tambahan tersaji pada tabel dan gambar berikut :

**Tabel 4.4**  
**BAU dan Skenario Capaian TPB 1.3.1.(a), 1.3.1.(b), 3.8.2.(a) dan 10.4.1.(b)**

No.	Indikator		Tahun													Rate
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	
1 & 3	1.3.1.a 3.8.2.a.	BAU Proyeksi	63,02	65,46	71,43	80,99	82,69	84,26	85,84	87,41	88,98	90,56	92,13	93,71	100,00	1,57
		Skenario	63,02	65,46	71,43	80,99	85,00	86,36	87,73	89,09	90,45	91,82	93,18	94,55	100,00	1,36
1 & 10	1.3.1.b 10.4.1.b	BAU Proyeksi	39,60	41,27	61,19	91,67	92,42	93,11	93,80	94,49	95,18	95,87	96,55	97,24	100,00	0,69
		Skenario	39,60	41,27	61,19	91,67	95,00	95,45	95,91	96,36	96,82	97,27	97,73	98,18	100,00	0,45

*Sumber: Analisis Tim KLHS RPJM Kota Metro, 2021*

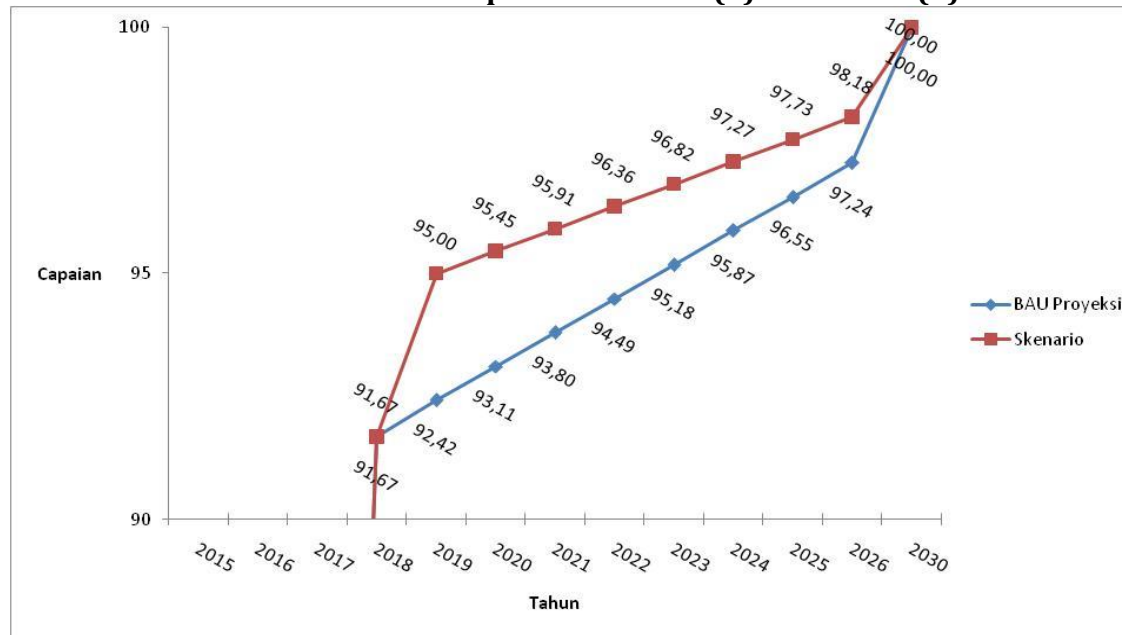
**Gambar 4.2**  
**BAU dan Skenario Capaian TPB 1.3.1.(a) dan 3.8.2.(a)**



*Sumber: Analisis Tim KLHS RPJM Kota Metro, 2021*



**Gambar 4.3**  
**BAU dan Skenario Capaian TPB 1.3.1.(b) dan 10.4.1.(b)**



Sumber: Analisis Tim KLHS RPJM Kota Metro, 2021

Beberapa hal yang dapat direkomendasikan sebagai skenario intervensi alternatif untuk meningkatkan presentase peserta sistem jaminan sosial nasional bidang kesehatan dan ketenagakerjaan, adalah senagai berikut:

- a. Meningkatkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program diseminasi informasi serta peningkatan akses dan keterjangkauannya kepada masyarakat;
- b. Mengikutsertakan para pamong secara bertingkat, mulai dari RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan dalam pendataan masyarakat peserta SJSN bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- c. Memanfaatkan data administrasi kependudukan untuk pendataan peserta BPJS bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;

### **C. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan, Penyediaan Bahan Pangan dan Pemenuhan Gizi Masyarakat**

Sebagaimana telah diuraikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait penataan ruang wilayah perkotaan, sama halnya dengan kota-kota lain di Indonesia, kegiatan utama di Kota Metro tidak sepenuhnya bertumpu pada sektor pertanian dan/ atau perkebunan. Secara praktis, untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan, sampai dengan saat ini masyarakat Kota Metro masih mengandalkan pada pasokan yang berasal dari daerah lain yang berada di sekitarnya. Meskipun demikian, Kota Metro masih memiliki kawasan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Ketersediaan dan akses terhadap bahan pangan memiliki peranan yang sangat penting khususnya dalam menjaga kualitas sumber daya manusia. Selain ketersediaan dan akses, pengolahan bahan pangan dan pola konsumsi pangan masyarakat juga turut menentukan dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan bagi manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial yang bermasyarakat. Berdasarkan Buku Metadata TPB/SDGs Indonesia Edisi II, indikator 2.2.2.(a) menguraikan tentang kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh angka skor pola pangan harapan. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, sampai dengan tahun 2019, skor untuk Kota Metro belum memenuhi target yang telah ditetapkan secara nasional. Dengan

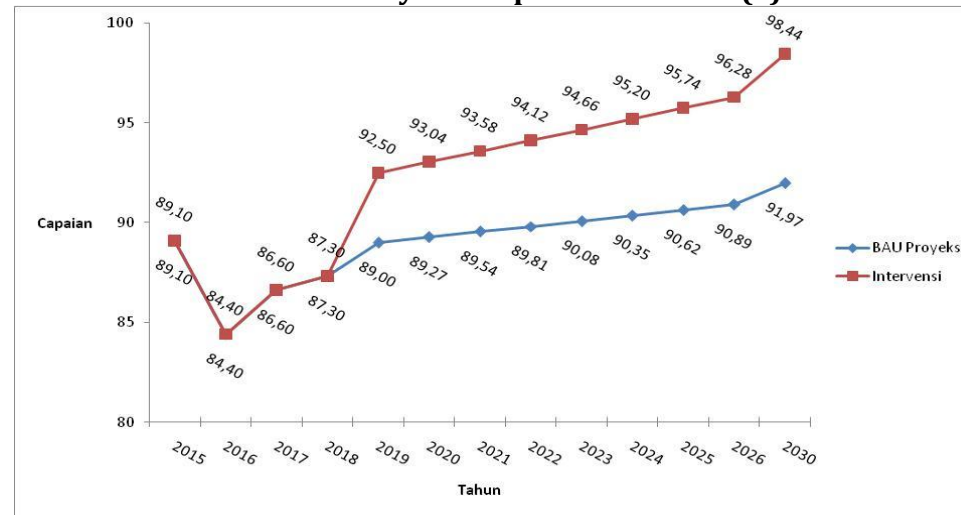
demikian, perlu adanya peningkatan upaya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan secara nasional. Untuk memenuhi target nasional serta mengejar ketertinggalan, baik pada akhir masa pemerintahan nasional sampai dengan 2024 dan akhir masa TPB. Kota Metro harus berupaya meningkatkan laju pencapaiannya dari 0,27 % per tahun menjadi 0,54 % per tahun. Proyeksi kecenderungan pola konsumsi pangan yang diindikasikan dengan skor pola pangan harapain ini, baik tanpa upaya intervensi (*bussiness as usual*) maupun dengan upaya tambahan tersaji pada tabel dan gambar berikut :

**Tabel 4.5**  
**BAU dan Skenario Capaian TPB 2.2.2.(a)**

No.	Indikator		Tahun													Rate
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	
2	2.2.2.c.(i)	BAU Proyeksi	89,10	84,40	86,60	87,30	89,00	89,27	89,54	89,81	90,08	90,35	90,62	90,89	91,97	0,27
		Skenario	89,10	84,40	86,60	87,30	92,50	93,04	93,58	94,12	94,66	95,20	95,74	96,28	98,44	0,54

*Sumber: Analisis Tim KLHS RPJM Kota Metro, 2021*

**Gambar 4.4.**  
**BAU dan Proyeksi Capaian TPB 2.2.2.(a)**



*Sumber: Analisis Tim KLHS RPJM Kota Metro, 2021*

Untuk menjamin kesinambungan ketersediaan, pasokan serta akses terhadap bahan-bahan pangan bagi masyarakat, Pemerintah Kota Metro akan melakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Memberikan jaminan dan insentif kepada petani sebagai produsen pangan;
- b. Mengembangkan bisnis usaha tani, pengembangan kemitraan bisnis antara petani dan pelaku usaha bisnis lain;
- c. Meminimalisasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian, meningkatkan kualitas saluran irigasi, meningkatkan cara atau teknik penyediaan pasokan air, menjaga kualitas tanah, menjaga ketersediaan dan pasokan pupuk;
- d. Meningkatkan pemanfaatan lahan-lahan tidur (kosong), pekarangan atau halaman untuk dijadikan tempat pertanian, perkebunan atau budidaya;
- e. Mengembangkan sistem penjaminan mutu produk-produk pangan;
- f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang memudahkan angkutan bahan pangan;
- g. Diversifikasi bahan pangan yang dikonsumsi, intensifikasi, teknik dan metode pengawetan makanan, menerapkan pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab;
- h. Pengarusutamaan pola makan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- i. Pengembangan sistem ketahanan dan keberlanjutan pangan serta sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- j. Mengacu pada skenario dan rekomendasi yang telah dirumuskan dalam dokumen KLHS RPJMD Provinsi, dapat dilakukan pula dengan cara: penerapan billing system. Untuk memperoleh pupuk bersubsidi, petani atau kelompok tani diharuskan terdaftar pada sistem yang ada. Petani akan mendapatkan nota pesanan, yang kemudian dapat dibayar baik secara tunai maupun non tunai pada bank daerah atau bank lain yang telah ditunjuk. Setelah mendapatkan resi atau bukti pembayaran (setoran), dapat ditukarkan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk memperoleh pupuk bersubsidi yang dimaksud. Selain itu, penerbitan kartu petani bagi setiap kepala keluarga petani. Kartu petani ini dapat digunakan untuk mempermudah memperoleh pupuk, benih atau bantuan alat pertanian.
- k. Peningkatan ketersediaan, akses, kualitas konsumsi pangan, melalui:

- 1) Meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, biofortifikasi pangan;
  - 2) Meningkatkan ketersediaan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan pangan terutama peningkatan produktivitas dan teknik produksi berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok;
  - 3) Meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia pertanian dan perikanan serta kepastian pasar;
  - 4) Menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan dan irigasi, serta peningkatan tata kelola pangan tingkat daerah;
- l. Peningkatan pengelolaan perikanan, melalui:
- 1) Meningkatkan kualitas pembangunan wilayah pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
  - 2) Mengelola ekosistem perairan yang berkelanjutan;
  - 3) Meningkatkan produksi, produktivitas, standarisasi jaminan mutu dan keamanan produk perikanan;
  - 4) Meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, teknologi dan pasar, peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha perikanan, perlindungan usaha perikanan skala kecil
  - 5) Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi teknologi perikanan, penguatan sistem basis data perikanan.
- m. Peningkatan asupan gizi masyarakat
- 1) Penguatan advokasi dan komunikasi perubahan perilaku terutama untuk mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan;
  - 2) Penguatan sistem surveilan gizi;
  - 3) Peningkatan program tanggap darurat gizi.
  - 4) Pengembangan sistem gizi dan tumbuh kembang anak dengan pemberian jaminan asupan gizi sejak dalam kandungan

#### **D. Peningkatan Kesehatan Ibu**

Kesehatan jasmani dan rohani manusia merupakan hal penting dalam menjalani kehidupan. Penurunan kualitas kesehatan manusia dapat

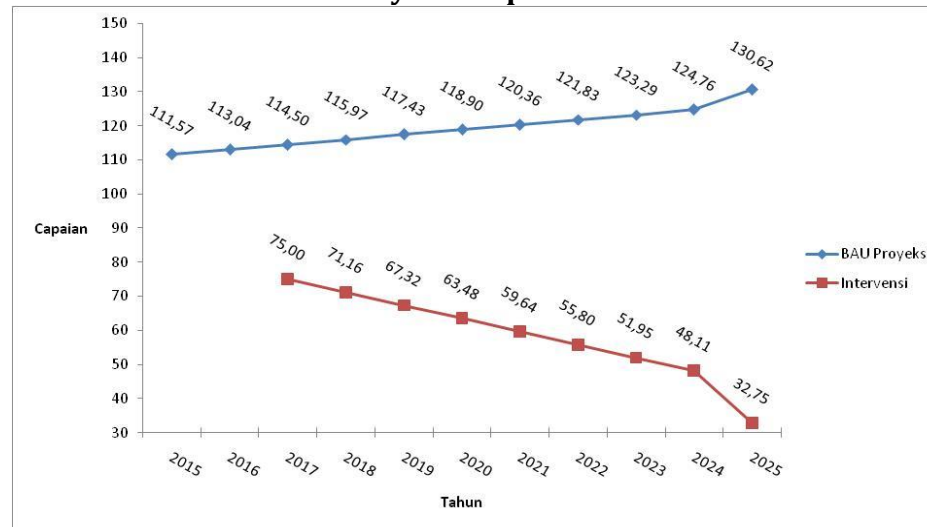
menyebabkan penurunan kualitas kehidupan. Di sisi lain, ibu memiliki peran penting dalam kehidupan. Ibu menjalankan berbagai tugas serta fungsi yang menopang peningkatan kualitas hidup. Ibu, secara khusus dan umumnya perempuan termasuk kelompok rentan, yang harus mendapatkan porsi perhatian yang relatif lebih dalam hal kesehatan. Berbagai tahap kehidupan seorang perempuan, mulai dari tahap menstruasi, reproduksi, kehamilan, melahirkan, menyusui dan tahapan selanjutnya selain menjadi tugas berat juga merupakan tahapan rentan, sehingga kesehatan ibu layak mendapatkan perhatian yang lebih. Dimensi kesehatan pun bukan sebatas pada pengobatan atau penyembuhan, namun juga terdapat dimensi pencegahan dan promosi. Selain itu, bukan sekadar kesehatan ibu pribadi, yang dianggap sebagai *demand*, namun juga ketersediaan, akses dan keterjangkauan sarana dan prasarana kesehatan yang dianggap sebagai *supply*, juga harus diperhatikan dalam hal peningkatan kesehatan ibu. Salah satu indikator dalam TPB yang menguraikan kesehatan ibu adalah Angka Kematian Ibu (selanjutnya disingkat dengan sebutan AKI) dengan nomor indikator 3.1.1\*. Sedangkan pemerataan tenaga kesehatan diuraikan pada nomor indikator 3.c.1. Berdasarkan data sampai dengan tahun 2019, untuk indikator AKI di Kota Metro belum memenuhi target nasional. Begitu pula dengan distribusi tenaga kesehatan yang berkompetensi yang masih belum merata ke seluruh wilayah Kota Metro, dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan demikian, diperlukan upaya tambahan alternatif untuk dapat mencapai target ini. Untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Metro perlu upaya sedikit lebih keras lagi, bukan sekadar sampai batas waktu masa berlaku RPJMD, namun sampai dengan tahun 2030 nanti. Tantangan berikutnya adalah Pemerintah Kota Metro harus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya tersebut, sebab tantangan dan permasalahan baru yang lebih kompleks dan rumit pada urusan kesehatan ibu, yang disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Proyeksi kecenderungan AKI, baik tanpa upaya intervensi (*business as usual*) maupun dengan upaya tambahan tersaji pada tabel dan gambar berikut :

**Tabel 4.6**  
**BAU dan Skenario Capaian TPB 3.1.1.\***

No.	Indikator		Tahun													Rate
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2030	
3	3.1.1.*	BAU Proyeksi			111,57	113,04	114,50	115,97	117,43	118,90	120,36	121,83	123,29	124,76	130,62	1,47
		Skenario					75,00	71,16	67,32	63,48	59,64	55,80	51,95	48,11	32,75	3,84

*Sumber: Analisis Tim KLHS RPJM Kota Metro, 2021*

**Gambar 4.5.**  
**BAU dan Proyeksi Capaian TPB 3.1.1.\***



*Sumber: Analisis Tim KLHS RPJM Kota Metro, 2021*



Berdasarkan tabel dan gambar di atas, bila Kota Metro tidak melakukan upaya terobosan dalam hal-hal terkait upaya penurunan AKI, dapat diperkirakan AKI akan bertambah semakin tinggi. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat terutama perempuan dan ibu, termasuk pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, adalah:

- a. Peningkatan pelayanan ibu, maternal dan neonatal yang berkesinambungan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun swasta;
- b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan termasuk penguatan kemampuan deteksi dini faktor risiko dalam kehamilan;
- c. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan dan pasca persalinan
- d. Perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi;
- e. Penyediaan sarana prasarana dan farmasi serta jaminan ketersediaan darah setiap saat;
- f. Penguatan tata laksana pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Peningkatan gizi, khususnya bagi remaja putri dan ibu hamil;
- h. Perluasan akses, cakupan dan kualitas pelayanan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi yang berkualitas;
- i. Peningkatan ketersediaan dan kompetensi penyuluh dan petugas lapangan kesehatan dan keluarga berencana;
- j. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal, neonatal, persalinan dan pasca persalinan;
- k. Perbaikan sistem rujukan maternal yang didukung dengan peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan penguatan regulasi
- l. Pemerataan tenaga kesehatan dan keluarga berencana sesuai dengan keahlian dan kondisi nyata masyarakatnya;
- m. Penguatan fasilitas kesehatan beserta jaringan dan jejaring kerjanya, terutama kesehatan ibu dan anak berbasis komunitas, seperti: posyandu, poskeskel

- n. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender;
- o. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat;
- p. Peningkatan kegiatan promosi, edukasi, komunikasi dan diseminasi informasi terkait Penguatan regulasi dan peningkatan pelayanan keluarga berencana yang berkesinambungan/ berkelanjutan di setiap pusat/ fasilitas pelayanan kesehatan;

#### **E. Pengendalian Jumlah Penduduk**

Keberadaan penduduk dalam suatu wilayah merupakan hal penting. Penduduk merupakan sumber daya yang paling penting dalam pembangunan kota. Penduduk sebagai pelaku sekaligus penerima, baik proses maupun hasil pembangunan. Namun demikian, jumlah penduduk yang berada pada satu wilayah perlu dikendalikan, menyesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi serta situasi dan kondisi sumber daya daerah, termasuk potensi alam dan sumber daya keuangan. Indikator TPB yang berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk adalah *Total Fertility Rate* (TFR) dengan nomor indikator 3.7.2.(a) Berdasarkan hasil analisis dan kompilasi data, sampai dengan tahun 2019, TFR Kota Metro belum memenuhi target yang telah ditetapkan secara nasional. Bila tidak dilakukan upaya intervensi, TFR diprediksikan memiliki kecenderungan untuk terus bertambah dengan laju 0,004 per tahun dan mencapai angka 2,36 pada tahun 2026 dan 2,38 pada tahun 2030, yang akan menyebabkan semakin jauh dari target yang telah ditetapkan, yaitu 2,1 pada tahun 2026 dan 1,84 pada tahun 2030. Kota Metro harus melakukan intervensi agar laju penurunan TFR mencapai 0,036 per tahun. Untuk mengendalikan jumlah penduduk, Pemerintah Kota Metro akan melakukan program-program terkait dengan:

- a. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, penyelenggaraan dan pelayanan program keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga yang berkesinambungan di setiap pusat/ fasilitas pelayanan kesehatan
- b. Peningkatan cakupan, akses kualitas, sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi

- c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia keluarga berencana, termasuk penyuluh dan petugas lapangan
- d. Penyediaan sarana prasarana serta jaminan ketersediaan peralatan kontraspesi
- e. Penguatan jejaring kerja pelayanan keluarga berencana
- f. Pembinaan dan pendampingan, fasilitasi dan asistensi, edukasi dan promosi peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender
- g. Meningkatkan program kegiatan yang mengikutsertakan sesering mungkin anak perempuan usia rentan pernikahan dini (15 s.d. 19 tahun)
- h. Meningkatkan program komunikasi perubahan perilaku dalam tata pergaulan anak perempuan, terutama perempuan usia rentan pernikahan dini (15 s.d. 19 tahun)
- i. Diseminasi informasi dan promosi pencegahan aktifitas seksual pra-nikah untuk anak perempuan usia rentan pernikahan dini (15 s.d. 19 tahun)
- j. Pengendalian pernikahan usia dini dengan meningkatkan efektifitas penegakan hukum peraturan perundang-undangan yang menetapkan batas minimal usia pernikahan
- k. Pendampingan dan pembinaan kesehatan reproduksi bagi anak perempuan usia rentan pernikahan dini (usia 15 s.d. 19 tahun)
- l. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan wilayah sekitar untuk mengendalikan urbanisasi, pemerataan pembangunan wilayah, terutama untuk wilayah-wilayah yang berada di sekitar perbatasan;
- m. Pengendalian dan penyebaran penduduk disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini dilakukan agar wilayah-wilayah yang daya dukung dan daya tampungnya sudah rendah, mendekati atau bahkan sudah melampaui ambang batas, tidak terus dipaksa atau dieksploitasi terus menerus, sehingga rusak dan/ atau tidak dapat dipulihkan kembali, yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kualitas hidup manusia itu sendiri.

## **F. Peningkatan Pendidikan Berkualitas**

Kota Metro dikenal sebagai kota pendidikan. Hal ini disebabkan bukan hanya banyaknya tempat atau fasilitas pendidikan yang berdiri di Kota Metro, baik formal, non formal maupun vokasi, mulai dari tingkat pendidikan usia dini sampai dengan perguruan tinggi, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun pihak swasta, namun juga ditunjang oleh kinerja serta prestasinya, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagai kota yang dikenal sebagai kota pendidikan, Kota Metro menjadi salah satu tujuan warga masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung, untuk menempuh atau mendapatkan pendidikan. Dengan banyak prestasi yang telah diraih dalam bidang pendidikan, masih ada pula beberapa indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi urusan bidang pendidikan, yang sampai dengan saat ini, belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Metro sesuai dengan target yang telah ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah Pusat. Beberapa indikator TPB terkait pendidikan yang belum terpenuhi oleh Kota Metro, adalah: Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut jenis kelamin (indikator 4.2.2.\*) terdapat gap capaian 17,86%, Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (indikator 4.4.1.\*) terdapat gap capaian 4,08%, Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas (indikator 4.5.1.\*) terdapat gap capaian 0,42% dan persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan (indikator 4.c.1.\*) terdapat gap capaian 21,66 %

Tenaga pendidik yang berkompentensi memadai yang dibuktikan dengan sertifikat dan pemerataan distribusi penugasannya, bukan hanya dapat menunjang keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri namun juga untuk mendukung keberhasilan penerapan sistem zonasi sekolah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini, hampir setiap tahun, penerapan sistem zonasi sekolah masih menimbulkan perselisihan bahkan konflik horizontal sekaligus vertikal. Di sisi lain, setiap warga

masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, sementara itu pendidikan merupakan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengelolaan pelayanan pendidikan yang berkualitas, yang dapat diterima secara merata dan berkeadilan oleh seluruh warga masyarakat, tanpa terkecuali tanpa diskriminasi. Pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada urusan sarana dan prasarana pendidikan di fasilitas-fasilitas pendidikan namun juga membangun akses dan keterjangkauan serta mendorong masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan yang layak setinggi-tingginya.

Pada masa tanggap darurat pandemik covid-19 sebagaimana terjadi sampai dengan saat ini, dalam hal penyelenggaraan pendidikan, khususnya kegiatan belajar mengajar, Pemerintah menghadapi banyak sekali tantangan, yang bukan untuk dihindari namun harus dihadapi. Dalam hal social distancing, sebagai salah satu upaya preventif penyebaran virus covid-19 ini, kegiatan belajar mengajar daring dengan memanfaatkan teknologi dan manajemen digital bidang komunikasi dan informasi menjadi salah satu metode yang dilaksanakan. Kondisi seperti ini, Pemerintah memastikan bahwa kualitas kegiatan belajar mengajar tetap terjaga. Satu sisi yang lain, Pemerintah harus merumuskan dan menerapkan sebanyak mungkin terobosan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, bukan hanya dalam bidang studi atau mata pelajaran yang diampunya atau kemampuannya dalam menyampaikan materi, namun juga keterampilan dan/ atau keahliannya dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan materi pembelajaran tersebut. Di sisi lain lagi, Pemerintah perlu juga mengampanyekan gerakan orang tua mendampingi proses belajar anak-anaknya.

Beberapa strategi yang diusulkan untuk dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Metro dalam percepatan pencapaian indikator-indikator tujuan pembangunan berkelanjutan bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan dan/ atau insentif sebagai pendorong/ pemicu, khususnya bagi keluarga rentan untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya yang usia sekolah;
- b. Peningkatan penyelenggaraan sistem pelacakan dan penelusuran (tracing and tracking) penjangkauan, penyaringan dan pendataan seluruh anak-anak

- usia sekolah. Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar PAUD, SD dan SMP, rasio angka partisipasi murni;
- c. Pemanfaatan data kependudukan untuk membangun dan mengelola sistem basis data peserta didik, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni.
  - d. Menerapkan dan menyebarluaskan metode-metode pembelajaran yang sekreatif mungkin, yang mendorong dan meningkatkan semangat untuk tetap mau belajar;
  - e. Menerapkan beban belajar yang disesuaikan dengan usia peserta didik;
  - f. Mengadopsi dan mengadaptasi praktek-praktek penyelenggaraan dari *best practices* yang telah berhasil diselenggarakan oleh negara-negara yang berkemajuan dalam pendidikan;
  - g. Menyeimbangkan kegiatan belajar mengajar dengan aktifitas sosial peserta didik;
  - h. Peningkatan dan pemerataan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan, termasuk sarana dan prasarana serta kompetensi tenaga pendidik;
  - i. Peningkatan penyelenggaraan program kegiatan yang dapat mendorong serta menumbuhkembangkan kemampuan anak-anak dalam matematika, membaca, seperti penyelenggaran jam tambahan pelajaran.
  - j. Peningkatan program peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat yang sesuai;
  - k. Pengembangan model pendidikan vokasi dan bekerja sama dengan usaha atau industri;
  - l. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi;
  - m. Penerapan prinsip-prinsip sekolah ramah lingkungan, sekolah sehat, sekolah hemat energi, sekolah ramah anak, sekolah ramah disabilitas dan mengikutsertakan seluruh peserta didik beserta civitas akademik dalam pelaksanaannya;
  - n. Penerapan adaptasi mata-mata pelajaran yang adaptatif sekaligus relevan dan berkorelasi langsung dengan tema kehidupan nyata sehari-hari dalam kehidupan

**G. Peningkatan Program Pengentasan Pengangguran, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Peningkatan Taraf Ekonomi Keluarga**

Salah satu dampak pandemik covid-19 pada dunia usaha adalah penurunan kinerja perusahaan, yang kemudian berpengaruh pada pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan terhadap karyawannya. Hal ini berdampak pada semakin bertambah banyaknya jumlah pengangguran. Di satu sisi, penurunan kinerja perusahaan berdampak pada akan semakin berkurangnya kemungkinan pembukaan lowongan pekerjaan. Sementara itu, tidak ada satu pihak pun yang mampu memastikan secara tepat waktu berakhirnya pandemik ini. Untuk dapat mengentaskan permasalahan pengangguran ini, paling kurang sesuai dengan target nasional, Pemerintah Kota Metro dapat melakukan berbagai macam skenario intervensi alternatif, seperti:

- a. Membangun sistem basis data angkatan kerja berikut status pekerjaannya;
- b. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, peningkatan keterampilan dan keahlian, termasuk kewirausahaan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan, fasilitasi dan asistensi kepada para pelaku usaha pemula, khususnya yang dikerjakan oleh orang yang sebelumnya berstatus tuna kary;
- d. Menyelenggarakan berbagai macam kegiatan/ program pembangunan padat karya yang mengikutsertakan peran angkatan kerja berjumlah banyak secara kontinu;
- e. Memberikan jaminan akses dan kemudahan dalam pelayanan keuangan;

Ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dengan lowongan kerja menyebabkan terjadinya penambahan jumlah pengangguran. Pada saat lowongan pekerjaan telah tersedia atau terbuka, namun kompetisi angkatan kerja tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, juga semakin memperbanyak jumlah pengangguran. Dalam era globalisasi, kompetisi bukan hanya terjadi antar angkatan kerja dalam suatu daerah saja melainkan juga dengan yang berasal dari daerah-daerah lain. Selain itu, dalam masa tanggap darurat wabah virus corona yang terjadi sejak tahun 2019 yang lalu, banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah Kota Metro akan menyelenggarakan program-program yang berorientasi dalam pengentasan masalah pengangguran sekaligus meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM serta upaya-upaya lain untuk meningkatkan taraf perekonomian keluarga, antara lain:

- a. Mengembangkan kebijakan serta menyelenggarakan program kerja yang mendukung kegiatan-kegiatan produktif, penciptaan lapangan/ lowongan pekerjaan, kewirausahaan, ekonomi kreatif, serta melakukan pendampingan atau pembinaan serta memperluas jejaring akses bagi industri rumah tangga, usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya untuk memasarkan dan/ atau memperjualbelikan produknya, namun juga untuk mendapatkan bantuan, termasuk kredit lunak dari berbagai lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan lokal;
- b. Menyelenggarakan program peningkatan atau pengembangan keterampilan dan keahlian masyarakat sehingga mampu untuk membuka usaha sendiri
- c. Memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi para pekerja
- d. Kebijakan deregulasi dan/ atau dispensasi untuk investasi dan/ atau izin usaha perusahaan swasta maupun perseorangan, agar terciptanya peluang atau lowongan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Kebijakan ini perlu diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat;
- e. Fasilitasi dan asistensi akses terhadap berbagai macam pembiayaan atau kredit lunak khususnya untuk usaha mikro dan menengah dan/ atau industri rumah tangga. Selain itu, pembinaan atau pendampingan dalam pengelolaan keuangan keluarga;
- f. Kerjasama antar daerah, terutama daerah sekitar, untuk bersama-sama meningkatkan dan meratakan pembangunan, sehingga berkontribusi terhadap upaya pengendalian laju urbanisasi, terutama warga masyarakat tanpa keterampilan dan/ atau keahlian;
- g. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro kecil menengah dan koperasi
  - 1) Meningkatkan kemitraan antara usaha mikro kecil dengan usaha menengah besar;
  - 2) Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan wirausaha;
  - 3) Meningkatkan kapasitas, jangkauan dan inovasi koperasi;
  - 4) Meningkatkan penciptaan seluas-luasnya peluang usaha dan start-up



- 5) Meningkatkan nilai tambah usaha sosial
- h. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi
  - 1) Meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, perikanan dan non agro yang terintegrasi skala lokal;
  - 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha ekonomi kreatif dan digital;
  - 3) Memperbaiki iklim usaha dan investasi.
- i. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga, melalui:
  - 1) Pembinaan pengelolaan keuangan keluarga pra dan pasca menikah serta investasi keluarga;
  - 2) Pelatihan usaha dan peningkatan akses serta keterjangkauan usaha produktif khususnya bagi keluarga miskin dan rentan;
  - 3) Fasilitasi pendanaan usaha bagi perseorangan atau kelompok usaha produktif, terutama bagi keluarga miskin dan rentan;
  - 4) Pemberian stimulan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga
  - 5) Penyelenggaraan kewirausahaan sosial dan ekonomi kreatif
- j. Keperantaraan usaha dan dampak sosial, melalui:
  - 1) Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha serta menghubungkan dengan mitra-mitra usaha;
  - 2) Pengembangan skema pendanaan program ekonomi kreatif produktif yang berdampak sosial;
  - 3) Transformasi ekonomi kampung terpadu; dan
 Penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan

#### **H. Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Peningkatan Upaya Kesetaraan Gender**

Perempuan dan anak termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan akan tindak kejahatan dan kekerasan, termasuk yang berkaitan dengan seksual, seperti pelecehan. Di satu sisi lain, sebagai bagian dari masyarakat, perempuan dan anak memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting. Di

luar peran serta tanggung jawabnya sebagai sebuah entitas sosial, perempuan berperan pula dalam menyiapkan generasi baru untuk melanjutkan pembangunan. Anak-anak sebagai sebuah potensi penting yang akan bertindak sebagai pelaku pembangunan di masa mendatang. Kedua kelompok ini, sebagai manusia, memiliki hak asasi untuk terbebas dari segala macam bentuk ancaman dan bahaya, agar mereka senantiasa leluasa menjalankan peran dan tugasnya dalam kehidupan dan pembangunan. Tidak hanya sampai sebatas itu saja, upaya-upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tindak kejahatan, dan eksploitasi khususnya terhadap perempuan dan anak juga perlu terus ditingkatkan. Perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak dari berbagai macam tindak kejahatan, kekerasan merupakan implementasi bentuk kehadiran Pemerintah Kota dalam melindungi segenap warga negara termasuk perempuan dan anak. Pemerintah Kota juga perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian masyarakat untuk menyampaikan/ menginformasikan/ mengadukan/ melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya/ dialami oleh warga di sekitarnya, baik yang terjadi di ranah rumah tangga maupun ruang publik. Selain itu, Pemerintah perlu meningkatkan pelayanan yang disediakan untuk korban beserta saksi juga mendorong masyarakat untuk semakin berani melaporkan kasusnya karena adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Selain kekerasan, khusus anak-anak, Pemerintah Kota perlu meningkatkan upaya perlindungan khusus seperti kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus, anak yang diperdagangkan, anak korban eksploitasi, pekerja anak, anak dengan HIV/AIDS, anak dalam situasi bencana, anak terlantar, anak korban penyalahgunaan NAPZA dan anak yang dikawinkan (perkawinan anak). Data capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini, masih terjadi kekerasan terhadap perempuan dewasa yang dilakukan oleh pasangan bahkan ada pula kasus kekerasan terhadap anak perempuan.

Berdasarkan analisis data yang terkumpul, sampai dengan tahun 2019, perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Metro masih belum memenuhi target yang ditetapkan secara nasional. Beberapa indikator TPB terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, yang perlu mendapatkan

perhatian lebih khusus, adalah: Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan (indikator 5.2.1\*) yang menunjukkan kecenderungan semakin bertambah, prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (indikator 16.2.1.b) yang juga menunjukkan kecenderungan semakin bertambah dan Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun (indikator 16.2.3.(a) yang memiliki kecenderungan untuk terus bertambah. Dengan demikian, Pemerintah Kota Metro beserta seluruh lapisan masyarakat harus berupaya lebih optimal untuk memenuhi target ini.

Selain penanggulangan kekerasan kepada perempuan dan anak, kesetaraan gender merupakan salah satu isu yang juga semakin mengemuka seiring dengan perkembangan pemahaman emansipasi wanita. Wanita bukan warga masyarakat kelas dua, yang harus tersisih, terusir, tergusur dan terpinggirkan dalam roda kehidupan dunia. Ruang lingkup kehidupan wanita bukan hanya di dalam rumah, pasif dan hanya menunggu. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuka kesempatan dan peluang yang setara bagi wanita untuk menjalankan kehidupannya, untuk meraih cita-citanya, untuk mengeskpresikan bakat dan minatnya, untuk mengaktualisasikan seluruh potensi dirinya, sekaligus berperan serta secara aktif dalam seluruh aspek pembangunan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kehidupan para wanita agar memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai, memiliki modal dan bekal untuk sama-sama bukan hanya berkompetisi namun juga bekerja sama dengan siapa saja dalam pembangunan, memiliki akses dan keterjangkauan terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan dan pembangunan. Dalam hal kesetaraan gender, wanita pun memiliki banyak sekali tantangan, seperti pelecehan, pemaksaan, penganiayaan, kekerasan atau tindak kejahatan lainnya.

- a. Pengarusutamaan kesetaraan gender pada semua lini kehidupan;
- b. Diseminasi informasi, edukasi dan komunikasi serta peningkatan penerapan/ pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

- terkait isu kesetaraan gender, pencegahan dan penanggulangan kekerasan serta tindak kejahatan lain terhadap perempuan dan anak-anak;
- c. Penyediaan pusat atau fasilitas pengaduan, dengan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan aparat penegah hukum;
  - d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana serta akses bagi seluruh masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak untuk mengapresiasi, mengekspresikan, mengimplementasikan seluruh minat, bakat, potensi dan kompetensi yang dimilikinya
  - e. Memberikan ruang serta memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi perempuan untuk bisa secara leluasa mengakses berbagai bidang kehidupan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, kesejahteraan dan kemakmurannya, seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama
  - f. Membangun sistem pengaduan, pengawasan, pelaporan, penanganan, pendampingan dan penanggulangan tindakan pelanggaran dan/ atau tindak kejahatan yang terjadi atau dilakukan kepada perempuan

#### **H. Peningkatan Upaya Perwujudan Kedamaian, Keamanan dan Keadilan**

Salah satu tujuan pembangunan adalah untuk menjamin dan memastikan terpenuhinya seluruh hak asasi setiap anggota masyarakat untuk mendapatkan kedamaian, keamanan dan keadilan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya sepanjang masa hidupnya. Pencapaian tujuan ini tidak mudah, dihadapkan pada berbagai macam persoalan dan tantangan, terutama dari dampak yang disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak dan kompleks kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan semakin besar potensi persinggungan antar kelompok masyarakat, baik konflik yang bersifat horizontal, vertikal maupun diagonal dalam upayanya memenuhi kebutuhan tersebut yang mengganggu kohesitas sosial dan menghambat pembangunan daerah. Meskipun secara umum, kondisi dan situasi keamanan Kota Metro cukup terkendali, namun tindakan yang mengancam kedamaian dan keamanan masih terjadi. Dengan demikian, Pemerintah Kota Metro bersama-sama dengan seluruh lapisan

masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan berbagai macam upaya terobosan dalam mewujudkan pembangunan yang dapat menciptakan kedamaian, keamanan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbagai upaya tambahan yang diusulkan untuk dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro, adalah:

- a. Peningkatan efektifitas sistem keamanan lingkungan berbasis masyarakat atau komunitas, termasuk dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam *deterrence, delay, detect, respons* dan *report* pada tingkat masyarakat, dengan berbagai variasi *technology* dan *management measures*, seperti *realtime monitoring*
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sarana dan prasarana umum yang memenuhi kriteria keamanan, kenyamanan, keselamatan dan inklusif
- c. Pemanfaatan teknologi dan manajemen informasi dan/ atau komunikasi dalam pelaporan/ pengaduan serta pemantuan kemajuan proses penyelesaian perkara/ sengketa yang dilaporkan/ diadukan
- d. Peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum

#### **J. Peningkatan Tata Kelola Kelembagaan, Kemitraan dan Peran Serta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan**

Penatakelolaan kelembagaan pemerintahan dan peningkatan kemitraan dengan berbagai lapisan serta entitas masyarakat merupakan elemen atau komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota untuk menunjukkan efektifitas dan kinerja pemerintahan dalam menjalankan program-program pemerintahan yang telah direncanakan, serta merupakan bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pemakaian anggaran kepada publik, proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui telah memenuhi target yang telah ditetapkan secara nasional.

Pemerintah Kota Metro berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik yang terbaik. Kejelasan, akurasi, kepastian waktu, biaya, keamanan, pertanggungjawaban, kemudahan akses, profesionalitas dan kenyamanan pelayanan merupakan prinsip-prinsip dalam pelayanan publik yang harus

dipenuhi. Penatakelolaan organisasi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi perlu lebih dikembangkan oleh Pemerintah Kota Metro sebagai salah satu bentuk upaya penataan sistem manajemen dan proses kerja sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kerja pemerintah. Pemerintah perlu terus menerus berupaya membangun birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Peningkatan pemanfaatan data diperlukan untuk kepentingan perbaikan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminal. Pemanfaatan data kependudukan melalui integrasi sistem ini harus untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih efisien dan efektif. Beberapa upaya alternatif yang direkomendasikan untuk dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro dalam penatakelolaan kelembagaan, peningkatan kemitraan, antara lain:

- a. Pelaksanaan kaji ulang semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah;
- b. Peningkatan pelaksanaan perencanaan program pembangunan yang berbasis pada kajian ilmiah terhadap data dan fakta kebutuhan nyata masyarakat serta persyaratan pemangku kepentingan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyusunan dan penetapan kriteria keberterimaan pelaksanaan program pembangunan, termasuk program kerja yang memiliki daya ungkit percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan secara nasional, untuk urusan atau indikator yang menjadi kewenangan pemerintah kota;
- d. Harmonisasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional, khususnya yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;
- e. Pengetatan atau efisiensi pemanfaatan anggaran belanja daerah;
- f. Perluasan transparansi informasi terkait pajak dan retribusi;

- g. Peningkatan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan program pembangunan, seperti berbasis pada dampak (*outcomes*), keberlanjutan (*sustainability*) serta dampaknya terhadap lingkungan;
- h. Peningkatan keaktifan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penilaian (pengawasan);
- i. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (digitalisasi/ otomasi) dalam membangun sistem basis data terintegrasi penyelenggaraan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penilaian (pengawasan);
- j. Pembaruan data terkait sumber pendapatan, obyek dan wajib pajak serta retribusi, termasuk penerapan insentif dan disinsentif, sanksi dan hukuman terkait pajak dan/ atau retribusi, termasuk utilisasi data dan informasi kependudukan untuk kepentingan perpajakan dan retribusi;
- k. Revitalisasi besaran tarif dan pajak yang dikelola oleh Pemerintah, salah satunya dengan cara melakukan perhitungan kembali yang cermat dan teliti cost-reflective tarif untuk semua jenis jasa umum atau layanan yang diberikan oleh pemerintah;
- l. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good, clear, clean and green governance*) serta sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menuju pemerintahan cerdas yang melayani masyarakat berbasis teknologi informasi;
- m. Pelaksanaan kaji ulang semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah;
- n. Peningkatan pelaksanaan perencanaan program pembangunan yang berbasis pada kajian ilmiah terhadap data dan fakta kebutuhan nyata masyarakat serta persyaratan pemangku kepentingan juga ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Penyusunan dan penetapan kriteria keberterimaan pelaksanaan program pembangunan, termasuk program kerja yang memiliki daya ungkit percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan secara nasional, untuk urusan atau indikator yang menjadi kewenangan pemerintah kota;

- p. Harmonisasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional, khususnya yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;
- q. Pengetatan atau efisiensi pemanfaatan anggaran belanja daerah;
- r. Perluasan transparansi informasi terkait pajak dan retribusi;
- s. Peningkatan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan program pembangunan, seperti berbasis pada dampak (*outcomes*), keberlanjutan (*sustainability*) serta dampaknya terhadap lingkungan;
- t. Peningkatan keaktifan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penilaian (pengawasan);
- u. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (digitalisasi/ otomasi) dalam membangun sistem basis data terintegrasi penyelenggaraan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penilaian (pengawasan);
- v. Pembaruan data terkait sumber pendapatan, obyek dan wajib pajak serta retribusi, termasuk penerapan insentif dan disinsentif, sanksi dan hukuman terkait pajak dan/ atau retribusi, termasuk utilisasi data dan informasi kependudukan untuk kepentingan perpajakan dan retribusi;
- w. Revitalisasi besaran tarif dan pajak yang dikelola oleh Pemerintah, salah satunya dengan cara melakukan perhitungan kembali yang cermat dan teliti cost-reflective tarif untuk semua jenis jasa umum atau layanan yang diberikan oleh pemerintah;
- x. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good, clear, clean and green governance*) serta sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menuju pemerintahan cerdas yang melayani masyarakat berbasis teknologi informasi;
- y. Peningkatan sarana dan prasarana jaringan dan jejaring komunikasi dan informasi serta cakupan layanan internet;
- z. Pengembangan model, instrumen, metode, teknik dan teknologi serta , membangun situasi dan kondisi termasuk iklim dan regulasi lokal yang dapat mendorong adanya pembiayaan alternatif;



- aa. Peningkatan jejaring kerjasama yang strategis dengan berbagai pihak pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk pihak swasta dan lembaga/ institusi donor tingkat nasional maupun internasional;
- bb. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah (baik lokal, nasional, regional dan internasional), masyarakat, swasta, akademisi (perguruan tinggi) dan media dalam penyelenggaraan pembangunan;
- cc. Memperluas jaringan pemasaran produk lokal daerah;
- dd. Meningkatkan kualitas pusat-pusat perekonomian lokal;
- ee. Peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah di seluruh kota, dengan
  - 1) Peningkatan akses dan keterjangkauan pelayanan dasar
  - 2) Peningkatan sarana dan prasarana dasar perumahan, air bersih/ air minum, sanitasi dan listrik
  - 3) Peningkatan kualitas konektivitas transportasi darat
  - 4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital
  - 5) Perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan dengan multipihak
  - 6) Peningkatan pengawasan kegiatan perekonomian
- ff. Percepatan pembangunan wilayah kelurahan
  - 1) Penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan sumber daya manusia di kelurahan dan kecamatan, fasilitasi dan asistensi, pembinaan dan pendampingan masyarakat untuk peningkatan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan
  - 2) Pengembangan kelurahan dan kecamatan digital, produk unggulan kelurahan, badan usaha milik kelurahan
  - 3) Peningkatan pelayanan dasar kelurahan dan kecamatan
  - 4) Optimalisasi pemanfaatan dana kelurahan untuk mendorong kegiatan produktif dan pemberdayaan masyarakat
  - 5) Penguatan peran kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, perubahan, perkembangan dan pembangunan

- gg. Peningkatan sarana dan prasarana jaringan dan jejaring komunikasi dan informasi serta cakupan layanan internet;
- hh. Pengembangan model, instrumen, metode, teknik dan teknologi serta , membangun situasi dan kondisi termasuk iklim dan regulasi lokal yang dapat mendorong adanya pembiayaan alternatif;
- ii. Peningkatan jejaring kerjasama yang strategis dengan berbagai pihak pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk pihak swasta dan lembaga/ institusi donor tingkat nasional maupun internasional;
- jj. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah (baik lokal, nasional, regional dan internasional), masyarakat, swasta, akademisi (perguruan tinggi) dan media dalam penyelenggaraan pembangunan;
- kk. Memperluas jaringan pemasaran produk lokal daerah;
- ll. Meningkatkan kualitas pusat-pusat perekonomian lokal;
- mm. Peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah di seluruh kota, dengan
  - 1) Peningkatan akses dan keterjangkauan pelayanan dasar
  - 2) Peningkatan sarana dan prasarana dasar perumahan, air bersih/ air minum, sanitasi dan listrik
  - 3) Peningkatan kualitas konektivitas transportasi darat
  - 4) Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi sebagai basis ekonomi digital
  - 5) Perluasan kerjasama dan kemitraan dalam investasi, promosi, pemasaran dan perdagangan dengan multipihak
  - 6) Peningkatan pengawasan kegiatan perekonomian
- nn. Percepatan pembangunan wilayah kelurahan
  - 1) Penerapan praktik tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dan sumber daya manusia di kelurahan dan kecamatan, fasilitasi dan asistensi, pembinaan dan pendampingan masyarakat untuk peningkatan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan
  - 2) Pengembangan kelurahan dan kecamatan digital, produk unggulan kelurahan, badan usaha milik kelurahan
  - 3) Peningkatan pelayanan dasar kelurahan dan kecamatan

- 4) Optimalisasi pemanfaatan dana kelurahan untuk mendorong kegiatan produktif dan pemberdayaan masyarakat
- 5) Penguatan peran kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, perubahan, perkembangan dan pembangunan

#### **4.2.2. Rekomendasi Skenario Alternatif untuk Indikator TPB berstatus Tak Tersedia Data**

Berdasarkan analisis data capaian TPB Kota Metro, sampai dengan tahun 2019, masih terdapat indikator TPB yang berstatus capaian sebagai indikator yang tidak tersedia data capaiannya. Beberapa hal yang menyebabkan hal ini, antara lain: perbedaan definisi operasional indikator antara dokumen pedoman yang diterbitkan oleh institusi berwenang sebagai induk kerja organisasi perangkat daerah dengan dokumen metadata yang diterbitkan oleh kementerian perencanaan pembangunan nasional, data sektoral tersedia namun belum dilakukan perhitungan yang sesuai dengan pedoman metadata TPB Indonesia Edisi II atau data-data terkait capain indikator tersebut tidak tersedia dan tidak dilaksanakan. Terkait indikator TPB dengan status capaian tidak tersedia data, direkomendasikan agar Kota Metro melakukan berbagai macam upaya terkait penelitian dan pengembangan, pengumpulan dan analisis data yang berkenaan dengan indikator-indikator TPB tersebut.

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih, yaitu Dr. H. Wahdi, Sp. OG dan Drs. H. Qomaru Zaman, MA yang selanjutnya menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Visi ini juga disusun mengacu pada RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025 dimana Kota Pendidikan dan Masyarakat Sejahtera menjadi tujuan akhir pembangunan pada Tahun 2025. Tahap keempat RPJPD diarahkan pada terwujudnya kemandirian budaya perilaku masyarakat/ Pusat Kemandirian Budaya. Dalam periode 2021-2026, visi pembangunan Kota Metro adalah :

***“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”***

Memperhatikan visi di atas, maka ada 4 pokok visi yang akan menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Adapun pokok-pokok visi tersebut adalah :

#### **1. Kota Metro Berpendidikan**

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (**GEMERLANG**), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat *Intelligence Quotient* atau IQ (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam masyarakat); *Spiritual Quotient* atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); *Emotional*

*Quotient* atau EQ (kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat) dan *Physical Quotient*, yaitu kemampuan seseorang dalam menjaga kebugaran atau kesehatan dirinya sendiri.

## **2. Kota Metro Sehat**

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.

## **3. Kota Metro Sejahtera**

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian lokal dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

## **4. Kota Metro Berbudaya**

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

## 5.2. Misi

Dalam rangka mencapai Visi "***Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya***", maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

1. **Misi 1** : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. **Misi 2** : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. **Misi 3** : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. **Misi 4** : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
5. **Misi 5** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Terhormat, dan Bermartabat.

### 5.2.1. Misi 1

***"Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan"***.

Komitmen perwujudan Misi 1 akan dilaksanakan melalui :

1. Pemerataan kualitas pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan yang inklusif;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berliterasi;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkompetisi, berinovasi, beradaptasi terhadap perubahan global serta menciptakan masyarakat yang berkarakter;
4. Meningkatkan integrasi-kolaborasi tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam interaksi sosial, kegiatan budaya, dan kehidupan beragama;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sistem pemberdayaan.

Program Kerja :

1. Menerbitkan Kartu Metro Ceria yang diperuntukkan bagi warga miskin dengan fasilitas bantuan pendidikan, berobat gratis, dan sembako murah.
2. Peningkatan kesejahteraan guru honorer dan pemberian beasiswa bagi guru dan siswa berprestasi
3. Membentuk Struktur Organisasi Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sampai tingkat kelurahan
4. Revitalisasi Rumah Pintar Kelurahan
5. Penyediaan ruang bagi kelompok seni budaya di 22 kelurahan
6. Peningkatan apresiasi di bidang keagamaan

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 1 : Pendidikan; Kebudayaan; Perpustakaan; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kepemudaan dan Olahraga; dan urusan Fungsi Penunjang

#### **5.2.2. Misi 2**

***“Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial”***

Komitmen perwujudan Misi 2 akan dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, membangun perilaku pola hidup bersih dan sehat; serta peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Meningkatkan sifat dan jiwa religius masyarakat Kota Metro dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik;
3. Peningkatan budaya gotong-royong dan kepedulian sosial masyarakat.

Program Kerja :

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Kesehatan
2. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan KB melalui JAMA-PAI(Jaringan Masyarakat Peduli Anak dan Ibu)
3. Perawatan lansia berbasis *home care* dan *hospital base*

4. Peningkatan insentif kader poskeskel, posyandu, posbindu, jumantik, PHBS, LBS, Kelas Ibu dan KB
5. Peningkatan insentif RT dan RW
6. Menggiatkan kembali sistem gotong-royong dan siskamling di masyarakat
7. Meningkatkan insentif bagi pegiat keagamaan, seperti kaum, guru ngaji, marbot, dan penggali kubur.

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 2 : Kesehatan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Sosial; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas; Pengendalian Penduduk dan KB; dan urusan Fungsi Penunjang

### **5.2.3. Misi 3**

***“Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan”***

Komitmen perwujudan Misi 3 akan dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan sistem dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan dengan sistem pengelolaan sampah terpadu;
3. Meningkatkan Sistem Penerangan Lingkungan;
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi di ruang publik dan permukiman sebagai bentuk fasilitasi adaptasi terhadap perubahan global;
5. Mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Program Kerja :

1. Revitalisasi Stadion Tejosari;
2. Pembangunan gedung pelayanan publik terpadu;
3. Meningkatkan infrastruktur sanitasi dan lingkungan;



4. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk masyarakat;
5. Peningkatan kualitas jalan dan drainase yang terintegrasi
6. Peningkatan infrastruktur penerangan lingkungan.

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 3 : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan dan Kawasan Permukiman; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Pertanahan; Ketentraman, Ketertuban Umum dan Linmas; dan urusan Fungsi Penunjang

#### **5.2.4. Misi 4**

***“Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif”***

Komitmen perwujudan Misi 4 akan dilaksanakan melalui :

1. Menciptakan model-model usaha baru dengan sistem kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi
2. Mengintegrasikan objek wisata yang ada di Kota Metro melalui sistem informasi data terpadu
3. Membangun creative-hub sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator bisnis industri kreatif
4. Meningkatkan bantuan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk mendukung peningkatan sistem intensifikasi pertanian.

Program Kerja :

1. Kemitraan Meningkatkan Produk Hasil Pertanian Melalui Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) bagi Petani
2. Pembukaan 22 Pusat Wirausaha Baru.
3. Pembukaan Pusat Distribusi Bahan Pokok di 5 (lima) Kecamatan

4. Program Kemitraan Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat untuk Riset dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (PROGRAM METRO *CREATIVE-HUB*).
5. Membangun *Creative-Hub* (pemasaran produk UMKM berbasis digital)
6. Penciptaan Iklim Wisata Keluarga Terintegrasi.
7. Program Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga.
8. Program Penguatan Distribusi dan Pemasaran.

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 4 : Tenaga Kerja; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Pangan; Penanaman Modal; Pariwisata; Pertanian; Perikanan; Perindustrian; Perdagangan; dan urusan Fungsi Penunjang

#### **5.2.5. Misi 5**

***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat”***

Komitmen perwujudan Misi 5 akan dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan, akurat, serta berkala kepada masyarakat, terkait kinerja pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta manajemen pegawai;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan birokrasi dengan mengedepankan prinsip good governance.

Program Kerja :

1. Penerapan *E – Government* secara menyeluruh untuk pelayan yang lebih baik, cepat, tepat, dan efisien
2. Penguatan *Database* Terintegrasidalam Tata Kelola Pemerintahan

3. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan yang Terhormat dan Bermartabat
4. Implementasi *Open Government* dengan prinsip transparansi

Urusan yang mengampu pelaksanaan Misi 5 : Statistika; Arsip; Persandian; Perizinan; Komunikasi dan Informatika; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan urusan Fungsi Penunjang.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka hasil pemetaan urusan pengampu Misi sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Pemetaan Urusan Pengampu Misi**

NO	MISI	UU 23/2014	PERMENDAGRI 90/KEPMEN 050-3708	OPD
1	<b>Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan</b>	Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kebudayaan	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Kepemudaan dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Fungsi Penunjang	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah
			Unsur Kewilayahan	Kecamatan
Unsur Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

2	<b>Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial</b>	Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PP, PA, PP dan KB
		Pengendalian Penduduk dan KB	Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas PP, PA, PP dan KB
		Sosial	Sosial	Dinas Sosial
		Fungsi Penunjang	Unsur Pemerintahan Umum	BPBD
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah
			Unsur Kewilayahan	Kecamatan
			Unsur Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	<b>Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan</b>	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PUTR
		Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Pertanahan	Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Fungsi Penunjang	Unsur Pemerintahan Umum	BPBD
			Unsur Kewilayahan	Kecamatan
4	<b>Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif</b>	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Transmigrasi	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian
		Perindustrian	Perindustrian	Dinas Koperasi, UMK, UM dan

				Perindustrian
		Pangan	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Pertanian	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Perikanan	Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Pariwisata	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Perdagangan	Perdagangan	Dinas Perdagangan
		Penanaman Modal	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Fungsi Penunjang	Unsur Kewilayahan	Kecamatan
5	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat</b>	Statistik	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persandian	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Kearsipan	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pertanahan	Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Fungsi Penunjang	Urusan Pendukung	Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD
			Urusan Penunjang	Bappeda, BPKAD, BPPRD, BKPSDM

			Urusan Pengawasan	Inspektorat
			Urusan Kewilayahan	Kecamatan
			Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	Sat.Pol.PP

### 5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

**Tabel 5.2**

**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro Tahun 2021-2026**

<b>"Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"</b>											
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AWAL (2020)	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan</b>											
Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	77,19	Meningkatnya jenjang pendidikan yang ditempuh	Angka rata-rata lama sekolah	10,96	11,02	11,10	11,19	11,28	11,36	11,36
				Angka Harapan Lama Sekolah	14,47	14,56	14,65	14,74	14,83	14,92	15,01
			Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	77,19	77,62	78,05	78,48	78,92	79,36	79,36
<b>Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial</b>											
2.1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,63	Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83,54 persen	85 persen	90 persen	95 persen	98 persen	98 persen	98 persen
				Angka Harapan Hidup	71,63	71,76	71,90	72,04	72,18	72,32	72,32
2.2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	8,47	Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang ditangani	81,79%	85,3%	88,4%	91,5%	94,6%	97,7%	100%
				Persentase Penduduk Miskin	8,47	8,01	7,60	7,20	6,79	6,38	6,38
<b>Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan</b>											
Mewujudkan infrastruktur kota yang handal dan berwawasan lingkungan	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	90%	Meningkatnya kualitas konektivitas kota	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	90,%	91,64%	91,85%	92,06%	92,27%	92,48%	92,48%
			Meningkatnya	Indeks Kualitas	63,2	63,4	63,6	63,8	64	64,2	64,2

			kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Lingkungan Hidup								
<b>Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif</b>												
Meningkatkan perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi	-1,79 %	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase kenaikan penduduk yang bekerja	2,4%	2,9%	3,4%	3,9%	4,4%	4,9%	4,9%	
			Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	2,26 %	2,26 %	2,5%	3%	3,5%	4%	4%	
<b>Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat</b>												
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Nilai RB	60,08	5.1.1. Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Nilai RB	60,08	60,08	61,58	63,08	66,08	69,58	69,58	
			5.1.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Nilai SAKIP	65,04	65,04	66,14	67,24	68,34	69,48	69,48	





# **BAB VI**

## **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

### **6.1. Strategi**

Strategi merupakan sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, dan mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan perencanaan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Selanjutnya, strategi dan arah kebijakan menjadi rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Metro mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

**Tabel 6.1**  
**Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<i>"Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"</i>		
<b>Misi 1 :</b> Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan		
Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing	Meningkatnya jenjang pendidikan yang ditempuh	Meningkatkan kualitas sekolah untuk memenuhi standar layanan melalui peningkatan kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; peningkatan kualitas dan sarana sekolah; peningkatan manajemen pengelolaan satuan pendidikan; dan mengembangkan pendidikan karakter
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Meningkatkan angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan standar hidup layak
		Meningkatkan budaya literasi melalui pengembangan fungsi perpustakaan
		Mengembangkan kebudayaan dan kesenian daerah melalui Pelestarian dan pemberdayaan kebudayaan berbasis kearifan lokal
	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama melalui peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama	
<b>Misi 2 :</b> Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan Kesehatan	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan semesta melalui peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional; peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan; dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan
		Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui penurunan angka morbiditas; peningkatan status gizi; peningkatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat; dan Percepatan penurunan stunting melalui Program

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b><i>“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”</i></b>		
		Bangga Kencana
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Menurunkan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas sistem data PPKS; peningkatan Program Pemberdayaan Masyarakat; peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha
<b>Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan</b>		
Mewujudkan infrastruktur kota yang handal dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas konektivitas kota	Pengelolaan infrastruktur jalan melalui Pembangunan, Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jalan
		Meningkatkan manajemen lalu-lintas kota melalui Penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan
		Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana
	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup; dan peningkatan pengelolaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
		Pengelolaan Kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan melalui Pengelolaan kualitas lingkungan hunian dan Pengelolaan kualitas kawasan permukiman
		Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim melalui Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana
		Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui peningkatan edukasi proteksi kebakaran, meningkatkan kapasitas petugas kebakaran dan sarpras penanganan kebakaran

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”</b>		
<b>Misi 4 :</b> Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif		
Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat melalui Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi; pengembangan industri kreatif; peningkatan pelaksanaan program pembangunan yang bersifat padat karya; peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan pasar; dan peningkatan kualitas kelembagaan kelompok tani
	Meningkatnya investasi daerah	Menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi melalui penyederhanaan birokrasi perizinan dan non perizinan; Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia usaha; Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sektor ekonomi; peningkatan produksi dan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan; dan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
<b>Misi 5 :</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> ), Terhormat, dan Bermartabat.		
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Optimalisasi kerja birokrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; peningkatan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara; peningkatan kualitas kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
		Mengoptimalkan Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila melalui Pembinaan ideologi Pancasila, Pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme
		Penguatan kesetaraan dan kebebasan hak-hak sipil melalui Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten, peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b><i>“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”</i></b>		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	<p>Mengoptimalkan sistem perencanaan, penganggaran, penata usahaan dan evaluasi yang terintegrasi melalui integrasi sistem perencanaan, penganggaran, penata usahaan dan evaluasi; peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah; dan peningkatan keterbukaan informasi publik</p> <p>Penyederhanaan dan peningkatan kualitas sistem birokrasi pelayanan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi Standar Operasional Prosedur (SOP); peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan yang inklusif; peningkatan kapasitas prasarana pelayanan publik dan sdm aparatur pelayanan publik; dan pengintegrasian proses pelayanan public</p> <p>Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui peningkatan profesionalisme anggota Sat.Pol. PP, peningkatan penegakan produk hukum daerah, optimalisasi operasi penertiban umum; dan Penanganan konflik secara damai</p>

## **6.2. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

**Tabel 6.2**  
**Arah Kebijakan Pembangunan**

<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>	<b>Tahun 2026</b>
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka pemulihan kondisi sosial ekonomi akibat pandemic COVID-19	Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar serta pembangunan sumberdaya manusia	Meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat berbasis pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas	Pemantapan pembangunan sumberdaya manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berbudaya dan berakhlak mulia.	Pemantapan pembangunan di seluruh bidang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera



### 6.3. Program Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, telah ditetapkan 9 (sembilan) program prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan. Program prioritas ini adalah program utama yang telah disampaikan kepada masyarakat Kota Metro pada saat pelaksanaan Pilkada lalu. Dengan kata lain, program prioritas ini adalah program yang telah dijanjikan untuk diwujudkan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Berikut adalah program prioritas dimaksud :

1. Peningkatan Layanan Masyarakat melalui Kartu Metro Ceria (Satu Kartu Banyak Manfaat);
2. Peningkatan Insentif bagi Pegiat Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, dan Para Pamong;
3. Pembebasan Iuran BPJS Kelas III, dengan pelayanan yang berkualitas;
4. Merealisasikan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran;
5. Menghadirkan layanan masyarakat terpadu dan cepat, melalui Mall Pelayanan Publik Satu Atap (Mall Melesat);
6. Peningkatan Sarana Prasarana Jalan, Lampu/Penerangan Jalan dan IOT (*Internet Of Things*);
7. Revitalisasi Fasilitas Olahraga dan Budaya
8. Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) untuk Petani
9. Membangun *Creative-Hub*, yaitu sentra produksi dan pemasaran / E-comererce di 5 (lima) Kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan.

Selanjutnya adalah program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Adapun program pembangunan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**TABEL 6.3**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF**  
**PEMERINTAH KOTA METRO**

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	MISI 1 :																	
	Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan																	
	Tujuan :																	
	Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	77,19	77,62		78,05		78,48			78,92		79,36		79,36			
	Sasaran 1.1 :																	
	Meningkatnya jenjang pendidikan yang ditempuh	Angka rata-rata lama sekolah	10,96	11,2		11,1		11,19			11,28		11,36		11,36			
01	Program urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Administrasi perangkat daerah	100%	100%	137.934	100%	137.934	100%	142.072	100%	146.675	100%	151.457	100%	156.455		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
01	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) :													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			- SD/MI/PAKET A	103,35		22.005		22.005			22.665		23.400		24.162		24.960	
			- SMP/MTs/PAKET B	142,35		17.870		17.870			18.406		19.002		19.622		20.269	
			- PAUD usia 4-6 Tahun	78,45		7.631		7.631			7.860		8.115		8.379		8.656	
01	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah ketersediaan Buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar	1	1	46,3	1	46,3	1	47,69	1	49,23	1	50,84	5	52,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang bersertifikat pendidik :			0		70		72,10		74,44		76,86		79,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			- TK	58,99		59,46		60		60,5		61		61,51		62		
			- SD/SDLB	43,47		60,30		65,92		66,50		68		69		70		
			- SMP/SMPLB	65,41		65,97		66		68		69		70		71		
01	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah penerbitan izin operasional pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat			114		114		117,6		121,244		125,249		125,249	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			- PAUD	135		27		27		27		28		28		137		
			- SD	15		3		3		3		4		4		17		
			- SMP	17		3		3		3		5		5		19		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Sasaran 1.2 :																
		Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	77,19	77,62	78,05	78,48	78,92	79,36	79,36								
01	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	1	1	275	1	275	1	283	1	292	1	301	1	311	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	2	846	2	846	2	871,38	2	899,613	2	928,940	10	959,595	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional	1	2	202	1	202	2	208,06	2	214,801	2	221,804	10	229,123	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah karya budaya yang difitalisasi dan diinventarisasi	0	0	0	1	200	1	206	1	212,674	1	219,608	4	226,855	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	1	25	514	30	514	40	529,42	45	546,573	50	564,391	50	583,016	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Pembinaan dan peningkatan mutu kapasitas SDM	0	1	78	1	78	1	80,34	1	82,943	1	85,647	4	88,473	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100	100	100	5.076	100	5.076	100	5.228	100	5.385	100	5.547	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Rumah Pintar/perpustakaan kelurahan yang aktif	10	12	12	1.002	14	1.002	16	1.032	18	1.063	20	1.095	22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase peningkatan kerukunan beragama	100%	100%	151	100%	151	100%	156	100%	160	100%	165	100%	165	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100%	100%	1.461	100%	1.461	100%	1.505	100%	1.554	100%	1.604	100%	1.657	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGGUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi Olahraga	7 Prestasi	4.230	8 Prestasi	4.230	9 Prestasi	4.357	12 Prestasi	4.498	15 Prestasi	4.645	15 Prestasi	4.798	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai predikat LPPD	tinggi	8.713	tinggi	8.713	tinggi	8.974	tinggi	9.244	sangat tinggi	9.521	sangat tinggi	9.521	Sekretariat Daerah
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	1.897	100%	1.897	100%	1.954	100%	2.013	100%	2.073	100%	2.073	Kecamatan Metro Pusat
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	1.844	100%	1.844	100%	1.899	100%	1.956	100%	2.015	100%	2.015	Kecamatan Metro Timur
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	1.513	100%	1.513	100%	1.558	100%	1.605	100%	1.653	100%	1.653	Kecamatan Metro Barat
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	1.533	100%	1.533	100%	1.579	100%	1.626	100%	1.675	100%	1.675	Kecamatan Metro Utara
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	1.527	100%	1.527	100%	1.573	100%	1.620	100%	1.669	100%	1.669	Kecamatan Metro Selatan

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		MISI 2 :																
		Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial																
		Tujuan 2.1 :																
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,36	71,6	71,9	72,04	72,04	72,18	72,18	72,32	72,32	72,32	72,32	72,32	72,32		
		Sarasan 2.1 :																
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan	Cakupan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83,54%	85%	11.736	90%	18.030	95%	20.752	98%	22.113	98%	24.324	98%	24.324		
			Angka Harapan Hidup	71,63	71,76	71,90	72,04	72,04	72,18	72,18	72,32	72,32	72,32	72,32	72,32	72,32		
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kasus Kematian Ibu	0 kasus (0/2.585 KH)	3 kasus	199.101	3 kasus	219.111	3 kasus	240.912	2 kasus	265.003	2 kasus	291.503	2 kasus	320.654	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	5,03 (13/2.585)	5,03 (13/2.585)		4,76 (12/2.521)	4,76 (12/2.521)	4,76 (12/2.521)	4,41 (11/2.495)	4,41 (11/2.495)	4,41 (11/2.495)	4,41 (11/2.495)	4,41 (11/2.495)	4,41 (11/2.495)		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,64 (12/2.585)	4,64 (12/2.585)		4,36 (11/2.521)	4,36 (11/2.521)	4,36 (11/2.521)	4,01 (10/2.495)	4,01 (10/2.495)	4,01 (10/2.495)	4,01 (10/2.495)	4,01 (10/2.495)	4,01 (10/2.495)		
				Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	4,64 (12/2.585)	4,64 (12/2.585)		3,57 (9/2.521)	3,57 (9/2.521)	3,57 (9/2.521)	3,21 (8/2.495)	3,21 (8/2.495)	3,21 (8/2.495)	3,21 (8/2.495)	3,21 (8/2.495)	3,21 (8/2.495)		
				Prevalensi stunting pada anak balita	9,91	9,91		9,91	9,5	9,5	9,0	9,0	8,5	8,5	8,5	8,5		
				Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia > 15 tahun	19,82%	12,99%		12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%		
				Insiden Tuberkulosis per 100.000 penduduk	208,25	228,34		214,3	194,39	194,39	186,69	186,69	164,88	164,88	164,88	164,88		
				Pencapaian 5 pilar STBM berkelanjutan	1 pilar	2 pilar		2 pilar	3 pilar	3 pilar	3 pilar	3 pilar	4 pilar	4 pilar	4 pilar	4 pilar		
				Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi Utama	18,2 % (2/11)	18,2 % (2/11)		18,2 % (2/11)	81,8 % (9/11)	81,8 % (9/11)	100% (11/11)	100% (11/11)	100% (11/11)	100% (11/11)	100% (11/11)	100% (11/11)		
				Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan (RS) terakreditasi Paripurna	Akreditasi Utama	Akreditasi Utama		Akreditasi Utama	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGGUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	90%	91%	80	92%	88	93%	97	94%	106	95%	117	95%	128	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	86%	90%	574	92%	632	94%	695	96%	765	98%	841	98%	925	Dinas Kesehatan
				Persentase Industri Rumah Tangga bersertifikat PIRT	60 pelaku Industri Rumah Tangga	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indikator Keluarga Sehat (IKS)	0,22 (tidak sehat)	0,22 (tidak sehat)	1.124	0,27 (tidak sehat)	1.236	0,35 (tidak sehat)	1.360	0,35 (tidak sehat)	1.496	0,51 (kurang sehat)	1.645	0,51 (kurang sehat)	1.809	Dinas Kesehatan
01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional kantor	100%	100%	5.686	100%	6.255	100%	6.880	100%	7.568	100%	8.325	100%	9.157	
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	% ARG pada Belanja Langsung APBD	0,01	0,01	822	0,01	904	0,01	995	0,01	1.094	0,01	1.203	0,01	1.203	Dinas PPA KB PP
				IPG (indeks Pembangunan Gender) dan IDG														
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	% Perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	18	100%	20	100%	22	100%	24	100%	26	100%	26	Dinas PPA KB PP
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)			14		15		17		19		20		20	Dinas PPA KB PP
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	Jumlah instansi yang memanfaatkan data profil gender dan anak di Kota Metro	32	32	17	32	19	32	21	32	23	32	25	32	25	Dinas PPA KB PP
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	IPA (Indeks Perlindungan Anak)			87		96		105		116		127		140	Dinas PPA KB PP
				Capaian predikat Kota Layak Anak	Pratama	madya		madya		madya		nindya		nindya		nindya		
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	% AMPK yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	92	100%	101	100%	111	100%	122	100%	135	100%	148	Dinas PPA KB PP
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	2,34	2,34	326	2,33	358,6	2,33	394,46	2,33	433,906	2,32	477,2966	2,32	525,02626	Dinas PPA KB PP

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGGUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	15/1000	24/1000		21/1000		20/1000		18/1000		16/1000		16/1000			
2	14 03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	70	71	2300	72	2530	72,2	2783	72,5	3061,3	72,9	3367,43	72,9	3367,43	Dinas PPA KB PP
		Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	12,12	12,1		12,1		12		11,9		11,9		11,9			
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	29,21	29,44		29,75		30		30,2		31		31			
2	14 04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	86%	86%	121	88%	133,1	90%	146,41	92%	161,051	93%	177,1561	93%	177,1561	Dinas PPA KB PP
		<b>Tujuan 2.2 :</b>															
		<b>Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat</b>	Persentase penduduk miskin	8,47	8,01		7,6		7,2		6,79		6,38		6,38		
		<b>Sasaran 2.2 :</b>															
		<b>Meningkatnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial</b>	Persentase PPKS yang ditangani	81,79	85,3		88,4		91,5		94,6		97,7		100		
			Persentase penduduk miskin														
1	06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Tersertifikasinya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	16 org	21 org	463	28 org	486	35 org	510	42 org	536	50 org	563	55 org	591	Dinas Sosial
1	06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Tertanganinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	4 org	50	6 org	80	8 org	120	10 org	140	12 org	160	Dinas Sosial

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	187 org	268 org	1.413	281	1.483	295 org	1.557	310 org	1.635	326 org	1.717	345 org	1.803	Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.690 kk	7800 kk	602	8000 kk	632	7800 kk	663	7600 kk	697	7500 kk	731	7500 kk	750	Dinas Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	200 kk	225 kk	180	236 kk	189	248 kk	198	260 KK	208	273 kk	218	290 kk	250	Dinas Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terpeliharanya Nilai - nilai Perjuangan, Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	0,8	0,8	377	0,85	395	0,9	415	0,9	436	0,95	458	1	481	Dinas Sosial
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.897	100%	1.897	100%	1.954	100%	2.013	100%	2.073	100%	2.073	Kecamatan Metro Pusat
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.844	100%	1.844	100%	1.899	100%	1.956	100%	2.015	100%	2.015	Kecamatan Metro Timur
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.513	100%	1.513	100%	1.558	100%	1.605	100%	1.653	100%	1.653	Kecamatan Metro Barat
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.533	100%	1.533	100%	1.579	100%	1.626	100%	1.675	100%	1.675	Kecamatan Metro Utara
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.527	100%	1.527	100%	1.573	100%	1.620	100%	1.669	100%	1.669	Kecamatan Metro Selatan
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai predikat LPPD	tinggi	tinggi	8.713	tinggi	8.713	tinggi	8.974	tinggi	9.244	sangat tinggi	9.521	sangat tinggi	9.521	Sekretariat Daerah



KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		<b>MISI 3 :</b>																
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan																
		<b>Tujuan :</b>																
		<b>Mewujudkan infrastruktur kota yang handal dan berwawasan lingkungan</b>	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	90%	91,64%		91,85%		92,06%		92,27%		92,48%		92,48%			
		<b>Sasaran 3.1 :</b>																
		<b>Meningkatnya kualitas konektivitas kota</b>	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	90%	91,64%		91,85%		92,06%		92,27%		92,48%		92,48%			
1	11	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	90,00%	91,64%	30.514,15	91,85 %	31.429,57	92,06%	32.372,46	92,27%	33.343,63	92,48 %	34.343,94	92,48%	34.343,94	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	7	6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	70%	70%	5.614.185	72,5%	5.754.539	75%	5.898.403	77,5%	6.045.863	80%	6.197.009	80%	6.197.009	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	15	2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas kota	4,14 %	6,14 %	3142.84	8,14 %	3.237.125	10,14 %	3.334.239	12,14%	3.434.266	14,14 %	3.537.294	14,14%	3.537.294	Dinas Perhubungan
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	3.209	100%	3.273	100%	3.273	100%	3.338	100%	3.405	100%	3.405	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	02	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	900 jiwa	910 jiwa	710	920 jiwa	724	930 jiwa	738	940 jiwa	753	950 jiwa	768	960 jiwa	768	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		<b>Sasaran 3.2 :</b>																
		<b>Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman</b>	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,2	63,4		63,6		63,8		64		64,2		64,2			
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	40 %	35 %	3.391,002	30%	3.492,733	25 %	3.587,036	20 %	3.676,712	15%	3.750,246	15 %	3.750,246	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Sambungan Rumah Aktif Pertama	2251	2551	2.888,808	2651	2.975,472	2751	3.049,859	2851	3.126,106	2951	3.204,258	2951	3.204,258	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	3	4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	6%	6%	0	7,5%	1500	12%	1500	15%	1800	18%	2000	18%	2000	Dinas Lingkungan Hidup / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal dengan akses sanitasi aman	3%	5%	1647,92	8%	1700	10%	1700	12%	1700	12%	1700	12%	1700	Dinas Lingkungan Hidup / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	7	Pengembangan Permukiman	persentase Ketercukupan Prasarana Kawasan Strategis	60%	60%	2225	65%	1000	70%	1000	75%	1000	80%	1000	80%	1000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	8	Program Penataan Bangunan	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	10%	11%	575	12%	575	13%	575	14%	575	15%	575	16%	575	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	1.444	0	1.445	0	1.445	0	1.445	0	1.445	0	1.445	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	15%	15%	200	30%	200	45%	200	60%	200	75%	200	75%	200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	91%	91%	1.351,334	91%	1000	91%	675	91%	700	91%	700	91%	700	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana/Relokasi Pembangunan Pemerintah	N/A	100%	49,800	100%	250	100%	250	100%	250	100%	250	100%	250	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni (Penyusunan RKP dan RP3)	98%	98,2%	1304,544	98,2% (RKP)	350	98,4% (RP3)	1850	98,6%	1500	98,8%	1500	98,8%	1500	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Lingkungan Kumuh (perbaikan rumah kumuh di luar kawasan kumuh 10 Ha)	0	0	0	1,00%	3000	0,80%	3000	0,60%	3000	0,50%	3000	0,50%	3000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	95%	95%	1.934,5	95,5%	2550	96%	2500	96,5%	2500	97%	2500	97%	2500	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1	4	6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan	Persentase Pembangunan Perumahan Baru yang Layak Huni	89,64%	90,50%	0	90,50%	200	91,00%	200	91,50%	200	92,5%	200	92,50%	200	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	10	8	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Cakupan Pemanfaatan Tanah Kosong (Pemanfaatan Tanah Kosong untuk RTH)	0	0	0	0	150	0	200	30%	200	60%	200	60%	200	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Rasio Luas tanah yang telah ditetapkan penatagunaannya	78%	78%	164,35	80%	165	85%	165	90%	165	95%	165	95%	165	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup	66,67% (RPPLH, KLHS RTRW, KLHS RPJMD)	66,67% (RPPLH, KLHS RTRW, KLHS RPJMD)	0	100% (RPPLH, KLHS RTRW, KLHS RPJMD, KLHS RDTR)	550	100% (RPPLH, KLHS RTRW, KLHS RPJMD, KLHS RDTR)	0	100% (RPPLH, KLHS RTRW, KLHS RPJMD, KLHS RDTR, KLHS REVISI RPJMD)	250	100% (RPPLH, KLHS RTRW, KLHS RPJMD, KLHS RDTR, KLHS REVISI RPJMD)	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rasio Pencegahan dan Penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	0	100%	400	100%	400	100%	350	100%	350	100%	350	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Persentase Keterawatan RTH	85,45%	85,45%	1110	89%	1143,3	92,50%	1.177.599	95%	1.212.927	100%	1.249.315	100%	1.249.315	Dinas Lingkungan Hidup / Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Ketaatan Produsen B3 dan/atau Limbah B3	7	7	15	8	40	8	40	9	45	9	45	10	45	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGKUTAN/PR OGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	11	6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Ketaatan Pemenuhan Persyaratan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	75 %	75 %	36	80 %	100	82%	100	84%	105	87%	105	105	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat yang taat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	40%	40%	0	40.1%	60	40,20%	63	40,35%	67.5	40,50%	70	40,50%	70	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Hidup	20%	20%	35	25,00%	70	30%	105	40%	140	45%	175	45%	125	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kota Metro, lokasi usaha dan dampaknya di Kota Metro.	100%	100%	15	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kota Metro, lokasi usaha dan dampaknya di Kota Metro.	100,00%	100,00%	15	100,00%	50	100,00%	50	100,00%	50	100,00%	50	100,00%	50	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	16,55%	16,55%	5.664.575	26,00%	8.831.258	27,00%	9.096.196	28,00%	10.915.435	30,00%	11.242.898	30,00%	11.242.898	Dinas Lingkungan Hidup
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	120	100%	132	100%	145	100%	160	100%	176	100%	100	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGBUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.897	100%	1.897	100%	1.954	100%	2.013	100%	2.073	100%	2.073	Kecamatan Metro Pusat
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.844	100%	1.844	100%	1.899	100%	1.956	100%	2.015	100%	2.015	Kecamatan Metro Timur
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.513	100%	1.513	100%	1.558	100%	1.605	100%	1.653	100%	1.653	Kecamatan Metro Barat
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.533	100%	1.533	100%	1.579	100%	1.626	100%	1.675	100%	1.675	Kecamatan Metro Utara
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.527	100%	1.527	100%	1.573	100%	1.620	100%	1.669	100%	1.669	Kecamatan Metro Selatan

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		<b>MISI 4 :</b>																
		Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif																
		<b>Tujuan :</b>																
		Meningkatkan perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi	-1,79%	3%	4%		5%		5%		5,6%		5,6%				
		<b>Sasaran 4.1 :</b>																
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase kenaikan penduduk yang bekerja	2,40%	2,90%	3,40%		3,90%		4,40%		4,90%		4,90%				
2	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas bahan pangan utama (Padi) (kwintal)	58,9	59,0	724,89	59,1	724,89	59,2	746,64	59,3	770,83	59,4	795,96	59,5	822,22	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
2	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani (%)	31	32	803,62	33	803,62	34	827,73	35	854,55	40	882,41	40	911,52	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	4248,08	100%	4248,08	100%	4375,52	100%	4517,29	100%	4664,55	100%	4818,48	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	2 koperasi	2 koperasi	0	2 koperasi	50	3 koperasi	52	4 koperasi	54	5 koperasi	56	5 koperasi	58	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan secara langsung (on-site) atau secara tidak langsung (off-site)	5	5	0	5	50	10	52	15	54	20	56	20	58	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase koperasi aktif	78%	78%	12,59	78,20%	12,59	78,40%	12,97	78,60%	13,39	78,80%	13,83	78,80%	14,28	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang telah mendapat sertifikat uji kompetensi	40 Koperasi	60 koperasi	820,3	80 Koperasi	820,3	100 Koperasi	844,91	120 Koperasi	872,29	140 Koperasi	900,72	140 Koperasi	930,45	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Fasilitasi pameran dan promosi UMKM	20 produk	20 produk	70	20 produk	72	20 produk	74	20 produk	77	20 produk	79	20 produk	82	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Data UMKM yang akurat	2 dokumen	2 dokumen	183,51	2 dokumen	183,51	2 dokumen	189,02	2 dokumen	195,14	2 dokumen	201,5	2 dokumen	208,15	Dinas UMK, UM dan Perindustrian

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGKUTAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro dan kecil	99%	99%	1172,57	99,10%	1172,57	99,20%	1207,75	99,30%	1246,88	99,40%	1287,53	99,40%	1330,01	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	35 Kelompok	45 Kelompok	2221,99	55 Kelompok	2221,99	65 Kelompok	2288,65	75 Kelompok	2362,8	85 Kelompok	2439,83	85 Kelompok	2520,35	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi proses perizinannya	72 Usaha industri	82 Usaha Industri	125,56	92 Usaha Industri	125,56	102 Usaha Industri	129,33	112 Usaha Industri	133,52	122 Usaha Industri	137,87	122 Usaha Industri	142,42	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Industri yang terdaftar dalam SII Nas	1	1	171,54	1	171,54	1	176,68	1	182,41	1	188,35	1	194,57	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	50	50	48,89	50	48,89	50	50,36	50	51,99	50	53,69	50	55,45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	7142,67	100%	7142,67	100%	7356,95	100%	7595,32	100%	7842,93	100%	8101,74	Dinas Perdagangan
3	30	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah verifikasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	64	50	177	55	177	60	182,31	65	188,22	70	194,35	70	200,77	Dinas Perdagangan
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	0	10%	3142,75	20%	3142,75	30%	3237,03	40%	3341,91	50%	3450,86	50%	3564,74	Dinas Perdagangan
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah pasar yang terpantau stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3 Pasar	3 Pasar	178	3 Pasar	178	3 Pasar	183,34	3 Pasar	189,28	3 Pasar	195,45	3 Pasar	201,9	Dinas Perdagangan
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor															Dinas Perdagangan
3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan alat UTTP yang bertanda Tera Sah	287 unit	5%	120	5%	120	5%	123,6	5%	127,6	5%	131,76	5%	136,11	Dinas Perdagangan
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran produk lokal/produk dalam negeri	4 kegiatan	4 kegiatan	275,5	4 kegiatan	275,5	4 kegiatan	283,76	4 kegiatan	292,96	4 kegiatan	302,51	4 kegiatan	312,49	Dinas Perdagangan

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kota Metro	1273 lembaga	1273 lembaga		1273 lembaga		1273 lembaga		1273 lembaga		1273 lembaga		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2	7	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	126 Tenaga Kerja	130 Tenaga Kerja	358,61	140 Tenaga Kerja	325,97	150 Tenaga Kerja	325,97	160 Tenaga Kerja	325,97	170 Tenaga Kerja	325,97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2	7	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	48,33	49	358,61	50	325,97	51	325,97	52	325,97	53	325,97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2	7	05	Program Hubungan Industrial	Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan meningkatnya perlindungan tenaga kerja	300 Perusahaan	300 Perusahaan	358,61	350 Perusahaan	325,97	400 Perusahaan	325,97	450 Perusahaan	325,97	500 Perusahaan	325,97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
			<b>Sasaran 4.2 :</b>															
			<b>Meningkatnya investasi daerah</b>	Pertumbuhan Investasi	2,26%	2,26%		2,50%		3%		3,50%		4%		4%		
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)	16.634,39	21.042,08	30,35	21.076,35	30,35	21.110,55	31,26	21.144,82	32,27	21.179,02	33,33	21.179,02	34,43	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal perkapita)	Energi 2.925,92	2400	520,25	2400	520,25	2400	535,86	2400	553,22	2400	571,25	2400	590,11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
				Protein 85,98	63		63		63		63		63		63			
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Peningkatan cadangan pangan masyarakat (ton)	37,5	75	40	112,5	40	150	41,2	187,5	42,53	225	43,92	225	45,37	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	9	90	29,29	110	29,29	250	30,17	350	31,15	450	32,16	450	33,22	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan (ton)	1869,82	1907,22	1385,32	1945,4	1385,32	1984,3	1426,88	2043,8	1473,11	2105,1	1521,13	2105,1	1571,33	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan



KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3	25	05	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi ikan (%)	37,65	38,45	29,94	39,25	29,94	40,05	30,84	40,85	31,84	41,65	32,88	41,65	33,96	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	46,49	46,50	2498,32	46,55	2498,32	46,60	2573,27	46,65	2656,64	46,70	2743,25	46,75	2833,78	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pelayanan hewan (ekor)	7	7,35	819,44	7,7	819,44	8,05	844,02	8,4	871,37	8,75	899,78	8,75	929,47	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan lahan gagal panen / puso (hektar)	100	80	100	60	100	40	103	20	106,34	0	109,80	0	113,43	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi (surat)	0	2	50	2	50	2	51,5	2	53,17	2	54,90	2	56,71	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	5738,77	100%	5738,77	100%	5910,93	100%	6102,45	100%	6301,38	100%	6509,33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	115 M	120 M	233,66	125 M	233,66	130 M	240,67	135 M	248,47	140 M	256,57	140 M	265,04	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	245	250	30	255	30	260	30,9	265	31,9	270	32,94	270	34,03	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM	88,66	88,86	358,61	89,06	358,61	89,26	369,37	89,46	381,34	89,66	393,77	89,66	406,76	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	5 M	6 M	325,97	7 M	325,97	8 M	335,75	9 M	346,63	10 M	357,93	10 M	369,74	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	PAD sektor Pariwisata	1,17	1,30	1,080	1,33	1,080	1,35	1,112	1,38	1,148	1,40	1,186	1,40	1,225	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	100%	100%	1,236	100%	1,236	100%	1,273	100%	1,314	100%	1,357	100%	1,402	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI	20%	20%	3,00	25%	3,00	30%	3,09	40%	3,19	45%	3,29	45%	3,40	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	40	55	9,87	70	9,87	80	1,017	95	1,050	115	1,084	115	1,120	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	MISI 5 :																	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat																	
	Tujuan :																	
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Nilai RB	6,08	6,08		61,58		63,08		66,08		69,58		69,58				
	Sasaran 5.1 :																	
	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Nilai RB	6,08	6,08		61,58		63,08		66,08		69,58		69,58				
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	14202	100%	15579	100%	17137	100%	18851	100%	20736	100%	20736	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan Perda	90%	90%	411	90%	452	95%	497	95%	547	100%	602	100%	602	Satuan Polisi Pamong Praja
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	47%	57%	416	70%	416	82%	428	91%	441	100%	455	100%	455	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah OPD yang melakukan penyelamatan arsip	0	0	0	3	27	4	28	4	29	4	30	4	17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Bertambahnya daftar arsip tertutup	0	0	0	1	30	1	31	1	32	1	33	1	33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
4	01	02	Program Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	30.496	100%	30.496	100%	31.411	100%	32.353	100%	33.324	100%	33.324	Sekretariat Daerah
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai predikat LPPD	tinggi	tinggi	8.713	tinggi	8.713	tinggi	8.974	tinggi	9.244	sangat tinggi	9.521	sangat tinggi	9.521	Sekretariat Daerah
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase hasil monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	78%	78%	2.511	81%	2.511	84%	2.586	87%	2.664	90%	2.744	93%	2.744	Sekretariat Daerah

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGGUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4	02	01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	25.680	100%	25.680	100%	26.450	100%	27.244	100%	28.061	100%	28.061	Sekretariat DPRD
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disahkan	100%	100%	11.310	100%	11.310	100%	11.649	100%	11.999	100%	12.359	100%	12.359	Sekretariat DPRD
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK	60,27	70	358	77	358	82	368,74	86	379,80	88	391,20	90	391,20	Inspektorat
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	3.477	100%	3.477	100%	3.581	100%	3.689	100%	3.799	100%	3.799	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sekolah yang diberikan pendidikan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	0	3	288	3	288	5	297	5	306	5	315	21	315	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan	N/A	75%	163	80%	163	85%	168	90%	173	95%	178	100%	178	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif	N/A	30%	558	30%	558	35%	575	40%	592	45%	610	50%	610	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial	100%	100%	494	100%	494	100%	509	100%	524	100%	540	100%	540	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	16	2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Pengembangan media komunikasi publik Lingkup OPD	200 Informasi 1 Layanan	55 Informasi 1 Layanan	250	55 Informasi 1 Layanan	250	55 Informasi 1 Layanan	250	55 Informasi 1 Layanan	250	55 Informasi 1 Layanan	250	275 Informasi 5 Layanan	250	Dinas Kominfo
2	16	3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Pengembangan teknologi informasi Lingkup OPD	4 Aplikasi 100 Maintenance	3 Aplikasi 100 Maintenance	500	3 Aplikasi 100 Maintenance	500	3 Aplikasi 100 Maintenance	500	3 Aplikasi 100 Maintenance	500	3 Aplikasi 100 Maintenance	500	15 Aplikasi 100 Maintenance	500	Dinas Kominfo
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	90%	98%	7.686	98%	8.614	98%	9.740	98%	10.825	98%	12.043	98%	12.043	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGGUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan	90%	99%	286	99%	329	99%	394	99%	454	99%	522	99%	522	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil	90%	99%	529	99%	608	99%	730	99%	840	99%	966	99%	966	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	90%	99%	608	99%	699	99%	839	99%	965	99%	111	99%	1.110	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan	90%	100%	3	100%	4	100%	5	100%	6	100%	7	100%	71	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Metro Pusat															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah (persen)	100%	100%	5.957	100%	5.957	100%	6.136	100%	6.320	100%	6.509	100%	6.509	Kecamatan Metro Pusat
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	80	1.313	82	1.313	84	1.352	86	1.393	88	1.435	90	1.435	Kecamatan Metro Pusat
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.897	100%	1.897	100%	1.954	100%	2.013	100%	2.073	100%	2.073	Kecamatan Metro Pusat
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (persen)	30%	30%	16	35%	16	40%	20	45%	20	50%	20	55%	20	Kecamatan Metro Pusat
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	N/A	100%	762	100%	762	100%	785	100%	808	100%	833	100%	833	Kecamatan Metro Pusat
			Metro Timur															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah (persen)	100%	100%	5.298	100%	5.298	100%	5.457	100%	5.621	100%	5.789	100%	5.789	Kecamatan Metro Timur
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	80	1.038	82	1.038	84	1.069	86	1.101	88	1.134	90	1.134	Kecamatan Metro Timur

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGGUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.844	100%	1.844	100%	1.899	100%	1.956	100%	2.015	100%	2.015	Kecamatan Metro Timur
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (persen)	50%	55%	16	60%	16	65%	20	70%	20	75%	20	80%	20	Kecamatan Metro Timur
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	N/A	100%	850	100%	850	100%	876	100%	902	100%	929	100%	929	Kecamatan Metro Timur
			Metro Barat															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah (persen)	100%	100%	4.763	100%	4.763	100%	4.906	100%	5.053	100%	5.205	100%	5.205	Kecamatan Metro Barat
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	80	847	82	847	84	872	86	899	88	926	90	926	Kecamatan Metro Barat
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.513	100%	1.513	100%	1.558	100%	1.605	100%	1.653	100%	1.653	Kecamatan Metro Barat
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (persen)	19%	20%	11	25%	11	30%	16	35%	16	40%	16	45%	16	Kecamatan Metro Barat
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	N/A	100%	683	100%	683	100%	703	100%	725	100%	746	100%	746	Kecamatan Metro Barat
			Metro Utara															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah (persen)	100%	100%	5.160	100%	5.160	100%	5.315	100%	5.474	100%	5.638	100%	5.638	Kecamatan Metro Utara
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	80	1.035	82	1.035	84	1.066	86	1.098	88	1.131	90	1.131	Kecamatan Metro Utara
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.533	100%	1.533	100%	1.579	100%	1.626	100%	1.675	100%	1.675	Kecamatan Metro Utara

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGGUNG DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (persen)	0	5%	11	10%	11	15%	16	20%	16	25%	16	30%	16	Kecamatan Metro Utara
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	N/A	100%	769	100%	769	100%	792	100%	816	100%	840	100%	840	Kecamatan Metro Utara
			Metro Selatan															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah (persen)	100%	100%	4.908	100%	4.908	100%	5.055	100%	5.207	100%	5.363	100%	5.363	Kecamatan Metro Selatan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	80	672	82	672	84	692	86	713	88	734	90	734	Kecamatan Metro Selatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.527	100%	1.527	100%	1.573	100%	1.620	100%	1.669	100%	1.669	Kecamatan Metro Selatan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (persen)	10%	15%	11	20%	11	25%	16	30%	16	35%	16	35%	16	Kecamatan Metro Selatan
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	N/A	100%	576	100%	576	100%	593	100%	611	100%	629	100%	629	Kecamatan Metro Selatan
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Pelayanan Daerah	100%	100%	5.329	100%	5.423	100%	5.684	100%	5.868	100%	6.059	100%	6.059	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Meningkatnya Kinerja PNS dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Daerah	100%	100%	9721,0	100%	9721,0	100%	10012,0	100%	10337,0	100%	10674,0	100%	10674,0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN dan CPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Manajerial	100%	100%	948,7	100%	948,7	100%	2666,0	100%	2692,0	100%	2749,0	100%	2749,0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAMPENGANGKUTAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Sasaran 5.2 :																
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	65,04	65,04		66,14		67,24		68,34		69,48		69,48			
6	01	02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	9.577	100%	9.577	100%	9.864	100%	10.160	100%	10.465	100%	10.465	Inspektorat
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	95%	95%	783	95%	783	96%	806	97%	831	98%	856	98%	856	Inspektorat
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Kelurahan	22 Kelurahan	22 Kelurahan	33.643	22 Kelurahan	33.643	22 Kelurahan	34.653	22 Kelurahan	35.775	22 Kelurahan	36.942	22 Kelurahan	38.161	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	1	1	33.643	1	33.643	1	34.653	1	35.775	1	36.942	1	38.161	BPKAD
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	16.886	WTP	16.886	WTP	17.392	WTP	17.956	WTP	18.541	WTP	19.153	BPKAD
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Data Aset daerah yang Akurat dan sesuai antara Data Riil dan Buku Inventaris	70%	70%	2.223	75%	2.223	80%	2.290	90%	2.364	93%	2.441	93%	2.522	BPKAD
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	6.551	100%	6.551	100%	6.748	100%	6.966	100%	7.193	100%	7.431	Bappeda
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	100%	100%	1.081	100%	1.081	100%	1.113	100%	1.149	100%	1.187	100%	1.226	Bappeda
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPd	100%	100%	1.420	100%	1.420	100%	1.463	100%	1.510	100%	1.559	100%	1.611	Bappeda
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	9.884	100%	9.884	100%	10.149	100%	10.478	100%	10.820	100%	11.177	BPPRD
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	24,14	25,3	1.127	26,6	1.127	27,9	1.192	29,2	1.231	30,5	1.271	30,5	1.313	BPPRD



KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	100%	100%	659	100%	659	100%	679	100%	701	100%	723	100%	747	Bappeda

## **BAB VII**

# **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Program Perangkat Daerah merupakan operasionalisasi dari visi dan misi yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Program Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah beserta pemutakhirannya. Selanjutnya, Program Perangkat Daerah akan dirinci lagi kedalam Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Adapun pendanaan program disesuaikan dengan proyeksi Belanja yang telah disusun dalam Bab III sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026**

KODE	URAIAN	PROYEKSI					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Kapasitas Riil Keuangan</b>	<b>589.691.849.813</b>	<b>546.604.224.215</b>	<b>617.811.348.927</b>	<b>638.973.035.065</b>	<b>664.684.483.724</b>	<b>698.937.846.992</b>
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>978,176,684,496</b>	<b>935,089,058,898</b>	<b>1,006,296,183,610</b>	<b>1,027,457,869,749</b>	<b>1,053,169,318,407</b>	<b>1,087,422,681,675</b>
<b>5,1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>821,441,954,674</b>	<b>778,354,329,076</b>	<b>778,354,329,076</b>	<b>819,516,015,215</b>	<b>845,227,463,873</b>	<b>879,480,827,141</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	444,973,144,842	444,973,144,842	444,973,144,842	444,973,144,842	444,973,144,842	444,973,144,842
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	338,244,349,830	295,156,724,232	295,156,724,232	336,318,410,371	362,029,859,029	396,283,222,297
5.1.03	Belanja Hibah	36,902,070,002	36,902,070,002	36,902,070,002	36,902,070,002	36,902,070,002	36,902,070,002
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	1,322,390,000	1,322,390,000	1,322,390,000	1,322,390,000	1,322,390,000	1,322,390,000
<b>5,2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>146,694,729,822</b>	<b>146,694,729,822</b>	<b>217,901,854,534</b>	<b>197,901,854,534</b>	<b>197,901,854,534</b>	<b>197,901,854,534</b>
5.2.01	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	25,728,975,686	25,728,975,686	25,728,975,686	25,728,975,686	25,728,975,686	25,728,975,686
5.2.02	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	42,045,533,284	42,045,533,284	73,252,657,996	73,252,657,996	73,252,657,996	73,252,657,996
5.2.03	Belanja Mobil Jalan, Jaringan Dan Irigasi	78,039,703,552	78,039,703,552	118,039,703,552	98,039,703,552	98,039,703,552	98,039,703,552
5.2.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	880,517,300	880,517,300	880,517,300	880,517,300	880,517,300	880,517,300

5,3	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>10,040,000,000</b>	<b>10,040,000,000</b>	<b>10,040,000,000</b>	<b>10,040,000,000</b>	<b>10,040,000,000</b>	<b>10,040,000,000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10,040,000,000	10,040,000,000	10,040,000,000	10,040,000,000	10,040,000,000	10,040,000,000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>978,176,684,496</b>	<b>935,089,058,898</b>	<b>1,006,296,183,610</b>	<b>1,027,457,869,749</b>	<b>1,053,169,318,407</b>	<b>1,087,422,681,675</b>

**TABEL 7.2**  
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS**  
**YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KOTA METRO**  
**PEMERINTAH KOTA METRO**

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan																
1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															
01	01	01	Program urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan Administrasi perangkat daerah	100%	100%	137.934	100%	137.934	100%	142.072	100%	146.675	100%	151.457	100%	156.455	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) :			22.005		22.005		22.665		23.399		24.162		24.960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				- SD/MI/PAKET A	103,35	100	22.005	100	22.005	100	22.665	100	23.400	100	24.162	100	24.960	
				- SMP/MTs/PAKET	142,35	100	17.870	100	17.870	100	18.406	100	19.002	100	19.622	100	20.269	
				- PAUD usia 4-6	78,45		7.631		7.631		7.860		8.115		8.379		8.656	
01	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	jumlah Ketersediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar	1	1	46,30	1	46,30	1	47,69	1	49,23	1	50,84	5	52,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
01	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang bersertifikat pendidik :			0		70		72,10		74,44		76,86		79,40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				- TK	58,99	59,46		60		60,5		61		61,51		62		
				- SD/SDLB	43,47	60,30		65,92		66,50		68		69		70		
				- SMP/SMPLB	65,41	65,97		66		68		69		70		71		
01	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah terhadap pendidikan:			0		50		52		53		55		57	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				- PAUD	58,99	59,46		60		60,5		61		61,51		62		
				- SD	43,47	60,30		65,92		66,50		68		69		70		
				- SMP	65,41	65,97		66		68		69		70		71		
2	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	1 kegiatan	1 kegiatan	275	1 kegiatan	275	1 kegiatan	283	1 kegiatan	292	1 kegiatan	302		312	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota															

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kasus Kematian Ibu	0 kasus (0/2.585 KH)	3 kasus	199.101	3 kasus	219.011	3 kasus	240.912	2 kasus	265.003	2 kasus	291.503	2 kasus	320.654	Dinas Kesehatan
			Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	5,03 (13/2.585)	5,03 (13/2.585)	4,76 (12/2.521)		4,76 (12/2.521)		4,41 (11/2.495)		4,41 (11/2.495)		4,41 (11/2.495)		4,41 (11/2.495)		
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,64 (12/2.585)	4,64 (12/2.585)	4,36 (11/2.521)		4,36 (11/2.521)		4,01 (10/2.495)		4,01 (10/2.495)		4,01 (10/2.495)		4,01 (10/2.495)		
			Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	4,64 (12/2.585)	4,64 (12/2.585)	3,57 (9/2.521)		3,57 (9/2.521)		3,21 (8/2.495)		3,21 (8/2.495)		3,21 (8/2.495)		3,21 (8/2.495)		
			Prevalensi stunting pada anak balita	9,91	9,91	9,91		9,5		9,0		8,5		8,5		8,5		
			Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia > 15 tahun	19,82%	12,99%	12,99%		12,99%		12,99%		12,99%		12,99%		12,99%		
			Insiden Tuberkulosis per 100.000 penduduk	208,25	228,34	214,3		194,39		186,69		164,88		164,88		164,88		
			Pencapaian 5 pilar STBM berkelanjutan	1 pilar	2 pilar	2 pilar		3 pilar		3 pilar		4 pilar		4 pilar		4 pilar		
			Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi Utama	18,2 % (2/11)	18,2 % (2/11)	18,2 % (2/11)		81,8 % (9/11)		100% (11/11)		100% (11/11)		100% (11/11)		100% (11/11)		
			Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan (RS) terakreditasi Paripurna	Akreditasi Utama	Akreditasi Utama	Akreditasi Utama		Akreditasi Paripurna		Akreditasi Paripurna		Akreditasi Paripurna		Akreditasi Paripurna		Akreditasi Paripurna		
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	90%	91%	80	92%	88	93%	97	94%	106	95%	117	95%	128	Dinas Kesehatan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	86%	90%	574	92%	632	94%	695	96%	765	98%	841	98%	925	Dinas Kesehatan
				Persentase Industri Rumah Tangga bersertifikat PIRT	60 pelaku Industri Rumah Tangga	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Indikator Keluarga Sehat (IKS)	0,22 (tidak sehat)	0,22 (tidak sehat)	1.124	0,27 (tidak sehat)	1.236	0,35 (tidak sehat)	1.360	0,35 (tidak sehat)	1.496	0,51 (kurang sehat)	1.645	0,51 (kurang sehat)	1.809	Dinas Kesehatan
1	03		<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>															
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	40%	35%	3.391	30%	3.493	25%	3.587	20%	3.677	15%	3.750	15%	3.750	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Sambungan Rumah Aktif Pertama	2251	2551	2.889	2651	2.975	2751	3.050	2851	3.126	2951	3.204	2951	3.204	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	6%	6%	-	7,5%	1.500	12%	1.500	15%	1.800	18%	2.000	18%	2.000	Dinas Lingkungan Hidup / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	05	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal dengan akses sanitasi aman	3%	5%	1.648	8%	1.700	10%	1.700	12%	1.700	12%	1.700	12%	1.700	Dinas Lingkungan Hidup / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	70%	70%	5.614	72,5%	5.755	75%	5.898	77,5%	6.046	80%	6.197	80%	6.197	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	07	Program Pengembangan Permukiman	Rasio Ketercukupan Infrastruktur Kawasan Strategis	0	0	-	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	03	08	Program Penataan Bangunan	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	10%	11%	575	12%	575	13%	575	14%	575	15%	575	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	1.445	0	1.445	0	1.445	0	1.445	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	90,00%	91,64%	30.514	91,85%	31.430	92,06%	32.372	92,27%	33.344	92,48%	34.344	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	15%	15%	200	30%	200	45%	200	60%	200	75%	200	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	91%	91%	1.351	91%	1.000	91%	675	91%	700	91%	700	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	04		<b>Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>													
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana/Relokasi Pembangunan Pemerintah	N/A	100%	50	100%	250	100%	250	100%	250	100%	250	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni (Penyusunan RKP dan RP3)	98%	98,20%	1.305	98,2% (RKP)	350	98,4% (RP3)	1.850	98,60%	1.500	98,8%	1.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Lingkungan Kumuh (perbaikan rumah kumuh di luar kawasan kumuh 10 Ha)	0	0	-	1,00%	3.000	0,80%	3.000	0,60%	3.000	0,50%	3.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	95%	95%	1.935	95,50%	2.550	96%	2.500	96,50%	2.500	97%	2.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 04 06	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pembangunan Perumahan Baru yang Layak Huni	89,64%	90,50%	-	90,50%	200	91,00%	200	91,50%	200	92,5%	200	92,50%	200	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 05	<b>Urusan Ketentraman dan Ketertiban</b>															
1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	14202	100%	15579	100%	17137	100%	18851	100%	20736	100%	20736	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan Perda	90%	90%	411	90%	452	95%	497	95%	547	100%	602	100%	602	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	120	100%	132	100%	145	100%	160	100%	176	100%	100	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	3.209	100%	3.273	100%	3.273	100%	3.338	100%	3.405	100%	3.405	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 02	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	900 jiwa	910 jiwa	710	920 jiwa	724	930 jiwa	738	940 jiwa	753	950 jiwa	768	960 jiwa	768	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 06	<b>Urusan Sosial</b>															
1 06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Tersertifikasinya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	16 org	21 org	463	28 org	486	35 org	510	42 org	536	50 org	563	55 org	591	Dinas Sosial
1 06 03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Tertanganinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	4 org	50	6 org	80	8 org	120	10 org	140	12 org	160	Dinas Sosial
1 06 04	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	187 org	268 org	1.413	281	1.483	295 org	1.557	310 org	1.635	326 org	1.717	345 org	1.803	Dinas Sosial

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.690 kk	7800 kk	602	8000 kk	632	7800 kk	663	7600 kk	697	7500 kk	731	7500 kk	750	Dinas Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	200 kk	225 kk	180	236 kk	189	248 kk	198	260 KK	208	273 kk	218	290 kk	250	Dinas Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terpeliharanya Nilai - nilai Perjuangan, Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	0,8	0,8	377	0,85	395	0,9	415	0,9	436	0,95	458	1	481	Dinas Sosial
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>															
2	07		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>															
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	126 Tenaga Kerja	130 Tenaga Kerja	358,61	140 Tenaga Kerja	325,97	150 Tenaga Kerja	335,75	160 Tenaga Kerja	346,63	170 Tenaga Kerja	357,93	170 Tenaga Kerja	369,74	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	48,33	49	358,61	50	325,97	51	325,97	52	325,97	53	325,97	53	325,97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan meningkatnya perlindungan tenaga kerja	300 Perusahaan	300 Perusahaan	358,61	350 Perusahaan	325,97	400 Perusahaan	325,97	450 Perusahaan	325,97	500 Perusahaan	325,97	500 Perusahaan	325,97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	08		<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>															
2	08	2	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional kantor	100%	100%	5.686	100%	6.255	100%	6.880	100%	7.568	100%	8.325	100%	9.157	Dinas PPA KB PP
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	% ARG pada Belanja Langsung APBD	0,01	0,01	822	0,01	904	0,01	995	0,01	1.094	0,01	1.203	0,01	1.203	Dinas PPA KB PP
				IPG (indeks Pembangunan Gender) dan IDG														

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	% Perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	18	100%	20	100%	22	100%	24	100%	26	100%	26	Dinas PPA KB PP
2	08	04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)			14		15		17		19		20		20	Dinas PPA KB PP
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah instansi yang memanfaatkan data profil gender dan anak di Kota Metro	32	32	17	32	19	32	21	32	23	32	25	32	25	Dinas PPA KB PP
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	IPA (Indeks Perlindungan Anak)			87		96		105		116		127		140	Dinas PPA KB PP
				Capaian predikat Kota Layak Anak	Pratama	madya	300	madya	330	madya	363	nindya	399	nindya	439	nindya	439	
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	% AMPK yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	92	100%	101	100%	111	100%	122	100%	135	100%	148	Dinas PPA KB PP
2	09		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>															
2	09	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	12.374	100%	12.374	100%	12.745	100%	13.158	100%	13.587	100%	14.035	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)	16.634,39	21.042,08	30	21.076,35	30	21.110,55	31	21.144,82	32	21.179,02	33	21.179,02	34	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal perkapita)	Energi 2.925,92	2400	520	2400	520	2400	536	2400	553	2400	571	2400	590	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
				Protein	63		63		63		63		63		63			
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Peningkatan cadangan pangan masyarakat (ton)	37,5	75	40	112,5	40	150	41	187,5	43	225	44	225	45	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	9	90	29	110	29	250	30	350	31	450	32	450	33	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
1	10		<b>Urusan Pertanahan</b>															

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	10	08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Cakupan Pemanfaatan Tanah Kosong (Pemanfaatan Tanah Kosong untuk RTH)	0	0	-	0	150	0	200	30%	200	60%	200	60%	200	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Rasio Luas tanah yang telah ditetapkan penatagunaannya	78%	78%	164	80%	165	85%	165	90%	165	95%	165	95%	165	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	11		<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>															
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup	66.67% (RPPLH, KLHS RTRW, KLHS RPJMD)	66.67% (RPPLH, KLHS RTRW, KLHS RPJMD)	0	100% (RPPLH, KLHS RTRW, KLHS RPJMD, KLHS RDTR)	550	100% (RPPLH, KLHS RTRW, KLHS RPJMD, KLHS RDTR)	0	100% (RPPLH, KLHS RTRW, KLHS RPJMD, KLHS RDTR, KLHS REVISI RPJMD)	250	100% (RPPLH, KLHS RTRW, KLHS RPJMD, KLHS RDTR, KLHS REVISI RPJMD)	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rasio Pencegahan dan Penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	0	100%	400	100%	400	100%	350	100%	350	100%	350	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Keterawatan RTH	85,45%	85,45%	1110	89%	1143.3	92,50%	1.177.599	95%	1.212.927	100%	1.249.315	100%	1.249.315	Dinas Lingkungan Hidup / Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Ketaatan Produsen B3 dan/atau Limbah B3	7	7	15	8	50	8	50	9	50	9	50	10	50	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Ketaatan Pemenuhan Persyaratan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	75 %	75 %	36	80 %	100	82%	100	84%	105	87%	105	87%	105	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat yang taat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	40%	40%	0	40.1%	60	40,20%	63	40,35%	67.5	40,50%	70	40,50%	70	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	11	08	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Hidup	20%	20%	35	25,00%	70	30%	105	40%	140	45%%	175	45%	125	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kota Metro, lokasi usaha dan dampaknya di Kota Metro	100%	100%	15	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kota Metro, lokasi usaha dan dampaknya di Kota Metro	100,00%	100,00%	15	100,00%	50	100,00%	50	100,00%	50	100,00%	50	100,00%	50	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	16,55%	16,55%	5.664.575	26,00%	8.831.258	27,00%	9.096.196	28,00%	10.915.435	30,00%	11.242.898	30,00%	11.242.898	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>															
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran		0,98	7.686	0,98	8.614	0,98	9.740	0,98	10.825	0,98	12.043	0,98	12.043	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan		0,99	286	0,99	329	0,99	394	0,99	454	0,99	522	0,99	522	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil													Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan													Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan													Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	13		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>														
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan Kelurahan	22 Kelurahan	200	22 Kelurahan	250	22 Kelurahan	300	22 Kelurahan	350	22 Kelurahan	400	22 Kelurahan	400	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kota Metro	1273 lembaga	350	1273 lembaga	400	1273 lembaga	450	1273 lembaga	500	1273 lembaga	550	1273 lembaga	550	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	14		<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>														
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	TFR (To+F23+E22:P26+E22:P27+E2+E22:R27	2,34	326	2,33	359	2,33	394	2,33	434	2,32	477	2,32	525	Dinas PPA KB PP
				Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	15/1000		21/1000		20/1000		18/1000		16/1000		16/1000		
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan nikah usia 15 - 49	70	2.300	72	2.530	72,2	2.783	72,5	3.061	72,9	3.367	72,9	3.367	Dinas PPA KB PP

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	12,12	12,1		12,1		12		11,9		11,9		11,9				
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	29,21	29,44		29,75		30		30,2		31		31				
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	0,86	0,86	121	0,88	133	0,9	146	0,92	161	0,93	177	0,93	177	Dinas PPA KB PP
2	15		<b>Usuran Perhubungan</b>															
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio konektivitas kota	0,0414	0,0614	3.143	0,0814	3.237	0,1014	3.334	0,1214	3.434	0,1414	3.537	0,1414	3.537	Dinas Perhubungan
2	16		<b>Usuran Komunikasi dan Informatika</b>															
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Pengembangan media komunikasi publik Lingkup OPD	200 Informasi 1 Layanan	55 Informasi 1 Layanan	250	55 Informasi 1 Layanan	250	55 Informasi 1 Layanan	250	55 Informasi 1 Layanan	250	55 Informasi 1 Layanan	250	275 Informasi 5 Layanan	250	Dinas Kominfo
2	16	03	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Pengembangan teknologi informasi Lingkup OPD	4 Aplikasi 100 Maintenance	3 Aplikasi 100 Maintenance	500	3 Aplikasi 100 Maintenance	500	3 Aplikasi 100 Maintenance	500	3 Aplikasi 100 Maintenance	500	3 Aplikasi 100 Maintenance	500	15 Aplikasi 100 Maintenance	500	Dinas Kominfo
2	17		<b>Usuran pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>															
2	17	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	4.248	100%	4.248	100%	4.376	100%	4.517	100%	4.665	100%	4.818	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
2	17	02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	2 koperasi	2 koperasi	-	2 koperasi	50	3 koperasi	52	4 koperasi	54	5 koperasi	56	5 koperasi	58	Dinas UMK, UM dan Perindustrian

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	17	03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan secara langsung (on-site) atau secara tidak langsung (off-site)	5	5	-	5	50	10	52	15	54	20	56	20	58	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
2	17	04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase koperasi aktif	78%	78%	12,59	78,20%	12,59	78,40%	12,97	78,60%	13,39	78,80%	13,83	78,80%	14,28	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
2	17	05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang telah mendapat sertifikat uji kompetensi	40 koperasi	60 koperasi	820	80 koperasi	820	100 koperasi	845	120 koperasi	872	140 koperasi	901	140 koperasi	930	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
2	17	06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Fasilitas pameran dan promosi KUMKM	20 produk	20 produk	70	20 produk	72	20 produk	74	20 produk	77	20 produk	79	20 produk	82	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Data UMKM yang akurat	2 dokumen	2 dokumen	184	2 dokumen	184	2 dokumen	189	2 dokumen	195	2 dokumen	202	2 dokumen	208	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro dan kecil	99%	99%	1172,57	99,10%	1172,57	99,20%	1207,75	99,30%	1246,88	99,40%	1287,53	99,40%	1330,01	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
2	18		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>															
2	18	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	5.739	100%	5.739	100%	5.911	100%	6.102	100%	6.301	100%	6.509	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	115 M	120 M	234	125 M	234	130 M	241	135 M	248	140 M	257	140 M	265	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	245	250	30	255	30	260	31	265	32	270	33	270	34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM	88,66	88,86	359	89,06	359	89,26	369	89,46	381	89,66	394	89,66	407	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	5 M	6 M	326	7 M	326	8 M	336	9 M	347	10 M	358	10 M	370	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		50	49	50	49	50	50	50	52	50	54	50	55	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>															
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100%	100%	1.461	100%	1.461	100%	1.505	100%	1.554	100%	1.604	100%	1.657	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	19	03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi Olahraga	7 Prestasi	7 Prestasi	4.230	8 Prestasi	4.230	9 Prestasi	4.357	12 Prestasi	4.498	15 Prestasi	4.645	15 Prestasi	4.798	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	20		<b>Urusan Bidang Statistik</b>															
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral Lingkup Perangkat Daerah	2 Sektor 1 Buku	2 Sektor 1 Buku	50	1 Sektor 1 Buku	40	1 Sektor 1 Buku	40	1 Sektor 1 Buku	40	1 Sektor 1 Buku	40	6 Sektor 1 Buku	40	Dinas Kominfo
2	21		<b>Urusan Bidang Persandian</b>															
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah OPD yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian Jumlah SDM bidang persandian dan keamanan lingkup OPD	1 OPD 1 orang	7 OPD	80	6 OPD	80	6 OPD	80	6 OPD	80	6 OPD	80	31 OPD	80	Dinas Kominfo
2	22		<b>Urusan Kebudayaan</b>															

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	2 festival	846	2 festival	846	2 festival	871	2 festival	900	2 festival	929	10 festival	960	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah kegiatan pengembangan kesenian tradisional	1 kegiatan	2 kegiatan	202	2 kegiatan	202	2 kegiatan	208	2 kegiatan	215	2 kegiatan	222	10 kegiatan	229	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah karya budaya yang difitalisasi dan diinventarisasi	0	0	0	1 karya budaya	200	1 karya budaya	206	1 karya budaya	213	1 karya budaya	220	4 karya budaya	227	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	1 benda cagar budaya	25	514	30	514	40	529	45	547	50	564	50	583	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Pembinaan dan peningkatan untuk mutu dan kapasitas SDM	0	1	78	1	78	1	80	1	83	1	86	5	88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23		<b>Urusan Perpustakaan</b>															
2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	5.076	100%	5.076	100%	5.228	100%	5.385	100%	5.547	100%	5.547	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Rumah Pintar/perpustakaan kelurahan yang aktif	10	12	1.002	14	1.002	16	1.032	18	1.063	20	1.095	22	1.095	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24		<b>Urusan Kearsipan</b>															
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	47%	57%	416	70%	416	82%	428	91%	441	100%	455	100%		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah OPD yang melakukan penyelamatan arsip	0	0		3	27	4	28	4	29	4	30	17		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Bertambahnya daftar arsip tertutup	0	0		1	30	1	31	1	32	1	33	4		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>															
3	25		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan</b>															

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan (ton)	1869,82	1907,22	1.385	1945,4	1.385	1984,3	1.427	2043,8	1.473	2105,1	1.521	2105,1	1.571	Dinas Ketahanan Pangan,
3	25	05	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi ikan (%)	37,65	38,45	30	39,25	30	40,05	31	40,85	32	41,65	33	41,65	34	Dinas Ketahanan Pangan,
3	26		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>															
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	PAD sektor Pariwisata	1,17	1,30	1,080	1,33	1,080	1,35	1,112	1,38	1,148	1,40	1,186	1,40	1,225	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	100%	100%	1,236	100%	1,236	100%	1,273	100%	1,314	100%	1,357	100%	1,402	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI	20%	20%	3,00	25%	3,00	30%	3,09	40%	3,19	45%	3,29	45%	3,40	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	40	55	9,87	70	9,87	80	1,017	95	1,050	115	1,084	115	1,120	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3	27		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>															
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	46,49	46,50	2.498	46,55	2.498	46,60	2.573	46,65	2.657	46,70	2.743	46,75	2.834	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas bahan pangan utama (Padi) (kwintal)	58,9	59,0	725	59,1	725	59,2	747	59,3	771	59,4	796	59,5	822	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pelayanan hewan (ekor)	7	7,35	819	7,7	819	8,05	844	8,4	871	8,75	900	8,75	929	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
3	27	05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan lahan gagal panen / puso (hektar)	100	80	100	60	100	40	103	20	106	0	110	0	113	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3	27	06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi (surat)	0	2	50	2	50	2	52	2	53	2	55	2	57	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
3	27	07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani (%)	31	32	804	33	804	34	828	35	855	40	882	40	912	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
3	30		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>															
3	30	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	7.143	100%	7.143	100%	7.357	100%	7.595	100%	7.843	100%	8.102	Dinas Perdagangan
3	30	02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah verifikasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	64	50	177	55	177	60	182	65	188	70	194	70	201	Dinas Perdagangan
3	30	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	0	10%	3142,75	20%	3142,75	30%	3237,03	40%	3341,91	50%	3450,86	50%	3564,74	Dinas Perdagangan
3	30	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah pasar yang terpantau stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3 Pasar	3 Pasar	178	3 Pasar	178	3 Pasar	183	3 Pasar	189	3 Pasar	195	3 Pasar	202	Dinas Perdagangan
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor		0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dinas Perdagangan
3	30	06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan alat UTTP yang bertanda Tera Sah	287 unit	5%	120	5%	120	5%	123,6	5%	127,6	5%	131,76	5%	136,11	Dinas Perdagangan
3	30	07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Lokal/Produk Dalam Negeri	4 kegiatan	4 kegiatan	276	4 kegiatan	276	4 kegiatan	284	4 kegiatan	293	4 kegiatan	303	4 kegiatan	312	Dinas Perdagangan
3	31		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>															
3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	35	45	2.222	55	2.222	65	2.289	75	2.363	85	2.440	85	2.520	Dinas UMK, UM dan Perindustrian

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3	31	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi proses perizinannya	72 Usaha industri	82	126	92	126	102	129	112	134	122	138	122	142	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Database industri	1	1	172	1	172	1	177	1	182	1	188	1	195	Dinas UMK, UM dan Perindustrian
3	32		<b>Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi</b>															
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Penempatan/Pengiriman Transmigran	0	2 KK	4 KK	6 KK	8 KK	10 KK	10 KK	10 KK	10 KK	10 KK	10 KK	10 KK	10 KK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	01		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
4	01	02	Program Administrasi Umum	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	30.496	100%	30.496	100%	31.411	100%	32.353	100%	33.324	100%	33.324	Sekretariat Daerah
4	01	02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai predikat LPPD	tinggi	tinggi	8.713	tinggi	8.713	tinggi	8.974	tinggi	9.244	sangat tinggi	9.521	sangat tinggi	9.521	Sekretariat Daerah
4	01	03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase hasil monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	78%	78%	2.511	81%	2.511	84%	2.586	87%	2.664	90%	2.744	93%	2.744	Sekretariat Daerah
4	02	01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	25.680	100%	25.680	100%	26.450	100%	27.244	100%	28.061	100%	28.061	Sekretariat DPRD
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Peraturan Daerah yang disahkan	100%	100%	11.310	100%	11.310	100%	11.649	100%	11.999	100%	12.359	100%	12.359	Sekretariat DPRD
5			<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
5	01		<b>PERENCANAAN</b>															
5	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	6.551	100%	6.551	100%	6.748	100%	6.966	100%	7.193	100%	7.431	Bappeda

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	1.081	100%	1.081	100%	1.113	100%	1.149	100%	1.187	100%	1.226	Bappeda
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	1.420	100%	1.420	100%	1.463	100%	1.510	100%	1.559	100%	1.611	Bappeda
5	02	<b>KEUANGAN</b>																
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	33.643	100%	33.643	100%	34.653	100%	35.775	100%	36.942	100%	38.161	BPKAD
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	16.886	WTP	16.886	WTP	17.392	WTP	17.956	WTP	18.541	WTP	19.153	BPKAD
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Data Aset daerah yang Akurat dan sesuai antara Data Riil dan Buku Inventaris	70%	70%	2.223	75%	2.223	80%	2.290	90%	2.364	93%	2.441	93%	2.522	BPKAD
5	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	9.884	100%	9.884	100%	10.149	100%	10.478	100%	10.820	100%	11.177	BPPRD
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	24,14	25,3	1.127	26,6	1.127	27,9	1.192	29,2	1.231	30,5	1.271	30,5	1.313	BPPRD
5	03	<b>KEPEGAWAIAN</b>																
5	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Pelayanan Daerah	100%	100%	5.329	100%	5.423	100%	5.684	100%	5.868	100%	6.059	100%	6.059	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Meningkatnya Kinerja PNS dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Daerah	100%	100%	9721,0	100%	9721,0	100%	10012,0	100%	10337,0	100%	10674,0	100%	10674,0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>																

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN dan CPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Manajerial	100%	100%	948,7	100%	948,7	100%	2666,0	100%	2692,0	100%	2749,0	100%	2749,0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
<b>5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>																		
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	100%	100%	659	100%	659	100%	679	100%	701	100%	723	100%	747	Bappeda
<b>6 01 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>																		
6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	9.577	100%	9.577	100%	9.864	100%	10.160	100%	10.465	100%	10.465	Inspektorat
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	783	100%	783	100%	806	100%	831	100%	856	100%	856	Inspektorat
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Nilai Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK	60,27	70	358	77	358	82	368,74	86	379,8022	88	391,1963	90	90	Inspektorat
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>																		
<b>7 01 KECAMATAN</b>																		
<b>Metro Pusat</b>																		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah (persen)	100%	100%	5.957	100%	5.957	100%	6.136	100%	6.320	100%	6.509	100%	6.509	Kecamatan Metro Pusat
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	80	1.313	82	1.313	84	1.352	86	1.393	88	1.435	90	1.435	Kecamatan Metro Pusat
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.897	100%	1.897	100%	1.954	100%	2.013	100%	2.073	100%	2.073	Kecamatan Metro Pusat

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (persen)	30%	30%	16	35%	16	40%	20	45%	20	50%	20	55%	20	Kecamatan Metro Pusat
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	N/A	100%	762	100%	762	100%	785	100%	808	100%	833	100%	833	Kecamatan Metro Pusat
			<b>Metro Timur</b>															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah (persen)	100%	100%	5.298	100%	5.298	100%	5.457	100%	5.621	100%	5.789	100%	5.789	Kecamatan Metro Timur
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	80	1.038	82	1.038	84	1.069	86	1.101	88	1.134	90	1.134	Kecamatan Metro Timur
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.844	100%	1.844	100%	1.899	100%	1.956	100%	2.015	100%	2.015	Kecamatan Metro Timur
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (persen)	50%	55%	16	60%	16	65%	20	70%	20	75%	20	80%	20	Kecamatan Metro Timur
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	N/A	100%	850	100%	850	100%	876	100%	902	100%	929	100%	929	Kecamatan Metro Timur
			<b>Metro Barat</b>															
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah (persen)	100%	100%	4.763	100%	4.763	100%	4.906	100%	5.053	100%	5.205	100%	5.205	Kecamatan Metro Barat
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	80	847	82	847	84	872	86	899	88	926	90	926	Kecamatan Metro Barat





KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah (persen)	100%	100%	4.908	100%	4.908	100%	5.055	100%	5.207	100%	5.363	100%	5.363	Kecamatan Metro Selatan
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	80	672	82	672	84	692	86	713	88	734	90	734	Kecamatan Metro Selatan
7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kelurahan (persen)	100%	100%	1.527	100%	1.527	100%	1.573	100%	1.620	100%	1.669	100%	1.669	Kecamatan Metro Selatan
7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (persen)	10%	15%	11	20%	11	25%	16	30%	16	35%	16	35%	16	Kecamatan Metro Selatan
7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	N/A	100%	576	100%	576	100%	593	100%	611	100%	629	100%	629	Kecamatan Metro Selatan
8			<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>															
8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	100%	100%	3.477	100%	3.477	100%	3.581	100%	3.689	100%	3.799	100%	3.799	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sekolah yang diberikan pendidikan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	0	3	288	3	288	5	297	5	306	5	315	21	315	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan	N/A	75%	163	80%	163	85%	168	90%	173	95%	178	100%	17811%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang aktif	N/A	30%	558	30%	558	35%	575	40%	592	45%	610	50%	60974%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase peningkatan kerukunan beragama	100%	100%	151	100%	151	100%	156	100%	160	100%	165	100%	165	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial	100%	100%	494	100%	494	100%	509	100%	524	100%	540	100%	540	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## **BAB VIII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah yang berisi indikator sasaran. Selanjutnya juga ditetapkan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Berikut disajikan dalam tabel Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021-2026.

**Tabel 8.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Metro**

N O	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Angka rata-rata lama sekolah	10,96	11,02	11,10	11,19	11,28	11,36	11,36
2	Angka Harapan Lama Sekolah	14,47	14,56	14,65	14,74	14,83	14,92	15,01
3	Indeks Pembangunan Manusia	77,19	77,62	78,05	78,48	78,92	79,36	79,36
4	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83,54 persen	85 persen	90 persen	95 persen	98 persen	98 persen	98 persen
5	Angka Harapan Hidup	71,63	71,76	71,90	72,04	72,18	72,32	72,32
6	Persentase PPKS yang ditangani	81,79%	85,3%	88,4%	91,5%	94,6%	97,7%	100%
7	Persentase Penduduk Miskin	8,47	8,01	7,60	7,20	6,79	6,38	6,38
8	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	90,%	91,64%	91,85%	92,06%	92,27%	92,48%	92,48%
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,2	63,4	63,6	63,8	64	64,2	64,2
10	Persentase kenaikan penduduk yang bekerja	2,4%	2,9%	3,4%	3,9%	4,4%	4,9%	4,9%
11	Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	2,26 %	2,26 %	2,5%	3%	3,5%	4%	4%
12	Nilai RB	60,08	60,08	61,58	63,08	66,08	69,58	69,58
13	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Nilai SAKIP	65,04	65,04	66,14	67,24	68,34	69,48	69,48

Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Metro

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>								
1	Pertumbuhan PDRB	-1,79	3,0-4,0	4,0-4,5	4,5-5,0	5,0	5,6	5,6
2	Laju Inflasi	3,0 ±1	3,0 ±1	3,0 ±1	3,0 ±1	3,0 ±1	3,0 ±1	3,0 ±1
3	PDRB per Kapita	37,15 juta	38 juta	39 juta	40 juta	42 juta	44 juta	46 juta
4	Persentase Penduduk Miskin	8,47	8,01	7,60	7,20	6,79	6,38	6,38
5	Indeks Pembangunan Manusia	77,19	77,62	78,05	78,48	78,92	79,36	79,36
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,4	5,4	5,11	5,02	5,0	4,8	4,8
<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>								
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	1,47 juta	1,57 juta	1,57 juta	1,67 juta	1,87 juta	2,07 juta	2,27 juta
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	54,35	55	55	55,2	55,4	55,5	55,6
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>								
<b>1.</b>	<b>Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>							
<b>1.1</b>	<b>Urusan Pendidikan</b>							
<b>1.1.1</b>	Angka Melek Huruf	99,47	99,50	99,60	99,70	99,80	100,00	100,00
<b>1.1.2</b>	Angka rata-rata lama sekolah	10,96	11,02	11,10	11,19	11,28	11,36	11,36
<b>1.1.3</b>	Anfgka partisipasi kasar							
	SD	99,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	SMP	96,02	96,02	96,05	97,00	97,00	97,00	97,00
<b>1.1.4</b>	Angka Pendidikan yang ditamatkan							

	SD	10,48	10,48	10,50	10,75	11,00	11,05	11,05
	SMP	4,98	4,98	5,00	5,25	5,50	5,75	5,75
<b>1.1.5</b>	Angka Partisipasi Murni							
	SD	99,31	99,50	99,60	99,60	99,80	100,00	100,00
	SMP	93,74	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,00
<b>1.1.6</b>	Angka Partisipasi Sekolah							
	SD	102,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	SMP	95,21	96,00	96,00	97,00	97,00	97,00	97,00
<b>1.1.7</b>	Angka Putus Sekolah							
	SD	4,00	3,00	2,00	1,00	-	-	-
	SMP	13,00	10,00	7,00	5,00	3,00	-	-
<b>1.1.8</b>	Angka Kelulusan							
	SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	SMP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>1.1.9</b>	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	143,45	143,50	144,00	144,50	145,00	145,50	145,50
<b>1.1.10</b>	Sekolah Pendidikan kondisi bangunan baik							
	SD/MI	89,85	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	94,00
	SMP/MTs	94,00	97,80	98,00	98,20	98,50	99,00	99,00
<b>1.1.11</b>	Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1 : 405	1 : 406	1 : 407	1 : 408	1 : 409	1 : 41	1 : 41
<b>1.1.12</b>	Rasio guru terhadap murid							
	SD	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15
	SMP	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12	1 : 12
<b>1.1.13</b>	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV							
	SD	88,41	92,22	94,00	97,00	98,00	100,00	100,00
	SMP	86,82	94,22	95,00	97,00	98,00	100,00	100,00

<b>1.2</b>	<b>Urusan Kesehatan</b>							
<b>1.2.1</b>	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83,54%	85%	90%	95%	98%	98%	98%
<b>1.2.2</b>	Angka Harapan Hidup	71,63	71,76	71,9	72,04	72,18	72,32	72,32
<b>11.2.3</b>	Jumlah Kasus Kematian Ibu	0	3	3	3	2	2	2
<b>1.2.4</b>	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	5,03 (13/2.585)	5,03 (13/2.585)	4,76 (12/2.521)	4,76 (12/2.521)	4,41 (11/2.495)	4,41 (11/2.495)	4,41 (11/2.495)
<b>1.2.5</b>	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,64 (12/2.585)	4,64 (12/2.585)	4,36 (11/2.521)	4,36 (11/2.521)	4,01 (10/2.495)	4,01 (10/2.495)	4,01 (10/2.495)
<b>1.2.6</b>	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	4,64 (12/2.585)	4,64 (12/2.585)	3,57 (9/2.521)	3,57 (9/2.521)	3,21 (8/2.495)	3,21 (8/2.495)	3,21 (8/2.495)
<b>1.2.7</b>	Prevalensi stunting pada anak balita	9,91%	9,91%	9,50%	9%	8,50%	8%	8%
<b>1.2.8</b>	Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia > 15 tahun	19,82%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%	12,99%
<b>1.2.9</b>	Insiden Tuberkulosis per 100.000 penduduk	208,25	228,34	214,3	194,39	186,69	164,88	164,88
<b>1.2.10</b>	Pencapaian 5 pilar STBM berkelanjutan	1 pilar	2 pilar	2 pilar	3 pilar	3 pilar	4 pilar	4 pilar
<b>1.2.11</b>	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi Utama	18,20%	18,20%	18,20%	81,80%	100,00%	100%	100%
<b>1.2.12</b>	Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan (RS) terakreditasi Paripurna	Akreditasi Utama	Akreditasi Utama	Akreditasi Utama	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna
<b>1.2.13</b>	Persentase balita wasting	4,10%	6%	5,80%	5,60%	5,40%	5%	5%
<b>1.2.14</b>	Persentase ibu hamil KEK	17%	15%	14%	12%	11%	10%	10%
<b>1.2.15</b>	Persentase anemia pada ibu hamil	16,71%	20%	19%	18%	17%	16%	16%
<b>1.2.16</b>	Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	89,20%	100	100	100	100%	100%	100%
<b>1.2.17</b>	Angka Keberhasilan pengobatan TB paru (success rate)	94,90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
<b>1.2.18</b>	Angka kesakitan (incidence rate) DBD per 100.000 penduduk	87,31	77,28	71,63	67,81	64,09	60,46	60,46



1.2.19	Prevalensi HIV AIDS	0,015%	0,015%	0,014%	0,013%	0,012%	0,011%	0,011%
1.2.20	Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	2,20%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%	21,80%
1.2.21	Persentase merokok pada penduduk usia 10 – 18 tahun	N/A	9,10%	9%	8,90%	8,80%	8,70%	8,60%
1.2.22	Cakupan IDL/ Imunisasi Dasar Lengkap	60,80%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
1.2.23	Cakupan Kelurahan UCI/ Universal Child Immunisation	18%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.2.24	Pencapaian tatanan Kota Sehat (5 tatanan)	0 tatanan	3 tatanan	3 tatanan	4 tatanan	4 tatanan	5 tatanan	5 tatanan
1.2.25	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan dasar	51%	53%	55%	57%	59%	60%	60%
1.2.26	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%
1.2.27	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	86%	90%	92%	94%	96%	98%	100%
1.2.28	Persentase Industri Rumah Tangga bersertifikat PIRT	60 PIRT	180 PIRT	180 PIRT	180 PIRT	180 PIRT	180 PIRT	180 PIRT
1.2.29	Indikator Keluarga Sehat (IKS)	0,22 (tidak sehat)	0,27 (tidak sehat)	0,27 (tidak sehat)	0,35 (tidak sehat)	0,35 (tidak sehat)	0,51 (kurang sehat)	0,51 (kurang sehat)
1.2.30	Jumlah kelurahan menerapkan kebijakan GERMAS	22	22	22	22	22	22	22
<b>1.3</b>	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
1.3.1	Rasio luas wilayah yang tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	40%	35%	30%	25%	20%	15%	15%
1.3.2	Jumlah Sambungan Rumah Aktif Pertahun (Air Minum Rumah)	2551	2551	2651	2751	2851	2951	2951
1.3.3	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	6%	6%	8%	12%	15%	18%	18%
1.3.4	Persentase rumah tinggal dengan akses sanitasi aman	3%	5%	8%	10%	12%	12%	12%

1.3.5	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	70%	70%	73%	75%	78%	80%	80%
1.3.6	Persentase areal kawasan Kumuh	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.3.7	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	11%	11%	12%	13%	14%	15%	15%
1.3.8	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.3.9	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	91,64%	91,64%	91,85%	92,06%	92,27%	92,48%	92,48%
1.3.10	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	15%	15%	30%	45%	60%	75%	75%
1.3.11	Ketaatan terhadap RTRW	91,30%	91%	91%	91%	91%	91%	91%
1.4	<b>Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>							
1.4.1	Persentase Rumah Layak Huni	31%	31%	31%	32%	33%	34%	34%
1.4.2	Persentase Permukiman Layak Huni	67%	67%	67%	68%	69%	70%	70%
1.4.3	Persentase Lingkungan Kumuh	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1.4.4	Jumlah lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	46%	46%	47%	48%	49%	50%	50%
1.4.5	Persentase Permukiman yang Tertata	90%	90%	91%	91%	92%	92%	92%
1.5	<b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>							
1.5.1	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	01:04	01:04	01:04	01:04	01:04	01:04	01:04
1.5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	90	90	90	95	95	100	100
1.5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.5.5	Persentase penegakan Perda	90	90	90	95	95	100	100
1.6	<b>Urusan Sosial</b>							
1.6.1	Tersertifikasinya Potensi Sumber Keejahteraan Sosial (PSKS)	16 org	21 org	28 org	35 org	42 org	50 org	55 org

1.6.2	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
1.6.3	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani	187 kk	268 kk	281 kk	290 kk	310 kk	326 kk	326 kk
1.6.4	Jumlah KK yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.690 kk	7800 kk	8000 kk	7800 kk	7600 kk	7500 kk	7500 kk
1.6.5	Jumlah KK Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	200 kk	200 kk	200 kk	200 kk	200 kk	200 kk	200 kk
2.	<b>Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>							
2.1	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>							
2.1.1	Persentase Pencari Kerja Terlatih yang telah bekerja	71,43	72	73	74	75	76	76
2.1.2	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	48,33	49	50	51	52	53	53
2.1.3	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100	75	80	85	87	100	100
2.1.4	Jumlah Penempatan/Pengiriman Transmigran	0	2	4	6	8	10	10
2.2	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
2.2.1	% Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
2.2.2	% Perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2.3	Jumlah instansi yang memanfaatkan data profil gender dan anak di Kota Metro	32	32	32	32	32	32	32
2.2.4	Capaian predikat Kota Layak Anak	pratama	madya	madya	madya	nindya	nindya	nindya
2.2.5	% Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapat layanan komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.3	<b>Urusan Pangan</b>							
2.3.1	Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)	16.634,39	21.042,08	21.076,35	21.110,55	21.144,82	21.179,02	21.179,02
2.3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal	Energi	2400	2400	2400	2400	2400	2400

	perkapita)	2.925,92						
<b>2.3.3</b>		Protein 85,98	63	63	63	63	63	63
<b>2.3.4</b>	Peningkatan cadangan pangan masyarakat (ton)	37,5	75	112,5	150	187,5	225	225
<b>2.3.5</b>	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	9	90	110	250	350	450	450
<b>2.4</b>	<b>Urusan Pertanahan</b>							
<b>2.4.1</b>	Penyelesaian izin lokasi	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	0	Meningkat	Meningkat
<b>2.4.2</b>	Penyelesaian kasus tanah negara	Ada	Ada	Ada	Ada	0	Ada	Ada
<b>2.4.3</b>	Persentase Ganti Kerugian untuk pembangunan	Ada	Ada	Ada	Ada	Meningkat	Ada	Ada
<b>2.4.4</b>	Tingkat fasilitasi redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>2.4.5</b>	Cakupan Tanah Ulayat yang ditetapkan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>2.4.6</b>	Persentase Luas Pemanfaatan Lahan Kosong	0	0	0	0	Ada	0,6	0,6
<b>2.4.7</b>	Rasio fasilitasi izin membuka tanah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
<b>2.4.8</b>	Rasio Fasilitasi Penggunaan Tanah	0	0	1	1	0,3	1	1
<b>2.5</b>	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>							
<b>2.5.1</b>	Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang lingkungan hidup	67%	67%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2.5.2</b>	Rasio Penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2.5.3</b>	RTH Publik yang terkelola	47 RTH	47 RTH	49 RTH	49 RTH	53 RTH	55 RTH	55 RTH
<b>2.5.4</b>	Ketaatan Produsen B3 dan/atau Limbah B3	7	7	8	8	9	9	9
<b>2.5.5</b>	Tingkat Ketaatan Pemenuhan Persyaratan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	75%	75%	80%	80%	84%	87%	87%
<b>2.5.6</b>	Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>2.5.7</b>	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0 kali	0 kali	1 kali	1 kali	1	1	1

2.5.8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	2 penghargaan	2 penghargaan	2 penghargaan	2 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan	4 penghargaan
2.5.9	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kota Metro, lokasi usaha dan dampaknya di Kota Metro.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5.10	Persentase Pengurangan Sampah	17%	17%	26%	26%	28%	30%	30%
2.5.11	Persentase Penanganan Sampah	55%	60%	65%	68%	70%	72%	75%
2.6	<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
2.6.1	Nilai rata-rata IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	86	87	87,45	88	88,5	89,75	89,75
2.6.2	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-17 tahun)	100%	99,90%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	42,62%	43%	50%	60%	70%	80%	80%
	- Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (0-18 tahun)	108,31%	99,90%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6.3	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100%	88%	90%	92%	95%	97%	97%
2.6.4	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	100%	90%	91%	92%	93%	94%	94%
2.6.5	Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	100%	90%	91%	92%	93%	94%	94%
2.6.6	Persentase Kepemilikan KTP-el	101,86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6.7	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.6.8	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	106,61%	98%	100%	100%	100%	100%	100%
2.7	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
2.7.1	Persentase Kelompok UP2K yang Aktif	81,48	82	83	84	85	86	86
2.7.2	Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam	98,66	80	82	85	87	90	90

	pembangunan							
<b>2.8</b>	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
<b>2.8.1</b>	TFR (Total Fertility Rate)	2,34	2,34	2,33	2,33	2,32	2,31	2,31
<b>2.8.2</b>	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 (ASFR 15-19)	15/1000	24/1000	21/1000	20/1000	18/1000	16/1000	16/1000
<b>2.8.3</b>	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan nikah usia 15 – 49	70	71	72	72,2	72,5	72,9	72,9
<b>2.8.4</b>	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)	12,12	12,1	12,1	12	11,9	11,9	11,9
<b>2.8.5</b>	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	29,21	29,44	29,75	30	30,2	31	31
<b>2.8.6</b>	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	86%	86%	88%	90%	92%	93%	93%
<b>2.9</b>	<b>Urusan Perhubungan</b>							
	Rasio konektivitas kota	4,14	6,14	8,14	10,14	12,4	14,14	14,14
<b>2.10</b>	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>							
<b>2.10.1</b>	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Pengembangan media komunikasi publik Lingkup OPD	55 Informasi 1 Layanan	55 Informasi 1 Layanan	55 Informasi 1 Layanan	55 Informasi 1 Layanan	55 Informasi 1 Layanan	275 Informasi 5 Layanan	275 Informasi 5 Layanan
<b>2.10.2</b>	Jumlah Pengembangan teknologi informasi Lingkup OPD	3 Aplikasi 100 Maintenance	3 Aplikasi 100 Maintenance	3 Aplikasi 100 Maintenance	3 Aplikasi 100 Maintenance	3 Aplikasi 100 Maintenance	15 Aplikasi 100 Maintenance	15 Aplikasi 100 Maintenance
<b>2.11</b>	<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>							
<b>2.11.1</b>	Persentase koperasi aktif	78%	78%	78,20%	78,40%	78,60%	78,80%	78,80%
<b>2.11.2</b>	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99%	99%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%	99,40%
<b>2.12</b>	<b>Urusan Penanaman Modal</b>							
<b>2.12.1</b>	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	245	250	255	260	265	270	270
<b>2.12.2</b>	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	115 M	120 M	125 M	130 M	135 M	140 M	140 M
<b>2.12.3</b>	Rasio daya serap tenaga kerja	50	50	50	50	50	50	50

2.12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	5 M	6 M	7 M	8 M	9 M	10 M	10 M
2.13	<b>Urusan Kepemudaan dan Olahraga</b>							
	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah prestasi Olahraga	7 Prestasi	7 Prestasi	8 Prestasi	9 Prestasi	12 Prestasi	15 Prestasi	15 Prestasi
2.14	<b>Urusan Statistik</b>							
2.14.1	Jumlah data statistik sektoral Lingkup Perangkat Daerah		2 Sektor 1 Buku	1 Sektor 1 Buku	1 Sektor 1 Buku	1 Sektor 1 Buku	6 Sektor 1 Buku	6 Sektor 1 Buku
2.15	<b>Urusan Persandian</b>							
2.15.1	Jumlah OPD yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian Jumlah SDM bidang persandian dan keamanan lingkup OPD		7 OPD	6 OPD	6 OPD	6 OPD	31 OPD	31 OPD
2.16	<b>Urusan Kebudayaan</b>							
2.16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	2	2	2	2	2	10
2.16.2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	3	5	7	9	11	13
2.16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	0	0	1	1	1	1	4
2.17	<b>Urusan Perpustakaan</b>							
2.17.1	Jumlah Rumah Pintar/perpustakaan kelurahan yang aktif	10	12	14	16	18	20	22
2.18	<b>Urusan Kearsipan</b>							
2.18.1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	47%	57%	70%	82%	91%	100%	100%
2.18.2	Jumlah OPD yang melakukan penyelamatan arsip	0	0	3	4	4	4	4
2.18.3	Bertambahnya daftar arsip tertutup	0	0	1	1	1	1	1
3	<b>Urusan Pilihan</b>							
3.1	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>							

3.1.1	Produksi Perikanan (ton)	1869,82	1907,22	1945,4	1984,3	2043,8	2105,1	2105,1
3.1.2	Tingkat Konsumsi ikan (%)	37,65	38,45	39,25	40,05	40,85	41,65	41,65
3.2	<b>Urusan Pariwisata</b>							
3.2.1	PAD sektor Pariwisata	1,17%	1,30%	1,33%	1,35%	1,38%	1,40%	1,40%
3.2.2	Kunjungan Wisata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.2.3	Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI	20%	20%	25%	30%	40%	45%	45%
3.2.4	Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	40	55	70	80	95	115	115
3.3.	<b>Urusan Pertanian</b>							
3.3.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	46,49	46,50	46,55	46,60	46,65	46,70	46,75
3.3.2	Produktivitas bahan pangan utama (Padi) (kwintal)	58,9	59,0	59,1	59,2	59,3	59,4	59,5
3.3.3	Cakupan pelayanan hewan (ekor)	7,000	7,350	7,700	8,050	8,400	8,750	8,750
3.3.4	Penurunan lahan gagal panen / puso (hektar)	100	80	60	40	20	0	0
3.3.5	Jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi (surat)	0	2	2	2	2	2	2
3.3.6	Cakupan bina kelompok petani (%)	31	32	33	34	35	40	40
3.4	<b>Urusan Perdagangan</b>							
3.4.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0	10%	20%	30%	40%	50%	60%
3.4.2	Jumlah pasar yang terpantau stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	3 Pasar
3.5	<b>Urusan Perindustrian</b>							
3.5.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	35	45	55	65	75	85	85
3.5.2	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi proses perizinannya	72 Usaha industri	82	92	102	112	122	122
3.5.3	Database industry	1	1	1	1	1	1	1



<b>4</b>	<b>Urusan Penunjang</b>							
<b>1.</b>	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>2.</b>	Nilai RB	60,08	60,08	61,58	63,08	66,08	69,58	69,58
<b>3.</b>	Nilai SAKIP	65,04	65,04	66,14	67,24	68,34	69,48	69,48

## **BAB IX**

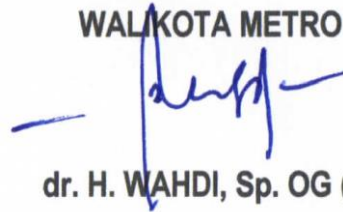
### **PENUTUP**

RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, pada poin (3) disebutkan bahwa periodisasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga periodisasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026.

Dengan mengusung visi ***“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”***, pelaksanaan RPJMD Kota Metro akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Lampung. Selanjutnya, kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda negeri ini, menjadi pertimbangan dalam menyusun program, kegiatan maupun kerangka pendanaan. Reformasi kebijakan pendapatan dan belanja sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di tengah pandemi COVID-19.

Secara garis besar, target yang akan kita capai dalam periode RPJMD ini adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2026 mencapai angka 79,39; Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Tahun 2026 mencapai angka 98 persen; Angka Kemiskinan di Tahun 2026 mencapai angka 6,38; Persentase PPKS yang ditangani pada Tahun 2026 mencapai angka 100%; Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap di Tahun 2026 sebesar 92,48%; Laju Pertumbuhan Ekonomi di Tahun 2026 sebesar 5,0; dan Nilai Reformasi Birokrasi di Tahun 2026 sebesar 69,58.

Harapannya, keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan selama lima tahun kedepan memberikan perubahan yang signifikan terhadap output, outcome dan impact pembangunan dengan tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat.

WALIKOTA METRO  
  
dr. H. WAHDI, Sp. OG (K)

**Tabel 1**  
**Penyelarasan Target Indikator Makro Nasional dan Provinsi Lampung**

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	RPJMN TAHUN 2020-2024					INDIKATOR PEMBANGUNAN	RPJMD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024				
		TARGET						TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>	<i>(9)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	5,90	6,20	6,50	7,00	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.40-5.70	2,5-3,5	3-4	3,5-4,5	4,5-5,5
2	Tingkat Kemiskinan (%)	11,56	11,27	10,35	9,68	9,20	Tingkat Kemiskinan (%)	11,10	12,76-12,4	12,4-11,9	11,9-11,4	11,4-10,9
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,80	3,60	3,40	3,00	2,70	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,85	4-4,5	4,3-4,4	4-4,3	3,8-4
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	69,69-70	70-70,3	70,3-70,6	70,6-70,9
5	Rasio Gini						Rasio Gini		0,310-0,334	0,308-0,324	0,302-0,319	0,293-0,314
6	Penurunan Emisi GRK (%)						Penurunan Emisi GRK (%)	-	6,74%	6,915%	7,066%	7,29%

**Tabel 2**  
**Penyelarasan Program Prioritas Nasional dan Provinsi Lampung**

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026												
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)													
1	PN	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas																										
	PP	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional* (Persen)	13,4	14,5	15,7	17,9	19,5																				
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68,00	68,00	68,80	69,20	70,30																				
	PP	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m <sup>3</sup> )	4,00	4,40	4,70	5,10	5,40	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	40%	35%	30%	25%	20%						
	PP	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90,4	91,6	92,8	94,0	95,2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Terlaksananya pemberdayaan, pengembangan, pembinaan lumbung pangan, sumber daya pangan dan pemantauan ketersediaan/akses pangan						Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan utama (beras) (ton)	16.63 4,39	21.04 2,08	21.076,3 5	21.110,5 5	21.144,8 2						
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari)	2100	2100	2100	2100	2100	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terlaksananya pengembangan usaha pangan lokal, pemberdayaan lembaga distribusi pangan dan pemantauan/pengendalian harga						Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal perkapita)	Energi 2.925, 92	2400	2400	2400	2400						



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026												
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)													
									Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha (Persen)		04:19	06:07	08:22	0,479													
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu)		26:55:00	26:55:00	26:55:00	26:55:00	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase koperasi aktif	78%	78%	78,20%	78,40%	78,60%						
									Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah		57:14:00	64:29:00	71:43:00	78:57:00	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang telah mendapat sertifikat uji kompetensi	40 koperasi	60 koperasi	80 koperasi	100 koperasi	120 koperasi						
																Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Fasilitasi pamera dan promosi KUMKM	20 produk	20 produk	20 produk	20 produk	20 produk						
																Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Data UMKM yang akurat	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen						





NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026						
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
									Program Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya pengembangan ketenagaan penyuluhan												
									Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian												
				6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)		151.869,90	159,463,40	167,441,57	184,185,72	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi proses perizinannya	72	82	92	102	112
									Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		161.588,70	169,668,14	187,442,89	206,995,13							
									Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Volume Ekspor Perikanan (kg)		18.361,350	19,279,418	20,725,374	22,797,911							
				5,0	5,5	6,5	7,5	8,1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase rata-rata capaian indikator kinerja sub kegiatan dalam mendukung tujuan RPIP						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Industri yang terdaftar dalam SII nas	1	1	1	1	1
									Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah penerbitan rekomendasi IUI besar												
									Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pengelolaan data dan informasi industri												
				4,8	5,0	5,2	5,3	5,5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang difasilitasi pengembangannya		80	85	90	95	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	PAD sektor Pariwisata	1,17	1,30	1,33	1,35	1,38

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026						
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITYAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITYAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITYAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
									Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan		80	85	90	95							
									Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan promosi pemasaran pariwisata												
									Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase kawasan pengembangan pariwisata daerah yang difasilitasi pengembangannya												
									Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Menara Siger	Persentase peningkatan penyelenggaraan event Menara Siger												
				1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1.689	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan		80	85	90	95	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	100%	100%	100%	100%	100%
				5,6	6,2	6,9	7,8	8,4								Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibangun untuk mendapatkan HKI	20%	20%	25%	30%	40%
				2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja yang Mendapat Layanan Penempatan	55	60	65	75	80	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	40	55	70	80	95

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026							
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)								
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Bersertifikasi	60	65	70	75	100	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	126 Tenaga Kerja	130 Tenaga Kerja	140 Tenaga Kerja	150 Tenaga Kerja	160 Tenaga Kerja	
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14,2	14,6	15,0	15,3	15,7										Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	48,33	49	50	51
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22,0								Program Hubungan Industrial	Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja	300 Perusahaan	300 Perusahaan	350 Perusahaan	400 Perusahaan	450 Perusahaan	
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM pariwisata													
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19,0	20,0	20,0	21,0	21,0	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan		80	85	90	95	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB (%)	46,49	46,50	46,55	46,60	46,65	
																Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas bahan pangan utama (Padi) (kwintal)	58,9	59,0	59,1	59,2	59,3	



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026						
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
			Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD miliar) (USD miliar)	21	23	25	27,5	30								Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang /Usaha Informal	0	10%	20%	30%	40%
																Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah pasar yang terpantau stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	3 Pasar
	PP	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (Persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4								Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	115 M	120 M	125 M	130 M	135 M
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18								Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	245	250	255	260	265
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	NA	34,39	NA	29,34	NA								Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM	88,66	88,86	89,06	89,26	89,46
																Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	5 M	6 M	7 M	8 M	9 M









NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026														
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET												
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)															
																Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas bahan pangan utama (Padi) (kwintal)	58,9	59,0	59,1	59,2	59,3								
																Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pelayanan hewan (ekor)	7	7,35	7,7	8,05	8,4								
																Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan lahan gagal panen / puso (hektar)	100	80	60	40	20								
																Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi (surat)	0	2	2	2	2								
																Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani (%)	31	32	33	34	35								
	PP	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (Persen)	3,7	4,2	4,8	5,5	6,2	Program Pengembangan Ekspor	Pelaku usaha yang menjadi eksportir						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan alat UTTP yang bertanda Tera Sah	287 unit	5%	5%	5%	5%	5%							
			Neraca perdagangan barang (USD Miliar)	0,3	1,0	3,0	7,5	15,0	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UKM/PKM binaan yang dipromosikan							Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Lokal/Produk Dalam Negeri	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan							

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026						
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
			Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD)	21,0	23,0	25,0	27,5	30,0	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase kualitas pengembangan ekonomi kreatif yang ditingkatkan		80	85	90	95	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	0	10%	20 %	30%	40 %
									Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan		80	85	90	95	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah pasar yang terpantau stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	3 Pasar	3 Pasar
	PP	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (persen)	4,2	4,3	4,3	4,4	4,4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Sehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah		57:14:00	64:29:00	71:43:00	78:57:00	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PM A)	115 M	120 M	125 M	130 M	135 M
			Biaya logistik terhadap PDB (Persen)	23,2	22,2	21,1	20,1	18,0	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil (Rasio)		14:15	14:15	21:23	35:38:00	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PM A)	245	250	255	260	265
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	NA	34-39	NA	29-34	NA	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kualitas pemasaran pariwisata yang ditingkatkan		80	85	90	95	Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM	88,66	88,86	89,06	89,26	89,46
									Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase kualitas pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan		80	85	90	95	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	5 M	6 M	7 M	8 M	9 M
																Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		50	50	50	50

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026												
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)													
																Penanaman Modal												
3	PN PP	<b>Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing</b>																										
		Perindungan Sosial Dan tata Kelola Kependudukan	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7				98	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial						Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan		0,99	0,99	0,99	0,99						
									Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya						Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya persentase kepemilikan dokumen Catatan Sipil		0,99	0,99	0,99	0,99						
									Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan		0,99	0,99	0,99	0,99						
			Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)	2,26	2,24	2,21	2,19	2,10	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Akseptor KB Aktif		74,5	75	75,5	100	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan		1	1	1	1						
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2				80	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial						Program Pengendalian Penduduk	TFR (To+F23+E22:P26+E22:P27+E2+E22:R27	2,34	2,34	2,33	2,33	2,33						
									Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi						Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan	70	71	72	72,2	72,5						

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026										
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)											
										kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya						(KB)	nikah usia 15 - 49									
									Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya						Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	0,86	0,86	0,88	0,9	0,92				
	PP	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78,7				98	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya						Program Pemberdayaan Sosial	Tersertifikasinya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	16 org	21 org	28 org	35 org	42 org				
									Program Rehabilitasi Sosial	Presentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya																
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65,2				80	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya						Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Tertanganinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-	4 org	6 org	8 org				
									Program Rehabilitasi Sosial	Presentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial yang						Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan	187 org	268 org	281 org	295 org	310 org				

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026												
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)													
										terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya							kesejahteraan sosial (PPKS)											
																	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.690 kk	7800 kk	8000 kk	7800 kk	7600 kk					
																	Program Penanganan Bencana	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	200 kk	225 kk	236 kk	248 kk	260 KK					
																	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terpeliharanya Nilai-nilai Perjuangan, Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	0,8	0,8	0,85	0,9	0,9					
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	FKTP Terakreditasi	50	65	70	75	85	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kasus Kematian Ibu	0 kasus (0/2.585 KH)	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	2 kasus					
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20,6	19,5	18,6	17,6	16,0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	FKTP Terakreditasi	50	65	70	75	85		Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	5,03 (13/2.585)	5,03 (13/2.585)	4,76 (12/2.521)	4,76 (12/2.521)	4,41 (11/2.495)						
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12,9	12,2	11,6	11	10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	FKTP Terakreditasi	50	65	70	75	85		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	4,64 (12/2.585)	4,64 (12/2.585)	4,36 (11/2.521)	4,36 (11/2.521)	4,01 (10/2.495)						
			Angka	61,8	62,2	62,5	62,9	63,4	Program	Persentase		74,5	75	75	10		Angka	4,64	4,64	3,57	3,57	3,21						

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026											
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)												
			prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)						Pengendalian Penduduk	Akseptor KB Aktif				5	0			Kematian Neonatal (AKN) per1000 kelahiran hidup	(12/2.585)	(12/2.585)	(9/2.521)	(9/2.521)	(8/2.495)				
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 8,6 8,3 8,0 7,7 7,4	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Akseptor KB Aktif		74,5	75	75,5	100		Prevalensi stunting pada anak balita	9,91	9,91	9,91	9,5	9,0					
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25,0	24,0	21,0	20,0	18,0	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Akseptor KB Aktif		74,5	75	75,5	100		Prevalensi tekanan darah tinggi pada penduduk usia > 15 tahun	19,82 %	12,99 %	12,99%	12,99%	12,99%					
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24,1	21,1	18,4	16,0	14,0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Wasting	09:27	0,3604	0,2993	05:43	04:51		Insiden Tuberkulosis per 100.000 penduduk	208,25	228,34	214,3	194,39	186,69					
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8,1	7,8	7,5	7,3	7,0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Wasting	09:27	0,3604	0,2993	05:43	04:51		Pencapaian 5 pilar STBM berkelanjutan	1 pilar	2 pilar	2 pilar	3 pilar	3 pilar					
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,21	0,21	0,19	0,19	0,18	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penemuan Kasus (CDR) TBC	58	65	70	75	80		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi Utama	18,2 % (2/11)	18,2 % (2/11)	18,2 % (2/11)	81,8 % (9/11)	100% (11/11)					
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272,0	252,0	231,0	211,0	190,0	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penemuan Kasus (CDR) TBC	58	65	70	75	80		Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan (RS) terakreditasi	Akreditasi Utama	Akreditasi Utama	Akreditasi Utama	Akreditasi Paripurna	Akreditasi Paripurna					



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026												
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)													
	PP	Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	399,1 388,7 400,4	NA NA NA	NA NA NA	399,7 392,3 406,2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) :											
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): a. Membaca b. Matematika c. Sains	NA NA NA	34,4 46,6 49	NA NA NA	NA NA NA	35,6 47,4 51	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100		- SD/MI/PAKET A	103,35	100	100	100	100						
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8,75	8,85	8,95	9,06	9,16	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang Berakreditasi minimal B	5	5					- SMP/MTs/PAKET B	142,35	100	100	100	100						
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13,41	13,6	13,79	13,97	14,16	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang Berakreditasi minimal B	5	5					- PAUD usia 4-6 Tahun	78,45										
																Program Pengembangan Kurikulum	jumlah Ketersediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar	1	1	1	1	1						
																Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang bersertifikat pendidik :											
																	- TK	58,99	59,46	60	60,5	61						
																	- SD/SDLB	43,47	60,30	65,92	66,50	68						
																	- SMP/SMPLB	65,41	65,97	66	68	69						
																Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah terhadap pendidikan:											
																	- PAUD	58,99	59,46	60	60,5	61						



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026						
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
																	- SD	43,47	60,30	65,92	66,50	68
																	- SMP	65,41	65,97	66	68	69
																Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah kegiatan pengembangan bahasa dan sastra	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
	PP	PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34					Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Kab/Kota Yang Telah Melaksanakan Pemenuhan Hak-Hak Anak	100	100	100	100	100	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	% ARG pada Belanja Langsung APBD	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempuan: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan yang Mendapatkan Pelayanan/ Pendampingan	100	100	100	100	100		IPG (indeks Pembangunan Gender) dan IDG					
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,2116475	91,2779428	91,27896233	91,33469578	91,38627023	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	100	100	100	100	100	Program Perlindungan Perempuan	% Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kompresif	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,24481017	73,50050042	73,74051922	73,96592027	74,17747551	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan PUG	100	100	100	100	100	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)					
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,512	53,134	53,756	54,378	55	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kab/Kota Peserta Pelatihan Peningkatan Kualitas Keluarga	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah instansi yang memanfaatkan data profil gender dan anak di Kota Metro	32	32	32	32	32
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64	Menurun dari 9,4 (Basel	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Pelayanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Hak Anak	IPA (Indeks Perlindungan Anak)					

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026												
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)													
			tahun di 12 bulan terakhir	ine 2016)												(PHA)												
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55,33	56,5	56,5	58,17	57,67	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase peran serta pemuda berprestasi							Capaian predikat Kota Layak Anak	Pratama	madya	madya	madya	nindya						
																	Program Perlindungan Khusus Anak	% AMPK yang mendapat layanan kompresif	100%	100%	100%	100%	100%					
	PP	Pengentasan Kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27,9				40	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya						Program Pemberdayaan Sosial	Tersertifikasinya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	16 org	21 org	28 org	35 org	42 org						
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25,6				50	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Presentase Data Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatnya kemampuan fungsi sosialnya						Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Tertanganinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-	4 org	6 org	8 org						
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630.000	1.600.000	1.850.000	1.350.000	1.100.000	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan							Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	187 org	268 org	281	295 org	310 org						
			Bidang tanah yang didistribusi	750.000													Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.690 kk	7800 kk	8000 kk	7800 kk	7600 kk					
			Bidang tanah yang dilegalisasi	6.286.087				56.286.087									Program Penanganan Bencana	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban	200 kk	225 kk	236 kk	248 kk	260 KK					

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026							
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)								
																	Bencana						
																	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terpeliharanya Nilai-nilai Perjuangan, Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan	0,8	0,8	0,85	0,9	0,9
	PP	Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44,8	46,6	48,4	50,2	52,1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Kenaikan Tenaga Kerja yang Mendapat Layanan Penempatan	55	60	65	75	80	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	126 Tenaga Kerja	130 Tenaga Kerja	140 Tenaga Kerja	150 Tenaga Kerja	160 Tenaga Kerja	
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University													Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	48,33	49	50	51	52	
			a. Top 200	0	0	0	0	1															
			b. Top 300	1	1	1	1	2															
			c. Top 500	2	2	2	2	3															
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43,0	45,0	47,0	48,0	50,0	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi yang Bersertifikasi	60	65	70	75	100								
4	PN	<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>																					
	PP	Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter							Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Prosentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	15	25	30	30	100	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah sekolah yang diberikan pendidikan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	0	3	3	5	5	
																Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga	Persentase partai politik yang melaksanakan fungsinya	N/A	75%	80%	85%	90%	





NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026						
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
	PP	Peningkatan kualitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m2)	4,0	4,4	4,7	5,1	5,4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik		100%	100%	100%	100%							
									Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum													
	PP	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3,7	3,7	3,9	4,0	4,1								Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	35	45	55	65	75
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8								Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi proses perizinannya	72	82	92	102	112
			Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen)	5,0	5,5	6,5	7,5	8,1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Industri yang terdaftar dalam SII nas	1	1	1	1	1
			Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)	4,8	5,0	5,2	5,3	5,5								Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	PAD sektor Pariwisata	1,17	1,30	1,33	1,35	1,38
			Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp triliun)	1.189-1.214	1.314-1.333	1.439-1.452	1.564-1.570	1.689								Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	100%	100%	100%	100%	100%
			Pertumbuhan investasi (PMTB)(Perse	5,6	6,2	6,9	7,8	8,4								Program Pengemban	Cakupan Usaha	20%	20%	25%	30%	40%

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026						
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
			n)													gan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Ekonomi Kreatif yang dibangun untuk mendapatkan HKI					
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0								Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	40	55	70	80	95
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5								Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	126 Tenaga Kerja	130 Tenaga Kerja	140 Tenaga Kerja	150 Tenaga Kerja	160 Tenaga Kerja
			Kontribusi tenaga kerja industri (9.2.2*) (Persen)	14,2	14,6	15,0	15,3	15,7								Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	48,33	49	50	51	52
			Jumlah tenaga kerja industri (juta orang)	19,7	20,3	20,9	21,4	22,6								Program Hubungan Industrial	Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja	300 Perusahaan	300 Perusahaan	350 Perusahaan	400 Perusahaan	450 Perusahaan

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026												
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)													
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (Juta orang)	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0																				
			Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta orang)	19,0	20,0	20,0	21,0	21,0									Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kontribusi sektor pertanian/pemberdayaan terhadap PDRB (%)	46,49	46,50	46,55	46,60	46,65					
																Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas bahan pangan utama (Padi) (kwintal)	58,9	59,0	59,1	59,2	59,3						
																Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pelayanan hewan (ekor)	7	7,35	7,7	8,05	8,4						
																Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Penurunan lahan gagal panen / puso (hektar)	100	80	60	40	20						
																Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah usaha pertanian yang mendapatkan rekomendasi (surat)	0	2	2	2	2	2					
																Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok petani (%)	31	32	33	34	35						
	PP	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati	92,84	93,44	94	94,63	95	Program Pengembangan Permukiman							Program Pengembangan	Persentase Penanganan Rumah Terkena	N/A	100%	100%	100%	100%	100%					



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026											
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)												
			hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)													Perumahan	Bencana/Relokasi Pembangunan Pemerintah										
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82,35	83,5	84,8	86	87	Program Pengembangan Permukiman							Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni (Penyusunan RKP dan RP3)	98%	98,20%	98,2% (RKP)	98,4% (RP3)	98,60%					
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55,46	56,85	58,23	59,62	60	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang							Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Lingkungan Kumuh (perbaikan rumah kumuh di luar kawasan kumuh 10 Ha)	0	0	1,00%	0,80%	0,60%					
			Rasio outstanding KOR terhadap PDB	3,05	3,1	3,30	3,60	4,00								Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Jumlah lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	95%	95%	95,50%	96%	96,50%					
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% Akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% Akses layak (termasuk 11% akses aman)	82,07% Akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% Akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% Akses layak (termasuk 15% akses aman)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah							Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pembangunan Perumahan Baru yang Layak Huni	89,64%	90,50%	90,50%	91,00%	91,50%					
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan	5,95	4,46	2,98	1,49	0	Program Pengembangan Permukiman							Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampah	Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang,	6%	6%	7,5%	12%	15%					

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026						
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITYAS	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITYAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITYAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)							
			(%)													an Regional	daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA					
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72,92 % % penangan; 3,70% % pengu rangan	73,70 % % penangan; 5,51% % pengu rangan	75,28 % % penangan; 9,13 % % pengu rangan	77,64 % % penangan; 14,57 % % pengu rangan	80% % penangan; 20% % pengu rangan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tinggal dengan akses sanitasi aman	3%	5%	8%	10%	12%
///			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91,8 % (JP: 23,6% BJP:68 ,2%)	93,8 % (JP: 25,46 % BJP:68 ,4%)	95,9% (JP: 27,1% BJP:68 ,7%)	97,9% (JP: 28,9% BJP:69 ,0%)	100% (JP: 30,4% BJP:69 ,5%)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	70%	70%	72,5%	75%	77,5%
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7,3	8,4	10	12,2	15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							Program Pengembangan Peremukiman	Rasio Ketercukupan Infrastruktur Kawasan Strategis	0	0	0	0	0
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52,50 18962 1	55, 18146 289	57,05 99984 2	58,10 49827 3	58,49 86320 5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							Program Penataan Bangunan	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	10%	11%	12%	13%	14%
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik		100%	100 %	100 %	100 %	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	0
			Luas lahan pertanian padi dan nonpadi yang beririgasi meningkat (Hektare)	4522 9,166 67	11594 2,708 3	11614 2,708 3	1163 42,70 83	1163 42,70 83							Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam	90,00 %	91,64 %	91,85%	92,06%	92,27%	

NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026											
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)												
			Provinsi dengan Penurunan Resiko Bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan Penanggulangan Bencana yang Mencakup Pra Bencana Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	15%	15%	30%	45%	60%					
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4,27	11,4325	11,4325	11,4325	11,4325	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pengembalian Fungsi Irigasi dan Infrastruktur Sumber Daya Air lainnya yang ditingkatkan dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	91%	91%	91%	91%	91%					
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65																			
	PP	Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol, baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2500 km)						Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap						Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Ruang publik yang berubahnya	0	0	0	0	0					
			Jumlah Pelabuhan Utama (Hub) yang memenuhi standar (7 Pelabuhan)						Program Pengelolaan Pelayaran			100%	100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	90,00%	91,64%	91,85%	92,06%	92,27%					
			Kinerja tepat waktu (ontime performance) penerbangan (90%)																								
			Panjang Jaringan KA yang beroperasi (7.635 km)						Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase pengelolaan perkeretaapian			100%	100%	100%												
	PP	Energi dan Tenaga Kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (persen)	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Peningkatan Pengelolaan Energi Terbarukan			100%	100%	100%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Rasio konektivitas kota	0,0414	0,0614	0,0814	0,1014	0,1214					



NO	KODE (PN/PP)	RPJMN TAHUN 2020-2024							RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2019-2024							RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026										
		PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITY	INDIKATOR	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITY PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)											
			Ekosistem Gambut (IKTL)													Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	B3 dan/atau Limbah B3									
																Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat Ketaatan Pemenuhan Persyaratan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	75 %	75 %					82%	84%	
																Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Terfasilitasinya Pendampingan Pengakuan MHA		0	0	0	0	0	0	0	0
																Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat yang taat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	40%	40%	40.1%	40,20%	40,35%				



